

“Mengatasi Rintangan, Mengutamakan Keselamatan dan Mempertahankan Fokus”

“Overcoming Obstacles, Prioritizing Safety and Preserving Focus”

Bagaikan badai yang datang tiba-tiba, pandemi Covid-19 muncul di depan mata secara tak disangka dan menghantam tahun 2020 dengan hebatnya. Pandemi ini telah menimbulkan korban manusia begitu banyak dan mengakibatkan dampak kerusakan meluas pada berbagai aspek kehidupan diseluruh dunia.

BPF pun tak terhindar dari imbas yang disebabkan pandemi ini. Puji syukur berkat kerja keras kami membangun dan memperkuat fondasi yang solid selama bertahun-tahun, BPF tetap sanggup berpijak dengan mantap dan berdiri dengan teguh di tengah terpaan badai ini. Fondasi yang tangguh, penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko yang berhati-hati telah menjadikan BPF perusahaan yang mampu menghadapi berbagai cuaca.

Dengan mengutamakan keselamatan dan mempertahankan fokus Perusahaan, BPF tetap aktif mengoperasikan usahanya dan menyusun strategi untuk mengatasi rintangan yang datang.

Like a sudden storm, the Covid-19 pandemic has unexpectedly appeared before us and hit 2020 very hard. This pandemic has caused enormous human casualties and resulted in widespread devastations on life all over the world.

BPF was also unavoidably affected by this pandemic. Fortunately, due to our hard work in building and strengthening a solid foundation over the years, BPF has been able to remain firm on its feet and stand steadily in the midst of this storm. The solid foundation, the implementation of good corporate governance and prudent risk management practices have made BPF a company that can withstand any weather.

By prioritizing safety and preserving the Company's focus, BPF continues to run its activities and build strategies to overcome obstacles that may come its way.



Daftar Isi

Table of Contents

- 04 Sekilas Pandang Kinerja 2020
2020 Business at a Glance
- 05 Ikhtisar Keuangan *Financial Highlights*
 - 06 Ikhtisar Rasio *Ratio Highlights*
 - 06 Ikhtisar Umum *General Highlights*
 - 07 Ikhtisar Saham *Share Highlights*
- 08 Laporan Dewan Komisaris dan Direksi
Messages from the Board of Commissioners and Board of Directors
- 09 Laporan Dewan Komisaris *Message from the Board of Commissioners*
 - 14 Laporan Direksi *Message from the Board of Directors*
- 20 Profil Perusahaan
Company Profile
- 21 Informasi Umum *General Information*
 - 22 Visi dan Misi *Vision and Mission*
 - 23 Riwayat Singkat *Brief History*
 - 24 Jejak Langkah *Milestones*
 - 26 Profil Dewan Komisaris *Board of Commissioners Profile*
 - 29 Profil Direksi *Board of Directors Profile*
 - 33 Struktur Organisasi *Organization Structure*
 - 34 Informasi Saham dan Obligasi *Shares and Bonds Information*
 - 34 Kronologi Saham *Shares Chronology*
 - 35 Informasi Kepemilikan Saham *Shareholders Information*
 - 36 Struktur Kepemilikan Saham *Shareholder Structure*
 - 37 Informasi Obligasi *Bonds Information*
 - 38 Komposisi Karyawan *Employee Composition*
 - 40 Asosiasi *Association*
 - 41 Lembaga dan Profesi Penunjang *Supporting Professional Institutions*
 - 42 Penghargaan *Awards*

43 Analisis dan Pembahasan Manajemen *Management's Analysis and Discussion*

- 44 Tinjauan Kinerja Usaha *Business Performance Review*
- 45 Tinjauan Kinerja keuangan *Financial Performance Review*
- 55 Tinjauan Pendukung Usaha *Business Support Review*
- 57 Tinjauan Pencapaian 2020 dan Proyeksi 2021 *2020 Achievements and 2021 Projections Review*

59 Tata Kelola Perusahaan *Good Corporate Governance*

- 60 Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *Good Corporate Governance Implementation*
- 62 Kode Etik dan Budaya Perusahaan *Code of Ethics and Corporate Culture*
- 63 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) *General Meeting of Shareholders (GMS)*
- 68 Dewan Komisaris *Board of Commissioners*
- 72 Direksi *Board of Directors*
- 75 Komite yang Bertanggung Jawab Kepada Dewan Komisaris
Committees Reporting to the Board of Commissioners
- 81 Manajemen Risiko *Risk Management*
- 84 Sistem Pengendalian Internal *Internal Control System*
- 85 Sekretaris Perusahaan *Corporate Secretary*
- 86 Audit Internal *Internal Audit*
- 87 Kebijakan Terkait Pemangku Kepentingan *Stakeholders Related Policies*
- 88 Sistem Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System*
- 89 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*

91 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi *Management's Responsibility Statement*

92 Surat Pernyataan Independensi Komisaris *Commissioner's Independency Statement*

93 Laporan Keuangan Tahun 2020 Yang Telah Diaudit *Audited 2020 Financial Reports*

A person is standing on a sandy beach, preparing for a parachute jump. The parachute is yellow with blue and white accents. The background features a clear blue sky with a bright sun and scattered white clouds, and a turquoise ocean with a small boat in the distance.

Sekilas Pandang Kinerja 2020

2020 Business at a Glance

Ikhtisar Keuangan

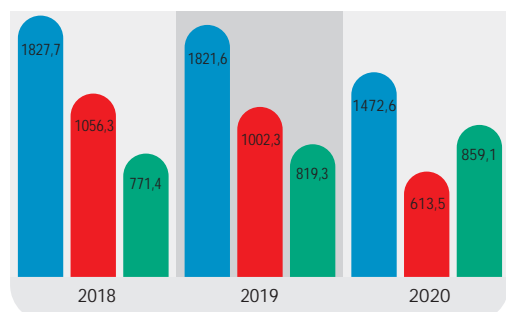
Financial Highlights

Dalam Miliar Rupiah *In IDR Billion*

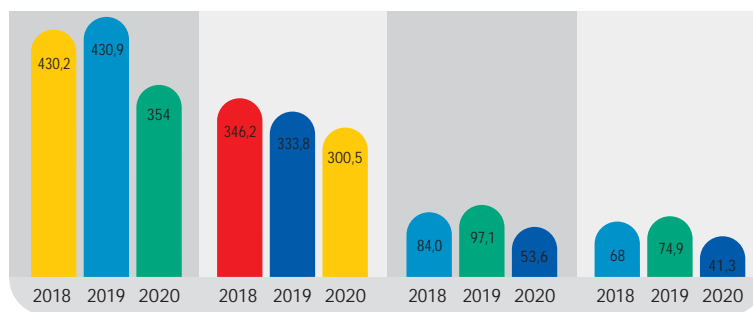
Neraca <i>Balance Sheet</i>	2020	2019	2018
Total Aset <i>Total Assets</i>	1472,6	1821,6	1827,7
Total Liabilitas <i>Total Liabilities</i>	613,5	1002,3	1056,3
Total Ekuitas <i>Total Equity</i>	859,1	819,3	771,4
Laba Rugi <i>Profit or Loss</i>			
Total Penghasilan <i>Total Revenues</i>	354,0	430,9	430,2
Total Beban Usaha <i>Total Operating Expenses</i>	300,5	333,8	346,2
Total Laba Usaha <i>Total Income from Operations</i>	53,6	97,1	84,0
Laba Neto <i>Net Income</i>	41,3	74,9	68,0
Total Laba Komprehensif <i>Total Comprehensive Income</i>	38,8	77,8	51,0
Laba Neto per Saham Dasar <i>Basic Earnings per Share</i>	0,2	0,4	0,4
Indikator Penting Lainnya <i>Other Important Indicators</i>			
Total Nilai Pembiayaan <i>Total Financing Value</i>			
(Dalam Miliar Rupiah <i>In IDR Billion</i>)			
Kendaraan <i>Vehicles</i>	651,9	969,2	910,6
Alat Berat <i>Heavy Equipments</i>	149,9	218,9	184,6
Jumlah Unit Pembiayaan <i>Total Financing Units</i>			
Kendaraan <i>Vehicles</i>	8.004	12.114	11.798
Alat Berat <i>Heavy Equipments</i>	188	247	234
Jumlah Kantor Cabang <i>Number of Branches</i>	75	76	68
Jumlah Karyawan <i>Number of Employees</i>	1.186	1.315	1.265

Dalam Miliar Rupiah *In IDR Billion*

■ Total Aset *Total Assets* ■ Total Liabilitas *Total Liabilities* ■ Total Ekuitas *Total Equity*



■ Total Penghasilan *Total Revenues* ■ Total Beban Usaha *Total Operating Expenses* ■ Total Laba Usaha *Total Income from Operations* ■ Laba Neto *Net Income*



Ikhtisar Rasio

Ratio Highlights

Rasio Rentabilitas <i>Profitability Ratio</i>	2020	2019	2018
Total Laba Neto Terhadap Total Penghasilan <i>Total Net Income to Total Revenues</i>	11,7%	17,4%	15,8%
Total Laba Neto Terhadap Rata-Rata Total Aset <i>Total Net Income to Average Total Assets</i>	2,5%	4,1%	4,0%
Total Laba Neto Terhadap Rata-Rata Total Ekuitas <i>Total Net Income to Average Total Equity</i>	4,9%	9,4%	9,8%
Rasio Solvabilitas <i>Solvency Ratio</i>			
Total Liabilitas Terhadap Rata-Rata Total Aset <i>Total Liabilities to Average Total Assets</i>	37,2%	54,9%	62,1%
Total Liabilitas Terhadap Rata-Rata Total Ekuitas <i>Total Liabilities to Average Total Equity</i>	73,1%	126,0%	151,6%

Ikhtisar Umum

General Highlights

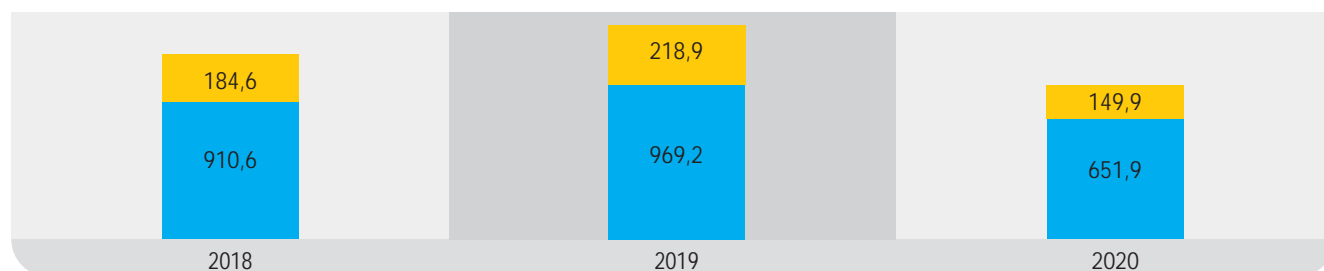
Total Nilai Pembiayaan

Total Financing Value

Dalam Miliar Rupiah *In IDR Billion*

■ Kendaraan
Vehicles

■ Alat Berat
Heavy Equipments

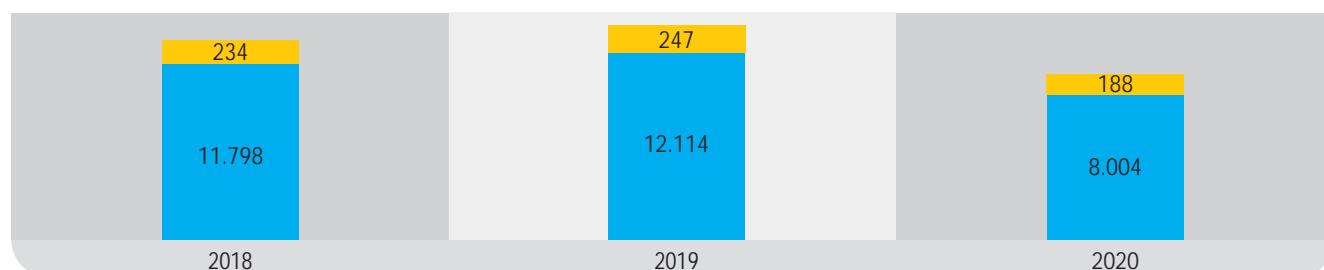


Jumlah Unit Pembiayaan

Total Financing Units

■ Kendaraan
Vehicles

■ Alat Berat
Heavy Equipments



Ikhtisar Saham

Shares Highlights

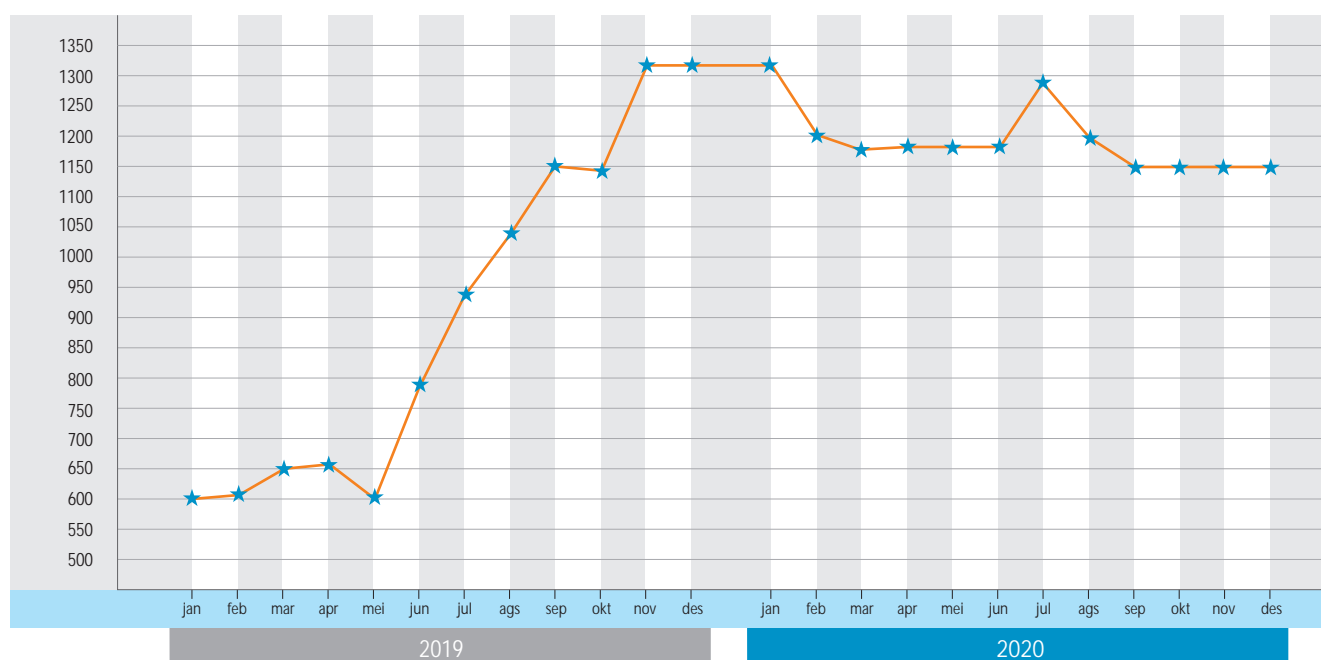
Harga Saham (Rp)

Share Price (IDR)

Keterangan <i>Description</i>	2020	2019	2018
Harga Tertinggi <i>Highest Price</i>	1.310	1.310	1.225
Harga Terendah <i>Lowest Price</i>	1.150	600	384
Harga Penutupan <i>Closing Price</i>	1.150	1.310	650
Jumlah Rata-rata Tertimbang Saham yang Beredar <i>Average Number of Shares Outstanding</i>	1.782.663.575	1.782.663.575	1.733.330.143
Laba Neto Per Saham <i>Basic Earnings Per share</i>	23,2	41,9	39,2

Harga Saham Penutupan (Rp)

Monthly Closing Price (IDR)



Volume Perdagangan 2019

Trading Volume 2019

Kuartal <i>Quarter</i>	Kapitalisasi Pasar <i>Market Capitalization</i>	Volume Lembar <i>No. of Shares Volume</i>
I	3.299.000.000	26.060.100
II	21.348.000.000	99.901.800
III	5.562.000.000	1.827.000
IV	6.711.000.000	3.534.000

Volume Perdagangan 2020

Trading Volume 2020

Kuartal <i>Quarter</i>	Kapitalisasi Pasar <i>Market Capitalization</i>	Volume Lembar <i>No. of Shares Volume</i>
I	6.608.000.000	2.961.000
II	6.336.000.000	39.052.100
III	10.904.000.000	35.179.600
IV	13.042.000.000	38.686.000



Laporan Dewan Komisaris dan Direksi

Messages from the Board of Commissioners and Board of Directors

Laporan Dewan Komisaris

Message from the Board of Commissioners



Irena Istary Iskandar

Komisaris Utama *President Commissioner*

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Mewakili segenap anggota Dewan Komisaris PT Batavia Prosperindo Finance Tbk ("BPF" atau "Perusahaan"), dalam laporan ini saya memberikan tinjauan dan gambaran proses pengawasan dan pendampingan Dewan Komisaris BPF selama tahun buku 2020. Kami sungguh menghargai inisiatif Direksi yang dengan cermat dan tegas mengambil tindakan-tindakan antisipasi strategis, sehingga BPF dapat dengan baik menjalani tahun 2020.

Tinjauan Situasi Tahun 2020

Pandemi Covid-19 menjadikan tahun 2020 sebagai tahun yang luar biasa. Pandemi ini telah menyebabkan korban jiwa hingga lebih dari dua juta jiwa di seluruh dunia hingga Januari 2021. Dampaknya secara langsung maupun tidak langsung begitu luas, baik dilihat dari segi area maupun sektor kehidupan.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indonesia memiliki angka tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,07% pada Agustus 2020, meningkat 1,84% dibandingkan dengan Agustus 2019. Laporan BPS tersebut juga menyatakan sebanyak 29,12 juta orang (14,28%) penduduk usia kerja terdampak Covid-19, termasuk jumlah pengangguran karena Covid-19 sebanyak 2,56 juta orang, sementara tidak bekerja karena Covid-19 sebanyak 1,77 juta orang, Bukan Angkatan Kerja karena Covid-19 sebanyak 0,76 juta orang, dan juga penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebanyak 24,03 juta orang. Data tersebut dapat sedikit

Dear Shareholders and Stakeholders,

On behalf of the Board of Commissioners of PT Batavia Prosperindo Finance Tbk ("BPF" or Company), I will present you with reviews and overviews of the Board's functions in supervising and assisting the managing of BPF during the 2020 financial year. We truly appreciate the Board of Directors' meticulous and firm initiatives in taking strategic anticipatory actions which allowed BPF to weather the year 2020 well.

2020 Situation Review

The Covid-19 pandemic made 2020 an extraordinary year. This pandemic has killed more than two million people worldwide by January 2021. Its detrimental impacts, both direct and indirect, were immense in terms of area as well as people's wellbeing.

The Central Statistics Agency (BPS-Badan Pusat Statistik) reported that Indonesia's open unemployment rate was 7.07% in August 2020, a 1.84% increase compared to August 2019. The BPS report also stated that 29.12 million people (14.28%) of the working age population were affected by the Covid-19, including 2.56 million people were unemployed due to Covid-19, 1.77 million people were furloughed due to Covid-19, 0.76 million people were not part of the labour force due to Covid-19, and 24.03 million people were on reduced working hours due to Covid-19.

memberi indikasi tentang kondisi daya beli masyarakat, di samping perubahan drastis pola konsumsi masyarakat akibat pandemi.

Untuk dapat melihat lebih jelas dinamika dan situasi perekonomian di era sebelum dan sejak pandemi, mari kita menapak tilas beberapa indikator perekonomian beberapa tahun terakhir.

Perekonomian dunia mengalami tren perlambatan selama beberapa tahun terakhir. Sejak awal tahun 2018, Amerika Serikat dan Cina terlibat dalam konflik perang dagang yang berlarut-larut. Dengan dua raksasa ekonomi dunia saling menyerang dan isu Brexit yang telah berlangsung sejak tahun 2016, perekonomian global tentu merasakan dampaknya. Angka pertumbuhan ekonomi global terus terseret-seret untuk menuju pertumbuhan yang lebih positif selama tahun-tahun tersebut.

Laporan IMF menunjukkan pertumbuhan ekonomi global tahun 2018 di sekitar 3,7% dan memproyeksikan perlambatan di tahun-tahun berikutnya. Data World Bank menunjukkan perekonomian global bertumbuh sebesar 2,3% pada tahun 2019 dan terpukul resesi akibat pandemi di tahun 2020 hingga diperkirakan berada di sekitar -4,3%.

Selama tahun-tahun sebelum era Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat terus membaik hingga mencapai angka tertinggi sejak tahun 2014, yaitu 5,17% pada tahun 2018, namun kembali melemah ke 5,02% di tahun 2019. Lalu di tahun berikutnya, pandemi Covid-19 telah membuat ekonomi Indonesia terpuruk hingga kisaran -2,07%.

Sebagai ringkasan tentang situasi perekonomian tahun 2020, World Bank menyebutkan bahwa Covid-19 telah menyebabkan resesi global yang tingkat keparahannya hanya dapat dikalahkan oleh kedua Perang Dunia dan Depresi Besar.

Pencapaian Perusahaan dan Kinerja Direksi Dalam Mengelola Perusahaan

Meski menyebabkan krisis yang tak pernah terbayangkan sebelumnya, pandemi Covid-19 sekaligus memberi kesempatan bagi BPF untuk menguji kesiapan diri dan membuktikan ketahanannya dalam menghadapi krisis.

Selain reaksi yang cepat dan strategi yang tepat, tata kelola perusahaan dan manajemen risiko terbukti sangat penting bagi suatu perusahaan saat menghadapi krisis. Pelaksanaan secara konsisten dan berkesinambungan akan memberi manfaat kesiapan dan ketahanan yang penting di waktu krisis. Melihat kinerja dan pencapaian BPF di tahun 2020, Dewan Komisaris memuji kesiapan Direksi dalam menanggapi situasi ini sejak dini dan sangat mengapresiasi langkah-langkah strategis yang sejauh ini diterapkan.

Menjalani masa krisis pandemi Covid-19, BPF membuktikan diri sebagai perusahaan yang memiliki ketahanan sangat baik. BPF menunjukkan kemampuan antisipatif yang mumpuni, sehingga sejak dini mengenali ancaman dan mempersiapkan diri untuk meminimalkan dampak kerusakan serta mempercepat pemulihan. Perusahaan juga telah mendemonstrasikan kemampuan adaptatifnya, dan dengan cepat mengidentifikasi dan menerapkan segera langkah yang dibutuhkan.

This data gives a flash indication of people's purchasing power, and the drastic changes in consumption patterns due to the pandemic.

To get a better picture of the economic dynamics and situation before and since the pandemic era, let's trace back some economic indicators over the last few years.

The global economy has been experiencing a slowdown trend over the past few years. Since the beginning of 2018, the United States of America and China have been embroiled in a protracted trade war conflict. The world economy certainly suffered from the impacts of two world economic giants attacking each other and the Brexit issue that has been going on since 2016. The global economic growth has been striving for a more positive growth during these years.

The IMF reports showed the global economic growth of around 3.7% in 2018 and projected a slowdown in the following years. The World Bank data showed that the global economy grew by 2.3% in 2019 and due to the pandemic in 2020 was hit by a recession, resulting in a negative growth of around -4.3%.

Prior to the Covid-19 era, Indonesia's economic growth had continued to improve until it reached 5.17% in 2018, the highest since 2014, but weakened to 5.02% in 2019. Then in the following year, the pandemic has plunged Indonesia's economy to around -2.07%.

To summarize the economic situation in 2020, the World Bank commented that the Covid-19 has caused a global recession with a severity that can only be surpassed by both the World Wars and the Great Depression.

Company Achievements and Directors' Performance in Managing the Company

Despite the unimaginable crisis it has caused, the Covid-19 pandemic has provided an opportunity for BPF to test its readiness and to prove its resilience in crucial times.

In addition to the quick managerial responses and right strategies, good corporate governance and risk management have proven to be particularly important for a company during this period of crisis. The consistent and sustainable implementation of those policies and procedures give the benefits of readiness and resilience important in times of crisis. Assessing BPF's 2020 performance and achievements, the Board of Commissioners commends the Board of Directors' agility in responding to the situation since the early stages of the pandemic and highly appreciate the strategic actions taken so far.

During the Covid-19 pandemic crisis, BPF has proven itself a resilient company. BPF showed its strong anticipatory capabilities, thus the early identification of threats and immediate preparatory measures to minimize damage and speed up recovery. The company has also demonstrated its adaptability, and was able to quickly identify and take the necessary steps.

Kami memuji keputusan Direksi yang tetap mengikuti arahan Pemerintah untuk merestrukturisasi kredit dengan membuat program yang akomodatif namun meminimalkan risiko bagi Perusahaan maupun nasabahnya. Direksi juga memperketat pemberian pembiayaan di masa pandemi ini untuk memastikan kelancaran pembayaran dan dampaknya pada kesehatan Perusahaan. Untuk sementara, ditentukan kebijakan yang mengatur bahwa proses persetujuan pembiayaan hingga nominal Rp 150 juta harus melalui area manager, sedangkan nominal yang lebih besar dari itu harus diajukan ke Kantor Pusat.

Dalam memenuhi rencana kerja Perusahaan, Dewan Komisaris melihat disiplin Direksi menerapkan prinsip kehati-hatian "Know Your Customer" dalam situasi pandemi yang luar biasa dan tidak gegabah dalam mengejar pemenuhan target, misalnya target pembiayaan. Prinsip ini telah menyelamatkan BPF dari tingginya risiko kredit macet yang mengancam perusahaan multifiinance di masa pandemi. Meski tetap mengikuti arahan Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan kelonggaran restrukturisasi kredit pada masyarakat, berkat proses penyaluran pembiayaan yang sangat selektif dan pemantauan tingkat kolektibilitas yang baik selama ini, Perusahaan hanya perlu merestruktur sekitar 35% atau senilai Rp 595,12 miliar dari total piutang pembiayaan per Desember 2019. Kredit yang direstruktur itu pun menunjukkan kualitas kolektibilitas yang tetap baik. Pada penutupan tahun 2020, jumlah kredit dalam program restrukturisasi yang masih berlangsung dan berlanjut ke tahun 2021 tersisa sekitar 30%, yaitu Rp 178,30 miliar. Melalui berbagai strategi kontrol yang baik, tingkat NPL (*non-performing loans*) efektif tahun 2020 terjaga dengan baik di bawah 3%, yaitu 1,91%.

Direksi merevisi target penjualan pembiayaan tahun 2020 sebesar 50% menjadi Rp 750 miliar, dan anggaran laba diturunkan menjadi Rp 30,5 miliar. Kembali menjalankan aktivitas penjualannya pada Juni 2020, BPF meraih total penjualan sebesar Rp 835,85 miliar, melampaui target penjualan 2020 yang telah direvisi menjadi Rp 750 miliar. Rasio efektif pinjaman terhadap ekuitas BPF di tahun 2020 terjaga dengan baik di tingkat 0,85, yang membuktikan struktur permodalan yang sangat sehat.

Salah satu strategi pemasaran BPF adalah dengan membuka cabang di lokasi-lokasi yang berpotensi. Pembukaan 7 kantor cabang baru Perusahaan, yang beberapa di antaranya telah dibuka di penghujung tahun 2019 dan mulai efektif beroperasi di tahun 2020, sangat bermanfaat untuk mengintensifkan usaha penetrasi pasar dan memfasilitasi gerak cepat BPF saat situasi mulai membaik.

Berkat kemampuannya menegakkan integritas dan menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan, terutama investor, BPF juga telah menyelenggarakan penerbitan obligasi berkelanjutan sesuai rencana dengan nilai Rp 200 miliar pada Mei 2020.

Selama masa pandemi, Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian tata kelola perusahaan dengan lebih intensif. Rapat resmi gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan setiap bulan, terutama untuk memantau situasi, mengevaluasi berbagai indikator kinerja Perusahaan, serta mendiskusikan solusi dan opsi yang akan diambil. Fungsi audit ditingkatkan untuk

We commend the Board of Directors' commitment to abide by the Government's guidelines to restructure customers' loans by offering accommodating programs yet with minimum risks for both the Company and the customers. The Board of Directors also tightened the procedures for the provision of financing during the pandemic to ensure good performance loans and its impact on the Company's health. A temporary policy has been established such that financing approval of up to IDR 150 million must be approved by the area manager, while applications of amounts greater than that must be submitted to the Head Office.

While working on the Company's business plan, the Board of Commissioners has observed the Board of Directors' discipline in administering the prudent principle of "Know Your Customer" in this extraordinary pandemic situation and taking the extra caution in proceeding to fulfill its business targets, such as financing targets. This principle has saved BPF from the high risk of non-performing loans (NPL) that threatened multifiinance companies during the pandemic. While still conforming with the Government and Financial Services Authority (OJK)'s instruction to provide a debt relaxation scheme, thanks to the very selective financing procedures applied and good monitoring of collectability level so far, the Company only needed to restructure around 35% or IDR 595.12 billion of the total outstanding accounts receivables as of December 2019. The said loans in the restructuring program also showed good collectability performance. At the end of 2020, only 30% or IDR 178.30 billion of these loans needed to be carried on to 2021. Applying sound control strategies, BPF's 2020 effective NPL was well maintained at below 3%, namely 1.91%.

The Board of Directors revised the 2020 financing sales target by 50% to IDR 750 billion and reduced the profit budget to IDR 30.5 billion. Resuming its sales activity in June 2020, BPF achieved a total sale of IDR 835.85 billion, exceeding the revised 2020 target of IDR 750 billion. The effective debt to equity ratio in 2020 was well maintained at 0.85, proof of a very healthy capital structure.

One of BPF's marketing strategies was to have branch offices in all potential locations. The opening of the Company's 7 new branch offices, several of which had been opened towards the end of 2019 and effectively began operating in 2020, was truly beneficial for intensifying the market penetration and facilitating BPF's fast track programs when the situation begins to recover.

Owing to the Company's ability to uphold its integrity and maintain the trust of stakeholders, especially investors, BPF issued sustainable bonds as planned with a value of IDR 200 billion in May 2020.

During the pandemic, the Board of Commissioners carried out the supervisory and controlling functions on corporate governance more intensively. The joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors was held every month, primarily to monitor the situation, evaluate the Company's performance indicators, and to discuss solutions and options to be taken. The audit function was escalated to

memastikan status kesehatan BPF. Fungsi pemantauan dan pengawasan antar wilayah juga dimanfaatkan untuk terus mengidentifikasi perkembangan, permasalahan, dan perencanaan langkah selanjutnya agar target tetap dapat dipenuhi.

Komite Pemantau Risiko yang dibentuk pada Desember 2019 telah berperan sangat baik sebagai perangkat pendukung Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan kualitas kerja manajemen dan mengurangi kemungkinan terjadinya risiko operasional Perusahaan. Komite yang bertanggung jawab pada Dewan Komisaris ini juga telah sangat membantu Direksi dalam menjalankan bisnis BPF dalam masa berat pandemi Covid-19.

Pada tahun kerja 2020, BPF telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada 18 Mei 2020, serta dua kali RUPS Luar Biasa pada 18 Mei 2020 dan 1 September 2020.

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik juga tercermin dari tingkat kepatuhan BPF yang menunjukkan tidak adanya laporan pelanggaran yang serius. Pengamatan dari hasil pengaduan *whistleblowing* pun menunjukkan tidak adanya kasus pelanggaran berat.

Dalam situasi pandemi Covid-19 dan masa yang sangat berat bagi perekonomian masyarakat ini, BPF tetap terus berusaha memberikan kontribusi terhadap komunitas dan memenuhi tanggung jawab sosialnya. Sambil tetap menjadi donatur untuk Sekolah Misi Bagi Bangsa di Batam melalui Yayasan BP Peduli, Perusahaan juga mengadakan beberapa aktifitas sosial lain selama tahun 2020, antara lain menyelenggarakan acara kurban pada hari Idul Adha 2020. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya terhadap para karyawannya, BPF yang selalu berusaha keras memastikan lingkungan kerja yang aman, apalagi dalam masa pandemi yang gawat ini telah menegakkan pelaksanaan semua protokol kesehatan dengan ketat dan memberikan pengadaan tes kesehatan Covid-19 secara cuma-cuma bagi semua karyawannya sebulan sekali.

Pandangan Atas Prospek Usaha dan Rencana Kerja Tahun 2021 Kami meyakini bahwa tahun 2021 akan menjadi permulaan pemulihan ekonomi Indonesia dan global dari resesi ini. Meskipun kami tahu bahwa imbas dari pandemi ini tentu masih sangat dirasakan di sepanjang tahun 2021, tapi kami optimis bahwa perekonomian kita akan bangkit dan membaik. Kami melihat dan sangat menghargai dedikasi Pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan pemulihan bangsa dari pandemi Covid-19. Pemerintah juga berkomitmen tinggi dalam memberikan dukungan perekonomian yang nyata, di antaranya berupa berbagai stimulus yang ditujukan untuk menopang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

IMF memprediksikan perkiraan optimis bahwa perekonomian Indonesia dapat bertumbuh sebesar 4,8% pada 2021 dan semakin membaik sebesar 6% pada 2022. Menteri Keuangan Republik Indonesia juga menyatakan harapan besar ekonomi Indonesia dapat tumbuh sebesar 5% pada 2021 jika berbagai upaya pengendalian pandemi, kebijakan pemulihan ekonomi, serta agenda reformasi struktural dapat diselenggarakan sesuai harapan.

ensure BPF's health status. The inter-regional monitoring and supervision functions were also employed to continuously identify developments, problems, and to plan the next steps to meet targets.

The Risk Monitoring Committee, which was established in December 2019, has performed its roles very well in supporting the Board of Commissioners in order to improve the quality of management tasks and to mitigate potential risks in the Company's operations. This committee, reporting to the Board of Commissioners, has also greatly assisted the Board of Directors in the running of BPF's business during the severe times of the Covid-19 pandemic.

In the year 2020, BPF held an Annual General Meeting of Shareholders (GMS) on May 18, 2020, as well as two Extraordinary GMS on May 18, 2020 and September 1, 2020.

The implementation of good corporate governance was also reflected in BPF's compliance report, which showed that there were no serious violations reported. Observation from the whistleblowing complaints also showed that there had not been any case of serious violation.

In the situation of Covid-19 pandemic and this very difficult period for the economy, BPF strived to continue giving contributions to the community and fulfilling its social responsibilities. While still being a regular contributor to Sekolah Misi Bagi Bangsa (school) in Batam through BP Peduli Foundation, BPF also did some other social activities in 2020, amongst others, it organized a Qurbani event during the Idul Adha 2020 festive. Also as part of its social responsibility to its employees, BPF which always seeks to ensure a safe working environment, especially in this critical pandemic situation, has been strictly enforcing the implementation of all health protocols and provided free Covid-19 medical tests for all of its employees once a month.

Outlook on 2021 Business Prospects and Work Plans

We believe that 2021 will be the beginning of a recovery from the recession for Indonesia and the global economy. Eventhough the impacts of the pandemic will still be felt throughout the year 2021, we are optimistic that our economy will rise and improve. We have witnessed and truly appreciate the dedication shown by the Indonesian Government in fighting for the nation's recovery from the Covid-19 pandemic. The Government has been highly committed to providing real economic support, including stimulus to support the micro, small and medium enterprises (MSME)

The IMF predicted an optimistic forecast that Indonesia's economy would grow by 4.8% in 2021 and further improve to 6% by 2022. The Indonesian Minister of Finance also expressed high hopes that Indonesia's economy could grow by 5% in 2021, provided the efforts on the pandemic control, economic recovery policies, as well as the structural reform agenda can be carried out as expected.

Setelah mendiskusikannya dengan Dewan Komisaris, Direksi telah menetapkan rencana kerja tahun 2021 yang optimis, namun tetap realistis. Dengan harapan akan adanya vaksin Covid-19, tahun 2021 diproyeksikan akan menjadi awal penting dari proses pemulihan pasca pandemi.

Dalam rencana kerja anggaran perusahaan 2021, BPF menargetkan kenaikan penghasilan menjadi Rp 379,9 miliar dan angka pembiayaan menjadi Rp 1,14 triliun. BPF juga menargetkan kenaikan laba menjadi sebesar Rp 59,3 miliar. Rasio leverage akan dijaga di kisaran 80% untuk terus memastikan kesehatan keuangan dan permodalan Perusahaan.

Mengingat situasi tahun 2021 masih akan sangat terpengaruh dampak penyebaran Covid-19, kendali monitor dan evaluasi tentunya akan diterapkan dengan lebih ketat untuk memastikan rencana kerja ini terlaksana dan tercapai sesuai harapan. Dewan Komisaris optimis BPF akan terus bekerja dengan baik di tahun 2021 dan menilai bahwa BPF siap untuk merealisasikan target-target yang telah dicanangkan.

Penutup

Bersama seluruh anggota Dewan Komisaris BPF, dengan ini kami menyampaikan rasa terima kasih kami kepada segenap pemegang saham dan pemangku kepentingan BPF yang kami hormati. Kami sungguh menghargai semua dukungan nyata yang telah diberikan dalam bentuk kepercayaan, kerja sama, dan berbagai manfaat, yang semakin besar artinya bagi Perusahaan dalam menjalani masa pandemi yang berat ini.

Dengan optimisme bahwa masa krisis ini pasti dapat kita lalui dan dampak pandemi akan pulih, segenap jajaran Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan BPF akan memastikan bahwa semua rencana kerja dan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 dapat terealisasi. Kami akan terus menegakkan budaya dan semangat BPF untuk mewujudkan visi menjadi salah satu perusahaan terkemuka dan terbaik di Indonesia, dengan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah, dan tentunya memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan BPF.

After having discussed it with the Board of Commissioners, the Board of Directors decided on an optimistic yet realistic work plan for 2021. With the implementation of the Covid-19 vaccines, 2021 is projected to be an important beginning in the post-pandemic recovery process.

In the Company's 2021 budget work plan, BPF has targeted an increase in revenues to IDR 379.9 billion and the total financing to IDR 1.14 trillion. BPF also targeted a profit increase to IDR 59.3 billion. The leverage ratio will be maintained at around 80% to continue ensuring the Company's financial and capital health.

Given that the 2021 situation will still be greatly affected by the impacts of the Covid-19, stricter monitoring and evaluation controls will be employed to ensure the work plans are executed and fulfilled as expected. The Board of Commissioners are optimistic that BPF will continue to work well in 2021 and we are of the opinion that BPF is ready to fulfill the targets that have been set.

Closing

Together with all members of BPF's Board of Commissioners, we hereby express our gratitude to all of our respected shareholders and stakeholders. We truly appreciate every support shown, in the trust, cooperation and advantages, which have meant even more to the Company during the difficult period of pandemic.

With the optimism that we can get through this crisis and that the impacts of this pandemic will recover, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all BPF employees will ensure that all work plans and targets set for 2021 will be fulfilled. We will continue to uphold the Company's culture and spirit to achieve BPF's vision to become one of the leading and best multifinance companies in Indonesia by offering top quality services to our customers, and to create value for BPF's shareholders and stakeholders.

Hormat kami *Sincerely yours*



Irena Istary Iskandar
Komisaris Utama *President Commissioner*

Laporan Direksi

Message from the Board of Directors



Markus Dinarto Pranoto
Direktur Utama *President Director*

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Dengan penuh syukur, saya mewakili segenap Direksi menyampaikan laporan kinerja PT Batavia Prosperindo Finance ("BPF" atau "Perusahaan") yang tetap mampu menunjukkan pencapaian Perusahaan yang menggembirakan di tahun 2020. Situasi pandemi Covid-19 global yang masih kita hadapi sampai saat ini telah menyeret perekonomian seluruh dunia ke situasi krisis yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Meski demikian, dengan bangga kami melaporkan bahwa BPF berhasil melewati tahun 2020 dengan aman.

Strategi membangun landasan fundamental yang kami terapkan selama beberapa tahun terakhir terbukti sangat efektif, sehingga BPF memiliki ketahanan dan ketangguhan yang solid dalam melalui masa-masa sulit.

Tinjauan Kinerja Tahun 2020

Sejak pandemi Covid-19 merebak ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, resesi perekonomian global menjadi tak terelakkan. Ekonomi global tahun 2020 yang awalnya diperkirakan World Bank akan tumbuh sebesar 2,5%, pada kenyataannya terjun ke kisaran minus 4,3%. Perkiraan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semula ditargetkan optimis di 5,3% pun turun jauh ke minus 2,07%.

Dalam situasi sulit ini, target pencapaian laba neto BPF yang semula sebesar Rp 89 miliar kami revisi menjadi Rp 30,5 miliar. Target ini berhasil kami lampau; pada akhir tahun 2020 Perusahaan mencatatkan pencapaian laba neto sebesar Rp 41,3 miliar.

Dear Shareholders and Stakeholders,

With gratitude, on behalf of the Board of Directors I present to you herewith the performance report of PT Batavia Prosperindo Finance ("BPF" or "Company"), which shows the Company's encouraging achievements in 2020. The global Covid-19 pandemic situation that we are still facing to date has dragged the world's economy into an unprecedented crisis situation. However, we are proud to report that BPF successfully passed 2020 safely.

The strategy of building the Company's fundamentals that we implemented over the past few years has proven to be very effective, equipping BPF with tenacity and solid resilience through difficult times.

2020 Performance Review

Since the Covid-19 pandemic broke out throughout the world, including Indonesia, a global economic recession has become inevitable. The global economy in 2020, which was initially estimated to grow by 2.5% by the World Bank, has in fact plunged into around minus 4.3%. The economic growth rate for Indonesia, which was previously estimated optimistically at 5.3%, has also dropped to minus 2.07%.

During this difficult situation, BPF's initial net profit target of IDR 89 billion was revised down to IDR 30.5 billion. This target has been successfully exceeded; the Company recorded its net profit achievement of IDR 41.3 billion by the end of 2020.

Imbas dari pandemi ini langsung menghantam hampir semua sektor, termasuk industri pembiayaan. Di masa awal pandemi Covid-19 merambah Indonesia, industri pembiayaan nyaris tak bisa bergerak. Diawali dengan perbankan yang memperketat penyaluran pinjaman ke perusahaan-perusahaan pembiayaan selama beberapa tahun terakhir, hingga kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah pada akhir Maret 2020 terkait relaksasi kredit yang berlaku sampai dengan satu tahun, semuanya terasa memberati industri multifinance.

Berkat struktur permodalan dan pinjaman BPF yang selama ini dijaga sangat baik, kondisi keuangan BPF tetap sehat dan sangat mencukupi. Perusahaan bahkan tidak perlu mengajukan permohonan restrukturisasi sama sekali atas pinjaman dari perbankan, meskipun BPF merestrukturisasi pinjaman para debiturnya dengan nilai total Rp 595,12 miliar di tahun 2020.

Selama tiga bulan pertama sejak kasus Covid-19 di Indonesia, BPF memutuskan untuk sementara tidak melakukan penjualan dan mengalihkan fokus ke restrukturisasi kredit para debitur. Setelah memastikan kelancaran *cashflow* dan kesehatan kondisi keuangan yang sangat terkendali, Perusahaan kembali melanjutkan aktivitas penjualannya pada Juni 2020.

Program Restrukturisasi Kredit

Kebijakan restrukturisasi kredit yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditujukan untuk mendorong optimalisasi kinerja lembaga jasa keuangan nonbank, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, sehingga membutuhkan kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak pandemi. Kenyataannya kebijakan ini terasa berat bagi industri pembiayaan, karena meminta perusahaan-perusahaan multifinance untuk merestruktur kredit para debiturnya, namun di sisi lain perusahaan multifinance sendiri kurang mendapat solusi kelonggaran restrukturisasi pinjamannya dari perbankan. Pada praktiknya, banyak perusahaan multifinance harus mengajukan permohonan dan melakukan negosiasi masing-masing ke perbankan.

Peraturan OJK (POJK) Nomor 14 /POJK.05/2020 tentang kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran coronavirus disease 2019 bagi lembaga jasa keuangan nonbank dikeluarkan OJK sebagai tindak lanjut dari pernyataan Pemerintah tentang relaksasi kredit. Peraturan yang diterbitkan pada 14 April 2020 ini menetapkan bahwa lembaga jasa keuangan nonbank dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan bagi debitur yang terdampak Covid-19 tanpa batasan plafon, berlaku sampai dengan satu tahun. Dalam penjelasannya, restrukturisasi pembiayaan dapat dilaksanakan antara lain dengan cara penurunan bunga, perpanjangan jangka waktu, penundaan sebagian pembayaran, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, dan penambahan pembiayaan. Kebijakan ini juga dimaksudkan agar diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik.

Peraturan tersebut kemudian direvisi dengan POJK Nomor 58/POJK.05/2020, ditetapkan pada 10 Desember 2020, yang menyebutkan kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran

The impact of this pandemic immediately hit most sectors, including the multifinance industry. In the early days after the Covid-19 pandemic broke out in Indonesia, the multifinance industry was barely able to run its business activities. Starting with the banks exercising a tighter lending policy to multifinance companies over the last few years, to the policy administered by the Government at the end of March 2020 regarding loan relaxation valid for up to one year, all of which weighed down the multifinance industry.

Due to the solid capital structure and well-maintained loans, BPF's financial condition remained healthy and liquid. The Company did not need to apply for any bank loan restructuring, even though BPF restructured its customers' loans with a total value of IDR 595.12 billion in 2020.

During the first three months since the first Covid-19 cases in Indonesia, BPF decided to temporarily stop its sales activities and focus on restructuring the customers' loans. Only after ensuring that the cashflow and financial health were all good and considered under control to meet any adverse eventuality, the Company resumed its sales activities in June 2020.

Loan Restructuring Program

The loan restructuring policy administered by the Government and Otoritas Jasa Keuangan (OJK - Financial Services Authority/FSA) was aimed at promoting the performance optimization of non-bank financial service institutions, maintaining the financial system's stability, and supporting economic growth, thus requiring economic stimulus policies as a countercyclical impact of the pandemic. In reality, this policy has burdened the multifinance industry, since it required multifinance companies to restructure its debtors' loans on the one hand, but on the other hand, multifinance companies have not been offered much leniency for their bank loans. In practice, many multifinance companies had to propose and negotiate with their respective banks.

The OJK regulation (POJK) Number 14/POJK.05/2020 concerning the countercyclical policy of the impact of coronavirus disease 2019 for non-bank financial service institutions was issued by OJK as a follow-up to the Government's statement regarding loan relaxation. The regulation issued on April 14, 2020 stipulated that non-bank financial service institutions can provide loan restructuring for debtors affected by Covid-19 without a maximum limit, valid for up to one year. It further illustrated that the loan restructuring can be proceeded in several schemes, such as reduction of interest, extension of loan period, rescheduling of partial installment payments, reduction of principal arrears, reduction of interest arrears, and the provision of more financing. This policy was also intended to be implemented with due regard to the prudential principle, and the implementation of risk management as well as good corporate governance.

This regulation was then revised with POJK Number 58/POJK.05/2020, issued on December 10, 2020, which stated that the countercyclical policy

Covid-19, termasuk restrukturisasi pembiayaan berlaku sampai dengan 17 April 2022, serta tambahan ketetapan bahwa perusahaan pembiayaan yang telah memiliki ekuitas lebih besar dari Rp 100 miliar dapat melakukan penerbitan efek bersifat utang tidak melalui penawaran umum.

BPF menawarkan dua pilihan restrukturisasi pembiayaan pada para debiturnya yang terimbas pandemi Covid-19, yaitu penundaan pembayaran sama sekali dengan nilai bunga yang diakumulasi atau pembayaran cicilan bunga saja. Kedua pilihan tersebut ditawarkan dengan pilihan jangka waktu 3 bulan dan 6 bulan. Dari pilihan tersebut, sekitar 50% dari total nilai pembiayaan yang direstruktur, yaitu sekitar Rp 290 miliar, memilih untuk tetap membayar bunga saja, sehingga *cash flow* Perusahaan dapat terjaga dengan baik. Dengan total hanya sekitar 35% pembiayaan yang butuh direstruktur dan skema yang masih cukup aman, *cash flow* BPF terjaga baik selama April hingga tutup tahun 2020.

Menilai persentase restrukturisasi kredit yang hanya sekitar 35% dari total pembiayaan Perusahaan, dapat disimpulkan bahwa proses pemberian kredit yang selama ini diterapkan BPF sangatlah selektif dan berhati-hati. Di samping sebanyak 65% pembiayaan tidak membutuhkan kelonggaran pembayaran kredit, 35% pembiayaan yang mengambil skema restrukturisasi pun tetap menunjukkan kinerja pembayaran kredit yang sangat positif.

Nilai total pembiayaan debitur BPF yang membutuhkan restrukturisasi di tahun 2020 adalah sebesar Rp 595,12 miliar. Jumlah ini turun hingga tinggal sekitar 30% atau Rp 178,30 miliar yang masih berlanjut ke tahun 2021.

Pencapaian Rencana Kerja Tahun 2020

Melihat imbas langsung pandemi Covid-19 yang menghantam perekonomian, kami melakukan penyesuaian beberapa target anggaran BPF tahun 2020 pada bulan Juli 2020.

Target penjualan pembiayaan dikoreksi sebesar 50% dari Rp 1,55 triliun menjadi sekitar Rp 750 miliar. Jumlah pembiayaan kendaraan yang semula ditargetkan sebesar Rp 1,21 triliun direvisi menjadi Rp 573,09 miliar. Target ini berhasil terpenuhi dengan pencapaian pembiayaan kendaraan sebesar Rp 651,94 miliar, alat berat sebesar Rp 149,87 miliar, factoring sebesar Rp 30 miliar, dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp 4,04 miliar, menjadikan total pembiayaan BPF selama tahun 2020 sebesar Rp 835,85 miliar.

Sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya, anggaran laba BPF tahun 2020 pun direvisi dari Rp 89 miliar menjadi Rp 30,5 miliar. Target laba neto ini berhasil dilampaui, dengan pencapaian aktual tahun 2020 sebesar Rp 41,3 miliar.

Kami menetapkan strategi yang sangat berhati-hati dengan memperkuat cadangan atau provisi. Langkah antisipasi tersebut dimaksudkan untuk memberi keamanan bagi BPF apabila kondisi ekonomi yang tidak kondusif akibat Covid-19 masih terus berlanjut di tahun 2021.

Sesuai rencana kerja semula, BPF menerbitkan obligasi berkelanjutan sebesar Rp 200 miliar di bulan Mei 2020. Karena kemampuan

on the impact of the Covid-19 spread, including restructuring of financing, is valid until April 17, 2022, with additional clauses such as multifinance companies with equity greater than IDR 100 billion may issue debt securities without a public offering.

BPF provided two loan restructuring schemes to debtors who were affected by the Covid-19 pandemic, namely total deferral of installment payment with interest amount being accumulated and payment of interest amount only. Both options were offered with a choice of terms of 3 and 6 months. Of these options, around 50% of the total restructured financing value, which was approximately IDR 290 billion, chose to continue to pay interest amount only, hence the Company's cashflow remained under control. With a total of only about 35% of financing that needed restructuring and the relatively safer schemes, BPF's cashflow was well maintained from April to the end of 2020.

In assessing the percentage of loan restructuring executed, which was only around 35% of the Company's total financing, it can be concluded that the conditions applied when BPF granted financing to its customers had been very selective and prudent. Aside from the fact that as many as 65% of the total financing did not request for loan relaxation, 35% of those required restructuring still showed a very positive installment payment performance.

The total amount of loans restructured for BPF's debtors in 2020 was IDR 595.12 billion. This amount decreased to only around 30% or IDR 178.30 billion which was carried on into 2021.

Achievement of the 2020 Work Plans

Observing the direct impact of Covid-19 pandemic that hit the economy, we made adjustments to several BPF budget targets for full year 2020 in July 2020.

The financing sales target was corrected by 50% from IDR 1.55 trillion to around IDR 750 billion. The amount of vehicle financing, which was originally targeted at IDR 1.21 trillion, was revised to IDR 573.09 billion. These targets were successfully met with the actual achievement of vehicle financing of IDR 651.94 billion, heavy equipment financing of IDR 149.87 billion, factoring of IDR 30 billion and homeownership loan (KPR – Kredit Pemilikan Rumah) of IDR 4.04 billion, bringing the total of BPF financing in 2020 to IDR 835.85 billion.

As mentioned earlier, BPF's profit budget for full year 2020 was also revised from IDR 89 billion to IDR 30.5 billion. This net profit budget was successfully exceeded, with 2020's actual achievement amounting to IDR 41.3 billion.

We adopted extremely prudent strategies by strengthening our reserves or provisions. These steps were taken to provide BPF with security should an unfavorable economic condition becomes a reality if Covid-19 continues in 2021.

As previously planned, BPF issued sustainable bonds amounting to IDR 200 billion in May 2020. Due to BPF's strong financial structure, the bonds

keuangan yang mumpuni, obligasi yang jatuh tempo pada bulan Mei 2020 senilai Rp 300 miliar terlunasi. Perusahaan bahkan masih sanggup melakukan *buyback* obligasinya yang jatuh tempo pada Juni 2021 senilai Rp 93,5 miliar.

Indikator finansial lainnya juga menunjukkan kondisi keuangan yang baik, antara lain dengan masih tercatatnya deposito sebesar Rp 41 miliar dan permodalan BPF yang sangat positif, termasuk rasio efektif pinjaman terhadap ekuitas yang sebesar 0,85 di tahun 2020, bukti bahwa status keuangan dan *cashflow* BPF sangat sehat dan solid di tengah masa pandemi ini.

Strategi Pemasaran di Masa Pandemi Covid-19

Meskipun iklim perekonomian dan keuangan di masa pandemi Covid-19 jelas sangat menyulitkan dan jauh dari optimisme perkiraan di tahun sebelumnya, BPF terus fokus dengan langkah-langkah strategis untuk tetap mengukuhkan posisinya di industri pembiayaan.

Sebagai salah satu strategi pemasaran, BPF membuka 7 kantor cabang baru (sebagian di antaranya dibuka di penghujung tahun 2019) lebih banyak dari rencana semula sebanyak 5 kantor cabang. Dari analisis sebelumnya, kami telah menargetkan untuk meningkatkan potensi eksplorasi Perusahaan di Pulau Jawa. Karenanya, kami menambah kantor-kantor cabang baru BPF di kota Cilacap, Kebumen, Kediri, Pekalongan, Rembang, dan Tuban, serta satu kantor di Tabanan, Pulau Bali. Kantor-kantor cabang baru yang mulai efektif beroperasi di tahun 2020 ini telah berkontribusi sebesar Rp 28,6 miliar atau 3,42% dari total pembiayaan Perusahaan sepanjang tahun.

Mengingat daya beli masyarakat yang turun secara signifikan sebagai dampak pandemi, kami mengambil kebijakan internal memperketat proses seleksi nasabah untuk memastikan keamanan aktivitas bisnis BPF. Sejak kembali memulai kegiatan penjualan pada Juni 2020, untuk sementara waktu semua permohonan pembiayaan dari cabang-cabang dialihkan ke kantor regional sampai batas maksimum wewenang persetujuan area manager yang sebesar Rp 150 juta per permohonan. Sedangkan untuk nominal pembiayaan lebih besar dari itu harus diajukan ke Kantor Pusat. Karena harga kendaraan turun akibat terimbas pandemi, Perusahaan juga lebih selektif dalam kontrol harga kendaraan yang akan diberikan kredit. Kami selalu memastikan agar pembiayaan baru yang diberikan tetap memiliki kualitas pembayaran yang baik dan membawa kontribusi positif bagi bisnis BPF.

Penerapan Tata Kelola yang Baik

Pandemi Covid-19 secara signifikan meningkatkan risiko yang mengancam perusahaan multifinance, terutama risiko kredit macet. Sejak dini kami mewaspadaikan berbagai kemungkinan yang akan muncul dan segera menyusun strategi untuk mencegah imbas negatif yang lebih besar. Berbagai langkah antisipasi telah kami implementasikan dan membuahkan hasil yang sesuai harapan, di antaranya program restrukturisasi kredit yang lebih aman, pembatasan otoritas persetujuan pemberian pembiayaan, serta penerbitan obligasi seperti telah diuraikan sebelumnya di atas.

Sistem pengendalian dan pengawasan juga kami tingkatkan, terutama melalui pertemuan rutin yang lebih intensif di tiap tingkatan

maturing in May 2020 amounting IDR 300 billion were paid off. The Company even had the capability to buy back its bonds that would mature in June 2021 amounting IDR 93.5 billion.

Other financial indicators also demonstrated BPF's good financial condition, amongst others shown by the Company's having a term deposit of IDR 41 billion on its books and a very positive capital structure, including the effective debt to equity ratio in 2020 of 0.85, evidence of BPF's very healthy and solid financial state and cash flow in the midst of this pandemic.

Marketing Strategies in Covid-19 Pandemic Era

Although the economic and financial climate during the Covid-19 pandemic era was extremely difficult and far from the optimism predicted in the previous year, BPF continued to focus on strategic steps to preserve its position in the multifinance industry.

As one of the marketing strategies, BPF opened 7 new branch offices (several of which had been opened towards the end of 2019) more than the initial plan of 5 offices. Based on our previous analysis, we aimed to increase the Company's exploration potential in Java. Therefore, we opened new branch offices in Cilacap, Kebumen, Kediri, Pekalongan, Rembang and Tuban, and one branch office in Tabanan, Bali. These new offices, which effectively commenced operations in 2020, contributed IDR 28.6 billion or 3.42% of the Company's total financing throughout the year.

Because people's purchasing power declined significantly as the result of the pandemic, we employed a stricter internal policy in the customer selection process to ensure the safety of BPF's business activities. Since resuming sales activities in June 2020, all loan applications from branches were temporarily transferred to regional offices up to the maximum approval authority of the respective area managers of IDR 150 million per application. Whereas all financing applications of greater amounts must be submitted to the Head Office. As vehicle prices fell due to the pandemic, the Company also became more selective in price control of the vehicles proposed for financing. It was our intention to ascertain that the new financings to be provided would have good installment payments and bring positive contribution to BPF's business.

Implementation of Good Corporate Governance

The Covid-19 pandemic has significantly increased the risks faced by multifinance companies, especially the risk of bad loans. We have been on guard against any possibilities that might arise and immediately devised strategies to prevent greater negative impacts. We implemented several anticipatory actions that have brought expected results, including providing safer loan restructuring schemes, limiting the authorities of financing approvals, and executing bonds issuances as previously described.

We also improved our control and supervision systems, notably through more intensive routine meetings at each management level, as well as

manajemen, serta pertemuan koordinasi tingkat regional. Selain mengevaluasi situasi pasar dan kinerja BPF, kami juga secara konsisten memastikan kepatuhan BPF pada kebijakan dan peraturan regulator, yang menjadi semakin penting untuk menjamin kelancaran usaha Perusahaan di kala krisis.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai tingkat kendali tertinggi Perusahaan dilaksanakan sebanyak 3 kali pada tahun 2020, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa pada 18 Mei 2020, serta RUPS Luar Biasa pada 1 September 2020. Beberapa keputusan penting yang diambil dalam RUPS Tahunan pada 18 Mei 2020 adalah persetujuan penggunaan laba bersih BPF tahun 2019 sepenuhnya senilai Rp 74,86 miliar sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja Perusahaan dan tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham. Sedangkan RUPS Luar Biasa pada hari yang sama menyetujui penjaminan lebih dari 50% atau seluruh harta kekayaan Perusahaan dalam rangka penerbitan dan penawaran umum obligasi di Pasar Modal, serta menetapkan dan menyusun kembali susunan para pemegang saham BPF sesuai dengan data kepemilikan per 30 April 2020. Susunan kepemilikan saham tersebut adalah PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk sebesar 1.324.988.580 saham (74,33%), UOB Kay Hian PTE. Ltd. sebesar 107.575.819 saham (6,03%), dan masyarakat sejumlah 350.099.176 saham (19,64%), dengan nilai keseluruhan sejumlah 1.782.663.575 saham atau nilai nominal sebesar Rp 178,27 miliar.

Dari RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada 1 September 2020, keputusan utama yang dihasilkan adalah persetujuan peningkatan modal dasar Perusahaan dari sebesar Rp 220 miliar menjadi Rp 700 miliar, serta persetujuan penambahan modal Perusahaan dengan mengeluarkan saham baru dari portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 950 juta saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Demi meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kami membentuk komite tambahan, yaitu Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi. Kedua komite ini bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.

Proyeksi Usaha Tahun 2021

Dengan harapan pemberian vaksin Covid-19 dan proses pemulihan umum dari dampak pandemi, Pemerintah Indonesia dan berbagai institusi global memprediksikan perbaikan situasi di tahun 2021 yang cukup optimis. Bank Dunia mengharapkan angka pertumbuhan ekonomi global membaik ke kisaran 4%, lebih rendah dari proyeksi sebelum era pandemi Covid-19.

Untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, IMF memberi perkiraan optimis hingga mencapai 4,8% dan Bank Indonesia memproyeksikan angka yang mirip di kisaran 4,8% hingga 5,8% di tahun 2021.

Meskipun berbagai proyeksi menunjukkan optimisme pemulihan kondisi di tahun 2021, kami sendiri memperkirakan dan mengantisipasi bahwa dampak Covid-19 masih akan mempengaruhi perekonomian secara umum dan bisnis BPF secara khusus. Total

regional coordination meetings. In addition to evaluating the market situation and the Company's performance, we also consistently ensured BPF's compliance with all regulators' policies and regulations, which were increasingly becoming more essential in order to ensure the smooth running of BPF's business in times of crisis.

The General Meeting of Shareholders (GMS) as the highest control level of the Company was held 3 times in 2020, namely the Annual GMS and Extraordinary GMS on May 18, 2020, and the Extraordinary GMS on September 1, 2020. Some important decisions made at the May 18, 2020 Annual GMS were approval on the use of BPF's entire net income for fiscal year 2019 of IDR 74.86 billion as retained earnings to increase the Company's working capital and no dividend payment to be made. Meanwhile, the Extraordinary GMS on the same day approved to pledge more than 50% or all of the Company's assets in relation to bonds issuance and public offering in the Capital Market, also to confirm and restructure BPF's shareholders composition according to ownership data as of April 30, 2020. The said shareholder composition was PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk with 1,324,988,580 shares (74.33%), UOB Kay Hian PTE Ltd. with 107,575,819 shares (6.03%), and the public with 350,099,176 shares (19.64%), with a total amount of 1,782,663,575 shares or a total value of IDR 178.27 billion.

From the Extraordinary GMS held on September 1, 2020, the foremost decision made was approval to increase the Company's authorized capital from IDR 220 billion to IDR 700 billion, and approval to increase the Company's capital by issuing new shares from its portfolio in a maximum number of 950 million shares with a value of IDR 100 per share through a rights issue.

In order to improve the implementation of good corporate governance principles, we formed additional committees, namely the Risk Monitoring Committee and the Remuneration & Nomination Committee. These committees report to the Board of Commissioners.

2021 Business Projections

With the hope of Covid-19 vaccines distribution and the general recovery process from the impact of the pandemic, the Indonesian Government and various global institutions predicted a relatively positive situation improvement in 2021. The World Bank expected the global economic growth to improve to around 4%, lower than the projection made before the Covid-19 pandemic era.

The IMF projected Indonesia's 2021 economic growth an optimistic estimate of up to 4.8% and Bank Indonesia (Indonesia's central bank) projected a similar figure in the range of 4.8% to 5.8%.

Even though many projections show the optimism of recovery in 2021, we predict and anticipate that the impact of Covid-19 will still affect the economy in general and BPF's business in particular. We have set the

pembiayaan 2021 kami targetkan sebesar Rp 1,14 triliun, total penghasilan sebesar Rp 379,9 miliar, dan pendapatan laba sebesar Rp 59,3 miliar. Rasio leverage akan dijaga di kisaran 80%. Untuk sementara kami tidak berencana untuk membuka kantor cabang baru di tahun 2021.

Penutup

Di akhir kata, saya atas nama segenap Direksi dengan tulus menyampaikan rasa terima kasih kami atas dukungan dan kepercayaan yang ditunjukkan pada BPF selama ini, terutama pada masa sulit pandemi Covid-19. Dengan penuh kerendahan hati, kami menyadari bahwa segala keberhasilan dan pencapaian Perusahaan sangat tergantung pada dukungan dan kerja sama dari banyak pihak, para pemegang saham dan pemangku kepentingan, termasuk regulator dan para mitra kerja BPF.

Bersama seluruh jajaran manajemen dan karyawan BPF, kami akan terus bekerja keras untuk menjadikan BPF sebagai salah satu perusahaan multifinance terbaik di Indonesia, serta memberi dampak yang positif bagi semua pemegang saham dan pemangku kepentingan.

targets of total financing in the amount of IDR 1.14 trillion, total revenues of IDR 379.9 billion, and profits of IDR 59.3 billion. The leverage ratio will be maintained at around 80%. We do not plan to open any new branch office in 2021.

Closing

In closing, on behalf of the Board of Directors, I would like to extend our sincere gratitude for the endless support and trust shown to BPF so far, especially during the difficult time of the Covid-19 pandemic. We are humbled at the acknowledgement that all of the Company's success and achievements are only possible because of the support and cooperation of many parties, shareholders and stakeholders, including regulators and BPF partners.

Together with BPF management and staff of all levels, we will continue to work hard to make BPF one of the best multifinance companies in Indonesia, and to bring positive impacts to all shareholders and stakeholders.

Hormat kami *Sincerely yours*



Markus Dinarto Pranoto
Direktur Utama *President Director*

Profil Perusahaan

Company Profile



Informasi Umum

General Information

Nama Perusahaan <i>Company's Name</i>	PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. (BPF)
Bidang Usaha <i>Line of Business</i>	Pembiayaan multiguna, pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja <i>Multipurpose financing, investment financing, working capital financing</i>
Kantor Pusat <i>Head Office</i>	Chase Plaza Lantai 12 & 15 Jl. Jend Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Tel: 021-520 0434 (hunting) Fax: 021-520 9160 Website: http://www.bpfi.co.id Email: cs@bpfi.co.id
Tahun Pendirian <i>Year of Establishment</i>	1994
Dasar Hukum Pendirian <i>Legal Basis of Establishment</i>	Akta No.186 tanggal 12 Desember 1994 <i>Deed No. 186 dated December 12, 1994</i>
Modal Dasar <i>Authorized Capital</i>	Rp. 700.000.000.000,- <i>IDR 700,000,000,000</i>
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh <i>Issued and Fully Paid Capital</i>	Rp. 178.266.357.500,- <i>IDR 178,266,357,500</i>
Pencatatan Saham <i>Share Listing</i>	Tanggal pencatatan 1 Juni 2009 <i>Date of listing June 1, 2009</i> Jumlah lembar saham 450.000.000 <i>Number of shares 450,000,000</i> Nilai nominal saham Rp. 45.000.000.000 <i>Nominal value of shares IDR 45,000,000,000</i>
Kode Saham <i>Shares Code</i>	Bursa Efek Indonesia <i>Indonesia Stock Exchange</i> BPF1
Nama Obligasi <i>Name of Bonds</i>	Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2017 <i>Batavia Prosperindo Finance Sustainable Bonds I Phase II Year 2017</i> Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2018 <i>Batavia Prosperindo Finance Sustainable Bonds II Phase I Year 2018</i> Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2020 <i>Batavia Prosperindo Finance Sustainable Bonds II Phase II Year 2020</i>
Komposisi Kepemilikan 2020 <i>2020 Shareholder Composition</i>	PT Batavia Prosperindo Internasional 74,33% Pemodal Publik Nasional <i>Domestic Public Shareholders</i> 17,35% Pemodal Publik Asing <i>Foreign Public Shareholders</i> 8,32%

Jaringan Operasi Usaha

Business Operation Network

75 kantor cabang dan perwakilan, yang terbagi dalam 13 daerah regional
75 branch and representative offices in 13 regional areas

1. Jabodetabekra <i>Jabodetabekra</i>	(Jakarta 1 dan 2, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Karawang)
2. Jawa Barat <i>West Java</i>	(Bandung, Ciamis, Cirebon, Garut, Tasikmalaya)
3. Jawa Tengah 1 <i>Central Java 1</i>	(Kudus, Pekalongan, Rembang, Semarang, Tegal)
4. Jawa Tengah 2 <i>Central Java 2</i>	(Banjarnegara, Cilacap, Kebumen, Purwokerto, Solo, Yogyakarta)
5. Jawa Timur <i>East Java</i>	(Denpasar, Kediri, Malang, Mataram, Sidoarjo, Surabaya, Tabanan, Tuban)
6. Sumatra 1 <i>Sumatra 1</i>	(Bengkulu, Jambi, Lubuk Linggau, Padang, Palembang 1 dan 2)
7. Sumatra 2 <i>Sumatra 2</i>	(Baturaja, Lampung, Metro Lampung, Pringsewu)
8. Sumatra 3 <i>Sumatra 3</i>	(Banda Aceh, Langsa, Lhokseumawe, Medan 1 dan 2, Pematang Siantar, Rantau Prapat)
9. Sumatra 4 <i>Sumatra 4</i>	(Duri, Pekanbaru, Rengat, Ujung Batu)
10. Kalimantan 1 <i>Kalimantan 1</i>	(Balikpapan, Banjarmasin 1 dan 2, Palangkaraya, Pangkalan Bun, Samarinda, Sampit)
11. Kalimantan 2 <i>Kalimantan 2</i>	(Belitung, Pangkal Pinang, Pontianak 1 dan 2, Singkawang, Sintang)
12. Sulawesi 1 <i>Sulawesi 1</i>	(Kendari, Makassar, Palopo, Palu, Parepare)
13. Sulawesi 2 <i>Sulawesi 2</i>	(Ambon, Gorontalo, Jayapura, Manado, Sorong)

Visi dan Misi

Vision and Mission



BATAVIA
PROSPERINDO
FINANCE

Visi

Vision

Menjadi salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka dan terbaik di Indonesia, dengan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.

To become one of the leading and best multifinance companies in Indonesia by offering top quality services to our customers.

Misi

Mission

Menyediakan produk-produk pembiayaan unggul dengan penawaran kompetitif yang mengutamakan kecepatan, efisiensi, dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada nasabah serta mitra kerja Perusahaan.

To offer superior and competitive financial products to our customers and business partners, and to ensure quick-response, efficient and optimum services.

Tujuan

Objective

Menciptakan nilai bagi pemegang saham, serta memberikan kontribusi positif bagi lingkungan masyarakat di mana Perusahaan berada dan beroperasi.

To create value for our shareholders and to give positive contributions to the community where the Company resides and operates.

Riwayat Singkat

Brief History

Sesuai peran suatu perusahaan pembiayaan, PT Batavia Prosperindo Finance Tbk ("BPF" atau "Perusahaan") menjalankan kegiatan bisnisnya di bidang pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan multiguna, dengan fokus utama selama ini pada pembiayaan kendaraan bermotor beroda empat dan alat-alat berat.

Perusahaan cikal bakal BPF adalah suatu perusahaan pembiayaan yang berdiri pada tahun 1994, mulai beroperasi pada tahun 1995 dengan izin usaha Menteri Keuangan RI No. 90/KMK.017/1995 tertanggal 15 Februari 1995 untuk bidang sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Pada tahun 2004, Perusahaan bergabung dengan Grup Batavia Prosperindo dan secara resmi beroperasi dengan nama PT Batavia Prosperindo Finance berdasarkan Surat Keputusan no. W7-03581.HT.01.04.TH.2007. Izin usaha Perusahaan pun kemudian diperbarui melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan no. KEP-099/KM.10/2007.

Pada bulan Juni 2009, BPF mengambil langkah penting dan melakukan penawaran umum perdana (*IPO – Initial Public Offering*) untuk mempercepat pertumbuhan Perusahaan yang menunjukkan potensi besar untuk dikembangkan. Saham PT Batavia Prosperindo Finance Tbk terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BPF1.

Sejak *go public*, Perusahaan terus bertumbuh dengan sangat baik dan telah menerapkan berbagai langkah strategis untuk terus memperkuat fondasi dan meningkatkan perkembangan usahanya, terutama dengan memperkuat struktur modal Perusahaan. BPF menerbitkan obligasi pertamanya di tahun 2013. Hingga akhir tahun 2020, BPF telah melakukan lima kali penerbitan obligasi dan tiga kali Penawaran Umum Terbatas (*rights issue*), yang semuanya mendapat tanggapan sangat positif dari para investor.

Sembari menjalankan bisnis utamanya, BPF terus mengeksplorasi berbagai bidang usaha lain sebagai upaya pengembangan korporasi dan diversifikasi usaha. Pada tahun 2014, BPF mendirikan sebuah anak perusahaan, PT Malacca Trust Finance ("MTFI"), yang menjalankan bisnis utamanya dalam bidang pembiayaan alat-alat berat. Di kemudian hari, pada tahun 2018, BPF mengambil alih aset dan kewajiban MTFI sebagai strategi untuk memperbesar aset dan pencapaian pertumbuhan usahanya.

Kantor Pusat BPF berada di tengah kawasan bisnis kota Jakarta. Hingga akhir tahun buku 2020, jaringan kerja dan jangkauan pemasaran BPF telah mencakup 75 kantor cabang dan perwakilan yang terbagi dalam 13 kelompok regional di seluruh Indonesia, dengan karyawan sebanyak 1.186 orang.

In line with the role of a multifinance company, PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk ("BPF" or "Company") performs its business activities in investment financing, working capital financing and multipurpose financing, with its main business focus in the sector of automobile and heavy equipment financing.

BPF was initially a multifinance company established in 1994, which started operating in 1995 with a license from the Indonesian Finance Minister Decree No. 90/KMK.0.17/1995 dated February 15, 1995 for financial leasing, receivable factoring, credit card operations and consumer financing. In 2004, this company joined Batavia Prosperindo Group and officially operated using the name PT Batavia Prosperindo Finance based on the Decree no. W7-03581.HT.01.04.TH.2007. The Company's business license was then renewed with the Minister of Finance Decree no. KEP-099/KM.10/2007.

In June 2009, BPF took a major step and held its initial public offering (IPO), purposed to accelerate the Company's growth, which showed great potential for development. The shares of PT Batavia Prosperindo Finance Tbk are listed on the Indonesian Stock Exchange as BPF1.

Since going public, the Company continued to grow excellently and has implemented strategic actions to strengthen its foundation and to improve its business development, particularly by strengthening the Company's capital structure. BPF issued its first bonds in 2013. By the end of 2020, BPF has issued five bonds and three rights issues, all of which received very positive responses from investors.

While running its main business, BPF continued to explore various other business sectors as an initiative in corporate development and business diversification. In 2014, BPF established a subsidiary, PT Malacca Trust Finance ("MTFI"), which main business was in the heavy equipment financing. BPF then acquired MTFI's assets and liabilities in 2018 as a strategy to increase its assets and to achieve growth.

BPF's Head Office is located in the center of Jakarta business district. By the end of 2020 financial year, BPF's network and marketing reach comprised 75 branch and representative offices, spread over 13 regional areas throughout Indonesia, with 1,186 employees on board.

Jejak Langkah

Milestones

2017

Pada Maret 2017, BPF menerbitkan *rights issue* (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu /HMETD) (PUT II).

In March 2017, BPF offered Rights Issue II

BPF resmi mengambil alih aset dan kewajiban PT Magna Finance Tbk. pada bulan April 2017.

BPF officially acquired the assets and liabilities of PT Magna Finance Tbk. in April 2017.

Di bulan Mei 2017, BPF menerbitkan tahap kedua dari obligasi berkelanjutan "Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2017" sebesar Rp 300 miliar dari nilai total obligasi sebesar Rp 500 miliar.

In May 2017, BPF issued the second phase of sustainable bonds, "Batavia Prosperindo Finance Sustainable Bonds I Phase II Year 2017" amounted IDR 300 billion of the total bonds value of IDR 500 billion.

2016

Pada Juni 2016, BPF menerbitkan obligasi berkelanjutan "Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016" sebesar Rp 200 miliar dari total obligasi senilai Rp 500 miliar.

In June 2016, BPF issued sustainable bonds "Batavia Prosperindo Finance Sustainable Bonds I Phase I Year 2016" amounted to IDR 200 billion of the total bonds value of IDR 500 billion.

2014

BPF membentuk sebuah anak perusahaan, PT Malacca Trust Finance (MTFI), yang khusus bergerak dalam bidang pembiayaan alat berat, beroperasi mulai September 2014.

BPF established a subsidiary specializing in heavy equipment financing, PT Malacca Trust Finance (MTFI), which commenced operations in September 2014.

BPF melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) I pada Desember 2014.

Rights Issue I was conducted in December 2014.

2013

BPF menerbitkan obligasi untuk pertama kalinya, "Obligasi Batavia Prosperindo Finance I Tahun 2013", dengan nilai total Rp 300 miliar.

BPF issued its first corporate bonds, "Batavia Prosperindo Finance Bonds I Year 2013" amounted to IDR 300 billion.

2009

Perusahaan melakukan penawaran umum perdana dan saham PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BPF1.

The Company held an Initial Public Offering (IPO) and PT Batavia Prosperindo Finance Tbk.'s shares were officially listed on the Indonesia Stock Exchange as BPF1

2004

Perusahaan bergabung dengan Grup Batavia Prosperindo.

The company was acquired by Batavia Prosperindo Group.

1995

Perusahaan resmi mulai beroperasi sebagai perusahaan pembiayaan berdasarkan izin Menteri Keuangan RI No. 90/KMK.017/1995 tanggal 15 Februari 1995.

The company officially commenced operating as a multifinance company based on the Minister of Finance Decree No. 90/KMK.017/1995 of February 15, 1995.

1994

Perusahaan asal PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. didirikan.

The original company of PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. was established



2020

Dunia global berjuang menghadapi pandemi Covid-19. Sesuai kebijakan Pemerintah, BPF menawarkan skema restrukturisasi kepada para nasabahnya dan merestruktur pinjaman nasabahnya dengan nilai total Rp 595,12 miliar di tahun 2020.

The global world was facing the Covid-19 pandemic. In accordance with the policy issued by the Government, BPF offered its customers a restructuring scheme and restructured its customers' loans with a total value of IDR 595.12 billion in 2020.

BPF menerbitkan tahap kedua dari obligasi berkelanjutan, "Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2020" sebesar Rp 200 miliar dari nilai total Rp 650 miliar.

BPF issued the second phase of sustainable bonds, "Batavia Prosperindo Finance Sustainable Bonds II Phase II Year 2020" amounted IDR 200 billion of the total bonds value of IDR 650 billion.

2019

PT Batavia Prosperindo Internasional menjadi pemegang saham pengendali BPF dengan kepemilikan sebesar 74,33%.

PT Batavia Prosperindo Internasional became the controlling shareholder of BPF with 74.33% ownership.

2018

Pada Maret 2018 BPF menyelenggarakan Penawaran Umum Terbatas (PUT) III dengan skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu/HMETD. Perusahaan berhasil menghimpun dana sebesar Rp 100 miliar.

In March 2018 BPF conducted Rights Issue III and the Company raised IDR 100 billion fund.

Pengambil alihan aset dan liabilitas PT Malacca Trust Finance (MTFI) dilaksanakan pada Maret 2018.

The acquisition of assets and liabilities of PT Malacca Trust Finance (MTFI) was executed in March 2018.

BPF menerbitkan obligasi berkelanjutan bernilai total Rp 650 miliar, dengan penerbitan tahap I, "Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2018" sebesar Rp 300 miliar.

BPF issued the first phase of sustainable bonds, "Batavia Prosperindo Finance Sustainable Bonds II Phase I Year 2018" amounted IDR 300 billion of the total bonds value of IDR 650 billion.

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



Irena Istary Iskandar
Komisaris Utama
President Commissioner

Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia <i>Indonesian</i>
Tempat & Tahun Lahir <i>Place & Year of Birth</i>	Jakarta, 1974 <i>Jakarta, 1974</i>
Latar Belakang Pendidikan <i>Educational Background</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration, European University, Switzerland (1996) - Master of Arts in Public Relations, European University, Switzerland (1996) - <i>Master of Business Administration, European University, Switzerland (1996)</i> - <i>Master of Arts in Public Relations, European University, Switzerland (1996)</i>
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Manajer Pemasaran, PT Bira Aset Manajemen (1996-1998) - Direktur, PT Omegatama Internasional Luas (1998-2003) - Komisaris, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (2000-sekarang) - Komisaris, PT Omegatama Internasional Luas (2003-sekarang) - Komisaris, PT Batavia Prosperindo Internasional (2003-sekarang) - Komisaris Utama, Malacca Trust Pte. Ltd. (2011-sekarang) - <i>Marketing Manager, PT Bira Aset Manajemen (1996-1998)</i> - <i>Director, PT Omegatama Internasional Luas (1998-2003)</i> - <i>Commissioner, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (2000-present)</i> - <i>Commissioner, PT Omegatama Internasional Luas (2003-present)</i> - <i>Commissioner, PT Batavia Prosperindo Internasional (2003-present)</i> - <i>President Commissioner, Malacca Trust Pte. Ltd. (2011-present)</i>
Riwayat Jabatan <i>History of Position</i>	Komisaris Utama (sejak 2005) <i>President Commissioner (since 2005)</i>
- Dasar Hukum Penunjukkan <i>Legal Basis of Appointment</i>	<p>Diangkat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 29 April 2005 berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2004.</p> <p><i>Appointed as President Commissioner since April 29, 2005 based on the Resolution of the Company's 2004 Annual General Meeting of Shareholders.</i></p>
- Jabatan Rangkap <i>Concurrent Position</i>	<p>Rangkap jabatan tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p><i>Concurrent position does not violate the Financial Service Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding The Board of Directors and The Board of Commissioners of a Public Company.</i></p>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliated Relationship</i>	<p>Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi atau pemegang saham utama.</p> <p><i>Is not affiliated with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors or the majority shareholder.</i></p>
Domisili <i>Domicile</i>	DKI Jakarta <i>DKI Jakarta</i>
Jumlah Kepemilikan Saham BPFJ <i>BPFJ Share Ownership</i>	- -



Desti Liliati
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia <i>Indonesian</i>
Tempat & Tahun Lahir <i>Place & Year of Birth</i>	Tanjung Karang, Lampung, 1979 <i>Tanjung Karang, Lampung, 1979</i>
Latar Belakang Pendidikan <i>Educational Background</i>	Sarjana Akuntansi, Universitas Atma Jaya, Jakarta (2002) <i>Bachelor of Accounting, Atma Jaya University, Jakarta (2002)</i>
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Associate Auditor, KAP Prasetyo & Sanjaya (Ernst & Young) (2002-2004) - Manager Divisi Corporate Finance, PT Batavia Prosperindo Sekuritas (2004-2007) - Head of Finance Division, PT Strait Finance (2007-2010) - Head of Finance Division, PT Karya Anugrah Kusuma (2010-2011) - Head of Finance Division, PT Prima Cipta Jaya (2011-2020) - Head of Finance Division, PT Strait Merchants Capital (2020-sekarang). <ul style="list-style-type: none"> - Associate Auditor, public accounting firm Prasetyo & Sanjaya (Ernst & Young) (2002-2004) - Manager of Corporate Finance Division, PT Batavia Prosperindo Sekuritas (2004-2007) - Head of Finance Division, PT Strait Finance (2007-2010) - Head of Finance Division, PT Karya Anugrah Kusuma (2010-2011) - Head of Finance Division, PT Prima Cipta Jaya (2011-2020) - Head of Finance Division, PT Strait Merchants Capital (2020-present).
Riwayat Jabatan <i>History of Position</i>	Komisaris Independen (sejak 2010) <i>Independent Commissioner (since 2010)</i>
- Dasar Hukum Penunjukkan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Diangkat sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 18 Mei 2010 berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2009. <i>Appointed as Independent Commissioner since May 18, 2010 based on the Resolution of the Company's 2009 Annual General Meeting of Shareholders.</i>
- Jabatan Rangkap <i>Concurrent Position</i>	Rangkap jabatan tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. <i>Concurrent position does not violate the Financial Service Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding The Board of Directors and The Board of Commissioners of a Public Company.</i>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliated Relationship</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi atau pemegang saham utama. <i>Is not affiliated with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors or the majority shareholder.</i>
Domisili <i>Domicile</i>	DKI Jakarta <i>DKI Jakarta</i>
Jumlah Kepemilikan Saham BPF1 <i>BPF1 Share Ownership</i>	- -



Christopher Clower
Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Amerika Serikat <i>American</i>
Tempat & Tahun Lahir <i>Place & Year of Birth</i>	Amerika Serikat, 1965 <i>United States of America, 1965</i>
Latar Belakang Pendidikan <i>Educational Background</i>	- Sarjana Teknik Nuklir dari Northwestern University, Amerika Serikat - MBA, University of Chicago, Amerika Serikat <i>- Bachelor of Science in Nuclear Engineering, Northwestern University, USA</i> <i>- MBA from University of Chicago, USA</i>
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	- Investment Banking Analyst-Corporate Finance, Bankers Trust Amerika Serikat (1994-1997) - Associate bidang Investment Banking-Corporate Finance, Deutsche Bank Singapore (1997-1998) - Head of Southeast Asia Corporate Finance, Merrill Lynch Singapore (2004-2009) - Managing Director, Merrill Lynch Singapore (2006-2009) - Principal, Developing Natural Resource Concessions in Indonesia (2009-2012) - Financial Advisor, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (2012-sekarang) <i>- Investment Banking Analyst - Corporate Finance, Bankers Trust, USA (1994-1997)</i> <i>- Associate, Investment Banking-Corporate Finance, Deutsche Bank Singapore (1997-1998)</i> <i>- Head of Southeast Asia Corporate Finance, Merrill Lynch Singapore (2004-2009)</i> <i>- Managing Director, Merrill Lynch Singapore (2006-2009)</i> <i>- Principal, Developing Natural Resource Concessions in Indonesia (2009-2012)</i> <i>- Financial Advisor, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (2012-present)</i>
Riwayat Jabatan <i>History of Position</i>	Komisaris (sejak 2015) <i>Commissioner (since 2015)</i>
- Dasar Hukum Penunjukkan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Diangkat sebagai Komisaris sejak tanggal 30 April 2015 berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014. <i>Appointed as Commissioner since April 30, 2015 based on the Resolution of the Company's 2014 Annual General Meeting of Shareholders.</i>
- Jabatan Rangkap <i>Concurrent Position</i>	Rangkap jabatan tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. <i>Concurrent position does not violate the Financial Service Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding The Board of Directors and The Board of Commissioners of a Public Company.</i>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliated Relationship</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi atau pemegang saham utama. <i>Is not affiliated with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors or the majority shareholder.</i>
Domisili <i>Domicile</i>	DKI Jakarta <i>DKI Jakarta</i>
Jumlah Kepemilikan Saham BPF1 <i>BPF1 Share Ownership</i>	- -

Profil Direksi

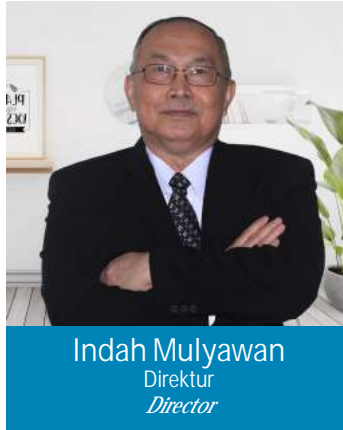
Board of Directors Profiles



Markus Dinarto Pranoto

Direktur Utama
President Director

Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia <i>Indonesian</i>
Tempat & Tahun Lahir <i>Place & Year of Birth</i>	Semarang, Jawa Tengah, 1951 <i>Semarang, Central Java, 1951</i>
Latar Belakang Pendidikan <i>Educational Background</i>	Sarjana Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang-Jawa Tengah, 1975 <i>Bachelor of Economics, Diponegoro University, Semarang-Central Java, 1975</i>
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Lebih dari 12 tahun sebagai Consumer Finance Manager di beberapa perusahaan pembiayaan - Manager Pemasaran, PT Bankers Trust (1988-1994) - Direktur, PT Bina Multi Finance (1994-2000) - Direktur, PT ANJ Finance (2000 - 2004) - Direktur, PT Batavia Prosperindo Finance (2004-2011) - Komisaris Utama, PT Malacca Trust Wuwungan Insurance (2011-sekarang) - Komisaris Utama, PT Batavia Prosperindo Trans (2018-sekarang) <p><i>- More than 12 years as Consumer Finance Manager at several multifinance companies</i> <i>- Marketing Manager, PT Bankers Trust (1988-1994)</i> <i>- Director, PT Bina Multi Finance (1994-2000)</i> <i>- Director, PT ANJ Finance (2000-2004)</i> <i>- Director, PT Batavia Prosperindo Finance (2004-2011)</i> <i>- President Commissioner, PT Malacca Trust Wuwungan Insurance (2011-present)</i> <i>- President Commissioner, PT Batavia Prosperindo Trans (2018-present)</i></p>
Riwayat Jabatan <i>History of Position</i>	Direktur Utama (sejak 2011) <i>President Director (since 2011)</i>
- Dasar Hukum Penunjukkan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Diangkat sebagai Direktur Utama sejak tanggal 21 September 2011 berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2010. <i>Appointed as President Director since September 21, 2011 based on the Resolution of the Company's 2010 Annual General Meeting of Shareholders.</i>
- Jabatan Rangkap <i>Concurrent Position</i>	Rangkap jabatan tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. <i>Concurrent position does not violate the Financial Service Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding The Board of Directors and The Board of Commissioners of a Public Company.</i>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliated Relationship</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya atau pemegang saham utama. <i>Is not affiliated with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors or the majority shareholder.</i>
Domisili <i>Domicile</i>	DKI Jakarta <i>DKI Jakarta</i>
Jumlah Kepemilikan Saham BPF1 <i>BPF1 Share Ownership</i>	- -



Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia <i>Indonesian</i>
Tempat & Tahun Lahir <i>Place & Year of Birth</i>	Lampung, 1960 <i>Lampung, 1960</i>
Latar Belakang Pendidikan <i>Educational Background</i>	Akademi Akuntansi, Trisakti, Jakarta (1983) <i>Trisakti Accounting Academy, Jakarta (1983)</i>
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	<ul style="list-style-type: none"> - PT Intan Nusamas Leasing (1986-1992) - Direktur, PT Intan Nusamas Leasing (1992-1994) - Kepala Bagian Car Financing, PT Bank Bira Tbk. (1994-1999) - Kepala Divisi Akuntansi dan Keuangan, PT Batavia Prosperindo Finance (1999-2008) - Direktur Akuntansi dan Keuangan (Tidak Terafiliasi), PT Batavia Prosperindo Finance (2008-2018) <ul style="list-style-type: none"> - <i>PT Intan Nusamas Leasing (1986-1992)</i> - <i>Director, PT Intan Nusamas Leasing (1992-1994)</i> - <i>Head of Car Financing Unit, PT Bank Bira Tbk (1994-1999)</i> - <i>Head of Accounting and Finance Division, PT Batavia Prosperindo Finance (1999-2008)</i> - <i>Director Accounting and Finance (Non-Affiliated), PT Batavia Prosperindo Finance (2008-2018)</i>
Riwayat Jabatan <i>History of Position</i>	Direktur (sejak 2018) <i>Director (since 2018)</i>
- Dasar Hukum Penunjukkan <i>Legal Basis of Appointment</i>	<p>Diangkat sebagai Direktur sejak tanggal 4 Mei 2018 berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017.</p> <p><i>Appointed as Director since May 4, 2018 based on the Resolution of the Company's 2017 Annual General Meeting of Shareholders.</i></p>
- Jabatan Rangkap <i>Concurrent Position</i>	<p>Rangkap jabatan tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p><i>Concurrent position does not violate the Financial Service Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding The Board of Directors and The Board of Commissioners of a Public Company.</i></p>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliated Relationship</i>	<p>Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya atau pemegang saham utama.</p> <p><i>Is not affiliated with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors or the majority shareholder.</i></p>
Domisili <i>Domicile</i>	Depok, Jawa Barat <i>Depok, West Java</i>
Jumlah Kepemilikan Saham BPFII <i>BPFII Share Ownership</i>	- -



Jasin Hermawan
Direktur (Tidak Terafiliasi)
Director (Non-Affiliated)

Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia <i>Indonesian</i>
Tempat & Tahun Lahir <i>Place & Year of Birth</i>	Jakarta, 1966 <i>Jakarta, 1966</i>
Latar Belakang Pendidikan <i>Educational Background</i>	Sarjana Manajemen, STIE Indonesia (1993) <i>Bachelor degree in Management, STIE Indonesia (1993)</i>
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sales Otomotif, PT Karunia Mobilindo dan PT Katana Furindo (1988-1993) - Purchasing Staff, PT Indorama Synthetics Tbk. (1993-1996) - Manager Marketing & Operation, PT Bina Multi Finance (1996-2004) - Kepala Divisi Credit Review & Operation, PT Batavia Prosperindo Finance (2004-2015) - Direktur, PT Batavia Prosperindo Finance (2015-2018) <p><i>- Automotive Sales, PT Karunia Mobilindo and PT Katana Furindo (1988-1993)</i> <i>- Purchasing Staff, PT Indorama Synthetics Tbk. (1993-1996)</i> <i>- Marketing & Operation Manager, PT Bina Multi Finance (1996-2004)</i> <i>- Division Head Credit Review & Operation, PT Batavia Prosperindo Finance (2004-2015)</i> <i>- Director, PT Batavia Prosperindo Finance (2015-2018)</i></p>
Riwayat Jabatan <i>History of Position</i>	Direktur (Tidak Terafiliasi) (sejak 2018) <i>Director (Non Affiliated)(since 2018)</i>
- Dasar Hukum Penunjukan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Diangkat sebagai Direktur (Tidak Terafiliasi) sejak tanggal 4 Mei 2018 berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017. <i>Appointed as Director (Non Affiliated) since May 4, 2018 based on the Resolution of the Company's 2017 Annual General Meeting of Shareholders.</i>
- Jabatan Rangkap <i>Concurrent Position</i>	Rangkap jabatan tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. <i>Concurrent position does not violate the Financial Service Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding The Board of Directors and The Board of Commissioners of a Public Company.</i>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliated Relationship</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya atau pemegang saham utama. <i>Is not affiliated with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors or the majority shareholder.</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Tangerang, Banten <i>Tangerang, Banten</i>
Jumlah Kepemilikan Saham BPF1 <i>BPF1 Share Ownership</i>	-

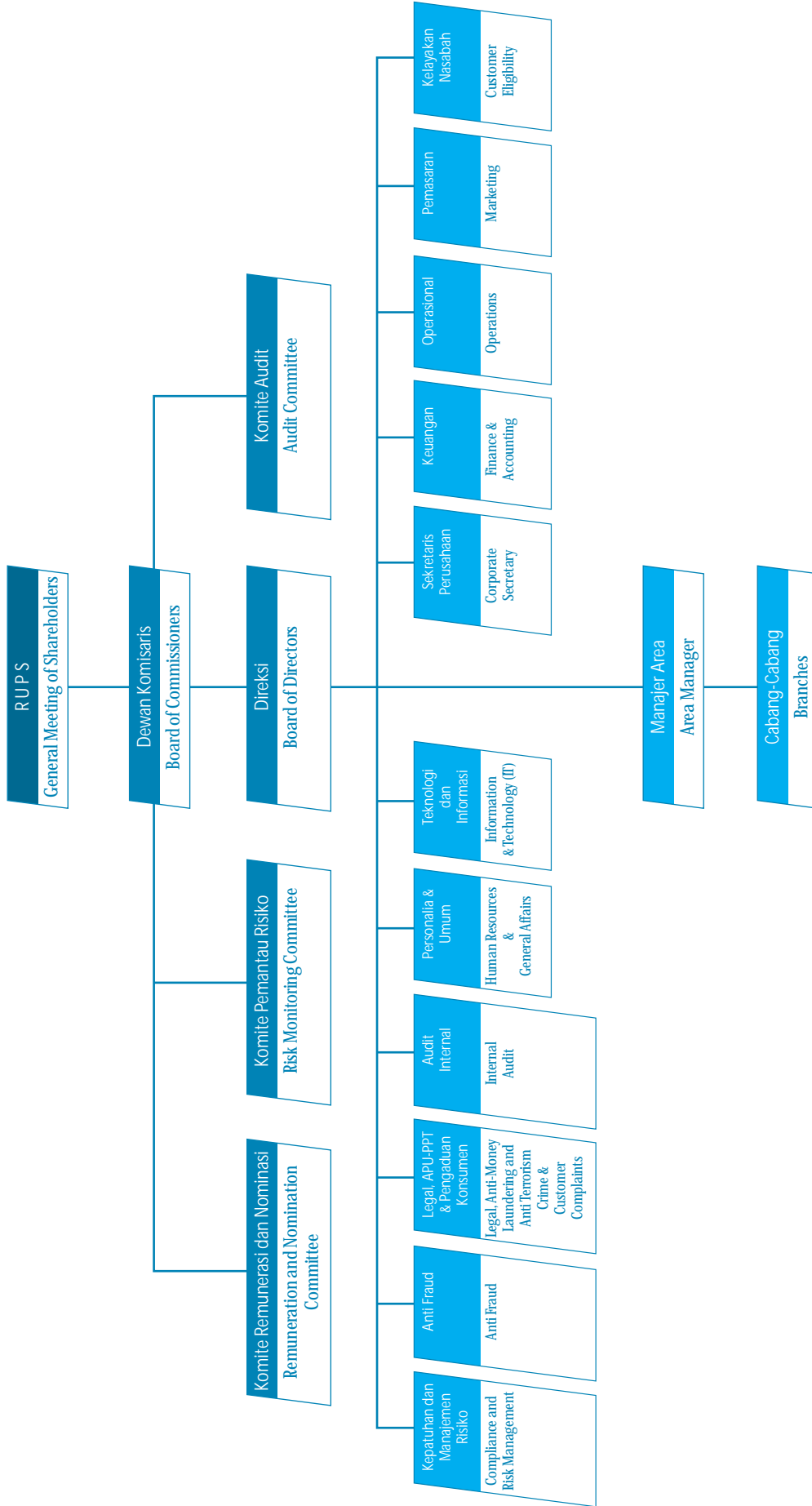


Hady Sutiono
Direktur
Director

Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia <i>Indonesian</i>
Tempat & Tahun Lahir <i>Place & Year of Birth</i>	Jakarta, 1965 <i>Jakarta, 1965</i>
Latar Belakang Pendidikan <i>Educational Background</i>	- Diploma Akuntansi, STIE Indonesia (1987) - Sarjana Manajemen, Universitas Trisakti Jakarta (1996) - <i>Diploma degree in Accounting, STIE Indonesia (1987)</i> - <i>Bachelor of Management, Trisakti University, Jakarta (1996)</i>
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	- Credit Marketing Officer, PT Astra Sedaya Finance (1990-1994) - Marketing Head, PT Astra Sedaya Finance (1994-1995) - Account Acquisition Head-Branch, PT Astra Sedaya Finance (1995-1997) - Assistant Marketing Head ASMO Finance-DKI Jakarta, PT Astra Sedaya Finance (1997) - Branch Manager, PT Rama Multi Finance (1997-1998) - Direktur, PT Rama Multi Finance (1998-2016) - Direktur, PT Ajikarya Perkasa Pratama (2001-2008) - Vice President, PT Pan Pacific Oto Finance (2005-2013) - Kepala Divisi Marketing, PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. (2014-2016) - <i>Credit Marketing Officer, PT Astra Sedaya Finance (1990-1994)</i> - <i>Marketing Head, PT Astra Sedaya Finance (1994-1995)</i> - <i>Account Acquisition Head-Branch, PT Astra Sedaya Finance (1995-1997)</i> - <i>Assistant Marketing Head ASMO Finance-DKI Jakarta of PT Astra Sedaya Finance (1997)</i> - <i>Branch Manager, PT Rama Multi Finance (1997-1998)</i> - <i>Director, PT Rama Multi Finance (1998-2016)</i> - <i>Director, PT Ajikarya Perkasa Pratama (2001-2008)</i> - <i>Vice President, PT Pan Pacific Oto Finance (2005-2013)</i> - <i>Division Head-Marketing, PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. (2014-2016)</i>
Riwayat Jabatan <i>History of Position</i>	Direktur (sejak 2016) <i>Director (since 2016)</i>
- Dasar Hukum Penunjukkan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Diangkat sebagai Direktur sejak tanggal 19 Desember 2016 berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015. <i>Appointed as Director since December 19, 2016 based on the Resolution of the Company's 2015 Annual General Meeting of Shareholders.</i>
- Jabatan Rangkap <i>Concurrent Position</i>	Rangkap jabatan tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. <i>Concurrent position does not violate the Financial Service Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding The Board of Directors and The Board of Commissioners of a Public Company.</i>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliated Relationship</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya atau pemegang saham utama. <i>Is not affiliated with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors or the majority shareholder.</i>
Domisili <i>Domicile</i>	DKI Jakarta <i>DKI Jakarta</i>
Jumlah Kepemilikan Saham BPF1 <i>BPF1 Share Ownership</i>	- -

Struktur Organisasi

Organization Structure



Informasi Saham dan Obligasi

Shares and Bonds Information

Kronologi Saham *Shares Chronology*

BPF resmi menjadi perusahaan publik setelah melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering* – IPO) pada tanggal 1 Juni 2009. Saham BPF sebanyak 450.000.000 lembar dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dengan kode saham BPF1. Informasi mengenai kronologi penerbitan dan pencatatan saham serta surat berharga BPF lainnya adalah sebagai berikut:

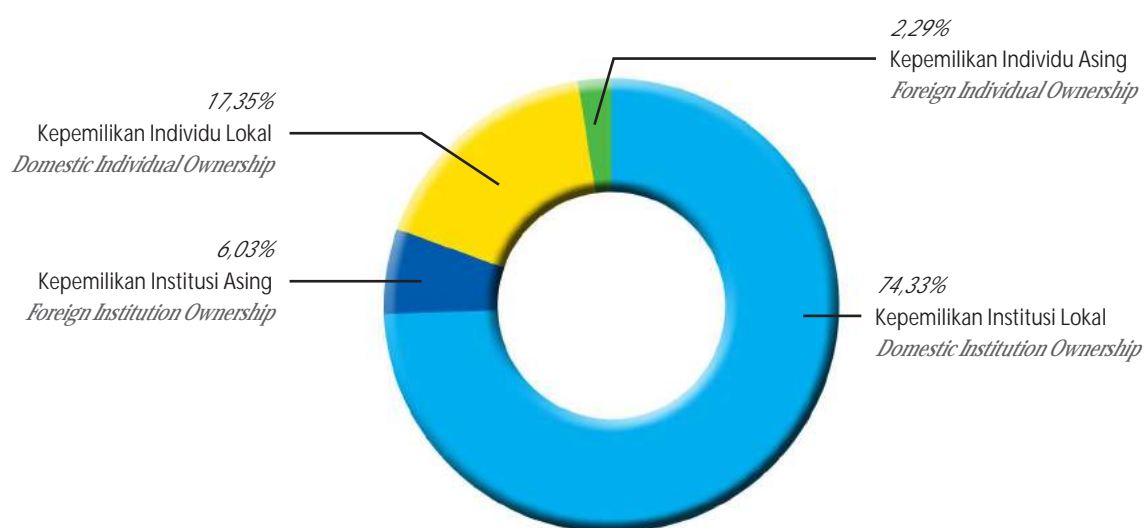
BPF officially became a public company after it held its Initial Public Offering (IPO) on June 1, 2009. BPF's shares totalling 450,000,000 shares were listed on the Jakarta Stock Exchange as BPF1. Information on the Company's share listing chronology and listing of BPF's other securities is as follows:

Tanggal Pencatatan <i>Date of Listing</i>	Penerbitan Saham <i>Shares Listing</i>			Jumlah Modal Disetor <i>Issued and Fully Paid Capital</i>	
	Keterangan <i>Description</i>	Jumlah Saham <i>No. of Shares</i>	Nominal (dalam Rp) <i>Value (in IDR)</i>	Saham <i>Shares</i>	Nominal (dalam Rp) <i>Value (in IDR)</i>
1 Jun 2009	Penawaran Saham Perdana di Bursa Efek Indonesia, kode saham BPF1 <i>Initial Public Offering on the Indonesia Stock Exchange, share code BPF1</i>	450.000.000	45.000.000.000	1.000.000.000	100.000.000.000
30 Des 2014	Penawaran Umum Terbatas I <i>Rights Issue I</i>	360.627.100	36.062.710.000	1.360.627.100	136.062.710.000
20 Mar 2017	Penawaran Umum Terbatas II <i>Rights Issue II</i>	221.962.000	63.037.208.000	1.582.589.100	158.258.910.000
26 Mar 2018	Penawaran Umum Terbatas III <i>Rights Issue III</i>	200.074.475	100.037.237.500	1.782.663.575	178.266.357.500

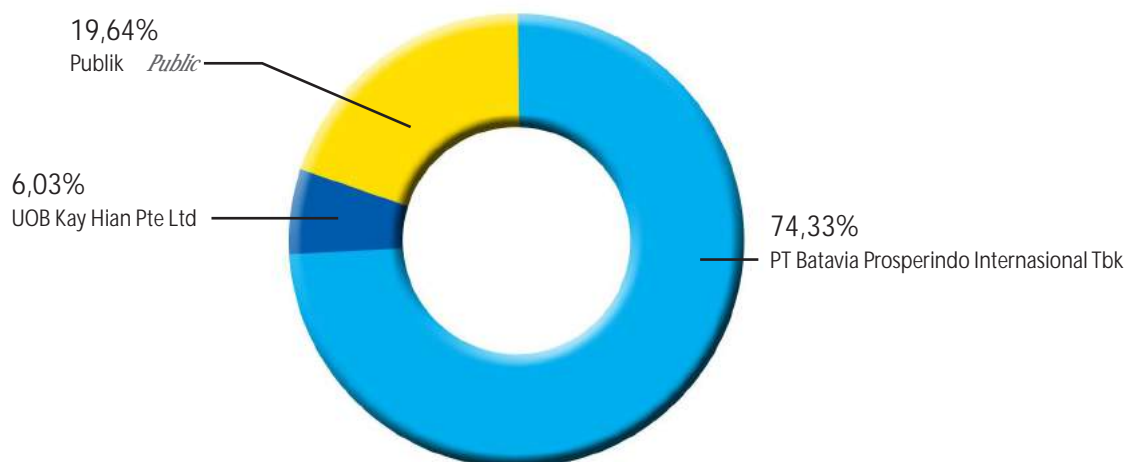
Informasi Kepemilikan Saham *Shareholders Information*

Komposisi Kepemilikan Saham 2020
2020 Shareholders Composition

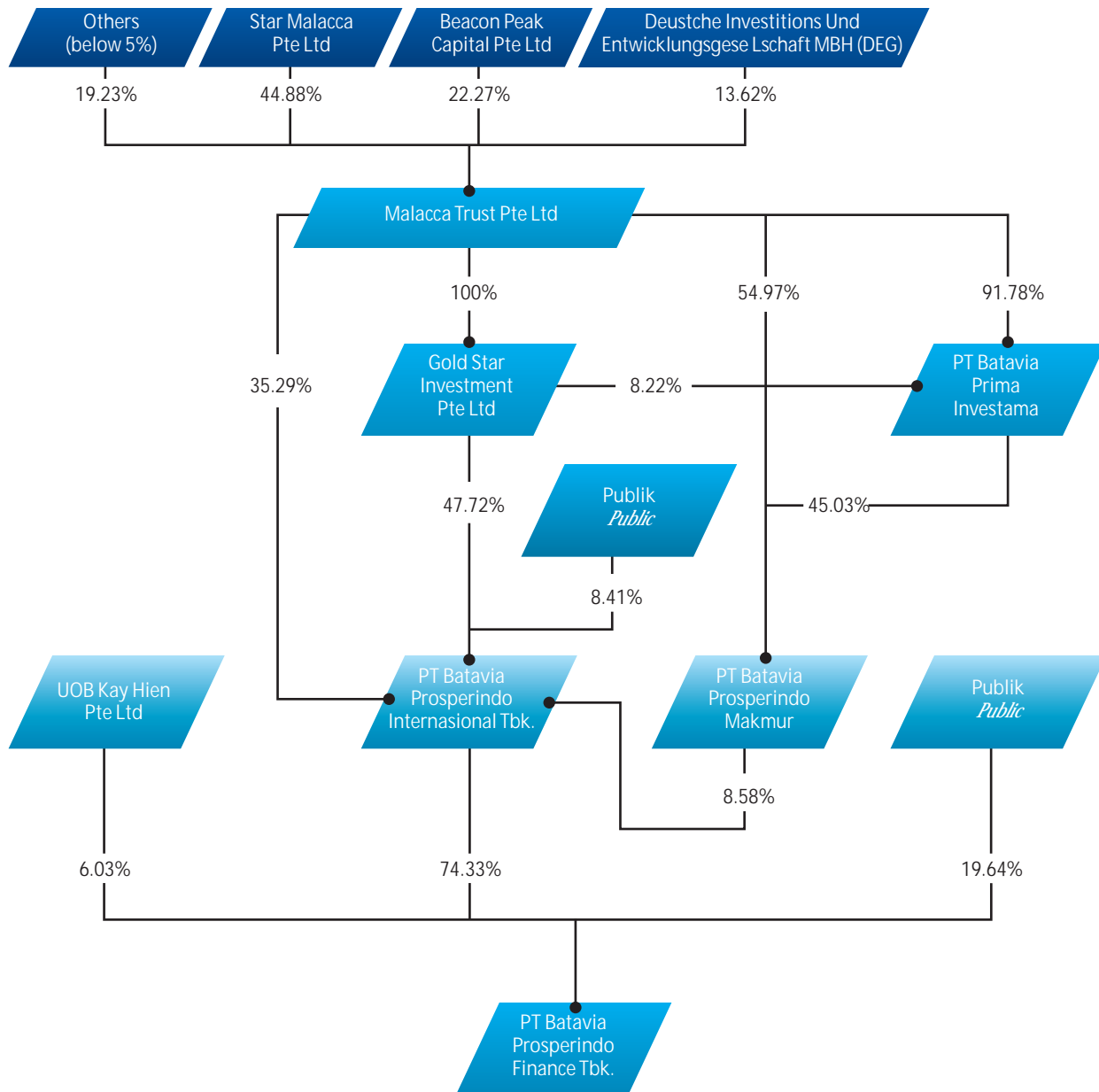
Kepemilikan Institusi Lokal	<i>Domestic Institution Ownership</i>	74,33%
Kepemilikan Institusi Asing	<i>Foreign Institution Ownership</i>	6,03%
Kepemilikan Individu Lokal	<i>Domestic Individual Ownership</i>	17,35%
Kepemilikan Individu Asing	<i>Foreign Individual Ownership</i>	2,29%



Nama Pemegang Saham <i>Name of Shareholder</i>	Saham <i>Shares</i>	Nilai dalam Rp <i>Value in IDR</i>	Persentase Kepemilikan <i>Percentage of Ownership</i>
PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk	1.324.988.580	132.498.858.000	74,33%
UOB Kay Hian Pte Ltd	107.575.819	10.757.581.900	6,03%
Publik <i>Public</i>	350.099.176	35.009.917.600	19,64%
Total	1.782.663.575	178.266.357.500	100,00%



Struktur Kepemilikan Saham *Shareholders Structure*



Pengendali hingga pemegang saham individu (Ultimate Beneficial Owner) BPF adalah Kartini Jusup melalui Star Malacca Pte Ltd.
The Ultimate Beneficial Owner of BPF is Kartini Jusup through Star Malacca Pte Ltd.

Informasi Obligasi *Bonds Information*

BPF pertama kali menerbitkan obligasi pada tahun 2013, yaitu "Obligasi Batavia Prosperindo Finance I Tahun 2013" dengan nilai total sebesar Rp 300 miliar. Informasi mengenai kronologi penerbitan obligasi BPF adalah sebagai berikut:

BPF issued its first bonds in 2013, namely "Batavia Prosperindo Finance Bonds I Year 2013," with a total value of IDR 300 billion. The chronology and other information on BPF bonds are as follows:

No	Keterangan <i>Description</i>	Seri <i>Series</i>	Jumlah Nominal (Rp Juta) <i>Amount (IDR Million)</i>	Tingkat Bunga <i>Interest Rate</i>	Jangka Waktu <i>Tenor</i>	Jatuh Tempo <i>Maturity Date</i>
1	Obligasi Batavia Prosperindo Finance I Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap <i>Batavia Prosperindo Finance Bonds I Year 2013 with fixed interest rate</i>	A	20.000	9,25%	370 hari kalender <i>370 calendar days</i>	13 Juli 2014 <i>July 13, 2014</i>
2	Obligasi Batavia Prosperindo Finance I Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap <i>Batavia Prosperindo Finance Bonds I Year 2013 with fixed interest rate</i>	B	50.000	9,50%	2 (dua) tahun <i>2 years</i>	3 Juli 2015 <i>July 3, 2015</i>
3	Obligasi Batavia Prosperindo Finance I Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap <i>Batavia Prosperindo Finance Bonds I Year 2013 with fixed interest rate</i>	C	230.000	10,75%	3 (tiga) tahun <i>3 years</i>	3 Juli 2016 <i>July 3, 2016</i>
4	Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance I Tahap I Tahun 2016 <i>Batavia Prosperindo Finance Sustainable Bonds I Phase I Year 2016</i>	A	30.000	10,50%	370 hari kalender <i>370 calendar days</i>	8 Juli 2017 <i>July 8, 2017</i>
5	Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016 <i>Batavia Prosperindo Finance Sustainable Bonds I Phase I Year 2016</i>	B	170.000	11,00%	2 (dua) tahun <i>2 years</i>	28 Juni 2018 <i>June 28, 2018</i>
6	Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2017 <i>Batavia Prosperindo Finance Sustainable Bonds I Phase II Year 2017</i>	-	300.000	11,00%	3 (tiga) tahun <i>3 years</i>	5 Mei 2020 <i>May 5, 2020</i>
7	Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2018 <i>Batavia Prosperindo Finance Sustainable Bonds II Phase I Year 2018</i>	-	300.000	11,00%	3 (tiga) tahun <i>3 years</i>	25 Juni 2021 <i>June 25, 2021</i>
8	Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2020 <i>Batavia Prosperindo Finance Sustainable Bonds II Phase II Year 2020</i>	-	200.000	9,70%	370 hari kalender <i>370 calendar days</i>	14 Mei 2021 <i>May 14, 2021</i>

Komposisi Karyawan

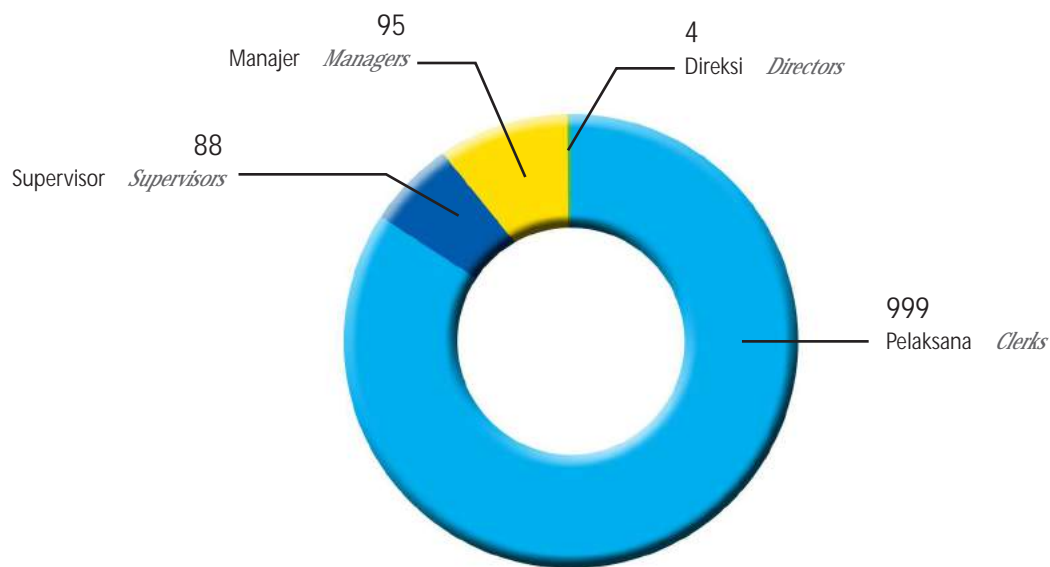
Employee Composition

Pada akhir tahun finansial 2020, jumlah total karyawan BPF adalah sebanyak 1.186 orang. Komposisi karyawan BPF berdasarkan jabatan, latar belakang pendidikan, jenis kelamin, serta usia adalah sebagai berikut:

By the end of 2020 financial year, the total number of BPF's employees was 1,186. The compositions of BPF's employees according to position, educational background, gender and age are as follows:

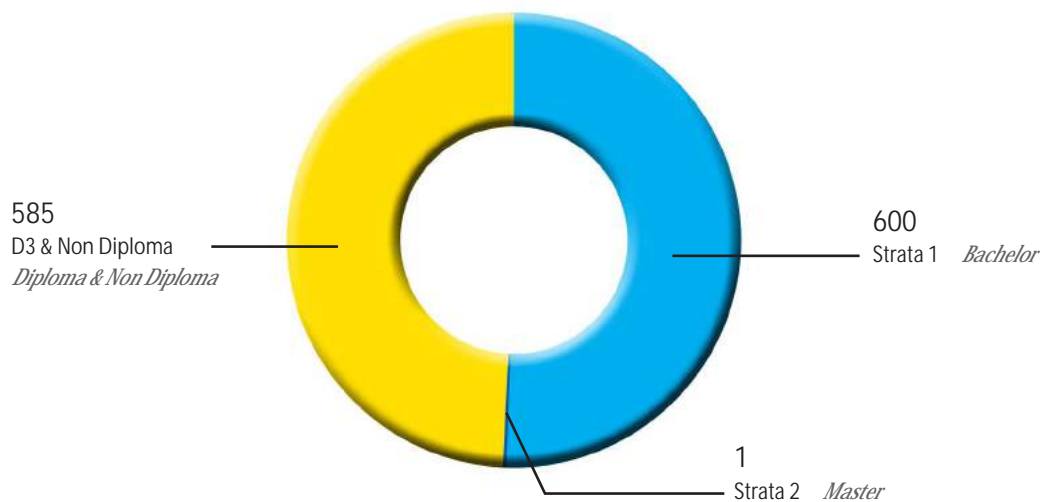
Komposisi Karyawan Berdasarkan Jabatan

Employee Composition Based on Position

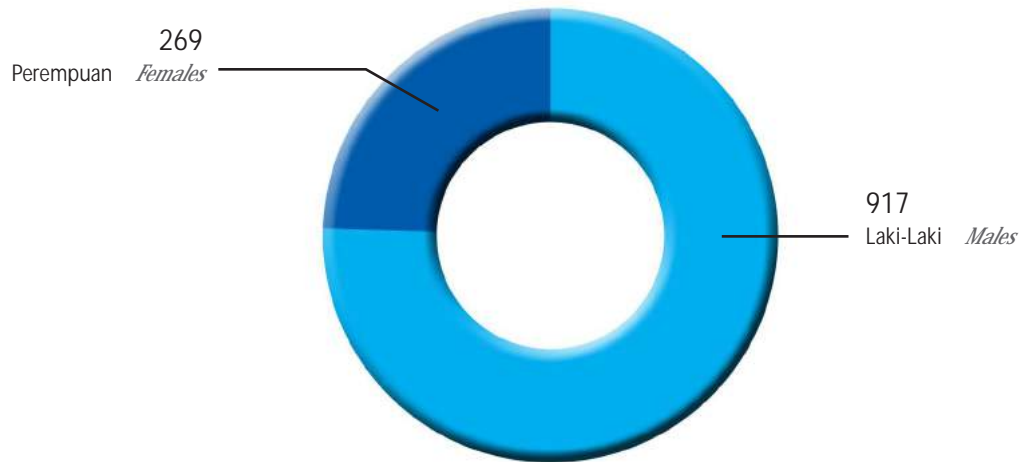


Komposisi Karyawan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

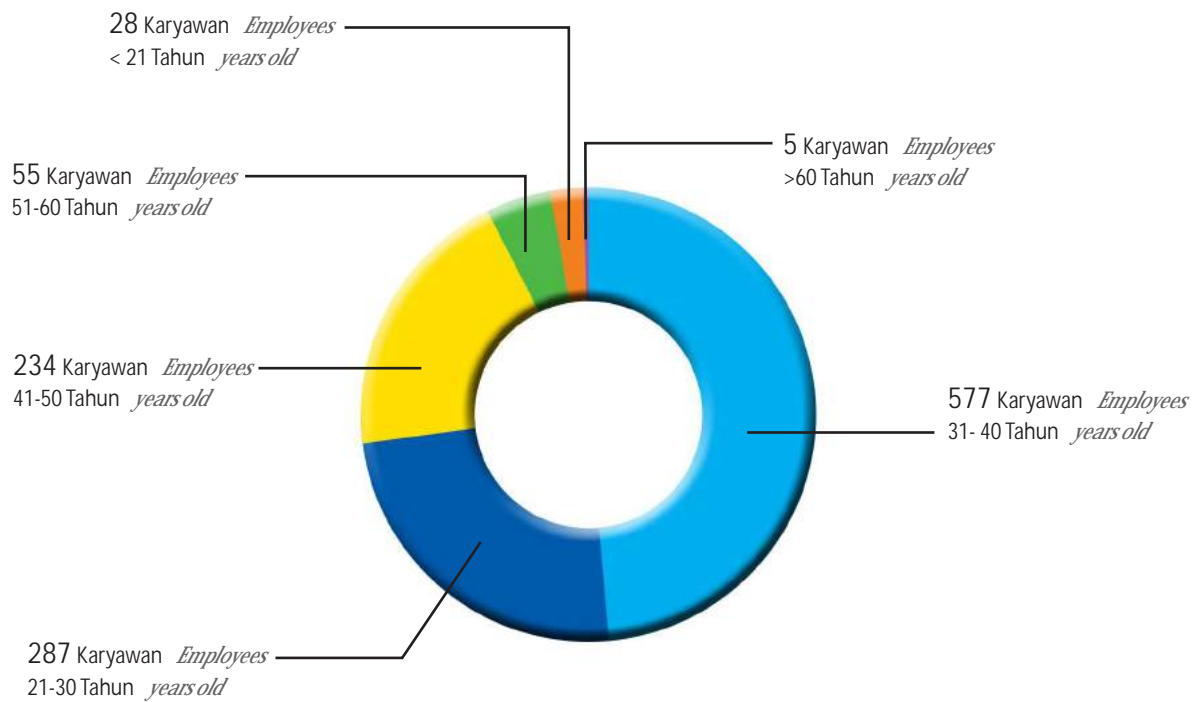
Employee Composition Based on Educational Background



Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin *Employee Composition Based on Gender*



Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia *Employee Composition Based on Age*



Perusahaan Induk *Parent Company*

PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk.

Kepemilikan Saham *Share Ownership* 74,33%

Tahun Pendirian *Year of Establishment* 1998

Bidang Usaha *Line of Business* Jasa konsultasi bisnis dan manajemen
Business and management consultation service

Alamat Kantor Pusat *Head Office Address*

Chase Plaza 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920 Indonesia
Telepon Telephone: +62 21 5200180
Fax Facsimile : +62 21 5200227
Website : <http://www.bpinternasional.com>

Lembaga dan Profesi Penunjang

Supporting Professional Institutions

Lembaga Penunjang Pasar Modal *Capital Market Institution*

Bursa Efek *Stock Exchange*
Bursa Efek Indonesia *Indonesia Stock Exchange*
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel: +6221 5150515
Fax: +6221 5150330
Toll free: 0800-100-9000 (nasional)
Email: callcenter@idx.co.id

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian *Securities Depository and Settlement Body*

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel: +6221 5152855
Fax: +6221 52991199
Toll free: 0800-186-5734
Email: helpdesk@ksei.co.id

Biro Administrasi Efek *Securities Administrator*

PT Adimitra Transferindo
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading
Jakarta 14250
Tel: +6221 2974 5222
Fax: +6221 2928 9961
Email: opr@adimitra-jk.co.id

Kantor Akuntan Publik *Public Accounting Firm*

Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
(Crowe Indonesia)
Tower Cyber 2, Lt. 21 Unit F
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5
Jakarta 12950, Indonesia
Tel: +6221 2553 5699/ +6221 2553 9200
Fax: +6221 2553 5699
Web: www.crowe.id

Penghargaan Awards



Setiap tahun BPF selalu menerima berbagai penghargaan dan pengakuan dari institusi-institusi terkemuka di Indonesia atas prestasi dan pencapaiannya, kecuali untuk tahun 2020, ketika Indonesia, seperti negara-negara lainnya di dunia, sedang dilanda pandemi Covid-19. Namun demikian, dapat dicatat bahwa majalah Infobank edisi No. 508 bulan Agustus 2020 memuat artikel mengenai Rating Multifinance 2020 dan menetapkan predikat "Sangat Bagus" bagi BPF untuk kategori perusahaan pembiayaan dengan aset Rp 1 triliun - < Rp 5 triliun.

Every year BPF received many awards and recognitions from prestigious institutions in Indonesia for its achievements, except in 2020, when Indonesia, like other countries in the world, was being hit by the Covid-19 pandemic. However, it is worth noting that Infobank Magazine, No. 508 edition dated August 2020 carried an article on 2020 Multifinance Co. Rating and rated BPF as "Very Good" for the category of multifinance companies with assets of IDR 1 trillion - < IDR 5 trillion.

A person is standing on a sandy beach, preparing for a parachute jump. The parachute is yellow with blue accents. The background features a clear blue sky with a bright sun and scattered white clouds, and a turquoise ocean with gentle waves. The person is wearing a dark shirt, shorts, and a yellow helmet.

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management's Analysis and Discussion

Pandemi Covid-19 telah mengubah berbagai gaya hidup manusia sedemikian drastisnya di seluruh dunia. Dampak dari ancaman tingkat kematian yang begitu tinggi dan tingkat penularan yang begitu cepat dalam waktu singkat, yang ditanggapi dengan kebijakan larangan bepergian dan pembatasan sosial berskala besar, telah mengguncang perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 terjun ke -2,07%, dari sebelumnya 5,02% pada tahun 2019 dan 5,17% pada tahun 2018. Sebagai perbandingan, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dari beberapa negara mitra dagang utama Indonesia pun merasakan imbas signifikan dari pandemi, seperti Amerika Serikat yang mencapai -3,5%, Singapura mencapai -5,8%, Korea Selatan mencapai -1,0%, Hong Kong mencapai -6,1%, Uni Eropa mencapai -6,4%; meskipun ada yang tetap berhasil mencetak angka pertumbuhan positif seperti Tiongkok yang mencapai 2,3% dan Vietnam yang mencapai 2,9% (data dari BPS-Badan Pusat Statistik).

Sejak diberitakannya kasus-kasus Covid-19 pertama di Indonesia dan dikeluarkannya kebijakan Pemerintah terkait relaksasi pembayaran pinjaman, BPF menghentikan kegiatan penjualannya selama tiga bulan dan mengalihkan fokus pada pelaksanaan restrukturisasi kredit para nasabahnya yang terkena dampak pandemi. Perusahaan kembali menjalankan aktivitas penjualannya pada bulan Juni 2020, setelah observasi dan analisis cermat, serta setelah memastikan kelancaran *cashflow* dan kesehatan keuangan Perusahaan.

BPF menawarkan dua skema restrukturisasi pembayaran bagi para nasabahnya yang terkena imbas pandemi, yaitu penundaan pembayaran sama sekali dengan nilai bunga yang diakumulasi atau pembayaran cicilan bunga saja. Kedua pilihan tersebut ditawarkan dengan pilihan jangka waktu 3 bulan dan 6 bulan.

Di tahun 2020, restrukturisasi pembayaran yang diberikan BPF kepada nasabahnya mencapai sekitar 35% dari total pembiayaan atau senilai Rp 595,12 miliar. Dari jumlah ini, sekitar 50%-nya atau sebesar Rp 290 miliar memilih skema pembayaran cicilan bunga saja. Dari total restrukturisasi di tahun 2020, hanya sekitar 30% atau Rp 178,30 miliar yang masih berlanjut ke tahun 2021.

Sebagai hasil pencapaian kinerja tahun 2020, BPF mencatatkan pencapaian total pembiayaan BPF sebesar Rp 835,85 miliar, total pendapatan sebesar Rp 354,02 miliar, dan laba neto sebesar Rp 41,26 miliar. Rasio leverage efektif Perusahaan juga terjaga dengan baik di 0,85 pada tahun 2020.

Sesuai rencana semula, BPF juga menerbitkan obligasi berkelanjutan senilai Rp 200 miliar pada bulan Mei 2020, yang mendapatkan tanggapan sangat positif. Perusahaan juga telah melunasi obligasi senilai Rp 300 miliar yang jatuh tempo pada bulan Mei 2020.

Sebanyak 7 kantor cabang baru BPF, yang sebagian di antaranya dibuka di penghujung tahun 2019, mulai efektif beroperasi pada tahun 2020. Kantor-kantor cabang baru ini berhasil memberikan kontribusi sebesar 3,42% dari total pembiayaan Perusahaan pada tahun 2020 atau senilai Rp 28,6 miliar.

The Covid-19 pandemic has drastically changed people's lifestyles around the world. The economy has been hit especially hard by the threat of such a high number of deaths and the rapid transmission rates in such short time, in addition to travel prohibitions and large-scale social restrictions policies.

Indonesia's economic growth plunged to -2.07% in 2020 from previously 5.02% in 2019 and 5.17% in 2018. As a comparison, the 2020 economic growth of several Indonesia's major trading partner countries also felt significant impacts from the pandemic, namely the United States at -3.5%, Singapore's at -5.8%, South Korea's at -1.0%, Hong Kong's at -6.1%, the European Union's at -6.4%; although there were those who still managed to score positive growth rates, such as China which reached 2.3% and Vietnam which reached 2.9% (data from BPS-Central Statistics Agency).

Since the first Covid-19 cases were reported in Indonesia and the announcement of the Government's policies regarding relaxation of customers' loan repayments, BPF stopped its sales activities for three months and shifted its focus to the implementation of credit restructuring offered to its customers affected by the pandemic. After careful observation and analysis, and ensuring the Company's smooth cash flows and its financial health, the Company resumed its sales activities in June 2020

BPF offered two payment restructuring schemes for its customers affected by the pandemic, namely total deferral of installment payment with interest amount being accumulated and payment of interest amount only. Both options were offered with a choice of terms of 3 and 6 months.

In 2020, the restructuring of payments provided by BPF to its customers was approximately 35% of the total financing or IDR 595.12 billion. Of this amount, around 50% or IDR 290 billion opted for the interest installment payment scheme. Of the total restructuring in 2020, only about 30% or IDR 178.30 billion was still carried on into 2021.

As a result of its 2020 performance achievement, BPF recorded total financing achievement of IDR 835.85 billion, total revenues of IDR 354.02 billion, and a net profit of IDR 41.26 billion. The Company's effective leverage ratio was also well maintained at 0.85 in 2020.

As originally planned, BPF also issued sustainable bonds worth IDR 200 billion in May 2020, which received very positive responses. The Company also paid off its bonds which matured in May 2020 worth IDR 300 billion.

A total of 7 new BPF branch offices, some of which had opened at the end of 2019, began operating effectively in 2020. These new branch offices managed to contribute 3.42% of the Company's total financing in 2020 or IDR 28.6 billion.

Tinjauan Kinerja Keuangan

Financial Performance Review

Berdasarkan laporan keuangan BPF untuk tahun finansial yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, telah diaudit dan diberikan penilaian wajar tanpa pengecualian oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahyo dan Rekan (Crowe Indonesia), berikut disajikan ringkasan dan pembahasannya:

Based on BPF's financial statements for the period ending December 31, 2020, audited by and was given an unqualified opinion by the Public Accounting Firm Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan (Crowe Indonesia), presented below is the summary and discussion:

Laporan Laba Rugi Statement of Profit or Loss

Dalam Jutaan Rupiah *In IDR Million*

	2020	2019	2018
Total penghasilan <i>Total revenues</i>	354.018	430.927	430.246
Total beban usaha <i>Total operating expenses</i>	(300.464)	(333.831)	(346.229)
Laba usaha <i>Income from operations</i>	53.554	97.096	84.017
Keuntungan divestasi investasi pada entitas asosiasi <i>Gain on divestment of investment in associates</i>	-	-	2.725
Bagian atas laba entitas asosiasi - neto <i>Share in profit of associate - net</i>	-	-	503
Laba sebelum beban pajak penghasilan <i>Income before income tax expense</i>	53.554	97.096	87.245
Beban pajak penghasilan - neto <i>Income tax expense - net</i>	(12.291)	(22.239)	(19.225)
Laba neto tahun berjalan <i>Net income for the year</i>	41.263	74.857	68.020

Laporan Laba Rugi 2020 BPF menunjukkan kinerja BPF yang positif dan tetap mampu menghasilkan laba usaha dalam situasi khusus pandemi Covid-19, meskipun tentunya ada penurunan dari pencapaian tahun-tahun sebelumnya. Laba usaha BPF turun 44,8% menjadi Rp 53,6 miliar dan laba neto tahun berjalan BPF turun 44,9% menjadi Rp 41,3 miliar.

BPF's 2020 Statement of Profit or Loss shows BPF's positive and still profit generating performance despite the Covid-19 pandemic unusual situation, even though there has been a decline from the previous years' achievements. BPF's income from operations fell 44.8% to IDR 53.6 billion and its net income for the year was down by 44.9% to IDR 41.3 billion.

Penghasilan

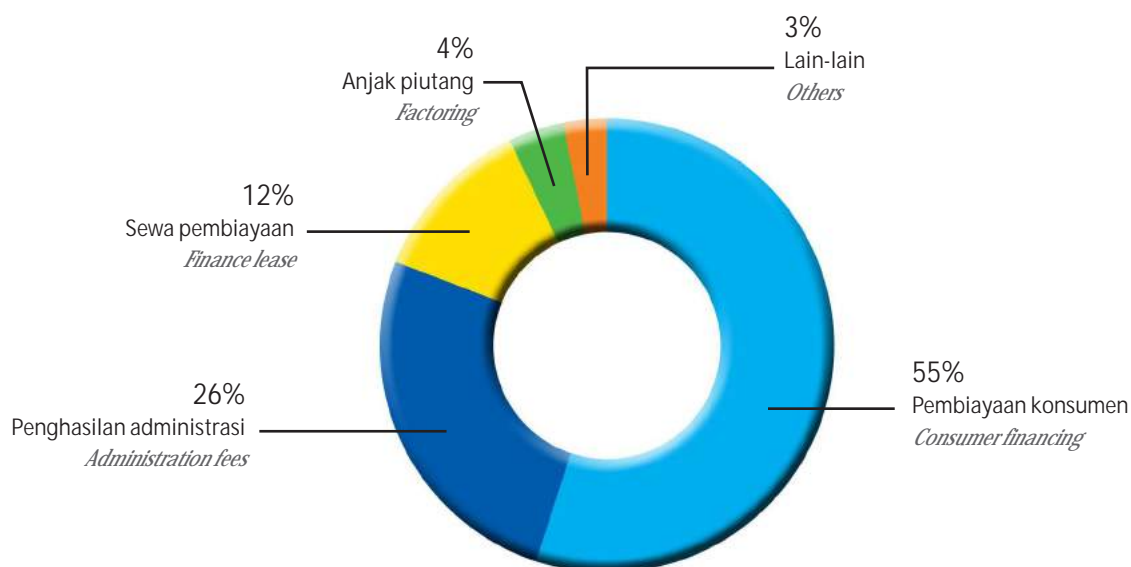
Penghasilan Perusahaan terdiri dari pembiayaan konsumen, penghasilan administrasi, sewa pembiayaan, anjak piutang, dan lain-lain. Total penghasilan turun 17,8% dari Rp 430,9 milyar di tahun 2019 menjadi Rp 354 milyar pada tahun 2020.

Revenues

The Company's revenues comprised of revenues from consumer financing, administration fees, financial lease, factoring, and others. Total revenues declined by 17.8% from IDR 430.9 billion in 2019 to IDR 354 billion in 2020.

Dalam Jutaan Rupiah *In IDR Million*

	2020	2019	2018
Pembiayaan konsumen <i>Consumer financing</i>	196.455	238.190	247.573
Penghasilan administrasi <i>Administration fees</i>	91.860	111.631	106.809
Sewa pembiayaan <i>Finance lease</i>	40.958	43.405	34.419
Anjak piutang <i>Factoring</i>	14.536	16.740	18.420
Lain-lain <i>Others</i>	10.209	20.961	23.025
Jumlah penghasilan <i>Total revenues</i>	354.018	430.927	430.246



Pembiayaan Konsumen

Selain dari menurunnya daya beli masyarakat, BPF juga menghentikan aktifitas penjualannya selama beberapa bulan di tahun 2020, keduanya disebabkan pandemi Covid-19. Karenanya, penghasilan dari segmen Pembiayaan Konsumen berkurang sebesar 17,5% dari Rp 238,2 milyar di tahun 2019 menjadi Rp 196,5 milyar di tahun 2020.

Consumer Financing

In addition to the decline in the people's purchasing power, BPF also temporarily ceased its sales activities for a few months in 2020, both due to Covid-19 pandemic. Hence, revenues from the Consumer Financing segment decreased by 17.5% from IDR 238.2 billion in 2019 to IDR 196.5 billion in 2020.

Penghasilan Administrasi

Karena menurunnya jumlah pembiayaan, maka Penghasilan Administrasi juga menurun dari Rp 111,6 milyar pada tahun 2019 menjadi Rp 91,9 milyar di tahun 2020, penurunan sebesar 17,7%.

Administrative Income

Due to the decrease in the number of financing, Administrative Income was down from IDR 111.6 billion in 2019 to IDR 91.9 billion in 2020, a decline of 17.7%.

Sewa Pembiayaan dan Anjak Piutang

Walaupun penghasilan dari kedua segmen ini menurun di tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya, namun penurunannya tidak teramat signifikan.

Finance Lease and Factoring

Although revenues from both segments declined in 2020 compared to the previous year, the decline was not too significant.

Pendapatan Lain-Lain

Penghasilan Lain-Lain menunjukkan penurunan sebesar 51,4% dari Rp 21 milyar di tahun 2019 menjadi Rp 10,2 milyar pada tahun 2020 disebabkan oleh menurunnya jumlah pemulhan piutang yang dihapus bukukan.

Other Income

Other revenues declined by 51.4% from IDR 21 billion in 2019 to IDR 10.2 billion in 2020 due to the decline in the written off receivables recovery.

Beban

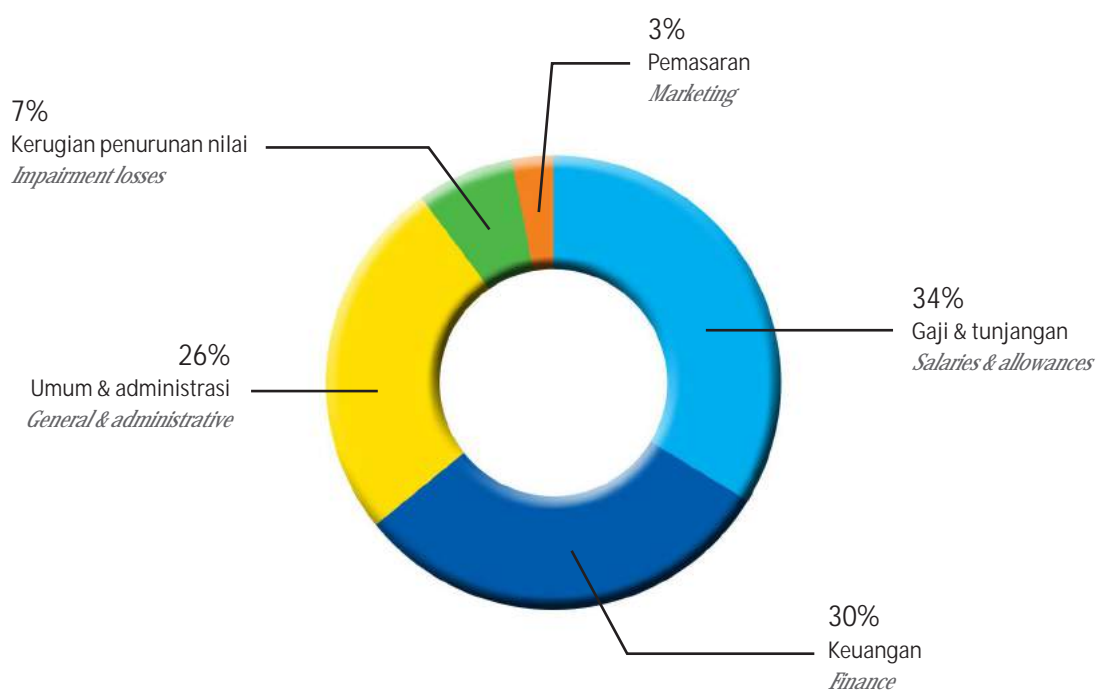
Beban usaha Perusahaan terdiri dari beban keuangan, gaji dan tunjangan, biaya umum dan administrasi, kerugian penurunan nilai dan beban pemasaran. Total beban usaha di tahun 2020 turun sebesar 10% dari Rp 333,8 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp 300,5 miliar di tahun 2020.

Expenses

The Company's expenses consisted of finance expenses, salaries and allowances, general and administrative expenses, impairment losses and marketing expenses. Total expenses decreased by 10% in 2020 from IDR 333.8 billion in 2019 to IDR 300.5 billion in 2020.

Dalam Jutaan Rupiah *In IDR Million*

	2020	2019	2018
Keuangan <i>Finance</i>	90.846	107.350	120.635
Gaji & tunjangan <i>Salaries & allowances</i>	100.348	98.970	91.318
Umum & administrasi <i>General & administrative</i>	78.713	81.075	76.319
Kerugian penurunan nilai <i>Impairment losses</i>	21.668	26.914	41.610
Beban pemasaran <i>Marketing</i>	8.889	19.522	16.347
Total beban usaha <i>Total operating expenses</i>	300.464	333.831	346.229



Keuangan

Meningkatnya secara signifikan pelunasan pinjaman bank berdampak kepada turunnya beban keuangan sebesar 15,4% dari Rp 107,4 miliar di tahun 2019 menjadi Rp 90,8 miliar pada tahun 2020.

Gaji & Tunjangan

Perusahaan menambah beberapa cabang baru di tahun 2020 disamping juga mengkonsolidasikan beberapa cabang lama. Gaji dan Tunjangan di tahun 2020 tidak mengalami perubahan yang berarti dibandingkan dengan tahun 2019.

Umum & Administrasi

Penurunan tipis sebesar 2,9% dalam biaya Umum dan Administrasi di tahun 2020.

Kerugian Penurunan Nilai

Kerugian Penurunan Nilai turun sebesar 19,3% dari Rp 26,9 miliar di tahun 2019 menjadi Rp 21,7 miliar di tahun 2020 yang merefleksikan keberhasilan BPF dalam menjaga level NPL nya dengan baik.

Pemasaran

Akun ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dari Rp 19,5 miliar di tahun 2019 menjadi Rp 8,9 miliar di tahun 2020, penurunan sebesar 54,4%. Ini disebabkan karena dihentikannya aktifitas pemasaran Perusahaan selama beberapa waktu di tahun tersebut karena pandemi Covid-19.

Laba Usaha & Laba Neto

Terjadi penurunan dalam Laba Usaha dan Laba Neto Perusahaan, masing-masing dengan 44,8% dan 44,9% pada tahun 2020 dibanding dengan tahun sebelumnya. Laba Usaha turun dari Rp 97,1 milyar di tahun 2019 menjadi Rp 53,6 milyar di tahun 2020, sedangkan Laba Neto turun dari Rp 74,9 milyar menjadi Rp 41,3 milyar. Hal ini terutama disebabkan oleh kejadian tak terduga Covid-19 yang berdampak luas terhadap kehidupan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.

Finance

The significant increase in bank loan repayments resulted in the reduction of finance expenses by 15.4% from IDR 107.4 billion in 2019 to IDR 90.8 billion in 2020.

Salaries & Allowances

The Company opened a few new branch offices in 2020 while also consolidated some existing ones. Salaries and Allowances in 2020 did not change significantly compared to 2019.

General & Administrative

A slight decrease of 2.9% in General and Administrative expenses in 2020.

Impairment Losses

Impairment losses decreased by 19.3% from IDR 26.9 billion in 2019 to IDR 21.7 billion in 2020 which reflected BPF's ability in maintaining its NPL level well.

Marketing

This account had a very significant decrease from IDR 19.5 billion in 2019 to IDR 8.9 billion in 2020, a decline of 54.4%. This was due to the absence of the Company's marketing activities for some time during the year because of Covid-19 pandemic.

Income from Operations & Net Income

There was a decline in both Income from Operations and Net Income, respectively by 44.8% and 44.9% in 2020 compared to the previous year. Income from Operations decreased from IDR 97.1 billion in 2019 to IDR 53.6 billion in 2020 whereas Net Income decreased from IDR 74.9 billion to IDR 41.3 billion. This was primarily caused by the unprecedented Covid-19 pandemic occurrence which caused widespread impacts to the people's lives, including their social and economic situation.

Dalam Jutaan Rupiah *In IDR Million*

	2020	2019	2018
Laba usaha <i>Income from operations</i>	53.554	97.096	84.017
Laba sebelum pajak penghasilan <i>Income before income tax expense</i>	53.554	97.096	87.245
Pajak penghasilan <i>Income taxes</i>	(12.291)	(22.239)	(19.225)
Laba neto tahun berjalan <i>Net income for the year</i>	41.263	74.857	68.020

Aset

Total Aset BPF pada akhir tahun 2020 adalah Rp1,47 triliun, turun 19.2% dari Total Aset tahun 2019 yang sebesar Rp1,82 triliun. Penurunan ini terutama terjadi pada akun-akun Piutang Sewa Pembiayaan (turun 14.5%), Piutang Pembiayaan Konsumen (turun 25%), dan Tagihan Anjak Piutang (turun 49.7%), dampak dari turunnya daya beli masyarakat dan absennya BPF dari aktifitas penjualan selama beberapa waktu di masa pandemi.

Perusahaan mencatat kenaikan sebesar 93.2% dalam akun Kas dan Setara Kas, dari Rp31,1 milyar pada tahun 2019 menjadi Rp60,1 milyar di tahun 2020 yang menunjukkan sehatnya kondisi keuangan Perusahaan.

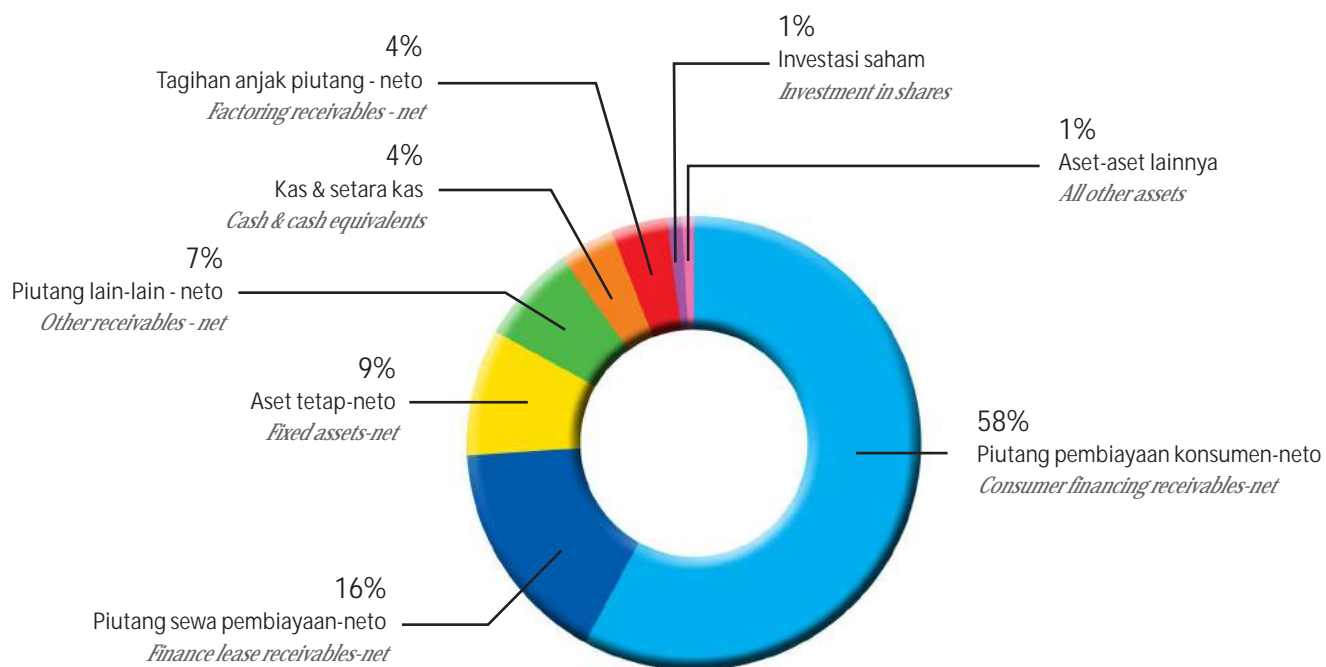
Assets

BPF's Total Assets at the end of 2020 was IDR 1.47 trillion, down 19.2% from Total Assets in 2019 of IDR 1.82 trillion. This decline was mainly caused by the decreases in the accounts of Finance Lease Receivables (down by 14.5%), Consumer Financing Receivables (down by 25%), and Factoring Receivables (down by 49.7%), as people's purchasing power declined and BPF's absence from sales activities for sometime during the pandemic.

The Company registered an increase of 93.2% in its Cash and Cash Equivalents account, from IDR 31.1 billion in 2019 to IDR 60.1 billion in 2020 which demonstrated the Company's healthy financial condition.

Dalam Jutaan Rupiah *In IDR Million*

	2020	2019	2018
Kas & setara kas <i>Cash & cash equivalents</i>	60.090	31.083	114.413
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya <i>Restricted time deposits</i>	500	500	500
Piutang sewa pembiayaan-neto <i>Finance lease receivables-net</i>	240.898	281.854	234.945
Piutang pembiayaan konsumen-neto <i>Consumer financing receivables-net</i>	849.061	1.132.423	1.134.009
Tagihan anjak piutang - neto <i>Factoring receivables - net</i>	66.302	131.900	80.400
Piutang lain-lain - neto <i>Other receivables - net</i>	100.018	86.223	115.543
Biaya dibayar di muka <i>Prepaid expenses</i>	2.880	8.135	9.986
Investasi saham <i>Investment in shares</i>	15.000	15.484	14.758
Aset tetap-neto <i>Fixed assets-net</i>	133.395	127.373	115.035
Aset pajak tangguhan - neto <i>Deferred tax assets - net</i>	1.573	2.607	2.311
Aset Lain-lain <i>Other assets</i>	2.925	4.044	5.821
Total aset <i>Total assets</i>	1.472.642	1.821.626	1.827.721



Liabilitas

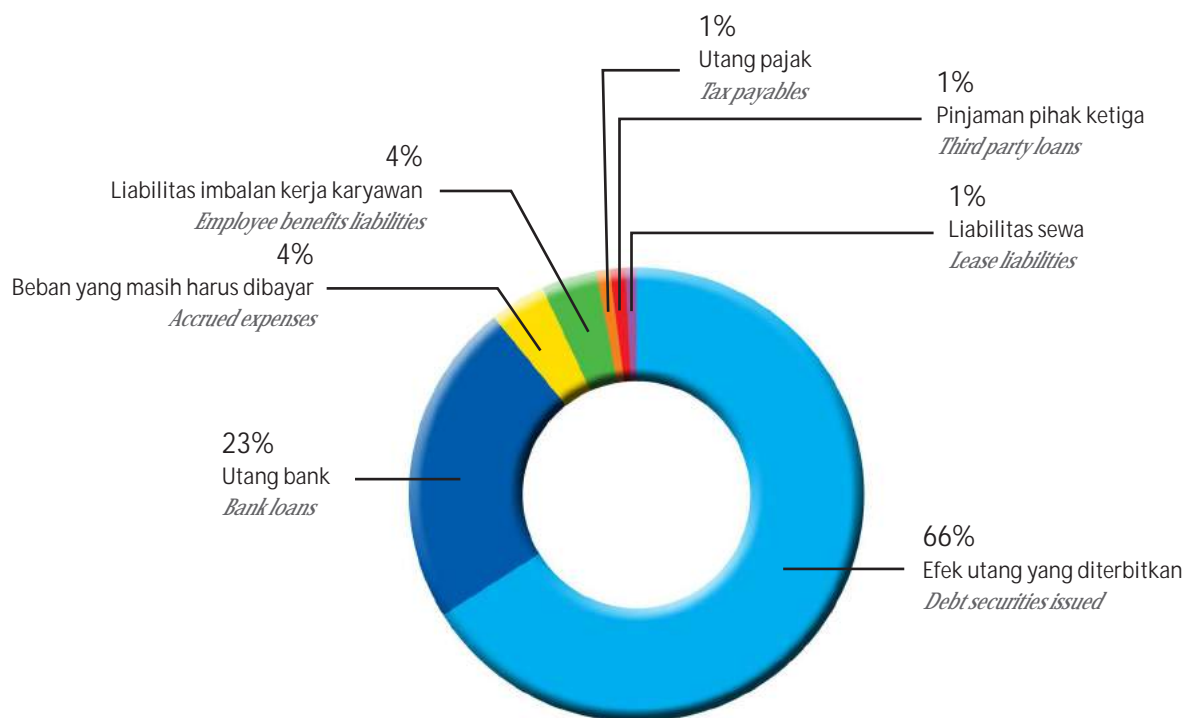
Total Liabilitas BPF turun sebesar 38.7% dari Rp 1 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 613,5 milyar di tahun 2020. Penurunan yang signifikan terjadi pada dua akun yaitu Utang Bank (turun 58.7%), dan Efek Utang yang Diterbitkan (turun 32,2%). Ini membuktikan bahwa Perusahaan memiliki kondisi keuangan yang solid.

Liabilities

BPF's Total Liabilities decreased by 38.7% from IDR 1 trillion in 2019 to IDR 613.5 billion in 2020. The most notable declines were in two accounts namely Bank Loans (down by 58.7%), and Debt Securities Issued (down by 32.2%). This showed that the Company had a solid financial condition.

Dalam Jutaan Rupiah In IDR Million

	2020	2019	2018
Utang bank <i>Bank loans</i>	142.366	345.024	417.152
Pinjaman pihak ketiga <i>Third party loans</i>	7.538	6.525	2.640
Beban yang masih harus dibayar <i>Accrued expenses</i>	20.129	21.705	16.976
Utang pajak <i>Tax payables</i>	8.683	10.977	9.294
Efek utang yang diterbitkan <i>Debt securities issued</i>	404.912	597.536	595.179
Liabilitas imbalan kerja karyawan <i>Employee benefits liabilities</i>	23.606	20.532	15.054
Liabilitas sewa <i>Lease liabilities</i>	6.305	-	-
Total liabilitas <i>Total liabilities</i>	613.539	1.002.299	1.056.295



Ekuitas

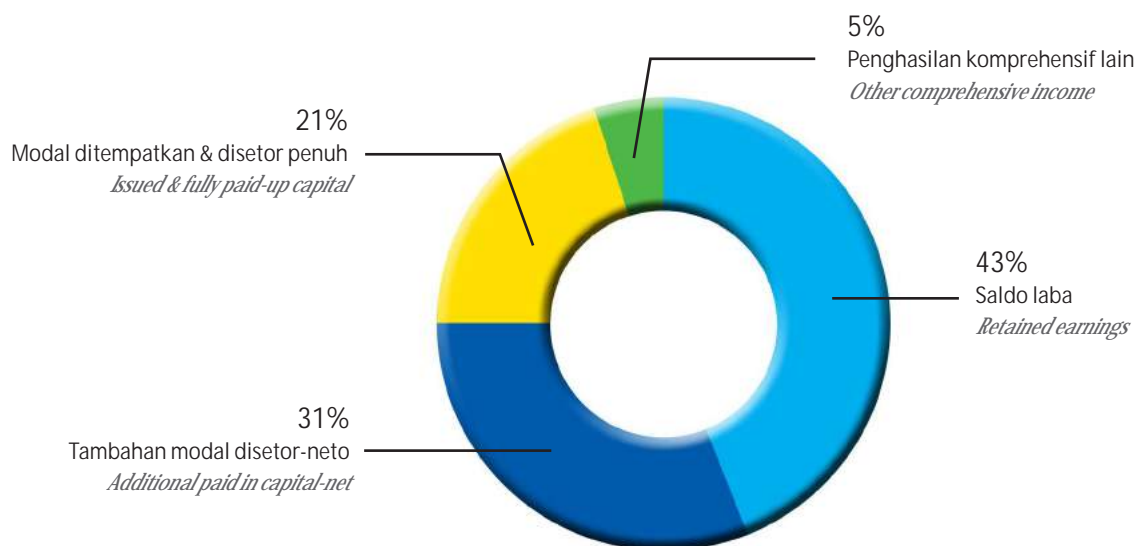
Total Ekuitas Perusahaan pada tahun finansial yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 859,1 milyar, meningkat 4,9% dari Rp 819,3 milyar ekuitas di tahun 2019.

Equity

The Company's Total Equity in the financial year ending December 31, 2020 was IDR 859.1 billion, an increase of 4.9% from IDR 819.3 billion equity in 2019.

Dalam Jutaan Rupiah In IDR Million

	2020	2019	2018
Modal dasar <i>Authorized capital</i>	700.000	220.000	220.000
Modal ditempatkan & disetor penuh <i>Issued & fully paid capital</i>	178.266	178.266	178.266
Tambahan modal disetor-neto <i>Additional paid in capital-net</i>	263.314	263.314	263.314
Saldo laba <i>Retained earnings:</i>			
- Telah ditentukan penggunaannya <i>Appropriated</i>	250	250	250
- Belum ditentukan penggunaannya <i>Unappropriated</i>	374.334	332.519	288.739
Penghasilan komprehensif lain <i>Other comprehensive income</i>	42.939	44.978	40.857
Total ekuitas <i>Total equity</i>	859.103	819.327	771.426



Arus Kas

Metode langsung dengan mengelompokkan arus kas kedalam aktifitas operasi, investasi dan pendanaan digunakan dalam menyusun Laporan Arus Kas dibawah ini:

Cash Flow

A direct method by grouping cash flows into operations, investment and funding activities was used in forming the following Cash Flow Report below:

Dalam Jutaan Rupiah *In IDR million*

	2020	2019	2018
Kas, setara kas & cerukan pada awal tahun <i>Cash, cash equivalents and bank overdraft at beginning of year</i>	31.079	113.935	32.792
Arus kas neto dari/untuk aktivitas operasi <i>Net cash from/for operating activities</i>	434.322	20.742	44.404
Arus kas neto dari/untuk aktivitas investasi <i>Net cash from/for investing activities</i>	400	(6.778)	(89.507)
Arus kas neto dari/untuk aktivitas pendanaan <i>Net cash from/for financing activities</i>	(405.711)	(96.820)	126.246
Kenaikan (penurunan) neto kas & setara kas <i>Net increase (decrease) in cash & cash equivalents</i>	29.011	(82.856)	81.143
Kas, setara kas & cerukan pada akhir tahun <i>Cash, cash equivalents and bank overdraft at end of year</i>	60.090	31.079	113.935

Arus Kas dari/untuk Aktifitas Operasi

Arus Kas dari/untuk Aktifitas Operasi menggambarkan pergerakan kas untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional BPF. Pada tahun 2020 terdapat kenaikan signifikan sebesar 1.993,9% yang terutama disebabkan oleh menurunnya penyaluran transaksi pembiayaan Perusahaan karena pandemi Covid-19.

Cash Flows from/for Operating Activities

Cash Flows from/for Operating Activities reflected the cashflows from/used for supporting BPF's operational activities. In 2020 there was a significant increase of 1,993.9%, primarily because of the decline in the Company's financing activities due to the Covid-19 pandemic.

Arus Kas dari/untuk Aktifitas Investasi

Pada tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar 105,9% pada Arus Kas dari/untuk Aktifitas Investasi. Sekali lagi, karena pandemi, di tahun tersebut Perusahaan tidak melakukan kegiatan investasi yang signifikan.

Arus Kas dari/untuk Aktifitas Pendanaan

Arus kas dari/untuk aktifitas pendanaan turun secara signifikan sebesar 319,0% dibanding tahun 2019. Beberapa hal yang menyebabkannya antara lain karena adanya penerimaan dana obligasi yang diterbitkan pada tahun 2019, juga disebabkan oleh dilakukannya pelunasan yang dipercepat pada pinjaman bank Perusahaan karena baiknya penerimaan angsuran dari nasabah dan masih terbatasnya penyaluran pembiayaan akibat pandemi.

Kolektibilitas Piutang

BPF mengklasifikasi kolektibilitas piutang berdasarkan jumlah hari tunggakan. Analisis umur piutang pembiayaan yang dikelola-bruto untuk kurun waktu tahun 2018-2020 adalah sbb.:

Dalam Jutaan Rupiah *In IDR Million*

	2020	2019	2018
Belum jatuh tempo <i>Current receivables</i>	1.139.293	1.506.032	1.434.042
Tunggakan 1-30 hari <i>1-30 days overdue</i>	138.995	130.269	145.699
Tunggakan 31-60 hari <i>31-60 days overdue</i>	51.832	58.496	64.723
Tunggakan 61-90 hari <i>61-90 days overdue</i>	13.977	9.356	14.910
Tunggakan >90 hari <i>>90 days overdue</i>	29.609	40.030	34.438
Jumlah piutang <i>Total receivables</i>	1.373.706	1.744.183	1.693.812
Rasio piutang macet: tunggakan >90hari/jumlah piutang <i>Ratio of non-performing loan: >90days overdue/total receivables</i>	2,16%	2,29%	2,03%

Rasio Piutang Macet (Non Performing Loans - NPL) dihitung berdasarkan tunggakan dengan jatuh tempo lebih dari 90 hari dibagi dengan jumlah piutang. Rasio NPL BPF selama tahun 2018-2020 cenderung stabil di kisaran 2 - 2,3%, yang merefleksikan kecakapan Perusahaan dalam menjaga tingkat NPL nya.

Rasio

Tabel dibawah ini menjabarkan beberapa rasio keuangan penting Perusahaan, untuk tahun finansial 2020, 2019, 2018, 2017 dan 2016:

Cash Flows from/for Investing Activities

In 2020 there was an increase of 105.9% in Cash Flows from/for Investing Activities. Again, because of the pandemic, in the said year the Company did not do any significant investing activities.

Cash Flows from/for Financing Activities

Cash Flows from/for Financing Activities decreased significantly by 319.0% compared to year 2019. A number of reasons for this among others there was proceeds from debt securities issued in 2019, and also because there were some early repayments of the Company's bank loans due to good payment collections from the Company's customers as well as because of the limited new booking allocations as a result of the pandemic.

Receivables Collectability

BPF classifies its receivables collectability based on days overdue. The analysis of the receivables gross for the period 2018-2020 is as follows:

The Non Performing Loans (NPL) ratio was calculated based on over 90 days overdue receivables divided by the total amount of receivables. BPF's NPL ratios for 2018-2020 were stable in the range of 2 - 2.3%, which reflected the Company's proficiency in maintaining its NPL level.

Ratios

The following table shows a number of the Company's important financial ratios for the financial years 2020, 2019, 2018, 2017 and 2016:

Dalam Persentase *In Percentage*

	2020	2019	2018	2017	2016
Rasio Rentabilitas <i>Profitability ratios</i>					
Total laba neto terhadap total penghasilan <i>Total net income to total revenues</i>	11,7	17,4	15,8	14,1	13,1
Total laba neto terhadap rata-rata total aset <i>Total net income to average total assets</i>	2,5	4,1	4,0	3,8	3,4
Total laba neto terhadap rata-rata total ekuitas <i>Total net income to average total equity</i>	4,9	9,4	9,8	8,8	6,8
Rasio Solvabilitas <i>Solvency ratios</i>					
Total liabilitas terhadap rata-rata total aset <i>Total liabilities to average total assets</i>	37,2	54,9	62,1	72,8	52,9
Total liabilitas terhadap rata-rata total ekuitas <i>Total liabilities to average total equity</i>	73,1	126,0	151,6	168,7	106,4

Pemasaran

Industri pembiayaan termasuk sektor usaha yang sangat terimbas pandemi Covid-19 di tahun 2020. Menurunnya daya beli masyarakat dan kebijakan OJK terkait sektor jasa pembiayaan non-bank untuk memberikan restrukturisasi pembiayaan bagi debiturnya yang terdampak pandemi, membuat Perusahaan mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang luar biasa tersebut. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah dengan menghentikan kegiatan penjualannya di awal masa pandemi di Indonesia dan baru memulainya kembali pada pertengahan Juni 2020, itu pun dengan disertai berbagai kebijakan dan langkah mitigasi yang ketat.

Beberapa langkah pemasaran yang diterapkan Perusahaan di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Penetrasi Pasar

Dalam rencana semula, BPF menargetkan untuk meningkatkan potensi jaringan penjualannya di Pulau Jawa dan telah membuka 7 kantor cabang baru, yang sebagian telah dibuka di penghujung tahun 2019 dan mulai efektif beroperasi di tahun 2020. Kantor-kantor cabang yang baru dibuka ini berlokasi di kota Cilacap, Kebumen, Kediri, Pekalongan, Rembang, dan Tuban, serta satu kantor di Tabanan, Bali. Kantor-kantor cabang baru ini memberikan kontribusi sebesar 3,42% atau Rp 28,6 miliar dari total pembiayaan BPF sepanjang tahun 2020.

2. Tenaga Pemasaran

Dikarenakan kondisi perekonomian dan industri yang melemah secara drastis di tahun 2020, BPF pun harus mengambil langkah efisiensi biaya di berbagai sektor. Perusahaan terpaksa melakukan keputusan untuk tidak merekrut karyawan baru dan tidak memperpanjang kontrak sebagian tenaga pemasaran yang belum menjadi karyawan. Walaupun demikian, BPF tetap berusaha mengoptimalkan potensi tim tenaga pemasaran yang dimilikinya untuk tetap dapat mencapai target dan hasil yang terbaik. Berbagai pelatihan dan *workshop* diadakan secara internal di masing-masing cabang, salah satunya adalah untuk memperdalam penguasaan terkait SOP.

3. Hubungan Baik Dengan Mitra Bisnis

Kredibilitas dan kepercayaan menjadi modal utama BPF dalam membina hubungan baik dengan para mitra bisnisnya. Sejak awal usahanya, BPF telah mengidentifikasi para mitra bisnis strategisnya dan terus membangun hubungan kerja yang baik dengan mereka, terutama bank, lembaga pembiayaan dan kreditur lainnya, perusahaan asuransi, dealer/showroom, agen tunggal pemegang merek (ATPM), dan tentunya para konsumen BPF.

Selama beberapa tahun terakhir, perbankan memperketat kebijakannya dalam memberikan dukungan dana pada industri pembiayaan. Sebagai referensi, data OJK per Oktober 2020 mencatat adanya penurunan nilai penyaluran pinjaman bank ke industri multifiinance sebesar 12,38% year on year. Situasi sulit ini berlanjut dengan jatuhnya perekonomian tahun 2020 dikarenakan pandemi. Meskipun demikian, BPF tetap mendapat kepercayaan dan mendapat tawaran dukungan pendanaan dari mitra-mitra perbankannya berkat reputasi dan hubungan kerja yang terjaga baik selama ini.

Marketing

The multifiinance industry is one of the business sectors that has been badly impacted by the Covid-19 pandemic in 2020. The declining purchasing power of the people and OJK's policy regarding the non-bank financing service sector to provide restructuring for debtors who were affected by the pandemic, have made the Company to apply certain policies appropriate for this extra ordinary situation. One of the policies applied was to stop its sales activities at the beginning of the pandemic period in Indonesia and only resumed it again in mid-June 2020; this was accompanied by various strict policies and mitigation measures.

Some of the marketing steps implemented by the Company in 2020 were:

1. Market Penetration

According to the original plan, BPF targeted to increase its sales network potential in Java Island and opened 7 new branch offices, some of which had been opened at the end of 2019 and began operating effectively in 2020. These newly opened branch offices are located in the city of Cilacap, Kebumen, Kediri, Pekalongan, Rembang, and Tuban, as well as an office in Tabanan, Bali. These new branch offices contributed 3.42% or Rp 28.6 billion of the total BPF financing throughout 2020.

2. Marketing Staff

Due to the significant weakening of the economy and industry in 2020, BPF must take cost efficiency measures in various sectors. The Company was forced to make a decision not to recruit new employees and not to renew the employment contracts of some sales people who have not yet become permanent employees. However, BPF still strived to optimize the potential of its existing sales force team in order to achieve the targets and best results. Various internal trainings and workshops were intensified in each branch, especially to improve the staff's knowledge in SOPs.

3. Strong Business Partnerships

Credibility and trust are BPF's main assets in building good relations with its business partners. Since the beginning of its business, BPF has identified its strategic business partners and continues to build good working relations with them, especially banks, other financing and creditor institutions, insurance companies, dealers/showrooms, sole agencies and BPF's consumers.

Over the past few years, banks have tightened their policies in providing bank loans to multifiinance companies. As a reference, OJK data as of October 2020 recorded a decrease in the value of bank lending to the multifiinance industry by 12.38% year on year. This difficult situation continued with the economic downturn in 2020 due to the pandemic. Even then, BPF still had the trust and was still offered funding supports from its bank partners thanks to the company's reputation and well-maintained working relations over the years.

4. Prinsip "Know Your Customer"

Melewati tahun 2020 yang sangat sulit, BPF membuktikan pentingnya prinsip kehati-hatian dan pencegahan, yaitu prinsip "Know Your Customer", yang selama ini selalu diterapkan untuk menjaga tingkat kolektabilitas Perusahaan dan menjaga integritasnya. Hal ini membuahkan manfaat yang sangat penting bagi ketahanan Perusahaan, saat perekonomian umum dan daya beli masyarakat turun secara signifikan. Para nasabah BPF telah terseleksi dan teridentifikasi dengan baik, sehingga tetap menunjukkan kinerja pembayaran yang positif, termasuk para nasabah yang membutuhkan program restrukturisasi pinjaman. Rasio kredit macet (NPL) BPF sangat terjaga baik sepanjang tahun 2020 dan dengan demikian menyelamatkan kelancaran arus kas Perusahaan.

Personalia

Bagi BPF, sumber daya manusia adalah aset dan mitra strategis yang sangat memengaruhi pertumbuhan Perusahaan dan juga menentukan citra perusahaan BPF di masyarakat. Perusahaan mengelola dan memperlakukan semua karyawannya dengan hormat, serta memastikan semua hak dasar mereka sebagai pegawai terpenuhi, termasuk berbagai fasilitas pengembangan diri dan skema insentif yang memadai. Perusahaan juga menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, serta memenuhi kebutuhan kerja terkait.

1. Panduan Kerja dan Kepatuhan

Perusahaan memastikan agar semua standar operasional prosedur (*standard operating procedure-SOP*), tata tertib, dan semua peraturan terkait internal Perusahaan maupun industri yang berlaku juga senantiasa dipahami, diimplementasikan, dan dipantau. Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku, Perusahaan juga melakukan fungsi pengendalian internal yang berkelanjutan, termasuk di antaranya adalah sistem *whistleblowing*.

2. Perekrutan dan Pelatihan

Selama menjalani masa pandemi di tahun 2020, Perusahaan terpaksa mengambil langkah efisiensi biaya yang lebih ekstrem dalam berbagai sektor usahanya. Perusahaan mengambil kebijakan untuk sementara tidak merekrut karyawan baru dan tidak memperpanjang kontrak sebagian tenaga kerja yang belum menjadi karyawan tetap. Jumlah total karyawan BPF di tahun 2020 adalah sebanyak 1.186 orang, berkurang dari jumlah karyawan di tahun 2019 yang sebanyak 1.317 orang.

Di tahun-tahun sebelumnya, BPF secara rutin mengirimkan karyawan-karyawan yang berprestasi untuk mengikuti berbagai pelatihan eksternal untuk meningkatkan kompetensi, menambah wawasan dan pengetahuan perkembangan terbaru yang berkaitan dengan bidang usaha BPF. Dikarenakan pandemi, selama tahun 2020 semua pelatihan dan *workshop*hanya dilaksanakan secara internal di setiap cabang, untuk alasan keamanan kesehatan dan efisiensi.

4. "Know Your Customer" Principle

Going through the very difficult year 2020, BPF has proven the importance of the prudential and preventive principles, namely the "Know Your Customer" principle, which have been applied to maintain the Company's collectability level and integrity. This has contributed significant benefits for the Company's resilience, when the general economy and people's purchasing power declined considerably. BPF's customers have been well selected and identified, so that they continued to show positive payment performance, including customers who needed a loan restructuring scheme. BPF's Non-Performing Loan (NPL) level was well maintained throughout 2020 and thus guaranteed the Company's smooth cash flow.

Personnel

For BPF, human resources are assets and strategic partners that greatly influence the growth of the Company and also determine BPF's corporate image in the society. The Company manages and treats all its employees with respect and ensures that all their basic rights as employees are fulfilled, including various personal development facilities and adequate incentive schemes. The Company also creates a safe and comfortable working atmosphere and environment, as well as fulfilling related work needs.

1. Work Guidelines and Compliance

The Company ensures that all standard operating procedures (SOPs), rules and regulations, and all applicable internal and industry-related regulations are understood, implemented and monitored. To ensure compliance with the applicable laws and regulations, the Company also deploys a sustainable internal control function, including the whistleblowing system.

2. Recruitment and Training

During the pandemic in 2020, the Company was forced to take more extreme cost efficiency measures in its various business sectors. The Company adopted a temporary policy of not doing recruitment and not extending the employment contracts of some workers who were not yet permanent employees. The total number of BPF employees in 2020 was 1,186 people, reduced from 1,317 employees in 2019.

In previous years, BPF regularly sent outstanding employees to join external training programs to improve employees' competence, get more insight and knowledge of the latest updates relating to BPF's business industry. However, due to the pandemic, all training and workshops were only held internally in each branch, for health safety and efficiency reasons.

Tinjauan Pencapaian 2020 dan Proyeksi 2021

2020 Achievements and 2021 Projections Review

Tinjauan Pencapaian 2020

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan perekonomian global dan nasional terpuruk. Dengan daya beli masyarakat yang turun signifikan, industri pembiayaan pun sangat terdampak. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menyebutkan bahwa kontraksi pertumbuhan industri pembiayaan mencapai 14 -15% di tahun 2020, dengan penurunan terbesar di pembiayaan otomotif yang mencapai 65% dari portofolio pembiayaan. Industri otomotif yang sangat terkait dengan bisnis BPF pun juga mengalami penurunan ekstrem. Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), angka penjualan mobil baru tahun 2020 turun sebesar 48,35% dibandingkan tahun sebelumnya.

BPF sempat merevisi berbagai target yang semula ditetapkan untuk tahun 2020. Berikut ini adalah beberapa realisasi pencapaian target dan rencana kerja tahun 2020, yaitu:

1. Pendapatan yang semula ditargetkan sebesar Rp 503,57 miliar, direvisi menjadi Rp 372,08 miliar, dengan pencapaian aktualnya sebesar Rp 354,02 miliar.
2. Laba yang semula ditargetkan sebesar Rp 89 miliar dan kemudian direvisi menjadi Rp 30,48 miliar, berhasil dilampaui dengan pencapaian actual sebesar Rp 41,26 miliar.
3. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2020 senilai Rp 200 miliar berhasil diselenggarakan dengan respon sangat positif.

Proyeksi 2021

Percepatan distribusi dan pengadaan vaksin Covid-19 oleh Pemerintah membawa harapan bagi pemulihan ekonomi dalam negeri. Indonesia maupun global menunjukkan berbagai tren prediksi yang positif akan mulai membaiknya situasi dalam berbagai aspek, yang akan membawa pemulihan daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat.

Industri pembiayaan dan otomotif yang paling terkait dengan usaha BPF pun mengeluarkan angka-angka proyeksi yang lebih optimis untuk tahun 2021. OJK memperkirakan piutang pembiayaan tahun 2021 bisa tumbuh di kisaran 5% secara year on year (yoy). APPI juga optimis industri multifinance dapat tumbuh positif di tahun 2021, meskipun kebijakan restrukturisasi kredit diperpanjang dan perbankan akan masih lebih selektif dalam memberikan pinjaman ke perusahaan multifinance, sebagai konsekuensi dari perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit. Gaikindo menargetkan penjualan mobil *wholesales* sebesar 750 ribu unit di tahun 2021, lebih tinggi dari pencapaian tahun 2020 yang sebanyak 532 ribu unit.

Meskipun optimis, BPF tetap berhati-hati dalam menentukan strategi dan memasang target. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi bahwa imbas pandemi masih akan terus berlangsung di tahun 2021. Berikut ini beberapa target dan rencana kerja Perusahaan untuk tahun finansial 2021, yaitu:

1. Pendapatan ditargetkan mencapai Rp 379,98 miliar. Produktivitas penjualan akan lebih digencarkan di semua cabang, dengan inovasi produk yang lebih terjangkau dan dengan potensi kualitas kredit yang lebih aman.

2020 Achievement Review

The Covid-19 pandemic has caused the global and national economies' deterioration. With people's purchasing power dropping significantly, the multifinance industry has been severely affected. The Indonesian Financial Services Association (APPI) stated that the growth contraction of the multifinance industry reached 14 -15% in 2020, with the largest decline in auto financing which represents 65% of the financing portfolio. The automotive industry, which is closely related to BPF's business, also experienced an extreme decline. According to data from the Association of Indonesian Automotive Industries (GAIKINDO), the car sales figure for 2020 fell by 48.35% compared to the previous year.

BPF had revised various targets previously set for 2020. The following are some of the realization of the 2020 targets and work plans, namely:

- 1. Revenue, which was originally targeted at IDR 503.57 billion, was revised to IDR 372.08 billion, with the actual achievement of IDR 354.02 billion.*
- 2. Profit, which was originally targeted at IDR 89 billion and was then revised to IDR 30.48 billion, was surpassed by the actual achievement of IDR 41.26 billion.*
- 3. The issuance of the Batavia Prosperindo Finance Sustainable Bonds II Phase II Year 2020 of IDR 200 billion was successfully held with very positive responses.*

2021 Projections

The acceleration of the Covid-19 vaccine distribution and deployment by the Government bring hope for the domestic economic recovery. Indonesia and the world have shown various positive predictive trends of an improvement in the situation in various aspects, which will lead to a recovery in people's purchasing power and level of consumption.

The finance and automotive industries that are most closely related to BPF's business also issued more optimistic projection figures for 2021. OJK estimated that financing receivables in 2021 would grow by around 5% year on year (yoy). APPI was also optimistic that the multifinance industry could grow positively in 2021, despite the extension of the credit restructuring policy and banks will still be very selective in providing loans to multifinance companies, as a consequence of the extension of the credit restructuring policy. Gaikindo targeted wholesale car sales of 750 thousand units in 2021, higher than the achievement in 2020 of 532 thousand units.

Despite being optimistic, BPF remained careful in determining strategies and setting targets. This policy was taken to anticipate that the impact of the pandemic will still continue in 2021. The following are some of the Company's targets and work plans for the financial year 2021, namely:

- 1. Revenue is targeted to reach IDR 379.98 billion. Sales productivity will be stimulated in all branches, with product innovation that is more affordable and with the potential for safer credit quality.*

2. Laba ditargetkan mencapai Rp 59,28 miliar. Kebijakan efisiensi akan terus diterapkan di setiap proses bisnis. Dengan target peningkatan produktivitas dan penurunan biaya, maka laba tahun 2021 diharapkan lebih baik daripada pencapaian di tahun 2020.
3. Rasio leverage akan dijaga di kisaran 80%.
4. Pembukaan kantor cabang baru dan penerbitan obligasi sementara ditunda.

- 2. Profit is targeted to reach IDR 59.28 billion. Efficiency policies will continue to be applied in every business process. With the target of increased productivity and lowered costs, it is expected that the profit in 2021 will be better than the 2020 achievement.*
- 3. The leverage ratio will be maintained at around 80%.*
- 4. The opening of new branch offices and the issuance of bonds are temporarily postponed.*

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance



Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Good Corporate Governance Implementation

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* GCG) merupakan kerangka kerja BPF dalam mengendalikan dan mengarahkan semua kegiatan usaha yang dijalankannya. BPF menjadikan GCG sebagai acuan untuk mencapai tujuan-tujuan Perusahaan, baik secara finansial maupun operasional, dengan pertimbangan-pertimbangan strategis untuk tercapainya integritas dan efisiensi yang menjadi daya tarik bagi investor dan kreditor.

Prinsip inti dalam tata kelola perusahaan, yaitu transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas/pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran, menjadi nilai-nilai yang dijadikan pegangan oleh seluruh karyawan dalam melakukan pekerjaan dan dalam proses bisnis yang ada. Perusahaan juga senantiasa mengusahakan kepatuhan dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator di industri pembiayaan. Prinsip inti penerapan tata kelola perusahaan yang diterapkan BPF didasari pemahaman sebagai berikut:

- **Transparansi:** Perusahaan berkomitmen menyajikan seluruh informasi terkait secara jelas dan terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan dengan cara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan pihak terkait.
- **Tanggung Jawab:** Perusahaan memastikan kejelasan fungsi dan keberadaan masing-masing organ Perusahaan melalui pembagian tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas dan sesuai dengan tujuan Perusahaan. Perusahaan juga memastikan ketersediaan mekanisme dan koordinasi peran yang profesional, serta memberikan jaminan atas seluruh keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional Perusahaan.
- **Pertanggungjawaban/akuntabilitas:** Perusahaan senantiasa tunduk pada Anggaran Dasar dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seluruh kegiatan usaha Perusahaan dapat dipertanggungjawabkan. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan institusi dan semua kegiatannya kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat.
- **Independensi:** Perusahaan menjamin bahwa seluruh pengelolaan usaha dan pengambilan keputusan dilakukan secara independen dan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain yang berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Kewajaran:** Perusahaan mengedepankan keadilan dan kesetaraan, terutama dalam memenuhi hak dan kewajiban para pemangku kepentingan, sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di setiap kegiatan usaha BPF selama ini terbukti dari ketahanan BPF dalam menjalani tahun 2020 yang penuh tantangan ekstrem. Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten telah mempersiapkan BPF sehingga sanggup dan mampu menghadapi masa krisis seperti pandemi dengan baik. Beberapa contoh konkret pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik yang dilaksanakan BPF di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Identifikasi potensi risiko dilakukan sejak bulan Maret 2020, saat Pemerintah menetapkan pembatasan sosial akibat adanya pandemi Covid-19. BPF mempersiapkan diri dan mulai menyusun ulang strategi yang tepat untuk mengantisipasi risiko yang mungkin muncul.

Good Corporate Governance (GCG) has been the framework employed by BPF in controlling and directing all business activities it carries out. BPF uses GCG as the reference for achieving the Company's goals, both financially and operationally, with strategic motives to achieve integrity and efficiency which attracts investors and creditors.

The core principles in corporate governance, namely transparency, responsibility, accountability, independence and fairness, are the values held by all employees in carrying out their work and upheld in every business process. The Company also strives for compliance with the provisions and regulations of the Financial Services Authority (OJK) as the regulator in the financing industry. The core principles of implementing corporate governance applied by BPF are based on the following understanding:

- *Transparency: The Company is committed to present all relevant information to all stakeholders clearly and openly in ways that are in accordance with the applicable laws and according to concerned parties' needs.*
- *Responsibility: The Company ensures the function and existence of each of the Company's organs are made clear by defining duties and responsibilities in accordance with the Company's objectives. The Company also ensures the professionalism of its mechanism, roles and responsibility of the management and provides guarantees for all decisions and policies taken relating to the Company's operational activities.*
- *Accountability: The Company is always subject to the Articles of Association and all applicable laws and regulations, so that all of the Company's business activities can be accounted for. The Company must be held accountable for its institution and its activities to all stakeholders and public.*
- *Independence: The Company guarantees that all business management and decision-making are carried out independently and without interference from other parties with potential violation(s) to the laws and regulations.*
- *Fairness: The Company put fairness and equality as its top priorities, especially in fulfilling the rights and obligations of stakeholders, according to all applicable agreements and laws.*

The implementation of GCG principles in every BPF's business activity has so far been proven by BPF's resilience in undergoing the year 2020, which was full of extreme challenges. The consistent practices of GCG has prepared BPF that it is able and capable of coping well with times of crisis, such as pandemics. Some concrete examples of BPF's GCG implementations in 2020 are as follows:

- *The identification of potential risks has been carried out since March 2020, when the Government imposed social restrictions due to the Covid-19 pandemic. BPF prepared itself and began to reorganize the right strategy to anticipate the risks that might arise.*

- Memelihara hubungan baik dengan kreditor dengan tetap melakukan pembayaran pada para kreditor secara tepat waktu dan tidak mengajukan permohonan keringanan ataupun relaksasi, sehingga kreditor dapat melihat bahwa BPF memiliki itikad baik untuk dapat mengembalikan pinjaman tepat waktunya.
- Memelihara hubungan baik dengan debitur dengan memberikan relaksasi pembayaran bagi para debitur yang dinilai Perusahaan layak mendapat relaksasi karena usahanya terkena imbas Covid-19.
- Menjaga kepercayaan investor dengan menerbitkan obligasi senilai Rp 200 miliar pada bulan Mei 2020. BPF juga melakukan pembayaran terhadap obligasinya yang jatuh tempo sebesar Rp 300 miliar. Dengan demikian investor tetap yakin bahwa BPF akan mampu memenuhi segala kewajibannya.
- *Maintaining good relations with creditors by continuing to make payments to creditors in a timely manner and not applying for payment relief or relaxation, so that creditors would be assured of BPF's good faith in repaying the loans on time.*
- *Maintaining good relations with debtors by providing relaxation of payments for debtors that the Company considered deserving such scheme because their business were affected by Covid-19.*
- *Maintaining the trust of investors by issuing bonds worth IDR 200 billion in May 2020. BPF also made payments on maturing bonds in the amount of IDR 300 billion. Thus investors remained confident that BPF would be able to fulfill all of its obligations.*

Fungsi pengawasan dan pengendalian tata kelola perusahaan dijalankan dalam:

- Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi setiap bulan, sehingga Dewan Komisaris dan Direksi bersama-sama mengetahui dan memantau Perusahaan agar tetap di jalur yang benar.
- Pertemuan Komite Audit secara rutin.
- Fungsi audit internal dan eksternal yang saling melengkapi untuk menjadi alat manajemen dalam mengawasi Perusahaan.
- Melakukan fungsi *monitoring* antar wilayah untuk membahas perkembangan, permasalahan, dan perencanaan selanjutnya, agar target dapat tetap dijalankan walau dalam kondisi pandemi.
- Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai aturan yang ada.

Struktur Tata Kelola

Dalam melaksanakan GCG, Perusahaan memiliki struktur tata kelola perusahaan yang terdiri dari organ utama dan organ pendukung. Organ utama yang dimiliki Perusahaan meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Dewan Komisaris, dan Direksi. Adapun organ-organ ini didukung oleh perangkat pendukung, termasuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, Sekretaris Perusahaan, serta Internal Audit (lihat struktur organisasi di halaman 33).

The supervision and control functions over GCG are carried out in:

- *Joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors every month, so that both are informed of and in control of the Company to ensure it stays on the right track.*
- *Regular Audit Committee meetings.*
- *The complementary internal and external audit functions which serve as a management tool in overseeing the Company.*
- *Inter-regional monitoring function to discuss development, problems and further planning, to ensure targets can be met even in pandemic condition.*
- *Holding the General Meeting of Shareholders (GMS) in accordance with applicable regulations.*

Corporate Governance Structure

In implementing the GCG, the Company has a corporate governance structure that consists of the main and supporting organs. The main organs consist of the General Meeting of Shareholders (GMS) as the highest authority, the Board of Commissioners and the Board of Directors. These organs are supported by supporting instruments, including the Audit Committee, the Remuneration and Nomination Committee, the Risk Monitoring Committee, the Corporate Secretary, and the Internal Audit (see organization structure on page 33).

Kode Etik dan Budaya Perusahaan

Code of Ethics and Corporate Culture



Kode etik dan budaya perusahaan menjadi salah satu panduan penting yang paling mendasar dalam praktik pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Di dalam kegiatan usaha BPF, kode etik dan budaya perusahaan ini dimanifestasikan di dalam berbagai Standar Operasional Prosedur (SOP), peraturan, serta tata tertib. Kode etik Perusahaan senantiasa ditegakkan untuk meningkatkan integritas dan citra Perusahaan, meningkatkan pengelolaan risiko dan krisis, membangun budaya Perusahaan dan mewujudkan nilai-nilai Perusahaan, menciptakan komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan, serta menghindari tindakan konsekuensi legal. Kode etik dan budaya perusahaan BPF juga berakar pada hukum dan peraturan yang berlaku, serta dari visi, misi, dan tujuan Perusahaan.

Panduan kode etik dan budaya perusahaan BPF senantiasa disosialisasikan dan juga tercantum dalam paket dokumen yang dimiliki tiap karyawan, serta berlaku bagi semua karyawan dari semua jenjang.

The code of ethics and corporate culture is one of the most basic crucial guidelines in the practice of good corporate governance implementation. In BPF's business activities, this code of ethics and corporate culture is manifested in various Standard Operating Procedures (SOPs), regulations, and code of conduct. The Company's code of ethics is constantly upheld to enhance the Company's integrity and corporate image, to improve risk and crisis management, to build the Company's corporate culture and embody the Company's values, to enhance good communication with stakeholders, and to avoid legal litigation. BPF's code of ethics and corporate culture are also rooted in the applicable laws and regulations, as well as in the Company's vision, mission and objectives.

BPF's code of ethics and corporate culture are continuously promoted and incorporated in the document package distributed to every employee, and are enforced to all staff of every level.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

General Meeting of Shareholders (GMS)

Sebagai organ tertinggi dalam struktur tata kelola perseroan, RUPS memiliki kewenangan yang tidak dapat diberikan kepada Dewan Komisaris maupun Direksi, dengan batasan-batasan yang ditetapkan dalam undang-undang dan Anggaran Dasar Perusahaan. Melalui RUPS Tahunan (RUPST), Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja Perusahaan kepada para pemegang saham melalui pembahasan strategi, kebijakan, pencapaian, rencana, dan hal-hal penting lainnya. Selanjutnya Perusahaan dapat menyelenggarakan RUPS Luar Biasa bila diperlukan.

Kewenangan RUPS

RUPS sebagai organ perusahaan memiliki wewenang antara lain:

1. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk mengesahkan laporan keuangan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya.
2. Menetapkan penggunaan laba bersih Perusahaan.
3. Mengambil keputusan-keputusan menyangkut organisasi Perusahaan, misalnya perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran, dan likuidasi Perusahaan.
4. Melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Memutuskan penetapan gaji, tunjangan, serta honorarium Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.
6. Memberikan persetujuan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
7. Melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik terdaftar.
8. Memutuskan tindakan-tindakan yang berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mekanisme Penyelenggaraan RUPS

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPST dan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya (Luar Biasa). RUPST diselenggarakan secara rutin setiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perusahaan berakhir. Sedangkan RUPS lainnya/Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.

Di tahun 2020, BPF menyelenggarakan RUPS Tahunan dan dua kali RUPS Luar Biasa, dengan keterangan sebagai berikut:

RUPS Tahunan - 18 Mei 2020

Pada tahun 2020, Perusahaan melaksanakan RUPST pada tanggal 18 Mei 2020 di Kantor Pusat BPF. RUPST tersebut dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah berjumlah 1.364.995.316 saham atau sama dengan 76,57% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah. Perwakilan Dewan Komisaris dan Direksi yang menghadiri RUPS Tahunan tersebut adalah:

Komisaris Utama : Irena Istary Iskandar
Direktur (Independen) : Jasin Hermawan

As the highest organ in the corporate governance structure, the GMS has the authorization that cannot be transferred to the Board of Commissioners and the Board of Directors, with some limitations as regulated in the laws and the Company's Article of Association. Through the Annual GMS (AGMS), the Board of Directors and the Board of Commissioners report and be held responsible for the Company's performance to shareholders through discussions of strategies, policies, achievements, plans, and other important matters. Furthermore, the Company can call for an Extraordinary GMS if needed.

Authority of the GMS

The GMS as a corporate organ has the following authorities, amongst others:

1. *To approve the Annual Report, including ratification of the financial reports and the reports on the supervisory duties of the Company's Board of Commissioners, as well as providing the full discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervision actions.*
2. *To determine the use of the Company's net income.*
3. *To make decisions on matters relating to the Company's organization, such as amendments on the Article of Association, merger, consolidation, acquisition, separation, dissolution, liquidation of the Company.*
4. *To appoint and/or replace the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.*
5. *To determine salaries, allowances, and honorarium of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.*
6. *To approve transactions that contain conflicts of interest.*
7. *To appoint a registered Public Accountant Firm and Public Accountant.*
8. *To decide on actions to be taken based on the Company's Articles of Association and the applicable laws and regulations.*

GMS Organizing Mechanism

With due observance of the laws and regulations and the Articles of Association of the Company, the Board of Directors is obliged to hold an AGMS and is authorised to hold other GMS (Extraordinary). The AGMS is held regularly every year, no later than 6 (six) months after the Company's financial year ends. Meanwhile, other/Extraordinary GMS can be held at any time whenever required for the benefit of the Company.

In 2020, BPF held an AGMS and two Extraordinary GMS, with the following information:

Annual GMS - May 18, 2020

In 2020, the Company held the AGMS on May 18, 2020 at BPF's Head Office. The AGMS was attended by shareholders or shareholders' legal representatives totaling to a value of 1,364,995,316 shares or the equivalent of 76.57% of the total shares with valid voting rights. Representatives of the Board of Commissioners and Board of Directors attending the AGMS were:

President Commissioner : Irena Istary Iskandar
Director (Independent) : Jasin Hermawan

Keputusan yang dihasilkan dari RUPST tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan tahun buku 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perusahaan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2019 sebagai berikut:
 - a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perusahaan.
 - b. Sebesar Rp. 74.857.330.329 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perusahaan.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2020, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.
4. a. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perusahaan secara keseluruhan untuk tahun buku 2020, sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2019) atau dengan kenaikan tidak melebihi 8% dari tahun buku 2019, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perusahaan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

RUPS Luar Biasa I - 18 Mei 2020

Pada hari dan tempat yang sama dengan RUPST Tahun 2020, diselenggarakan juga RUPS Luar Biasa setelah RUPST selesai. RUPS Luar Biasa tersebut dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah berjumlah 1.364.995.391 saham atau sama dengan 76,57% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah. Perwakilan Dewan Komisaris dan Direksi yang menghadiri RUPS Luar Biasa tersebut adalah:

Komisaris Utama : Irena Istary Iskandar
Direktur (Independen) : Jasin Hermawan

Keputusan yang dihasilkan dari RUPS Luar Biasa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian atau seluruh harta kekayaan Perusahaan dalam rangka penerbitan dan penawaran umum obligasi di Pasar Modal, maupun fasilitas pinjaman yang akan diperoleh Perusahaan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.
2. a. Menegaskan, menetapkan dan menyusun kembali susunan para pemegang saham Perusahaan, sesuai dengan data kepemilikan saham Perusahaan dari Daftar Pemegang Saham Perusahaan per tanggal 30 April 2020, yaitu dengan susunan :

The decisions made at the AGMS were as follows:

1. *Approved and ratified the Company's Annual Report for the 2019 financial year, including the Company's Activity Reports, the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Company's 2019 Financial Statements, as well as providing the full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory actions, as long as these actions were reflected in the Annual Report.*
2. *Approved the use of the Company's 2019 financial year's net profit as follows:*
 - a. *Not distributing cash dividends to the Company's shareholders.*
 - b. *As much as IDR 74,857,330,329 was to be recorded as retained earnings, to increase the Company's working capital.*
3. *Granted the authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant, who is independent and registered with the Financial Services Authority, to audit the Company's financial statements for the 2020 financial year, as it is being considered and evaluated for the appointment of further Public Accountants, as well as to determine the Public Accountant's honorarium and terms of appointment, including terms of termination.*
4. a. *Determined the salaries and/or other benefits for members of the Company's Board of Commissioners as a whole for the 2020 financial year, equal to the previous financial year (financial year 2019) or with an increase of not exceeding 8% from the 2019 financial year, and authorized the Board of Commissioners Meeting to determine the allocation, taking into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee;*
 - b. *Authorized the Company's Board of Commissioners to determine salaries and/or benefits for members of the Company's Board of Directors, taking into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.*

Extraordinary GMS I - May 18, 2020

On the same day and place as the 2020 AGMS, an Extraordinary GMS was also held after the AGMS was completed. The Extraordinary GMS was attended by shareholders or shareholders' legal representatives totaling to a value of 1,364,995,391 shares or the equivalent of 76.57% of the total shares with valid voting rights. Representatives of the Board of Commissioners and Board of Directors attending the Extraordinary GMS were:

*President Commissioner : Irena Istary Iskandar
Director (Independent) : Jasin Hermawan*

The decisions made at the Extraordinary GMS were as follows:

1. *Approved to pledge more than half (1/2) or all of the Company's assets for the bonds issuance and public offering, as well as loan facilities from banks and/or other financial institutions.*
2. a. *Confirmed, stipulated and reconstructed the Company's shareholders composition, in accordance with the Company's share ownership data as stated in the Company's List of Shareholders dated April 30, 2020, as follows:*

- i. PT. Batavia Prosperindo Internasional Tbk, sejumlah 1.324.988.580 (satu miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 132.498.858.000 (seratus tiga puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- ii. UOB Kay Hian Pte. Ltd., sejumlah 107.575.819 (seratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan belas) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 10.757.581.900 (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
- iii. Masyarakat, sejumlah 350.099.176 (tiga ratus lima puluh juta sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh enam) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 35.009.917.600 (tiga puluh lima miliar sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);
- sehingga seluruhnya berjumlah 1.782.663.575 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 178.266.357.500 (seratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perusahaan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk menyusun kembali susunan para pemegang saham Perusahaan, sesuai dengan data kepemilikan pemegang saham Perusahaan yang berasal dari Daftar Pemegang Saham Perusahaan per tanggal 30 April 2020 atau tanggal lain yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan, selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- i. *PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk, totaling 1,324,988,580 (one billion three hundred twenty four million nine hundred eighty eight thousand five hundred and eighty) shares, valued at IDR 132,498,858,000 (IDR one hundred thirty two billion four hundred ninety-eight million eight hundred and fifty eight thousand);*
- ii. *UOB Kay Hian Pte Ltd, totaling 107,575,819 (one hundred seven million five hundred seventy five thousand eight hundred nineteen) shares, valued at IDR 10,757,581,900 (IDR ten billion seven hundred fifty seven million five hundred eighty one thousand nine hundred);*
- iii. *The public, totaling 350,099,176 (three hundred and fifty million ninety nine thousand one hundred and seventy six) shares, valued at IDR 35,009,917,600 (IDR thirty five billion nine million nine hundred and seventeen thousand six hundred);*
- *bringing a total of 1,782,663,575 (one billion seven hundred eighty two million six hundred sixty three thousand five hundred and seventy five) shares, with a total nominal value of IDR 178,266,357,500 (IDR one hundred seventy eight billion two hundred sixty six million three hundred and fifty seven thousand five hundred).*
- b. *Granted the authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to carry out all and every action necessary in connection with the decision, including but not limited to declaring/deciding the decree in a deed made before a Notary, to update the composition of the Company's shareholders, according to the Company's shareholders list as of April 30, 2020 or another date determined by the Company's Board of Directors, then to notify the authorized parties, and take all and every necessary action in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.*

RUPS Luar Biasa II - 1 September 2020

RUPS Luar Biasa kedua diselenggarakan pada 1 September 2020 di Kantor Pusat BPF, dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah berjumlah 1.375.228.381 saham atau sama dengan 77,14% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah. Perwakilan Dewan Komisaris dan Direksi yang menghadiri RUPS Luar Biasa tersebut adalah:

Komisaris Utama	: Irena Istary Iskandar
Komisaris Independen	: Desti Liliati
Direktur	: Indah Mulyawan
Direktur	: Hady Sutiono

Keputusan yang dihasilkan dari RUPS Luar Biasa tersebut adalah sebagai berikut:

1. a. Menyetujui perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perusahaan, yaitu :
 - i. peningkatan modal dasar Perusahaan dari sebesar Rp 220.000.000.000 (dua ratus dua puluh miliar rupiah), menjadi sebesar Rp 700.000.000.000 (tujuh ratus miliar rupiah), serta menyetujui dan merubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perusahaan;

Extraordinary GMS II - September 1, 2020

The second Extraordinary GMS was held on September 1, 2020 at BPF's Head Office, attended by shareholders or shareholders' legal representatives totaling to a value of 1,375,228,381 shares or the equivalent of 77.14% of the total shares with valid voting rights. Representatives of the Board of Commissioners and Board of Directors who attended the Extraordinary GMS were:

President Commissioner	: Irena Istary Iskandar
Independent Commissioner	: Desti Liliati
Director	: Indah Mulyawan
Director	: Hady Sutiono

The decisions made at the Extraordinary GMS were as follows:

1. a. Approved changes and adjustments to the Company's Articles of Association, namely:
 - i. an increase in the authorized capital of the Company from IDR 220,000,000,000 (IDR two hundred twenty billion) to IDR 700,000,000,000 (IDR seven hundred billion), as well as approval to amend Article 4 paragraph 1 of the Company's Articles of Association;

- ii. perubahan dan penyesuaian dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
 - sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
 - b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perusahaan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, termasuk Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perusahaan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui penambahan modal Perusahaan, dengan mengeluarkan saham baru dari portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 100 (seratus rupiah) per saham, dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk :
- a. Menyetujui dan merubah ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perusahaan dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perusahaan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk :
 - i. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengeluaran saham baru dalam Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - ii. menetapkan jumlah saham yang dikeluarkan, dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selesai;
 - iii. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal;

- ii. *amendments and adjustments in order to comply with the Financial Services Authority Regulations;*
 - *as explained in the Meeting;*
 - b. *Granted the authority and power to the Board of Directors of the Company, either individually or collectively, with the right of substitution, to take all and every action necessary in connection with the decision, including but not limited to declaring/stating the decree in a deed made before a Notary, to change, adjust and/or rearrange all provisions of the Company's Articles of Association, including Article 4 paragraph 1 of the Company's Articles of Association in accordance with the decision (including confirming the composition of shareholders in the deed if necessary), as required by and in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations, further to apply for approval and/or announce the decision of this Meeting and /or amendments to the Articles of Association of the Company in the resolutions of this Meeting, to the competent authority, and to take all and every necessary action, in accordance with the applicable laws and regulations.*
2. *Approved the increase in the Company's capital, by issuing new shares from the portfolios in a maximum amount of 950,000,000 (nine hundred and fifty million) shares with a nominal value of IDR 100 (IDR one hundred) per share, through a Rights Issue, with due observance of the applicable laws and regulations in the Capital Market, particularly the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning Increase in Capital for Public Companies through a Rights Issue, including:*
- a. *Approved and amended the provisions of the Company's Articles of Association in connection with the increase in issued and paid-in capital of the Company in the context of Capital Increase through a Rights Issue;*
 - b. *Granted the authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to carry out all and every necessary actions in connection with the said Capital Increase through a Rights Issue, including but not limited to:*
 - i. *taking all and every action necessary in connection with the issuance of new shares in the context of Capital Increase through a Rights Issue;*
 - ii. *determining the number of shares issued, and the increase in issued and paid-up capital after the completion of the Capital Increase through a Rights Issue;*
 - iii. *taking all and every action necessary in connection with Capital Increase through a Rights Issue, without any action being excluded, all of which are subject to the provisions of the applicable laws and regulations in the Capital Market;*



iv. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perusahaan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perusahaan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dalam keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

iv. declaring/ stating the decision in a deed made before a Notary, to amend and/or revise the provisions of Article 4 paragraph 1 of the Company's Articles of Association or Article 4 of the Company's Articles of Association as a whole in accordance with the decision (including confirming the composition of the shareholders in the deed, if necessary), as required by and in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, then to submit a request to the authorized party/official, to obtain approval and/or announce the decision of this Meeting and/or amendments to the Company's Articles of Association in resolutions of this Meeting, as well as taking all and every necessary action, in accordance with the applicable laws and regulations.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners



Dalam tata kelola Perusahaan, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan atas kebijakan dan pengelolaan yang dijalankan oleh Direksi. Selain itu Dewan Komisaris juga berkewajiban memberikan arahan, masukan, dan rekomendasi kepada Direksi, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik dan tujuan Perusahaan.

Sesuai pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris yang terakhir diperbaharui pada 1 Agustus 2019, Dewan Komisaris bertugas melaksanakan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar Perusahaan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perusahaan, serta memberikan nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Dewan Komisaris juga melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS maupun tugas-tugas yang ditentukan di dalam Anggaran Dasar Perusahaan, serta peraturan OJK dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Pemantau Risiko.

Anggota-anggota Dewan Komisaris dipilih dan diangkat oleh keputusan RUPS untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. Susunan anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

In the Company's GCG, the Board of Commissioners has a supervisory function over the policies and management carried out by the Board of Directors. In addition, the Board of Commissioners is also obliged to provide directions, inputs and recommendations to the Board of Directors, taking into account the best interests and objectives of the Company.

According to the Board of Commissioners' guidelines and work rules, which was last updated on August 1, 2019, the Board of Commissioners has the task of carrying out general and/or specific supervision over the policies applied by the Board of Directors in running the Company, in accordance with the Company's Articles of Association, as well as providing advices to the Board of Directors for the benefit of the Company, in line with the Company's objectives and goals. The Board of Commissioners also carries out other tasks in accordance with the decisions made at the GMS and the tasks specified in the Company's Articles of Association, as well as OJK regulations and other related regulations. In carrying out its duties, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee, the Remuneration and Nomination Committee, and the Risk Monitoring Committee.

Members of the Board of Commissioners are elected and appointed by a resolution of the GMS for a term of 5 (five) years. The composition of the members of the Board of Commissioners for 2020 is as follows:

Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	: Irena Istary Iskandar
Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	: Desti Liliati
Komisaris <i>Commissioner</i>	: Christopher J. Clower

Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dan fungsi penasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris mengacu pada Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) yang telah disahkan pada tanggal 1 Agustus 2019, yang merupakan uraian tentang tugas dan kewajiban, hak dan wewenang, fungsi, persyaratan, keanggotaan, masa jabatan, etika jabatan, serta rapat Dewan Komisaris yang disusun berdasarkan:

- a. POJK Nomor 30/POJK.05/2014 mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan.
- b. POJK Nomor 33/POJK.04/2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris emiten atau perusahaan publik.
- c. POJK Nomor 34/POJK.04/2014 mengenai Komite Remunerasi dan Nominasi emiten atau perusahaan publik.

Penyusunan Board Manual ini ditujukan untuk memberi batasan/arahan serta untuk menjelaskan hubungan kerja Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya agar tercipta pengelolaan perusahaan yang professional, transparan dan efisien.

Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Berikut adalah kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan perusahaan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan dan memberi nasehat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris Perusahaan wajib mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.
3. Dewan Komisaris dapat meminta setiap anggota Direksi untuk memberikan penjelasan tugas masing-masing.
4. Anggota Dewan Komisaris berhak untuk memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perusahaan secara lengkap dan tepat waktu.
5. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja Divisi Audit Internal, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK ataupun hasil pengawasan otoritas lain yang berwenang.
6. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan atas pemberhentian sementara tersebut.
7. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
8. Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Dewan Komisaris wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perusahaan.
9. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
10. Dewan Komisaris wajib tunduk pada Kode Etik Perusahaan.
11. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
12. Dewan Komisaris Perusahaan wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas.

Guidelines and Work Procedures for the Board of Commissioners

In order to carry out supervisory duties and advisory functions to the Board of Directors, the Board of Commissioners refers to the Work Guidelines for the Board of Commissioners and the Board of Directors (Board Manual) which was ratified on August 1, 2019, that describes the duties and obligations, rights and authorities, functions, requirements, membership, tenure, job ethics, and Board of Commissioners meetings, based on:

- a. OJK Regulation Number 30/POJK.05/2014 regarding good corporate governance for finance companies.*
- b. OJK Regulation Number 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and the Board of Commissioners of issuer or public company.*
- c. OJK Regulation Number 34/POJK.04/2014 concerning the Remuneration and Nomination Committee of issuer or public company.*

The Board Manual is intended to provide boundaries/direction and to illustrate the work relations of the Board of Commissioners in performing its duties, in order to create a professional, transparent and efficient company management.

Obligations, Duties, Responsibilities and Authorities of the Board of Commissioners

The following are the obligations, duties, responsibilities and authorities of the Board of Commissioners:

- 1. The Board of Commissioners is in charge of supervising and is responsible for overseeing the management policies in general, both regarding the Company and the Company's business, and provides advices to the Board of Directors.*
- 2. The Company's Board of Commissioners must supervise the Board of Directors in balancing the interests of all parties.*
- 3. The Board of Commissioners may request each member of the Board of Directors to provide an explanation of their respective duties.*
- 4. Members of the Board of Commissioners are entitled to obtain complete information regarding the Company in a timely manner from the Board of Directors.*
- 5. The Board of Commissioners must ensure that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Internal Audit Division work unit, external auditors, supervision results by OJK or other authorized authorities.*
- 6. The Board of Commissioners has the authority to suspend members of the Board of Directors by stating the reasons. The Board of Commissioners must provide written notice to the member of the Board of Directors concerned of the temporary dismissal.*
- 7. In the event that there is a member of the Board of Directors who is temporarily suspended, the Board of Commissioners must hold a GMS to revoke or enact the decision on that temporary dismissal.*
- 8. In carrying out its duties, responsibilities and authorities, the Board of Commissioners must take into account the Articles of Association of the Company.*
- 9. Each member of the Board of Commissioners must carry out his duties and responsibilities in good faith, and in a fully responsible and prudent manner.*
- 10. The Board of Commissioners must comply with the Company's Code of Ethics.*
- 11. The Board of Commissioners carries out its duties and responsibilities independently.*
- 12. The Board of Commissioners of the Company must ensure effective, precise and fast decision makings, and can act independently in performing its duties.*

13. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan wewenang berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan ataupun ketentuan RUPS.
14. Dewan Komisaris memastikan diadakannya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada semua tingkatan atau jenjang organisasi melalui komite-komite yang dibentuk Dewan Komisaris .
15. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
16. Dewan Komisaris bertugas mengajukan calon auditor eksternal berdasarkan usulan Komite Audit (jika ada) yang selanjutnya ditunjuk sebagai auditor eksternal Perusahaan.
17. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
18. Dewan Komisaris wajib menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Independensi Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris Perusahaan melaksanakan peran dan tanggung jawabnya secara independen dan profesional agar terhindar dari benturan kepentingan atau intervensi pihak lain. Komisaris Independen tidak memiliki keterkaitan dengan sesama Komisaris, anggota Direksi maupun Pemegang Saham Pengendali.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris

Ketentuan mengenai besaran dan struktur remunerasi Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPST berdasarkan hasil evaluasi, usulan Komite Remunerasi dan Nominasi, serta kemampuan Perusahaan di tahun buku.

Prosedur penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- Menelaah kompensasi yang diberikan untuk jabatan anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lainnya dengan bidang usaha yang sama dan sesuai kondisi pasar.
- Memperhitungkan kinerja usaha Perusahaan dan kontribusi masing-masing individu, yang kemudian dibahas oleh Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menyiapkan rekomendasi.
- Mengajukan rekomendasi tersebut untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan dalam RUPS Tahunan.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Proses penilaian kinerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menetapkan indikator kinerja utama berdasarkan kriteria yang direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Dewan Komisaris melakukan penilaian sendiri atas kinerja dari (i) setiap anggota Dewan Komisaris dan (ii) Dewan Komisaris sebagai unit kolegial, berdasarkan kriteria yang direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.
3. RUPS menilai Kinerja Dewan Komisaris sebagaimana tercermin dalam laporan tahunan.

13. *The Board of Commissioners may perform management actions of the Company under certain circumstances for a certain period of time, in accordance with the authorities based on the Company's Articles of Association or the provisions of the GMS.*
14. *The Board of Commissioners ensures that GCG is implemented in every business activity of the Company at all levels of the organization through the committees formed by the Board of Commissioners.*
15. *Under certain conditions, the Board of Commissioners may hold an AGMS and other GMS, in accordance with its authority, as stipulated in the laws, regulations and Articles of Association.*
16. *The Board of Commissioners is in charge of nominating a candidate for external auditor based on the recommendation of the Audit Committee (if any) who will then be appointed as the Company's external auditor.*
17. *The Board of Commissioners is obliged to evaluate the performance of the committees which assist it in carrying out its duties and responsibilities at the end of each financial year.*
18. *The Board of Commissioners must prepare the activity report of the Board of Commissioners which is part of the implementation of GCG.*

Independence of the Board of Commissioners

Members of the Board of Commissioners of the Company carry out their roles and responsibilities independently and professionally in order to avoid conflicts of interest or intervention of other parties. Independent Commissioners should not be affiliated with fellow Commissioners, members of the Board of Directors or Controlling Shareholders.

Remuneration Policies of the Board of Commissioners

Provisions regarding the remuneration amount and structure of the Board of Commissioners are determined in the AGMS based on the evaluation results, recommendations from the Remuneration and Nomination Committee, as well as the Company's capacity for the financial year.

The procedure for the Board of Commissioners' remuneration is as follows:

- *Reviewing the compensation given for Boards of Commissioners in other companies of the same business line and observing the market condition.*
- *Taking into account the Company's business performance and the contribution of each individual, which is then discussed by the Remuneration and Nomination Committee to prepare recommendations.*
- *Proposing these recommendations for discussion and approval in the AGMS.*

Performance Appraisal of the Board of Commissioners

The performance appraisal process for the Board of Commissioners is as follows:

1. *The Board of Commissioners determines the main performance indicators based on the criteria recommended by the Remuneration and Nomination Committee.*
2. *The Board of Commissioners conducts its own assessment of the performance of (i) each member of the Board of Commissioners and (ii) the Board of Commissioners as a collegial unit, based on the criteria recommended by the Remuneration and Nomination Committee.*
3. *The GMS assesses the performance of the Board of Commissioners as reflected in the annual report.*

Kriteria penilaian kinerja terhadap Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Komisaris.
- Kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan.
- Implementasi tata kelola Perusahaan yang baik oleh Dewan Komisaris.
- Tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam rapat.
- Keterlibatan setiap Komisaris dalam penugasan khusus.

Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi baik sebagai entitas kolegial maupun individual merupakan pertimbangan mendasar dalam proses penentuan kompensasi, bonus, dan insentif untuk Dewan Komisaris dan Direksi serta dalam proses mempertimbangkan pemberhentian atau penunjukan kembali.

Penilaian Kinerja Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Pemantau Risiko, Dewan Komisaris menilai bahwa ketiga komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

The performance appraisal criteria for the Board of Commissioners are as follows:

- *Implementation of duties and functions of each Commissioner*
- *Company's compliance with regulations.*
- *Implementation of GCG by the Board of Commissioners.*
- *The attendance level of each member of the Board of Commissioners in meetings.*
- *Involvement of each Commissioner in special assignments.*

The results of the performance appraisal for the Board of Commissioners and the Board of Directors both as collegial and individual entities are fundamental considerations in the process of determining compensation, bonuses and incentives for the Boards of Commissioners and Directors, and in the process of considering dismissal or re-appointment.

Performance Assessment of Committees Reporting to the Board of Commissioners

Based on the implementation of the duties and responsibilities of the Audit Committee, Remuneration and Nomination Committee, and the Risk Monitoring Committee, the Board of Commissioners assessed that the three committees have performed their duties and responsibilities properly.

Direksi

Board of Directors



Direksi memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan mengelola Perusahaan secara keseluruhan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Selain itu Direksi juga bertanggung jawab atas pelaksanaan praktek tata kelola yang baik dalam pengelolaan operasional maupun keuangan Perusahaan.

Sesuai pedoman dan tata tertib kerja Direksi yang terakhir tertanggal 1 Agustus 2019, Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya Direksi dibantu unit unit kerja bisnis, unit kerja pendukung maupun unit kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal dan manajemen risiko.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Sama seperti Dewan Komisaris, pedoman kerja Direksi memuat tentang keanggotaan, pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Direksi, tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi, nilai-nilai, waktu kerja dan rapat Direksi. Pedoman ini ditujukan untuk memberi arahan dan batasan, serta menjelaskan hubungan kerja Direksi dalam melaksanakan tugasnya, agar tercipta pengelolaan Perusahaan yang profesional, transparan, dan efisien.

The Board of Directors has the responsibility to lead and manage the Company as a whole in accordance with the objectives set out in the Articles of Association of the Company. In addition, the Board of Directors is also responsible for the implementation of GCG practices in the management of the Company's operations and finances.

In accordance with the latest guidelines and work rules of the Board of Directors dated August 1, 2019, the Board of Directors is an organ of the Company that is authorized and fully responsible for the management of the Company for the benefit of the Company in accordance with the Company's purposes and objectives, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association. In performing its duties, the Board of Directors is assisted by business work units, support work units and work units that carry out internal control and risk management functions.

Board of Directors Charter and Code of Conduct

Similar to the Board of Commissioners, the work guidelines for the Board of Directors contain membership, appointment, dismissal and replacement of the Board of Directors, duties, responsibilities and authorities of the Board of Directors, values, working hours and Board of Directors meetings. This guideline is intended to provide direction and boundaries, as well as to define the work relations of the Board of Directors in carrying out its duties, in order to create a professional, transparent and efficient management of the Company.

Direktur Utama *President Director*

Direktur *Director*

Direktur (Tidak Terafiliasi) *Director (Non Affiliated)*

Direktur *Director*

: Markus Dinarto Pranoto

: Indah Mulyawan

: Jasin Hermawan

: Hady Sutiono

Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi Berikut adalah kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi:

1. Direksi wajib memenuhi peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan peraturan internal lain yang berlaku di Perusahaan dalam melaksanakan tugasnya.
2. Direksi bertugas mengelola, menjalankan, dan bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan berhati-hati.
4. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPST dan RUPS lainnya, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Direksi memastikan kepentingan semua pihak terkait, khususnya kepentingan debitor, kreditor dan/atau pemangku kepentingan lainnya diperhatikan.
6. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi.
7. Direksi harus menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak dengan independen, tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya dalam melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif.
8. Direksi wajib membuat dan memelihara risalah RUPS dan rapat Direksi, serta menyelenggarakan pembukuan Perusahaan.
9. Anggota Direksi wajib tunduk pada Kode Etik Perusahaan.
10. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
11. Direksi wajib menetapkan pengendalian internal yang efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan usaha Perusahaan dijalankan dengan efektif dan efisien, sesuai dengan sasaran dan strategi bisnis dan Anggaran Dasar, serta mematuhi aturan internal Perusahaan dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Perusahaan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
13. Direksi wajib menetapkan kebijakan dan rencana pembiayaan yang dituangkan dalam rencana bisnis tahunan Perusahaan.
14. Direksi wajib mengambil keputusan pembiayaan secara profesional dan mengoptimalkan nilai tambah kekayaan Perusahaan dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap debitor dan kepentingan bagi pemangku kepentingan lainnya.
15. Direksi wajib mengungkapkan kepada karyawan mengenai kebijakan Perusahaan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain kebijakan mengenai sistem perekrutan, promosi, dan remunerasi, serta rencana Perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya melalui pengurangan karyawan.

Obligations, Duties, Responsibilities and Authorities of the Board of Directors

The following are the obligations, duties, responsibilities and authorities of the Board of Directors:

1. *The Board of Directors must comply with laws and regulations, the Articles of Association and other applicable internal regulations in the Company in performing its duties.*
2. *The Board of Directors is in charge of managing, executing and being responsible for the management of the Company, in accordance with its authority and responsibility, for the benefit of the Company in line with the Company's purposes and objectives as stipulated in the Articles of Association.*
3. *Each member of the Board of Directors must carry out his duties and responsibilities in good faith, and in a fully responsible and prudent manner.*
4. *In performing its duties and responsibilities over the Company's management, the Board of Directors is obliged to hold an AGMS and other GMS, and is held accountable for the implementation of its duties to the GMS, as stipulated in the laws and regulations and the Articles of Association.*
5. *The Board of Directors ensures that the interests of all related parties, particularly the interests of debtors, creditors and/or other stakeholders are taken into account.*
6. *The Board of Directors is required to implement the principles of GCG in all business activities of the Company at all levels of the organization.*
7. *The Board of Directors must ensure effective, precise and fast decision-makings, and that it can act independently, does not have a conflict of interest that may interfere with its ability to carry out its duties independently and objectively.*
8. *The Board of Directors is required to prepare and maintain minutes of the GMS and Board of Directors meetings, as well as keep the Company's books.*
9. *Members of the Board of Directors must comply with the Company's Code of Ethics.*
10. *The Board of Directors is authorized to carry out the management of the Company in accordance with policies deemed appropriate, and in line with the aims and objectives set out in the Articles of Association.*
11. *The Board of Directors is obliged to establish effective and efficient internal controls to ensure that the Company's business activities are carried out effectively and efficiently, in accordance with business goals and strategies and the Articles of Association, and comply with the Company's internal rules and all applicable laws and regulations.*
12. *The Board of Directors is obliged to follow up on audit findings and recommendations from the Company's internal audit work unit, external auditors, supervision results of OJK and/or other authorities.*
13. *The Board of Directors is obliged to determine the Company's financing policies and plans, which will be outlined in the Company's annual business plan.*
14. *The Board of Directors is required to take financing decisions professionally and optimize the added value of the Company's assets, while still considering protection of debtors and the interests of other stakeholders.*
15. *The Board of Directors is required to disclose the Company's strategic policies on employment to employees, including those regarding recruitment, promotion and remuneration systems, as well as the Company's plans for cost efficiency through reduction of employees.*

16. Direksi membantu menyediakan fasilitas dan/atau sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang organ Perusahaan. Organ Perusahaan adalah RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas.
17. Direksi memastikan agar informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap.
18. Direksi berwenang mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.

Kebijakan Remunerasi Direksi

- Menelaah kompensasi yang diberikan untuk jabatan Dewan Direksi pada perusahaan sejenis dan melihat kondisi pasar.
- Memperhitungkan kinerja usaha Perusahaan dan kontribusi masing-masing individu kemudian dilakukan pembahasan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menyiapkan rekomendasi.
- Mengajukan rekomendasi tersebut kepada Dewan Komisaris untuk dilakukan pembahasan lanjutan dan persetujuan. Usulan remunerasi anggota Direksi dibahas dan mendapatkan persetujuan dari RUPS Tahunan.

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya mengelola dan memantau jalannya Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pertemuan bersama setiap bulan untuk melakukan pembahasan, evaluasi, dan koordinasi pengelolaan Perusahaan. Selama tahun 2020, Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan 12 (dua belas) kali pertemuan bersama, dengan daftar kehadiran sebagai berikut:

	Jan 2020	Feb 2020	Apr 2020	May 2020	Jun 2020	Jul 2020	Aug 2020	Sep 2020	Oct 2020	Nov 2020	Des 2020	Jan 2021
Irena Istari Iskandar	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Desti Liliati	V	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V
Christopher J. Clower	V	-	V	V	-	V	V	-	V	-	V	V
Markus D. Pranoto	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Indah Mulyawan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Jasin Hermawan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Hady Sutiono	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

Hubungan Afiliasi

Dalam menjunjung profesionalisme dan objektivitas setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengelolaan Perusahaan, hubungan afiliasi yang ada dari organ-organ tersebut selalu dinyatakan dengan jelas. Untuk tahun buku 2020, setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama Perusahaan; setiap anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun pemegang saham pengendali Perusahaan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan Perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi juga tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan selain dari yang telah ditetapkan RUPS.

16. The Board of Directors assists in providing facilities and/or resources for the smooth implementation of duties and authorities of the Company's organs. Organs of the Company are the GMS, Directors and Board of Commissioners for a company in the form of a limited liability company.

17. The Board of Directors ensures that complete information regarding the Company is provided to the Board of Commissioners in a timely manner.

18. The Board of Directors has the authority to represent the Company inside and outside the court.

Remuneration Policy for the Board of Directors

- Reviewing the compensation given for Boards of Directors of similar companies and observing the market condition.

- Taking into account the Company's business performance and the contribution of each individual, which is then discussed by the Remuneration and Nomination Committee to prepare recommendations.

- Submitting these recommendations to the Board of Commissioners for further discussion and approval. The proposal for the Board of Directors' remuneration is discussed and approved in the AGMS.

Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors In carrying out their duties to manage and monitor the running of the Company, the Board of Commissioners and the Board of Directors meet together every month to discuss, evaluate and coordinate the Company's management. Throughout 2020, the Board of Commissioners and the Board of Directors held 12 (twelve) meetings together, as shown in the attendance list below:

Affiliations

In upholding the professionalism and objectivity of each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors in managing the Company, the affiliation of these organs are always clearly stated. For the 2020 financial year, each member of the Board of Commissioners had no affiliation with fellow members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major shareholders of the Company; each member of the Board of Directors had no affiliation with fellow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or the controlling shareholder of the Company.

Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors do not take advantage of the Company for personal gain, family and/or other parties that might harm the Company. The Board of Commissioners and the Board of Directors also do not take and or receive personal benefits from the Company other than those stipulated by the GMS.

Komite yang Bertanggung Jawab Kepada Dewan Komisaris

Committees Reporting to the Board of Commissioners

1. Komite Audit

Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dan evaluasi, khususnya atas hal-hal yang terkait dengan proses pelaporan keuangan, pengendalian internal, kinerja dan efektivitas audit internal dan eksternal, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembentukan Komite Audit merujuk pada ketentuan POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Komite Audit BPF dibentuk melalui Keputusan Dewan Komisaris no. BPF/KOM/04/2010 tertanggal 18 Mei 2010.

Piagam Komite Audit

Keberadaan Komite audit telah dilengkapi dengan Piagam Komite Audit yang ditetapkan pada tanggal 15 Maret 2013. Piagam yang berperan sebagai acuan pelaksanaan Komite Audit ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan, struktur dan kualifikasi tanggung jawab, pertemuan, pelaporan serta masa jabatan.

Masa Jabatan Anggota Komite Audit

Masa jabatan Komite Audit tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Dewan Komisaris. Dalam anggaran dasar Perusahaan telah ditentukan bahwa anggota Komite Audit dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan tugas Komite Audit, pemberhentian dan penggantian Komite Audit harus merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Independensi Komite audit

Anggota Komite Audit adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham pengendali Perusahaan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, para anggota senantiasa mengedepankan independensi dan profesionalisme yang tinggi, serta menghindari adanya benturan kepentingan.

Struktur dan Keanggotaan

Susunan Komite Audit yang terkini ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BPF/KOM/03/2015, yaitu bahwa Komite Audit BPF terdiri atas satu orang ketua yang merangkap sebagai Komisaris Independen Perusahaan, serta dua orang anggota. Susunan anggota Komite Audit BPF di tahun 2020 adalah:

Ketua	<i>Chairman</i>	: Desti Liliati
Anggota	<i>Member</i>	: Eddy Silalahi
Anggota	<i>Member</i>	: Iwan Setiawan

Profil Komite Audit

Desti Liliati

Desti Liliati menjabat sebagai Komisaris Independen PT Batavia Prosperindo Finance Tbk sejak tahun 2010. Lahir pada tahun 1979 di Tanjung Karang, Lampung, beliau meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Atma Jaya, Jakarta pada tahun 2002. Desti Liliati memulai karirnya sebagai Associate Auditor di perusahaan akuntansi KAP Prasetyo

1. Audit Committee

The Audit Committee was formed to assist the Board of Commissioners in carrying out its supervisory and evaluation duties and functions, particularly on matters related to the financial reporting process, internal control, performance and effectiveness of internal and external audits, as well as compliance with prevailing laws and regulations.

The establishment of the Audit Committee refers to the provisions of OJK Regulation Number 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee. BPF's Audit Committee was established through the Decree of the Board of Commissioners no. BPF/KOM 04/2010 dated 18 May 2010.

Audit Committee Charter

The existence of the Audit Committee has been complemented by the Audit Committee Charter which was issued on March 15, 2013. The charter acts as a reference for the implementation of the Audit Committee, regulates matters relating to the authority, structure and responsibilities qualifications, meetings, reporting and terms of office.

Term of Office of Audit Committee Members

The term of office of the Audit Committee must not exceed the term of office of the Board of Commissioners and can be extended with the approval of the Board of Commissioners. In the Company's Articles of Association, it has been determined that members of the Audit Committee can be re-elected only for the next 1 (one) period.

To ensure the sustainability of the implementation of the Audit Committee's duties, dismissal and replacement of the Audit Committee must refer to the prevailing laws and regulations.

Independence of the Audit Committee

Audit Committee members are independent parties who are not affiliated with members of the Board of Commissioners, Directors, or controlling shareholders of the Company. In carrying out their duties and responsibilities, members always prioritize high independence and professionalism, and avoid conflicts of interest.

Structure and membership

The current composition of the Audit Committee is officially established under the Decree of the Board of Commissioners No. BPF/KOM/03/2015, which states that BPF Audit Committee consists of one chairman who is also the Company's Independent Commissioner, and two members. The composition of members of BPF Audit Committee in 2020 were:

Profile of the Audit Committee

Desti Liliati

Desti Liliati became an Independent Commissioner of PT Batavia Prosperindo Finance Tbk since 2010. Born in 1979 in Tanjung Karang, Lampung, she obtained her Accounting degree from Atma Jaya University, Jakarta in 2002. Desti Liliati began her career as an Associate Auditor of

& Sanjaya (Ernst & Young) hingga tahun 2004, lalu bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Sekuritas sebagai Manager Divisi Corporate Finance (2004-2007). Beliau kemudian melanjutkan perjalanan karirnya di PT Strait Finance sebagai Head of Finance Division (2007-2010), PT Karya Anugrah Kusuma sebagai Head of Finance Division (2010-2011), PT Prima Cipta Jaya sebagai Head of Finance Division (2011-2020), dan Head of Finance Division PT Strait Merchants Capital (2020-sekarang).

Eddy Silalahi

Eddy Silalahi bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk. sebagai anggota Komite Audit sejak tahun 2013. Beliau lahir di Sarimatondang, Sumatera Utara pada tahun 1960. Eddy Silalahi memulai karirnya di Kantor Akuntan Publik Prasetio Utomo & Co. sebagai Senior Auditor (1991-1995), lalu melanjutkan karir di PT Swadharma Indotama Finance sebagai Account Receivables Manager (1995-1997), Accounting Manager (1998-2000), Branch Manager (2000-2005), dan Credit Manager (2005-2006), serta menjabat Accounting Manager di PT Indoliz Marine (2009-2012).

Iwan Setiawan

Iwan Setiawan lahir di Cirebon pada tahun 1973. Beliau mengawali karirnya di Bank Danamon Indonesia sebagai Supervisor Divisi Consumer Banking (2001-2007), Supervisor Divisi Retail Banking (2007-2010), Manajer Administrasi dan Support Divisi Perkreditan (2010-2014), dan Manajer Portfolio dan Perencanaan Divisi Manajemen Risiko (2014-2015). Iwan Setiawan bergabung dengan Komite Audit Perusahaan pada tahun 2013.

Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan pertemuan rutin setiap sekitar tiga bulan, termasuk pertemuan dengan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Auditor Internal, dan Auditor Independen untuk koordinasi dan pembahasan. Sepanjang tahun 2020, Komite Audit telah mengadakan pertemuan sebanyak 4 kali, sebagai berikut:

1. 27 Maret 2020; dihadiri: Desti Liliati, Eddy Silalahi, Iwan Setiawan, Indah Mulyawan.
2. 26 Juni 2020; dihadiri: Desti Liliati, Eddy Silalahi, Iwan Setiawan, Indah Mulyawan.
3. 23 Oktober 2020; dihadiri: Desti Liliati, Eddy Silalahi, Iwan Setiawan, Indah Mulyawan.
4. 18 Desember 2020; dihadiri: Desti Liliati, Eddy Silalahi, Iwan Setiawan, Indah Mulyawan.

Kegiatan Komite Audit

Kegiatan Internal

Sepanjang tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan kegiatan internal sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan rutin dengan Auditor Internal untuk pembahasan sistem pengendalian internal, hasil temuan audit yang telah dilaksanakan dan kemajuan status tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan oleh auditor.
2. Melakukan tinjauan dan memberikan saran pada Laporan Keuangan triwulan sebelum dipresentasikan ke para pemegang saham.
3. Melakukan tinjauan terhadap kinerja, independensi, dan objektivitas dari akuntan publik sebagai bahan rekomendasi bagi Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan pengangkatan kembali atau penggantian akuntan publik tersebut.

the public accounting firm Prasetyo & Sanjaya (Ernst & Young) until 2004, then joined PT Batavia Prosperindo Sekuritas as Manager of its Corporate Finance Division (2004-2007). Her career continued at PT Strait Finance as Head of Finance Division (2007-2010), PT Karya Anugrah Kusuma as Head of Finance Division (2010-2011), PT Prima Cipta Jaya as Head of Finance Division (2011-2020) and Head of Finance Division PT Strait Merchants Capital (2020-present).

Eddy Silalahi

Eddy Silalahi joined PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk as member of the Audit Committee in 2013. He was born in Sarimatondang, North Sumatra in 1960. He began his career as Senior Auditor of the public accounting firm Prasetio Utomo & Co (1991-1995), then continued his career in PT Swadharma Indotama Finance as Account Receivables Manager (1995-1997), Accounting Manager (1998-2000), Branch Manager (2000-2005) and Credit Manager (2005-2006). His career then continued in PT Indoliz Marine (2009-2012) as Accounting Manager.

Iwan Setiawan

Born in Cirebon in 1973, Iwan Setiawan built his career in Bank Danamon Indonesia as Supervisor-Consumer Banking Division (2001-2007), Supervisor-Retail Banking Division (2007-2010), Administration and Support Manager-Credit Division (2010-2014), and Portfolio and Planning Manager-Risk Management Division (2014-2015). He joined the Company's Audit Committee in 2013.

Meetings of the Audit Committee

The Audit Committee holds a regular meeting every three months, including meetings with the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Internal Auditor and the Independent Auditor for coordination and discussion. Throughout 2020, the Audit Committee held 4 meetings, as follows:

1. March 27, 2020; present: Desti Liliati, Eddy Silalahi, Iwan Setiawan, Indah Mulyawan.
2. June 26, 2020; present: Desti Liliati, Eddy Silalahi, Iwan Setiawan, Indah Mulyawan.
3. October 23, 2020; present: Desti Liliati, Eddy Silalahi, Iwan Setiawan, Indah Mulyawan.
4. December 18, 2020; present: Desti Liliati, Eddy Silalahi, Iwan Setiawan, Indah Mulyawan.

Activities of the Audit Committee

Internal Activities

Throughout 2020, the Audit Committee carried out the following internal activities:

1. Held regular meetings with the Internal Auditor to discuss the internal control system, the results of the audit findings that have been implemented and the progress of the follow-up status of the recommendations given by the auditors.
2. Reviewed and provided advice on the quarterly Financial Statements before being presented to shareholders.
3. Reviewed the performance, independence and objectivity of the public accountant as a recommendation for the Board of Commissioners to make decisions on the re-appointment or replacement of the public accountant.

4. Meninjau dan memberikan saran atas kerangka manajemen kepatuhan.
5. Melakukan tinjauan dan memberikan komentar atas hasil dari keterlibatan audit internal.

Kegiatan Eksternal

Pada tahun 2020, Komite Audit mengadakan pertemuan dengan auditor eksternal untuk mendiskusikan pelaksanaan audit Laporan Keuangan Perusahaan secara keseluruhan. Pertemuan ini diadakan sebelum dan sesudah periode audit Laporan Keuangan Perusahaan.

2. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab pada Dewan Komisaris, dan merupakan salah satu komite penunjang fungsi dan tugas Dewan Komisaris dalam proses remunerasi dan nominasi, serta meningkatkan kualitas, kompetensi, dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi merujuk pada ketentuan POJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik, serta Anggaran Dasar Perusahaan.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Untuk memastikan fungsi dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi, Dewan Komisaris telah menyusun dan mengesahkan Piagam Komite pada tanggal 10 April 2016. Uraian yang tercantum dalam piagam ini mencakup keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, penyelenggaraan rapat dan sistem pelaporan, kegiatan, serta larangan.

Masa Jabatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Sesuai ketentuan OJK, masa jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris, diatur lebih lanjut dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setelahnya.

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota komite wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Sedangkan pejabat eksekutif yang menjadi anggota komite wajib memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan nominasi.

Struktur dan Keanggotaan

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi BPF per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

4. Reviewed and provided advice on the compliance management framework.

5. Conducted reviews and provided comments on the results of the internal audit engagement.

External Activities

In 2020, the Audit Committee held meetings with the external auditor to discuss the implementation of the Company's Financial Statements' overall audit. The meetings were held before and after the audit period of the Company's Financial Statements.

2. The Remuneration and Nomination Committee

The Remuneration and Nomination Committee is responsible to the Board of Commissioners, and is one of the committees supporting the functions and duties of the Board of Commissioners in the remuneration and nomination process, as well as improving the quality, competence and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners. The establishment of the Remuneration and Nomination Committee refers to the provisions of OJK Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies, OJK Regulation Number 34/POJK.04/2014 concerning the Remuneration and Nomination Committee of Issuers or Public Companies, as well as the Company's Articles of Association.

Remuneration and Nomination Committee Charter

To ensure the functions and responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee, the Board of Commissioners has drafted and ratified the Committee Charter on April 10, 2016. The descriptions stated in this charter covers membership, duties and responsibilities, meetings and reporting systems, activities and prohibitions.

Term of Office of the Remuneration and Nomination Committee Members

In accordance with OJK regulations, the term of office of the Remuneration and Nomination Committee is not longer than the term of office of the Board of Commissioners, which is further stipulated in the Remuneration and Nomination Committee Guidelines. Members of the Remuneration and Nomination Committee are appointed for a term of 5 (five) years and can be reappointed thereafter.

Independence of the Remuneration and Nomination Committee members must have high integrity, ability, knowledge and experience in accordance with their field of work, and be able to communicate well. Meanwhile, executive officers who are members of the committee must have knowledge of the remuneration and nomination systems.

Structure and Membership

The composition of BPF's Remuneration and Nomination Committee as of December 31, 2020 is as follows:

Ketua	<i>Chairman</i>	:	Desti Liliati
Anggota	<i>Member</i>	:	Christopher J. Clower
Anggota	<i>Member</i>	:	Sularno

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Desti Liliati

Desti Liliati menjabat sebagai Komisaris Independen PT Batavia Prosperindo Finance Tbk sejak tahun 2010. Lahir pada tahun 1979 di Tanjung Karang, Lampung, beliau meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Atma Jaya, Jakarta pada tahun 2002. Desti Liliati memulai karirnya sebagai Associate Auditor di perusahaan akuntansi KAP Prasetyo & Sanjaya (Ernst & Young) hingga tahun 2004, lalu bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Sekuritas sebagai Manager Divisi Corporate Finance (2004-2007). Beliau kemudian melanjutkan perjalanan karirnya di PT Strait Finance sebagai Head of Finance Division (2007-2010), PT Karya Anugrah Kusuma sebagai Head of Finance Division (2010-2011), PT Prima Cipta Jaya sebagai Head of Finance Division (2011-2020), dan Head of Finance Division PT Strait Merchants Capital (2020-sekarang).

Christopher Clower

Christopher Clower berwarga negara Amerika Serikat, lahir pada tahun 1965. Beliau mengawali karirnya sebagai Analis bidang Investment Banking-Corporate Finance di Bankers Trust Amerika Serikat (1994-1997), kemudian menjabat posisi Associate bidang Investment Banking-Corporate Finance di Deutsche Bank Singapore (1997-1998), lalu sebagai Head of Southeast Asia Corporate Finance (2004-2009) dan Managing Director (2006-2009) di Merrill Lynch Singapore. Karirnya berlanjut dengan posisi sebagai Principal di Developing Natural Resource Concessions in Indonesia (2009-2012). Christopher Clower bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen pada tahun 2012, dan kemudian menjabat posisi Komisaris PT Batavia Prosperindo Finance Tbk sejak tahun 2015. Christopher Clower meraih gelar Sarjana Ilmu Teknik Nuklir dari Northwestern University dan MBA dari University of Chicago, Amerika Serikat.

Sularno

Sularno menjabat sebagai Manager Divisi Personalia & Umum PT Batavia Prosperindo Finance Tbk sejak tahun 2007. Lahir pada tahun 1965 di Solo, Jawa Tengah, beliau meraih gelar Sarjana Manajemen dari Universitas Terbuka pada tahun 1992. Sularno memulai karirnya sebagai Manager Personalia & Umum di PT Bira Multi Finance sejak tahun 1994 hingga tahun 2007, kemudian bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Finance Tbk dengan menduduki posisi yang sama sejak tahun 2007 sampai saat ini.

Pendidikan dan Pelatihan Komite Remunerasi dan Nominasi

Perusahaan senantiasa mendukung pelaksanaan fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, yang diikuti dalam bentuk seminar atau lokakarya terkait perkembangan kerangka regulasi dan pengembangan kompetensi kompetensi terkait.

Pada tahun 2020 Komite Remunerasi dan Nominasi tidak mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan tugasnya dikarenakan pandemi.

Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang 2020, kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Profile of the Remuneration and Nomination Committee Desti Liliati

Desti Liliati became an Independent Commissioner of PT Batavia Prosperindo Finance Tbk since 2010. Born in 1979 in Tanjung Karang, Lampung, she obtained her Accounting degree from Atma Jaya University, Jakarta in 2002. Desti Liliati began her career as an Associate Auditor of the public accounting firm Prasetyo & Sanjaya (Ernst & Young) until 2004, then joined PT Batavia Prosperindo Sekuritas as Manager of its Corporate Finance Division (2004-2007). Her career continued at PT Strait Finance as Head of Finance Division (2007-2010), PT Karya Anugrah Kusuma as Head of Finance Division (2010-2011), PT Prima Cipta Jaya as Head of Finance Division (2011-2020) and Head of Finance Division PT Strait Merchants Capital (2020-present).

Christopher Clower

Christopher Clower, an American citizen, was born in 1965. He began his career as an Analyst of Investment Banking-Corporate Finance in Bankers Trust, USA (1994-1997), then served as an Associate in Investment Banking-Corporate Finance with the Deutsche Bank Singapore (1997-1998), continued on as Head of Southeast Asia Corporate Finance (2004-2009) and Managing Director (2006-2009) at Merrill Lynch Singapore. His career continued as Principal of Developing Natural Resource Concessions in Indonesia (2009-2012). Christopher Clower joined PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen in 2012 as Financial Advisor and was appointed Commissioner of PT Batavia Prosperindo Finance Tbk in 2015. Mr. Clower has a Bachelor of Science in Nuclear Engineering from Northwestern University and an MBA from University of Chicago, USA.

Sularno

Sularno has served as Human Resources & General Affairs Manager of PT Batavia Prosperindo Finance Tbk since 2007. Born in 1965 in Solo, Central Java he earned a Bachelor of Management degree from the Open University in 1992. Sularno started his career as Human Resources & General Affairs Manager at PT Bira Multi Finance from 1994 to 2007, then joined PT Batavia Prosperindo Finance Tbk holding the same position from 2007 to present.

Education and Training of the Remuneration and Nomination Committee

The Company continues to support the implementation of the functions of the Remuneration and Nomination Committee through various education and training programs, which are attended in the form of seminars or workshops related to the development of the regulatory framework and the development of related competencies.

In 2020 the Remuneration and Nomination Committee did not participate in any education and training programs related to its duties due to the pandemic.

Remuneration and Nomination Committee Activities Throughout 2020, the activities of the Remuneration and Nomination Committee were as follows:

1. Membantu melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait kebijakan evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Melakukan pengkajian kebijakan dan struktur remunerasi yang telah diterapkan, membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

3. Komite Pemantau Risiko

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) berikut ini:

- POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas POJK No. 30/POJK.05/2014 perihal "Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan", dan
- POJK No.1/POJK.05/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang "Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank", maka untuk membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya terutama mengenai kerangka kerja, kebijakan dan prosedur manajemen risiko Perusahaan, dibentuklah Komite Pemantau Risiko yang pembentukannya telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.00142/BPF/XII/2019 tertanggal 06 Desember 2019.

Tanggung jawab utama Komite Pemantau Risiko adalah:

1. Mengevaluasi dan mengkaji kebijakan dan strategi manajemen risiko untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris.
2. Mengevaluasi kesesuaian antara pelaksanaan manajemen risiko dengan kebijakan manajemen risikonya.
3. Mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan kehati-hatian serta kesesuaian terhadap kerangka kerja kebijakan dan sistem pengendalian yang dibangun oleh unit-unit kerja terkait.
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas unit-unit yang mengelola manajemen risiko.

Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari:

- Seorang Komisaris Independen (Ketua)
- Dua anggota lainnya

Profil Komite Pemantau Risiko

Desti Liliati

Desti Liliati menjabat sebagai Komisaris Independen PT Batavia Prosperindo Finance Tbk sejak tahun 2010. Lahir pada tahun 1979 di Tanjung Karang, Lampung, beliau meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Atma Jaya, Jakarta pada tahun 2002. Desti Liliati memulai karirnya sebagai Associate Auditor di perusahaan akuntansi KAP Prasetyo & Sanjaya (Ernst & Young) hingga tahun 2004, lalu bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Sekuritas sebagai Manager Divisi Corporate Finance (2004-2007). Beliau kemudian melanjutkan perjalanan karirnya di PT Strait Finance sebagai Head of Finance Division (2007-2010), PT Karya Anugrah Kusuma sebagai Head of Finance Division (2010-2011), PT Prima Cipta Jaya sebagai Head of Finance Division (2011-2020), dan Head of Finance Division PT Strait Merchants Capital (2020-sekarang).

Andreas Pratama Ginting

Lahir pada tahun 1984 di Bandung, Jawa Barat, beliau meraih gelar Sarjana Administrasi Bisnis dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 2007. Andreas Pratama Ginting memulai karirnya sebagai Account Executive di Apostrophe International (2009-2010), lalu

1. Assisted in assessing and providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the performance evaluation policies of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

2. Reviewed the remuneration policies and structures that have been implemented, assisted the Board of Commissioners in assessing performance according to the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.

3. Risk Monitoring Committee

Referring to the following Financial Services Authority Regulations (POJK):

- *POJK No. 29/POJK.05/2020 on Amendments to POJK No. 30/POJK.05/2014 concerning "Good Corporate Governance for Financing Companies"; and*
- *POJK No. 1/POJK.05/2015 dated March 26, 2015 on "Application of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions"; in order to provide assistance to the Board of Commissioners in monitoring the implementation of the Company's risk management framework, policies and procedures, this committee was established, which establishment was based on the Decree of the Board of Directors No. 00142/BPF/XII/2019 dated December 6, 2019.*

The main responsibilities of the Risk Monitoring Committee are:

- 1. Evaluating and reviewing risk management policies and strategies for approval from the Board of Commissioners.*
- 2. Evaluating compliance of the risk management implementation with the risk management policies.*
- 3. Evaluating compliance with the prudential provisions and with the policy and control system frameworks established by the related work units.*
- 4. Monitoring and evaluating the implementation of duties of the risk management units.*

The Risk Monitoring Committee members consist of:

- *An Independent Commissioner (chairman)*
- *Two other members*

Profile of the Risk Monitoring Committee

Desti Liliati

Desti Liliati became an Independent Commissioner of PT Batavia Prosperindo Finance Tbk since 2010. Born in 1979 in Tanjung Karang, Lampung, she obtained her Accounting degree from Atma Jaya University, Jakarta in 2002. Desti Liliati began her career as an Associate Auditor of the public accounting firm Prasetyo & Sanjaya (Ernst & Young) until 2004, then joined PT Batavia Prosperindo Sekuritas as Manager of its Corporate Finance Division (2004-2007). Her career continued at PT Strait Finance as Head of Finance Division (2007-2010), PT Karya Anugrah Kusuma as Head of Finance Division (2010-2011), PT Prima Cipta Jaya as Head of Finance Division (2011-2020) and Head of Finance Division PT Strait Merchants Capital (2020-present).

Andreas Pratama Ginting

Born in 1984 in Bandung, West Java, he earned a Bachelor of Business Administration degree from Parahyangan Catholic University, Bandung, in 2007. Andreas Pratama Ginting started his career as an Account Executive at Apostrophe International (2009-2010), then continued his career at PT

melanjutkan karirnya di PT ORIX Indonesia Finance sebagai Account Manager Divisi Alat Berat di Cabang Palembang (2010-2012). Beliau kemudian bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Finance Tbk sebagai Asisten Manajer Divisi Alat Berat (2012-2016), dan kemudian menjabat sebagai Manajer Divisi Alat Berat di PT Malacca Trust Finance (2016-2018). Andreas Pratama Ginting menjadi anggota Komite Pemantau Risiko di PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. sejak Desember 2019

Mulyadi Chang

Lahir pada tahun 1979 di Selat Panjang, Riau, beliau meraih gelar Sarjana Ilmu Komputer dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 2001. Mulyadi Chang memulai karirnya di PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk sejak tahun 2001 hingga 2017 dengan posisi terakhir sebagai Senior Manager, selain itu beliau juga merangkap sebagai dosen (lecturer) di Xinya College Indonesia (2008-2010). Karirnya berlanjut sebagai Konsultan Teknologi Informasi di PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk (2018-2020), dan PT Indo Teknologi Solusi sebagai Chief Technology Officer (2018-sekarang). Mulyadi Chang bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. sejak November 2017 dan telah menjadi anggota Komite Pemantau Risiko di PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. sejak Desember 2019.

ORIX Indonesia Finance as Account Manager for the Heavy Equipment Division at the Palembang branch (2010-2012). He then joined PT Batavia Prosperindo Finance Tbk as Assistant Manager of the Heavy Equipment Division (2012-2016), and then served as Manager of the Heavy Equipment Division at PT Malacca Trust Finance (2016-2018). Andreas Pratama Ginting has served as a member of the Risk Monitoring Committee at PT Batavia Prosperindo Finance Tbk since December 2019.

Mulyadi Chang

Born in 1979 in Selat Panjang, Riau, he earned a Bachelor of Computer Science degree from Bina Nusantara University, Jakarta in 2001. Mulyadi Chang started his career at PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk from 2001 to 2017 with his last position as Senior Manager, while concurrently he was also a lecturer at Xinya College Indonesia (2008-2010). He then continued his career as an Information Technology Consultant at PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk (2018-2020), and PT Indo Teknologi Solusi as Chief Technology Officer (2018-present). Mulyadi Chang joined PT Batavia Prosperindo Finance Tbk since November 2017 and has served as a member of the Risk Monitoring Committee at PT Batavia Prosperindo Finance Tbk since December 2019.

Dalam suatu perusahaan, pengelolaan risiko yang baik merupakan elemen penting dalam memastikan keberhasilan dan keberlangsungan usaha. Penerapan pengelolaan risiko secara konsisten dan menyeluruh membantu Perusahaan untuk senantiasa memastikan kelancaran operasional dan menjaga keuangan Perusahaan di tingkat yang sehat. Perusahaan memiliki prosedur manajemen risiko yang terdiri dari beberapa proses, meliputi identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan, untuk seluruh risiko yang timbul dan dihadapi oleh Perusahaan dalam seluruh kegiatan usahanya. Direksi, Dewan Komisaris, dan semua komite yang mendukung fungsi Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa memantau dan secara rutin mengevaluasi pengelolaan akan segala risiko yang mungkin timbul dan dihadapi BPF.

Profil Risiko BPF Pada Tahun 2020

Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko yang timbul akibat ketidaktepatan pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini sangat tergantung pada kecakapan Direksi dan Dewan Komisaris, serta kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang memadai, yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, pemantauan risiko, dukungan sistem informasi Manajemen Risiko dan sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Dalam menghadapi krisis tahun 2020 yang muncul sebagai dampak dari pandemi Covid-19, Direksi dan Dewan Komisaris BPF merespon sejak dini dengan melakukan pengawasan aktif untuk identifikasi dan pemantauan risiko strategis. Direksi, dengan pendampingan Dewan Komisaris, secepatnya menetapkan limit risiko dan mempersiapkan langkah kebijakan strategis yang harus diambil, salah satunya adalah kebijakan dan skema restrukturisasi pinjaman yang diberikan pada para nasabah BPF.

Risiko Operasional

Risiko operasional muncul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia (*human error*), kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan suatu Perusahaan.

Pandemi Covid-19 sebagai faktor kejadian eksternal yang membawa risiko operasional ditanggapi BPF dengan beberapa kebijakan strategis, salah satunya adalah perubahan sementara otoritas persetujuan pemberian pembiayaan di kantor-kantor cabang dan regional. BPF juga meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian internal melalui koordinasi lebih intensif antar regional untuk identifikasi dan pengukuran dini akan risiko operasional yang mungkin timbul.

Risiko Kredit

Risiko kredit muncul akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPF. Kualitas kolektibilitas Perusahaan selalu menjadi fokus perhatian manajemen, yang dipantau secara ketat oleh fungsi kendali internal dan audit internal. BPF mengantisipasi risiko ini dengan selalu mengelola dan mengevaluasi ketat struktur pembiayaan kredit, kelayakan konsumen, dan piutangnya. Prinsip kehati-hatian yang dianut terlihat dalam program "Prinsip Mengenal Nasabah" atau "Know Your Customer" yang diterapkan sejak dulu untuk lebih mengenali konsumen yang akan diberi fasilitas pembiayaan.

In a company, good risk management is an important element in securing the success and continuity of the business. A consistent and comprehensive implementation of risk management helps the Company to always ensure smooth operations and maintain the Company's finances at a healthy level. The Company has risk management procedures which consist of several processes, including identification, measurement, control and monitoring, of all risks that arise and are faced by the Company in all of its business activities. The Board of Directors, the Board of Commissioners, and all committees that support the functions of the Board of Directors and the Board of Commissioners constantly monitor and regularly evaluate the management of all risks that may arise and be faced by BPF.

BPF Risk Profile in 2020

Strategic Risk

Strategic risk is the risk arising from inaccurate decision making and/or implementation of a strategic decision, as well as failure to anticipate changes in the business environment. This risk is highly dependent on the skills of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as adequate Risk Management policies and procedures, which include the process of identification, measurement, control, risk monitoring, support for the Risk Management information system and a comprehensive internal control system.

In facing the 2020's crisis that emerged as an impact of the Covid-19 pandemic, BPF's Board of Directors and Board of Commissioners responded early by taking active supervision to identify and monitor strategic risks. The Board of Directors, with the assistance of the Board of Commissioners, immediately set the risk limits and prepared strategic policy steps to be taken, such as the policy and scheme for a loan restructuring program for BPF's customers.

Operational Risk

Operational risks arise due to inadequacy and/or malfunction of internal processes, human errors, system failures, and/or external factor events.

The Covid-19 pandemic as an external factor event that brought operational risk has been responded to by BPF with several strategic policies, one of which was the temporary change in the financing approval authority in branch and regional offices. BPF also improved its supervisory and internal control functions through more intensive coordination between regions for early identification and measurement of operational risks that may arise.

Credit Risk

Credit risk arises due to the failure of other parties to fulfill obligations to BPF. The quality of the Company's collectability has always been the focus of the management, which is closely monitored by the internal control and internal audit functions. BPF anticipates this risk by always strictly managing and evaluating the credit financing structure, consumer feasibility, and receivables. The prudential principles adopted are reflected in the "Know Your Customer" program that has been long implemented to better identify consumers to be given financing facilities.

Prosedur seleksi konsumen dan penyaluran kredit dengan kontrol ketat selama bertahun-tahun terbukti membangun ketahanan BPF dalam menghadapi masa krisis tahun 2020. Proporsi jumlah nilai pembiayaan yang membutuhkan restrukturisasi hanya sekitar 35%, itu pun dengan kinerja pembayaran kredit tetap positif, dan dengan skema yang masih cukup aman, membuat *cashflow* BPF terjaga baik sepanjang tahun 2020.

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang dihadapi pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.

Selama beberapa tahun terakhir, BPF terus membangun kekuatan fundamentalnya dengan memperkuat struktur permodalannya. Berbagai langkah strategis yang telah dilakukan untuk mengantisipasi risiko pasar adalah penerbitan obligasi dan *rights issue* dalam beberapa tahun terakhir, proporsi pinjaman yang dikelola dengan baik, serta berbagai rasio solvabilitas dan rentabilitas yang terjaga ketat. Semua langkah strategis tersebut membuat kondisi posisi aset, liabilitas, dan ekuitas BPF tetap sehat dan sangat mencukupi, meski BPF harus merestruktur sebagian dari pinjaman pembiayaan para debiturnya.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul akibat ketidakmampuan suatu perusahaan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dengan sumber pendanaan arus kas dan/atau dengan suatu aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan.

Kekuatan struktur permodalan BPF yang dibangun selama bertahun-tahun terbukti bermanfaat sebagai strategi yang efektif untuk mengantisipasi risiko likuiditas. Kualitas pengembalian pinjaman BPF pada perbankan yang terjaga sangat positif dan kemampuan BPF melunasi kewajiban dari obligasi yang diterbitkannya dari dana Perusahaan di masa krisis pandemi membuktikan bahwa risiko likuiditas BPF terantisipasi dengan sangat baik sejak dini.

Risiko Hukum

Risiko hukum timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum. BPF senantiasa mengantisipasi risiko kepatuhan yang terkait semua hukum, perundangan, peraturan, dan kebijakan yang berlaku dengan menetapkan standar yang ketat di setiap proses bisnisnya yang rentan risiko kepatuhan, menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas di seluruh kegiatan usahanya. Selain itu, BPF pun senantiasa menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaannya. Karenanya, BPF tidak pernah menghadapi risiko hukum yang berarti selama ini.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang muncul akibat suatu perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan pada semua peraturan dan ketentuan yang terkait usaha Perusahaan selalu menjadi prioritas BPF dalam menjalankan usahanya dan dipantau aktif oleh berbagai organ dalam Perusahaan, terutama pengawasan langsung oleh Direksi dan manajemen di tiap tingkatan.

Tight control over consumer selection and lending procedures over the years have proven to build BPF's resilience in the time of crisis in 2020. The proportion of financings that required restructuring was only around 35%, which still showed positive payment performance, and with a relatively safer scheme being offered resulted in a well maintained cash flow for BPF throughout 2020.

Market Risk

Market risk is the risk faced in the position of assets, liabilities, equity, and/or off balance sheet accounts, including derivative transactions due to changes in the overall market conditions.

Over the past few years, BPF has continued to build on its fundamental strength by strengthening its capital structure. Various strategic steps taken that anticipated market risks were the issuance of bonds and rights issues in recent years, the well managed proportion of loans, and the strictly maintained solvency and profitability ratios. All of these strategic steps have kept BPF's assets, liabilities and equity position in a healthy and very sufficient condition, even though BPF had to restructure part of its debtors' loans.

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk arising from a company's inability to meet maturing liabilities with cash flow funding sources and/or any liquid asset that can be easily converted into cash, without disrupting the Company's activities and financial condition.

BPF's strong capital structure that has been built over the years has proven to be an effective strategy to anticipate liquidity risks. BPF's loan repayments quality to banks has been maintained in a very positive manner and the ability of BPF to pay off its bonds obligations with the Company's funds during the pandemic crisis proves that BPF's liquidity risk was very well attended to.

Legal Risk

Legal risks arise due to lawsuits and/or weaknesses in legal aspects. BPF always anticipates compliance risks related to all applicable laws, legislation, regulations and policies by establishing strict standards in each of its business processes that are prone to compliance risks, implementing the GCG principles, and referring to clear Standard Operating Procedures (SOPs) in all of its business activities. In addition, BPF always carries out the monitoring and evaluating functions over its implementation. Therefore, BPF has never faced significant legal risks so far.

Compliance Risk

Compliance risk is the risk that arises because a company does not comply with and/or does not implement the prevailing laws and regulations. Compliance with all regulations and provisions related to the Company's business has always been BPF's priority in running its business and is actively monitored by various organs within the Company, especially direct supervision by the Board of Directors and management at each level.

Tingkat kepatuhan BPF yang baik selama ini terbukti meningkatkan kesehatan dan ketahanan korporasi BPF dalam masa-masa sulit seperti tahun 2020.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi ialah risiko yang muncul akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan. BPF senantiasa menjaga integritas Perusahaan dalam berbagai aspek usaha, baik dari tingkat kepatuhan, kesehatan usaha, maupun setiap aktivitas bisnis yang dijalankannya.

Keberhasilan BPF dalam setiap penerbitan obligasi dan *rights issue* yang diselenggarakan selama ini, termasuk penerbitan obligasi tahun 2020, menjadi indikator tingginya kepercayaan para pemegang saham dan investor pada reputasi BPF. Kualitas pengembalian pinjaman BPF pada perbankan selama ini juga membangun kepercayaan akan kemampuan dan likuiditas BPF, sehingga para mitra perbankan tetap bersedia dan menawarkan pemberian pinjaman pada BPF, bahkan di masa pandemi tahun 2020.

Risiko Pendanaan

Risiko ini muncul akibat ketidakcukupan dana/modal pada suatu perusahaan, termasuk kurangnya akses tambahan dana/modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana/modal yang tidak terduga. BPF telah mengantisipasi risiko ini dengan strategi memperkuat struktur modal Perusahaan, terutama diversifikasi sumber pendanaan Perusahaan. Sejak tahun 2013, BPF telah menerbitkan beberapa obligasi dan melakukan penawaran umum terbatas, serta melakukan pengelolaan yang cermat atas kelebihan dana Perusahaan. Dengan demikian, BPF mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendanaan, sekaligus tetap menjaga baik tingkat kepercayaan dari perbankan sebagai mitra utama pendanaan.

Meskipun di masa pandemi, penerbitan obligasi BPF sebesar Rp 200 miliar yang diadakan pada bulan Mei 2020 sesuai rencana sebelumnya tetap mendapat respon yang sangat positif. Perusahaan juga mampu melunasi obligasi yang jatuh tempo pada Mei 2020 sebesar Rp 300 miliar, dan bahkan masih sanggup melakukan *buyback* obligasinya senilai Rp 93,5 miliar yang jatuh tempo pada Juni 2021.

The good level of BPF compliance has been proven to improve the health and corporate resilience of BPF in difficult times such as 2020.

Reputation Risk

Reputation risk is a risk that arises as a result of stakeholders' declining trust derived from negative perceptions of the Company. BPF always maintains the integrity of the Company in various aspects of its business, be it from the level of compliance, business health, and every business activity it carries out.

BPF's success in every bond issuance and rights issue held so far, including the bonds issuance in 2020, is an indicator of the good trust shown by shareholders and investors in BPF's reputation. BPF's loan repayments quality to banks has also built confidence in BPF's ability and liquidity, so that banking partners remained willing and still offered loans to BPF even during the 2020 pandemic period.

Funding Risk

This risk arises due to insufficient company's funds/capital, including lack of access to additional funds/capital in facing the risk of unexpected losses or need for funds/capital. BPF has anticipated this risk with a strategy of strengthening the Company's capital structure, particularly diversifying the Company's funding sources. Since 2013, BPF has issued several bonds and held limited public offerings, and has carried out careful management of the Company's excess funds. Thus, BPF minimized dependence on one source of funding, while maintaining a good level of trust from banks as the main funding partner.

Even during the pandemic, the issuance of BPF bonds held in May 2020 of IDR 200 billion as previously planned still received a very positive response. The company was also able to pay off bonds maturing in May 2020 amounting to IDR 300 billion, and was even able to buy back bonds worth IDR 93.5 billion which will mature in June 2021.

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System



Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif di berbagai proses vital kegiatan usaha dan di setiap level manajemen membantu mencapai keberlanjutan jangka panjang Perusahaan. Fungsi sistem pengendalian internal memastikan bahwa tata kelola perusahaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan operasional, dan fungsi kepatuhan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan arah tujuan Perusahaan. Sistem ini merupakan upaya untuk meminimalkan risiko usaha dan penyimpangan etika bisnis yang dapat berdampak buruk pada kinerja dan citra BPF. Sistem pelaporan *whistleblowing* juga dimanfaatkan sebagai fungsi pengendalian internal Perusahaan.

Pengendalian Keuangan

Fungsi pengendalian keuangan Perusahaan dilakukan melalui pencatatan keuangan secara lengkap, akurat, andal; pelaporan tepat waktu; serta pemanfaatan aset dan dana secara tepat, efisien, dan efektif.

Pengendalian Operasional

Pengendalian operasional Perusahaan dilakukan dengan cara memastikan seluruh kegiatan operasional telah sesuai dengan SOP dan kebijakan yang berlaku. SOP dievaluasi secara berkala untuk mengetahui efektifitasnya dan direvisi sesuai perkembangan yang ada.

Pengendalian Kepatuhan

Pelaksanaan kendali kepatuhan Perusahaan diterapkan melalui SOP dan semua pedoman kerja Perusahaan, yang disosialisasikan kepada semua karyawan BPF. Pengawasan akan kepatuhan dilakukan secara aktif oleh para kepala unit kerja di setiap tingkat manajemen BPF.

Tinjauan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Perusahaan melakukan penilaian secara berkala atas efektivitas sistem pengendalian internal yang dimiliki. Kinerja sistem pengendalian internal sepanjang tahun 2020 dinilai cukup baik dalam memastikan terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik dan terkendali dalam aspek pengelolaan keuangan, operasional, dan kepatuhan Perusahaan.

The implementation of an effective internal control system in various vital processes of business activities and at every level of management helps the Company to achieve long-term sustainability. The function of the internal control system ensures that corporate governance, financial management, operational management, and compliance functions are in accordance with the GCG principles and in accordance with the direction of the Company's objectives. This system is an effort to minimize business risks and violations from business ethics that can have a negative impact on BPF's performance and image. The whistleblowing reporting system is also employed as the Company's internal control function.

Financial Control

The Company's financial control function is carried out through complete, accurate, reliable financial records; timely reporting; as well as the proper, efficient and effective use of assets and funds.

Operational Control

The Company's operational control is carried out by ensuring that all operational activities are in accordance with the relevant SOP and applicable policies. SOPs are regularly evaluated to ensure their effectiveness and are revised according to existing developments.

Compliance Control

The implementation of the Company's compliance controls is implemented through SOPs and all Company work guidelines, which are informed to all BPF employees. Supervision of compliance is actively carried out by the heads of work units at each level of BPF management.

Effectiveness Review of Internal Control Systems

The Company periodically assesses the effectiveness of its internal control system. The performance of the internal control system throughout 2020 was considered to be quite good in ensuring the implementation of good and controlled corporate governance in the aspects of financial management, operations and the Company's compliance level.

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Merujuk pada peraturan POJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Publik, serta sebagai pelaksanaan dari praktik tata kelola perusahaan yang baik, sebuah perusahaan publik wajib memiliki seorang Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi utama sebagai sumber resmi pihak Perusahaan dalam layanan informasi terkait kondisi Perusahaan bagi investor dan masyarakat, mengikuti perkembangan pasar modal dan memberi masukan kepada Direksi terkait hukum dan peraturan yang harus diikuti, juga menjadi penghubung komunikasi dengan para pemangku kepentingan terutama pihak yang berwenang.

Posisi Sekretaris Perusahaan BPF sekarang dijabat oleh Indah Mulyawan, sesuai Surat Keputusan Direksi No. 00507/BPF/III/2009, dengan periode jabatan 13 Maret 2009 hingga sekarang. Profil Indah Mulyawan dapat dilihat di halaman 30.

Referring to OJK's regulation number 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretary of a Public Company; and as a part of GCG practices, a public company is obliged to have a Corporate Secretary. The main function of the Corporate Secretary is to act as the Company's official source of public information in providing information services regarding the Company's condition to investors and the public, to follow up and to keep up to date on the capital market development, and to provide advices to the Board of Directors regarding the laws and regulations to be in compliance with, as well as to be the communication liaison with stakeholders, especially the authorities.

The current Corporate Secretary position is filled by Indah Mulyawan according to Decree of Directors No. 00507/BPF/III/2009 for the period of March 13, 2009 to date. His profile is presented on page 30.

Informasi kontak Sekretaris Perusahaan BPF

Nama *Name*

Telepon *Telephone*

Faksimili *Facsimile*

Email *Email*

Alamat Kantor *Office Address*

Contact information of BPF Corporate Secretary:

: Indah Mulyawan

: (021) 520 0434

: (021) 520 9160

: indah@bpf.co.id

: Gedung Plaza Chase, Lantai 15

: Jl. Jend. Sudirman Kav. 21

: Jakarta 12920 - Indonesia

Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik sepanjang tahun 2020, termasuk:

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemberi modal yang berkaitan dengan kondisi Perusahaan, terutama terkait kebijakan restrukturisasi pinjaman pembiayaan dan terkait penerbitan obligasi BPF yang dilakukan di tahun 2020.
2. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku terkait pasar modal.
3. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk mematuhi ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.
4. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pihak-pihak berwenang (OJK, BEI, dan lainnya), investor dan masyarakat.
5. Mengatur terselenggaranya RUPS.

Selama masa pandemi, pelatihan/lokakarya yang relevan dengan bidang ini tidak terselenggara.

The Company's Corporate Secretary has performed his duties well as demonstrated in the following tasks performed throughout 2020, including:

1. *Providing information services to the public on any information related to the condition of the Company, particularly regarding the financing restructuring policy and the bonds issuance carried out by BPF in 2020.*
2. *Following up on the capital market development, particularly on applicable regulations relating to the capital market.*
3. *Providing advices to the Board of Commissioners and Board of Directors on Law No. 8 Year 1995 regarding the capital market and related regulations.*
4. *Acting as the Company's intermediary with authorized bodies (OJK, BEI-Indonesia stock exchange, and others), investors, and the public.*
5. *Organizing the General Meeting of Shareholders.*

During the pandemic period, trainings/workshops relevant to this field were not available.

Audit Internal

Internal Audit

Fungsi audit internal BPF memiliki peran yang penting dan merupakan bagian integral dari sistem kendali internal Perusahaan untuk menilai dan meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta proses dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik untuk melindungi Perusahaan dan menjaga reputasinya. Audit Internal bertanggung jawab dan melapor langsung kepada Direksi. Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tim Audit Internal dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Internal, antara lain adalah:

- Membantu tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional, baik perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit.
- Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit.
- Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan, dan menyusun anggaran pelaksanaan fungsi audit internal.
- Meninjau dan mengevaluasi cara yang dapat diterapkan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dan dana Perusahaan.
- Melakukan audit kepatuhan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta melindungi aset Perusahaan dari kecurangan dan penipuan.
- Melaporkan hasil audit dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, serta informasi objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada setiap tingkatan manajemen.
- Melakukan audit khusus jika diperlukan.

Piagam Audit Internal BPF menyatakan pengangkatan Abdul Malik sebagai Kepala Divisi Audit Internal berdasarkan SK Direksi No. 140/BPF/DIR-HRD-IV/2017.

Pengalaman Kerja Abdul Malik

2003 – 2006 : Marketing PT Nusantara Surya Sakti
2007 – 2013 : Marketing PT Procar International Finance
2013 – 2017 : Divisi Audit Internal PT Batavia Prosperindo Finance Tbk
2018 – sekarang : Kepala Divisi Audit Internal PT Batavia Prosperindo Finance Tbk

Pada tahun 2020, Audit Internal BPF telah melaksanakan audit terhadap program restrukturisasi pembiayaan yang diberikan BPF bagi para debiturnya yang terimbas dampak pandemi Covid-19 dan terhadap beberapa kantor cabang. Hasil temuan audit tersebut telah dilaporkan dan telah ditindaklanjuti.

BPF's internal audit function plays an important role and is an integral part of the Company's internal control system to assess and improve the quality and effectiveness of the internal control system, risk management, as well as the GCG processes and implementation to protect the Company and maintain its reputation. Internal Audit is responsible to and reports directly to the Board of Directors. The appointment, replacement and dismissal of the Internal Audit team are carried out by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners.

Duties and responsibilities of the Internal Audit Division include, among others:

- *Assisting the duties and functions of the Board of Directors and the Board of Commissioners in conducting supervision by providing operational descriptions of planning, implementation and monitoring of audit results.*
- *Carrying out analysis and assessments in finance, accounting, operations, and other activities through audits.*
- *Developing and executing annual audit plans, and preparing a budget for the implementation of the internal audit function.*
- *Reviewing and evaluating approaches that can be applied to improve and increase the efficiency and effectiveness of the use of the Company's resources and funds.*
- *Performing compliance audits with the applicable laws and regulations, as well as protecting the Company's assets from frauds and scams.*
- *Reporting audit results and providing recommendations for improvements to the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as giving objective information on the activities examined at each level of management.*
- *Conducting special audits if necessary.*

BPF Internal Audit Charter states Abdul Malik's appointment as Head of the Internal Audit Division based on the Decree of the Board of Directors No. 140/BPF/DIR-HRD/IV/2017.

Abdul Malik's Work Experience:

*2003 – 2006 : Marketing - PT Nusantara Surya Sakti
2007 – 2013 : Marketing - PT Procar International Finance
2013 – 2017 : Internal Audit Division - PT Batavia Prosperindo Finance Tbk
2018 – present : Head of Internal Audit Division - PT Batavia Prosperindo Finance Tbk*

In 2020, BPF Internal Audit has carried out an audit of the financing restructuring program provided by BPF for its debtors who were affected by the impact of the Covid-19 pandemic and of several branch offices. The results of the audit findings have been reported and have been followed up.

Kebijakan Terkait Pemangku Kepentingan

Stakeholders Related Policies

Dalam menjunjung prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, BPF menerapkan beberapa kebijakan terkait para pemangku kepentingan sebagai berikut:

- Pemerintah dan otoritas. Kepatuhan Perusahaan pada semua ketentuan dan peraturan terkait dari pihak otoritas, terutama Pemerintah, selalu menjadi prioritas BPF dan menjadi panduan dalam setiap kegiatan usahanya.
- Pemegang saham. BPF senantiasa mengutamakan dipenuhinya tanggung jawab Perusahaan kepada para pemegang sahamnya, baik yang administratif seperti keterbukaan dan ketersediaan informasi keuangan Perusahaan, maupun dalam bentuk kinerja optimal Perusahaan demi memberi nilai tambah pada para pemegang saham.
- Nasabah. Untuk memastikan kepuasan nasabah sekaligus kelancaran kredit yang diberikan, Perusahaan menjalankan program "Prinsip Mengenal Nasabah" atau "Know Your Customer". Ditunjang dengan teknologi informasi yang andal, BPF menyediakan layanan pengaduan konsumen dengan staff yang khusus ditugaskan untuk menangani keluhan dan masukan dari konsumen di setiap kantor cabang dan perwakilan.
- Karyawan. BPF menghargai karyawannya sebagai mitra dalam mewujudkan visi dan misi Perusahaan. Karenanya, semua peraturan, kebijakan, dan etika Perusahaan selalu ditegakkan kepada semua karyawan untuk menjaga kredibilitas dan akuntabilitas BPF. Di lain pihak, segala pemenuhan hak dan kesejahteraan karyawan sangat diutamakan. Semua kesepakatan kerja antara Perusahaan dan karyawan juga dinyatakan dengan jelas dalam kontrak kerja, serta dalam semua peraturan dan kebijakan terkait karyawan.
- Pemasok (barang dan jasa). BPF selalu berusaha menjunjung objektivitas dan profesionalisme dalam proses pengadaan barang dan jasa dalam aktivitas usahanya. BPF menerapkan kebijakan dan ketentuan dalam pemilihan pemasok, dengan mengutamakan kualitas, *delivery time*, biaya, dan efisiensi.
- Larangan terkait hadiah dan gratifikasi. Untuk menjaga profesionalisme dan integritas Perusahaan, BPF memberlakukan larangan bagi seluruh karyawannya untuk memberi maupun menerima hadiah dan gratifikasi dari/ke pihak manapun.
- Komunitas. Perusahaan senantiasa mementingkan hubungan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta memenuhi semua tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat, khususnya komunitas sekitar tiap lokasi keberadaan BPF.

Kode Etik

BPF memiliki panduan kode etik yang berangkat dari visi, misi, dan tujuan Perusahaan, serta hukum dan peraturan yang berlaku. Penerapan kode etik Perusahaan bertujuan utama menjaga integritas dan citra Perusahaan, meningkatkan mutu pengelolaan risiko dan krisis, membangun budaya dan mewujudkan nilai-nilai Perusahaan, menciptakan komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan, serta menghindari konsekuensi legal.

Kode etik ini dijadikan pedoman kerja bagi semua karyawan dalam berperilaku baik di dalam maupun di luar perusahaan. Panduan kode etik dan budaya perusahaan BPF senantiasa disosialisasikan dan dicantumkan dalam paket dokumen yang dimiliki tiap karyawan, yang telah dipastikan telah dipahami dan disetujui untuk dipatuhi, serta berlaku bagi semua karyawan dari semua jenjang.

BPF menetapkan prosedur dan sanksi bagi setiap karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik Perusahaan maupun tindak kriminal, sesuai dengan peraturan Perusahaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

In upholding the GCG principles, BPF implements several policies related to stakeholders as follows:

- *Government and authorities. The Company's compliance with all relevant provisions and regulations from the authorities, especially the Government, has always been the priority of BPF and serves as a guide in all of its business activities.*
- *Shareholders. BPF always prioritizes the fulfillment of the Company's responsibilities to its shareholders, both administratively, such as in the disclosure and availability of the Company's financial information, as well as in the form of the Company's optimum performance in order to give added value to the shareholders.*
- *Customers. To ensure customer satisfaction, as well as a smooth financing disbursement, the Company implements the "Know Your Customer" program. Supported by reliable information technology, BPF provides customer complaint services with special staff assigned to handle complaints and inputs from customers at each branch and representative office.*
- *Employees. BPF appreciates its employees as partners in working towards the Company's vision and mission. Therefore, all regulations, policies and Company ethics are always upheld by all employees to maintain the credibility and accountability of BPF. On the other hand, the fulfillment of the employees' rights and welfare is given priority. All work agreements between the Company and employees are also clearly stated in the employment contract, as well as in all regulations and policies related to employees.*
- *Suppliers (goods and services). BPF always strives to uphold objectivity and professionalism in the process of procuring goods and services in its business activities. BPF implements policies and provisions in selecting suppliers, by prioritizing quality, delivery time, cost and efficiency.*
- *Prohibitions regarding gifts and gratuities. To maintain the Company's professionalism and integrity, BPF imposes a prohibition on all employees from giving or receiving gifts and gratuities to/from any party.*
- *Community. The company always emphasizes the importance of good relations and communication with the community, as well as fulfilling all its responsibilities as a member of the community, especially the communities around each location where BPF is located.*

Code of Ethics

BPF has a code of conduct guidelines derived from the vision, mission and objectives of the Company, as well as the applicable laws and regulations. The application of the Company's code of ethics is primarily aimed at maintaining the Company's integrity and image, improving the quality of risk and crisis management, building a culture and achieving the Company's values, creating good communication with stakeholders, and avoiding legal consequences.

This code of conduct is used as a work guideline for all employees in behaving both inside and outside the Company. Guidelines for BPF's code of ethics and corporate culture are always informed and included in the document package owned by each employee, which has been confirmed to have been understood and agreed to be obeyed, and applies to all employees of all levels.

BPF establishes procedures and applies sanctions for every employee who violates the Company's code of ethics or conducts criminal acts, in accordance with the Company regulations and the prevailing laws and regulations.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System

Dalam usaha menjaga integritas Perusahaan, menegakkan akuntabilitas dan transparansi dalam semua kegiatan usahanya, BPF memiliki sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang memungkinkan kalangan internal dari berbagai tingkatan untuk melaporkan adanya kecurigaan dan dugaan tindakan pelanggaran atau masalah dalam Perusahaan, baik yang terkait hukum maupun etika, sehingga dapat ditindaklanjuti sesegera mungkin.

BPF telah memiliki kebijakan *whistleblowing system* sejak tahun 2012 dan memiliki alamat email khusus untuk pelaporannya, yaitu pinter@bpfi.co.id. Sistem *whistleblowing* beserta fasilitas alamat email untuk pengiriman laporan tersebut, disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan setiap karyawan baru. Penerapan *whistleblowing system* BPF berada di bawah koordinasi Divisi Personalia & Umum.

Pelaksanaan *Whistleblowing System*

BPF telah mengadakan sosialisasi dan penyegaran informasi tentang sistem pelaporan pelanggaran kepada seluruh karyawan melalui berbagai cara, yang mencakup informasi keberadaan *whistleblowing system*, cara pelaporan, tindakan atau kejadian yang harus dilaporkan, dan tindak lanjut yang akan dilakukan atas pelaporan.

Prosedur pelaksanaan *whistleblowing system* BPF adalah sebagai berikut:

1. Pelapor menyampaikan laporan atas dugaan pelanggaran, beserta bukti atau fakta yang akurat, melalui media pelaporan yang disediakan.
2. Divisi Personalia & Umum melakukan verifikasi terhadap laporan berdasarkan kriteria pelaporan.
3. Divisi Personalia & Umum mengirimkan rekap pelaporan internal yang akan ditindaklanjuti kepada Direksi.
4. Hasil tindak lanjut akan dilaporkan pada Direksi dalam bentuk memo internal.
5. Setiap pelaporan yang ditindaklanjuti akan direkap setiap bulan dan disimpan oleh Divisi Personalia & Umum.

Selanjutnya hasil penanganan pengaduan yang telah selesai ditangani akan disampaikan kepada manajemen untuk kepentingan evaluasi dan perbaikan sistem. Fasilitas ini diharapkan dapat mencegah dan mengidentifikasi kegiatan yang berpotensi merugikan Perusahaan dalam aspek apa pun.

Kriteria Pelaporan

Kriteria pelaporan tindakan atau kejadian dugaan pelanggaran untuk *whistleblowing system* adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.
2. Perbuatan yang melanggar etika bisnis.
3. Tindakan kriminalitas atau pelanggaran hukum.

Perlindungan terhadap pelapor diberikan untuk memastikan keamanan bagi pelapor dan mendorong keberanian karyawan untuk melaporkan setiap tindakan atau kejadian yang menyimpang di dalam Perusahaan.

Sepanjang tahun 2020, tidak ada pelaporan atau kejadian berarti yang melibatkan karyawan dalam segala bentuk pelanggaran.

In an effort to maintain the integrity of the Company, to uphold accountability and transparency in all of its business activities, BPF has a whistleblowing system that allows internal parties of all levels to report suspicions and suspected acts of violations or problems within the Company, whether related to law or ethics, so that it can be followed up as soon as possible.

BPF has had a whistleblowing system policy since 2012 and has a special email address for reporting, namely pinter@bpfi.co.id. The whistleblowing system, along with an email address facility for sending the report, is informed to all employees and every new employee. The implementation of the BPF whistleblowing system is under the coordination of the Human Resources & General Affairs Division.

Implementation of the Whistleblowing System

BPF has conducted briefing and information updates on the violation reporting system to all employees through various ways, including information about the whistleblowing system itself, how to report, actions or events that must be reported, and follow-up actions that will be made on reporting.

The procedure for BPF whistleblowing system implementation is as follows:

1. *The whistleblower submits a report on the alleged violation, along with accurate evidence or facts, through the reporting channel provided.*
2. *The Human Resources & General Affairs Division verifies reports based on reporting criteria.*
3. *The Human Resources & General Affairs Division sends a recap of the internal reporting which will be followed up to the Board of Directors.*
4. *The follow-up results will be reported to the Board of Directors in the form of an internal memo.*
5. *Each report that is followed up will be recapitulated every month and kept by the Human Resources & General Affairs Division.*

Furthermore, the results of complaints handling that have been completed will be submitted to the management for system evaluation and improvement purposes. This facility is expected to prevent and identify activities that may have potential harms to the Company in any aspect.

Reporting Criteria

The criteria for reporting actions or incidents of suspected violations for the whistleblowing system are as follows:

1. *Violation of applicable policies and procedures.*
2. *Acts that violate business ethics.*
3. *Acts of crime or violation of the law.*

Protection for whistleblowers is provided to ensure security for the whistleblowers and to encourage employees to report any violations or incidents within the Company.

Throughout 2020, there were no reports or significant incidents involving employees in any form of violations.

Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility (CSR)



Eksistensi suatu perusahaan bukanlah hanya untuk mendapatkan keuntungan semata, namun juga menyangkut tanggung jawabnya kepada banyak pihak. Perusahaan mempunyai tanggung jawab kepada seluruh pihak yang berkepentingan, antara lain Pemerintah, masyarakat luas, lingkungan atau komunitas, konsumen, dan karyawannya. Organisasi Standarisasi Internasional (ISO) menekankan pentingnya kemampuan suatu perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara performa keuangannya dan penanganan isu sosial dan lingkungan yang mungkin akan muncul akibat beroperasinya perusahaan tersebut.

Menyadari pentingnya masalah ini, terutama bagi reputasi Perusahaan, BPF senantiasa melakukan bagiannya dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

Tanggung Jawab Sosial Terkait Masyarakat
Dukungan masyarakat terhadap kehadiran BPF adalah aspek yang amat penting bagi Perusahaan. Dan BPF menyadari kewajibannya untuk bersumbangsih sebagai timbal balik kepada masyarakat. BPF memilih untuk fokus berpartisipasi di bidang pendidikan, karena kepeduliannya terhadap generasi muda. Selama beberapa tahun hingga saat ini, Perusahaan melalui Yayasan BP Peduli memberikan dukungan moril dan materil kepada Sekolah Misi Bagi Bangsa di Batam, seperti pembangunan gedung sekolah, bantuan finansial rutin, dukungan program anak asuh, dan sebagainya.

Tanggung Jawab Sosial Terkait Lingkungan dan Komunitas Sekitar
Lingkungan dan komunitas di sekitar Perusahaan beroperasi adalah hal yang tak terpisahkan dengan keberadaan Perusahaan. Baik di Kantor Pusat maupun di cabang-cabang, BPF selalu membina hubungan baik dengan lingkungan dan komunitasnya, antara lain dengan melakukan

The existence of a company is not merely to create profits, but also carries with it the company's responsibilities to various parties. A company has responsibilities to all stakeholders, amongst others the Government, the public, community, customers and its employees. The International Organization for Standardization (ISO) stresses the importance of a company's ability in keeping a balance between its financial performance and resolving the social and environmental issues which may arise as result of its operations.

Fully aware of the importance of these issues, especially for the Company's good reputation, BPF always strives to fulfill its part in carrying out the Company's social responsibilities, amongst others as described below:

Social Responsibility Related to the Public
Public support for BPF's existence is a very important aspect for the Company. And BPF recognizes its obligation to contribute in return to the society. BPF opted to focus on participating in the education sector; out of concern for the younger generation. For several years until now, the Company through BP Peduli Foundation has provided moral and material supports to Sekolah Misi Bagi Bangsa (school) in Batam, namely assistance in the construction of the school building, routine financial support, support for foster children program, etc.

Social Responsibility Related to Environment and Community
The environment and community where the Company operates is an integral part of the Company's existence. Both in its Head Office as well as in its branches, BPF always strives to build a good relationship with its local environment and community, amongst others by conducting visits to local



kunjungan ke rumah-rumah yatim piatu dan berpartisipasi pada perayaan hari besar keagamaan nasional. Perusahaan melakukan kegiatan kurban bagi masyarakat sekitarnya pada hari raya Idul Adha tahun 2020.

Tanggung Jawab Sosial Terkait Konsumen

Konsumen BPF adalah pihak yang amat vital bagi keberlangsungan Perusahaan. Karenanya BPF senantiasa menjunjung tinggi etika Perusahaan terhadap konsumen dari awal Perusahaan berinteraksi dengan calon konsumen. Dalam melakukan pemasaran, BPF memastikan bahwa produk yang ditawarkan adalah produk yang bersaing dengan sejenisnya di pasar, serta bahwa informasi yang diberikan sesuai dengan kenyataan dan tidak berlebihan. Ditunjang dengan sistim informasi yang andal, Perusahaan senantiasa berupaya memberikan pelayanan terbaik. BPF juga membantu mencari solusi apabila konsumen dalam kesulitan, seperti pada tahun 2020, BPF menawarkan program restrukturisasi pinjaman bagi para konsumennya yang terimbas pandemi Covid-19.

Tanggung Jawab Sosial Terkait Karyawan

Karyawan adalah mitra dan aset strategis bagi BPF. Karyawan yang baik berasal dari lingkungan kerja yang baik. BPF memastikan bahwa semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam setiap unit kerjanya terfasilitasi dengan baik. Evaluasi penilaian kinerja dan remunerasi karyawan berupa gaji, tunjangan, dan bonus ditentukan sesuai dengan bidang pekerjaan dan wilayah kerja karyawan, dengan tetap mengikuti standar peraturan ketenagakerjaan dan kebijakan Perusahaan yang berlaku. Perusahaan juga memberi prioritas agar hak pokok semua karyawannya terpenuhi dan dikelola dengan benar, terutama terkait kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Di masa pandemi tahun 2020, BPF memberikan pengadaan tes kesehatan Covid-19 secara cuma-cuma bagi para karyawannya sekali dalam sebulan.

orphanages and participating in national religious holiday events. The Company organized a Qurbani event for the surrounding community in 2020 Idul Adha holidays.

Social Responsibility Related to Customers

BPF's customers are extremely vital for the Company's existence. Hence, BPF always upholds the Company's ethics towards customers from the earliest interaction with potential customers. In conducting marketing, BPF ensures that the products offered are competitive with similar products in the industry, and that the information provided is genuine and not exaggerated. Supported by a reliable and sophisticated information system, the company also always strives to provide the best service. BPF also helps in finding solutions for customers to resolve obstacles, such as in 2020 when BPF offered a debt restructuring program for customers impacted by the Covid-19 pandemic.

Social Responsibility Related to Employees

Employees are strategic partners and assets to BPF. Good employees come from good working environment. BPF ensures that all facilities and infrastructure required in each work unit are properly provided and well attended. Employee's performance evaluation and remuneration scheme such as salaries, benefits and bonuses are all determined according to the work field and area, following the standards of applicable labour regulations and Company's policies. The Company also makes priority the provision and management of the basic rights and wellbeing of the employees, particularly those related to health, safety and welfare. During the pandemic in 2020, BPF provided monthly free Covid-19 medical tests for its employees.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Management's Responsibility Statement

Dewan Komisaris dan Direksi PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. menyatakan bahwa Laporan Tahunan PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. tahun 2020 adalah benar adanya dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isinya.
The Board of Commissioners and Board of Directors of PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. state that the 2020 Annual Report of PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. is a fair presentation and shall be held accountable for the accuracy of its contents

Jakarta, April 2021

Dewan Komisaris

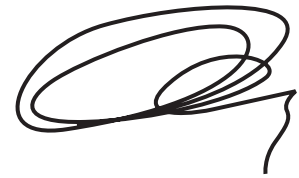
Board of Commissioners



Irena Istary Iskandar
Komisaris Utama
President Commissioner



Desti Liliati
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Christopher J. Clower
Komisaris
Commissioner

Direksi

Board of Directors



Markus Dinarto Pranoto
Direktur Utama
President Director



Indah Mulyawan
Direktur
Director



Jasin Hermawan
Direktur (Tidak Terafiliasi)
Director (Non-affiliated)



Hady Sutiono
Direktur
Director

Surat Pernyataan Independensi Komisaris

Commissioner's Independency Statement

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan independensi dalam jabatan kami sebagai Komisaris Independen.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*We, the undersigned, hereby declare our independency in our position as Independent Commissioner.
This statement is duly made in all integrity.*

Jakarta, April 2021



Desti Liliati
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Laporan Keuangan Tahun 2020 Yang Telah Diaudit

Audited 2020 Financial Reports



Halaman ini sengaja dikosongkan
This page intentionally left blank

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk

**LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

***FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

**Halaman/
Page**

Daftar Isi

Table of Contents

Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Posisi Keuangan.....	1 - 2	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.....	3 - 4	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas.....	5 - 6	<i>Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas.....	7 - 8	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan.....	9 - 153	<i>Notes to the Financial Statements</i>



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
 TENTANG TANGGUNG JAWAB
 ATAS LAPORAN KEUANGAN
 TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT
 PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
 REGARDING RESPONSIBILITY
 TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 AS OF DECEMBER 31, 2020 AND 2019
 AND FOR THE YEARS
 THEN ENDED
 PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk**

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama/Name :
 Alamat kantor/Office address :

Markus Dinarto Pranoto
 PT Batavia Prosperindo Finance Tbk
 Chase Plaza, 15th Floor
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21
 Jakarta 12910

Alamat domisili/Domicile address :

Pluit Permal Timur/12A RT.005/005
 Pluit, Penjaringan
 Jakarta Utara

Nomor telepon/Phone number :
 Jabatan/Title :

(021) 5200434
 Direktur Utama/President Director

2. Nama/Name :
 Alamat kantor/Office address :

Indah Mulyawan
 PT Batavia Prosperindo Finance Tbk
 Chase Plaza, 15th Floor
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21
 Jakarta 12910

Alamat domisili/Domicile address :

Jl. Tanah Lot Raya M2 No. 29 RT .001 RW.008
 Krukut Limo
 Depok

Nomor telepon/Phone number :
 Jabatan/Title :

(021) 5200434
 Direktur/Director

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Batavia Prosperindo Finance Tbk ("Perusahaan");
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
 b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan.

1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Batavia Prosperindo Finance Tbk ("Company");
2. The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information contained in the financial statements of the Company has been presented completely and accurately;
 b. The financial statements of the Company do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts;
4. We are responsible for the internal control system of the Company.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 9 Februari 2021/February 9, 2021
 PT Batavia Prosperindo Finance Tbk

Markus Dinarto Pranoto
 Direktur Utama/President Director



Indah Mulyawan
 Direktur/Director*

* Direktur yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan / Director in charge of accounting and finance.

The original report included herein is in Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00049/2.1051/AU.1/09/1029-1/1/II/2021

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Batavia Prosperindo Finance Tbk terlampir yang terdiri atas laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditor's Report

Report No. 00049/2.1051/AU.1/09/1029-1/1/II/2021

*The Shareholders, Boards of Commissioner, and Directors
PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk*

We have audited the accompanying financial statements of PT Batavia Prosperindo Finance Tbk which comprise the statements of financial position as of December 31, 2020 and 2019, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, and statements of cash flows for the years ended December 31, 2020 and 2019, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

The original report included herein is in Indonesian language.

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun oleh kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Batavia Prosperindo Finance Tbk tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta kinerja keuangan, dan arus kasnya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditor's responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Batavia Prosperindo Finance Tbk as of December 31, 2020 and 2019, and its financial performance, and cash flows for the years ended December 31, 2020 and 2019 in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

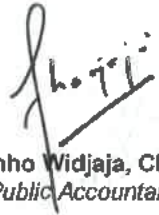
The original report included herein is in Indonesian language.

Hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk disertakan dalam pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2021, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan digunakan untuk tujuan lain.

Other matter

This report has been prepared solely for inclusion in the registration statement in relation to PT Batavia Prosperindo Finance Tbk's plan for a Public Offering of "Obligasi Berkelanjutan III Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2021", and is not intended to be, and should not be used for any other purposes.

KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHJO & REKAN

Juninho Widjaja, CPA
Izin Akuntan Publik/ *Public Accountant License No. AP.1029*

9 Februari 2021/ *February 9, 2021*

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020	2019	
ASET				ASSETS
Kas dan setara kas	2b,2c,4,37	60.089.895.013	31.082.493.692	Cash and cash equivalents
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	2b,2c,5,37	500.000.000	500.000.000	Restricted time deposits
Piutang sewa pembiayaan - pihak ketiga - dikurangi penyisihan kerugian kredit ekspektasian sebesar Rp 3.974.039.105 pada tanggal 31 Desember 2020 dan Rp 2.786.043.928 pada tanggal 31 Desember 2019	2c,2d,6,14,32,37	240.898.353.833	281.854.472.303	Finance lease receivables - third parties - net of allowance for expected credit losses amounting Rp 3,974,039,105 as of December 31, 2020 and Rp 2,786,043,928 as of December 31, 2019
Piutang pembiayaan konsumen Pihak ketiga - dikurangi penyisihan kerugian kredit ekspektasian sebesar Rp 18.648.837.248 pada tanggal 31 Desember 2020 dan Rp 27.601.294.040 pada tanggal 31 Desember 2019	2c,2e,7,14,15,18,32,37	849.060.792.020	1.132.423.264.728	Consumer financing receivables Third parties - net of allowance for expected credit losses amounting to Rp 18,648,837,248 as of December 31, 2020 and Rp 27,601,294,040 as of December 31, 2019
Tagihan anjak piutang Pihak ketiga - dikurangi penyisihan kerugian kredit ekspektasian sebesar Rp 289.856.524 pada tanggal 31 Desember 2020	2c,2g,8,32,37	66.301.809.143	114.899.822.001	Factoring receivables Third parties - net of allowance for expected credit losses amounting to Rp 289,856,524 as of December 31, 2020
Pihak berelasi	2f,34	-	17.000.000.000	Related party Other receivables - third parties - net of allowance for expected credit losses amounting to Rp 8,932,576,461 as of December 31, 2020 and Rp 8,965,768,978 as of December 31, 2019
Piutang lain-lain - pihak ketiga - dikurangi penyisihan kerugian kredit ekspektasian sebesar Rp 8.932.576.461 pada tanggal 31 Desember 2020 dan Rp 8.965.768.978 pada tanggal 31 Desember 2019	2c,2h,9,32,37	100.017.731.265	86.222.736.111	Advances and prepaid expenses
Uang muka dan beban dibayar di muka	2d,2f,2i,10,34	2.880.109.981	8.135.044.086	Investment in shares
Investasi saham	2c,2j,11,37	15.000.171.500	15.484.048.000	Property and equipment - net of accumulated depreciation amounting to Rp 45,345,746,432 as of December 31, 2020 and Rp 32,770,522,659 as of December 31, 2019
Aset tetap - dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 45.345.746.432 pada tanggal 31 Desember 2020 dan Rp 32.770.522.659 pada tanggal 31 Desember 2019	2d,2k,2l,12,14,19,28,31	133.395.447.344	127.372.646.243	Deferred tax assets - net
Aset pajak tangguhan - neto	2m,17d,2c,13,31,37	1.572.990.446	2.607.009.279	Other assets
Aset lain-lain		2.925.052.397	4.044.103.531	
TOTAL ASET		1.472.642.352.942	1.821.625.639.974	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020	2019	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang bank	2c,6,7,12, 14,37	142.365.662.689	345.024.383.717	Bank loans
Pinjaman pihak ketiga	2c,7,15,37	7.538.220.471	6.524.510.048	Third party loan
Beban masih harus dibayar	2c,16,37			Accrued expenses
Pihak ketiga		20.071.148.644	21.628.749.491	Third parties
Pihak berelasi	2f,34	57.745.482	76.181.266	Related party
Utang pajak	2m,17a	8.682.896.121	10.977.351.751	Tax payables
Efek utang yang diterbitkan - dikurangi beban emisi yang belum diamortisasi sebesar Rp 1.588.189.062 pada tanggal 31 Desember 2020 dan Rp 2.464.163.842 pada tanggal 31 Desember 2019	2c,2n,7, 18,37	404.911.810.938	597.535.836.158	Debt securities issued - net of unamortized debt securities issuance cost amounting to Rp 1,588,189,062 as of December 31, 2020 and Rp 2,464,163,842 as of December 31, 2019
Liabilitas sewa	2c,2d,12,19, 29,37	6.305.153.885	-	Lease liabilities
Liabilitas imbalan kerja	2o,20,30	23.606.315.221	20.531.766.911	Employee benefits liabilities
TOTAL LIABILITAS		613.538.953.451	1.002.298.779.342	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham				Share capital - par value of Rp 100 per share
Modal dasar - 7.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2.200.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2019				Authorized - 7,000,000,000 shares as of December 31, 2020 and 2,200,000,000 shares as of December 31, 2019
Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.782.663.575 saham	21	178.266.357.500	178.266.357.500	Issued and fully paid - 1,782,663,575 shares
Tambahan modal disetor - neto	2q,22	263.314.390.908	263.314.390.908	Additional paid in capital - net
Saldo laba				Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya	24	250.000.000	250.000.000	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		374.333.450.926	332.518.048.328	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain				Other comprehensive income
Cadangan revaluasi aset tetap - neto setelah pajak	12	48.190.021.865	49.745.009.104	Property and equipment revaluation reserve - net after tax
Kerugian nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2c,2j,11	(5.250.821.708)	(4.766.945.208)	Unrealized fair value loss on financial assets at fair value through other comprehensive income
TOTAL EKUITAS		859.103.399.491	819.326.860.632	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		1.472.642.352.942	1.821.625.639.974	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020	2019	
PENGHASILAN	2r			REVENUES
Pembiayaan konsumen - neto	2e,2f,26,34	196.455.100.510	238.189.540.033	Consumer financing - net
Administrasi	2f,27,34	91.859.598.968	111.631.392.477	Administrative
Sewa pembiayaan	2d	40.957.378.606	43.404.804.666	Finance lease
Anjak piutang	2f,2g,34	14.536.235.632	16.740.316.461	Factoring
Pendapatan lain-lain - neto	2e,2f,12,28, 34	10.209.271.120	20.960.859.245	Other income - net
Total Penghasilan		354.017.584.836	430.926.912.882	Total Revenues
BEBAN USAHA	2r			OPERATING EXPENSES
Gaji dan tunjangan	2f,20,30,34	100.347.929.970	98.969.694.164	Salaries and allowances
Beban keuangan	14,18,19,29	90.846.553.707	107.350.435.575	Finance expenses
Umum dan administrasi	2f,12,13,19, 31,34	78.712.799.131	81.074.512.566	General and administrative
Kerugian penurunan nilai	6,7,8,9,32	21.667.907.673	26.913.967.093	Impairment losses
Beban pemasaran	33	8.888.707.870	19.522.189.600	Marketing expenses
Total Beban Usaha		300.463.898.351	333.830.798.998	Total Operating Expenses
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		53.553.686.485	97.096.113.884	INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO	2m,17b	(12.291.191.240)	(22.238.783.555)	INCOME TAX EXPENSE - NET
LABA NETO TAHUN BERJALAN		41.262.495.245	74.857.330.329	NET INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya				Items that will not be reclassified to profit or loss in subsequent period
Keuntungan revaluasi aset tetap	12	1.419.001.107	4.995.248.263	Gain on revaluation of property and equipment
Pengukuran kembali liabilitas imbangan kerja	2o,20	(2.935.285.103)	(2.951.956.717)	Remeasurement of employee benefit liabilities
Kerugian nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2c,2j,11	(483.876.500)	-	Unrealized fair value loss on financial assets at fair value through other comprehensive income
Efek pajak terkait Keuntungan revaluasi aset tetap		(1.029.840.445)	(591.574.566)	Related tax effect Gain on revaluation of property and equipment
Pengukuran kembali liabilitas imbangan kerja		549.602.371	737.989.179	Remeasurement of employee benefits liabilities

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
 Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
 For the Years Ended
 December 31, 2020 and 2019
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020	2019	
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya				Item that may be reclassified to profit or loss in subsequent period
Keuntungan atas nilai aset keuangan tersedia untuk dijual	2c,2j,11	-	725.814.750	Fair value gain on available for sale financial assets
TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		(2.480.398.570)	2.915.520.909	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF		38.782.096.675	77.772.851.238	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
LABA NETO PER SAHAM DASAR	2s,25	23,15	41,99	BASIC EARNINGS PER SHARE

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
 Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
 For the Years Ended
 December 31, 2020 and 2019
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal Saham/ Share Capital	Tambahannya Disetor - Neto/ Additional Paid-in Capital - Net	Saldo Laba/Retained Earnings		Cadangan Revaluasi Aset Tetap/ Property and Equipment Revaluation Reserve	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income	Total Ekuitas/ Total Equity	
			Telah Ditetapkan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditetapkan Penggunaannya/ Unappropriated		Keuntungan (Kerugian) Nilai Wajar Aset Keuangan Yang Tersedia Untuk Dijual/ Unrealized Gain (Loss) on Fair Value of Available for Sale Financial Assets		
Saldo 31 Desember 2018	178.266.357.500	263.314.390.908	250.000.000	288.739.072.795	46.348.907.262	(5.492.759.958)	771.425.968.507	Balance as of December 31, 2018
Laba neto tahun berjalan	-	-	-	74.857.330.329	-	-	74.857.330.329	Net income for the year
Dividen kas	23	-	-	(30.002.227.962)	-	-	(30.002.227.962)	Cash dividends
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan								Other comprehensive income for the year
Keuntungan revaluasi aset tetap	12	-	-	-	4.995.248.263	-	4.995.248.263	Gain on revaluation of property and equipment
Transfer cadangan revaluasi aset tetap yang dijual		-	-	-	(1.216.243.993)	-	-	Transfer of revaluation reserve of property and equipment sold
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	20,20	-	-	(2.951.956.717)	-	-	(2.951.956.717)	Remeasurement of employee benefits liabilities
Keuntungan atas nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	2j,11	-	-	-	-	725.814.750	725.814.750	Fair value gain on available for sale financial assets
Efek pajak terkait		-	-	659.585.890	(382.902.428)	-	276.683.462	Related tax effect
Saldo 31 Desember 2019	178.266.357.500	263.314.390.908	250.000.000	332.518.048.328	49.745.009.104	(4.766.945.208)	819.326.860.632	Balance as of December 31, 2019

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal Saham/ Share Capital	Tambahkan Disetor - Neto/ Additional Paid-in Capital - Net	Saldo Laba/Retained Earnings		Cadangan Revaluasi Aset Tetap/ Property and Equipment Revaluation Reserve	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income	Kerugian Nilai Wajar Aset Keuangan pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain/ Unrealized Fair Value Loss on Financial assets at Fair Value through Other Comprehensive Income	Keuntungan (Kerugian) Nilai Wajar Aset Keuangan Yang Tersedia Untuk Dijual/ Unrealized Gain (Loss) on Fair Value of Available for Sale Financial Assets	Total Ekuitas/ Total Equity	
			Telah Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated						
Saldo 31 Desember 2019	178.266.357.500	263.314.390.908	250.000.000	332.518.048.328	49.745.009.104	-	(4.766.945.208)	819.326.860.632		Balance as of December 31, 2019
Dampak penerapan PSAK 71	2c	-	-	448.772.263	-	(4.766.945.208)	4.766.945.208	448.772.263		Effect of adoption of PSAK 71
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020 setelah penerapan PSAK 71	178.266.357.500	263.314.390.908	250.000.000	332.966.820.591	49.745.009.104	(4.766.945.208)	-	819.775.632.895		Balance as of January 1, 2020 after adoption of PSAK 71
Laba neto periode berjalan	-	-	-	41.262.495.245	-	-	-	41.262.495.245		Net income for the period
Penghasilan komprehensif lain periode berjalan										Other comprehensive income for the period
Keuntungan revaluasi aset tetap	12	-	-	-	1.419.001.107	-	-	1.419.001.107		Gain on revaluation of property and equipment
Transfer cadangan revaluasi aset tetap yang dijual		-	-	-	2.489.817.822	(2.489.817.822)	-	-		Transfer of revaluation Reserve of property and equipment sold
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	2o,20	-	-	(2.935.285.103)	-	-	-	(2.935.285.103)		Remeasurement of employee benefits liabilities
Kerugian nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2j,11	-	-	-	-	(483.876.500)	-	(483.876.500)		Unrealized fair value loss on financial assets at a fair value through other comprehensive income
Efek pajak terkait		-	-	549.602.371	(484.170.524)	-	-	65.431.847		Related tax effect
Saldo 31 Desember 2020	178.266.357.500	263.314.390.908	250.000.000	374.333.450.926	48.190.021.865	(5.250.821.708)	-	859.103.399.491		Balance as of December 31, 2020

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
 Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOWS
 For the Years Ended
 December 31, 2020 and 2019
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020	2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari:				Cash receipts from:
Transaksi pembiayaan		1.359.196.262.622	1.820.156.472.571	Financing transactions
Pendapatan bunga		1.489.063.462	1.821.961.221	Finance income
Piutang lain-lain		1.293.064.289	1.112.665.127	Other receivables
Pembayaran kas untuk:				Cash disbursements for:
Transaksi pembiayaan		(648.490.988.786)	(1.485.709.850.461)	Financing transactions
Beban operasional		(172.580.259.233)	(190.660.117.877)	Operating expenses
Beban keuangan		(91.888.342.286)	(102.248.129.336)	Finance expense
Pajak penghasilan		(13.551.628.037)	(22.850.327.316)	Income taxes
Piutang lain-lain		(1.145.098.547)	(881.000.000)	Other receivables
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi		434.322.073.484	20.741.673.929	Net cash from operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan aset tetap	12	2.278.100.000	1.392.440.000	Proceeds from sale of property and equipment
Perolehan aset tetap	12	(1.878.160.820)	(8.170.088.460)	Acquisitions of property and equipment
Arus kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi		399.939.180	(6.777.648.460)	Net cash from (used in) investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari efek utang yang diterbitkan	18	200.000.000.000	-	Proceeds from debt securities issued
Penerimaan utang bank	14	83.442.295.598	297.324.262.635	Proceeds from bank loans
Penerimaan pinjaman pihak ketiga	15	1.872.277.516	4.142.729.349	Proceeds from third party loan
Pembayaran efek utang yang diterbitkan	18	(393.500.000.000)	-	Payment of debt securities issued
Pembayaran utang bank	14	(288.528.351.121)	(368.027.000.149)	Payment of bank loans
Pembayaran pokok liabilitas sewa	19	(5.401.417.398)	-	Payment of principal portion of lease liabilities
Pembayaran beban emisi efek utang yang diterbitkan	18	(2.737.450.000)	-	Payment of debt securities issuance cost
Pembayaran pinjaman pihak ketiga	15	(858.567.093)	(257.890.770)	Payment of third party loan
Pembayaran dividen kas	23	-	(30.002.227.962)	Payment of cash dividends
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		(405.711.212.498)	(96.820.126.897)	Net cash used in financing activities

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
 Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOWS
 For the Years Ended
 December 31, 2020 and 2019
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020	2019	
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS, SETARA KAS DAN CERUKAN		29.010.800.166	(82.856.101.428)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH, CASH EQUIVALENTS AND BANK OVERDRAFTS
KAS, SETARA KAS DAN CERUKAN PADA AWAL TAHUN		31.079.094.847	113.935.196.275	CASH, CASH EQUIVALENTS AND BANK OVERDRAFTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS, SETARA KAS DAN CERUKAN PADA AKHIR TAHUN		60.089.895.013	31.079.094.847	CASH, CASH EQUIVALENTS AND BANK OVERDRAFTS AT END OF YEAR
Kas, setara kas dan cerukan terdiri dari:				Cash, cash equivalents and bank overdrafts consist of:
Kas dan setara kas	4	60.089.895.013	31.082.493.692	Cash and cash equivalents
Cerukan	14	-	(3.398.845)	Bank overdrafts
Neto		60.089.895.013	31.079.094.847	Net
Informasi tambahan untuk arus kas disajikan di Catatan 41				Supplementary information for cash flows is presented in Note 41

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Batavia Prosperindo Finance Tbk ("Perusahaan"), didirikan dengan nama PT Bira Multi Finance, didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 186 tanggal 12 Desember 1994 dari Djedjem Widjaja, S.H., M.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2.18791.HT.01.01.TH.94 tanggal 22 Desember 1994 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 9 Februari 1996, Tambahan No. 1584. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 20 Oktober 1999 yang diaktakan oleh Djedjem Widjaja, S.H., M.H., Notaris di Jakarta dengan Akta Notaris No. 42 tanggal 21 Desember 1999, pemegang saham Perusahaan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Bina Multi Finance. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C5143-HT.01.04.TH.2000 tanggal 6 Maret 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 48 tanggal 14 Juni 2000, Tambahan No. 5802. Dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang diadakan tanggal 16 Maret 2007 dan diaktakan oleh Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, dengan Akta Notaris No. 71, pemegang saham Perusahaan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Batavia Prosperindo Finance. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. W7-03581.HT.01.04.TH.2007 tanggal 4 April 2007 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 29 Mei 2007, Tambahan No. 5262. Berdasarkan Akta Notaris No. 156 tanggal 21 Oktober 2008 dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, nama Perusahaan diubah menjadi PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0101040.AH.01.09.TAHUN 2008 tanggal 24 Oktober 2008 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 29 April 2009, Tambahan No. 11470.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment and General Information

PT Batavia Prosperindo Finance Tbk (the "Company"), was established under the name PT Bira Multi Finance, as stated in Notarial Deed No.186 dated December 12, 1994 of Djedjem Widjaja, S.H., M.H., Notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia based on its Decision Letter No.C2-18791.HT.01.01.TH.94 dated December 22, 1994, and was published in the State Gazette of Republic of Indonesia No. 12 dated February 9, 1996, Supplement No. 1584. Based on Extraordinary General Meeting of Shareholders dated October 20, 1999 as stated in Notarial Deed No. 42 dated December 21, 1999 by Djedjem Widjaja, S.H., M.H., Notary in Jakarta, the shareholders of the Company approved the change of the Company's name into PT Bina Multi Finance. The change was approved by the Ministry of Justice and Laws of the Republic of Indonesia based on its Decision Letter No. C5143-HT.01.04.TH.2000 dated March 6, 2000, and published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 48 dated June 14, 2000 Supplement No. 5802. Based on Extraordinary General Meeting of Shareholders dated March 16, 2007 as stated in Notarial Deed No. 71 by Sugito Tedjamulja, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders of the Company approved the change of the Company's name into PT Batavia Prosperindo Finance. The change was approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Decision Letter No. W7-3581.HT.01.04.TH.2007 dated April 4, 2007, and was published in the State Gazette of Republic of Indonesia No. 43 dated May 29, 2007, Supplement No. 5262. Based on the Notarial Deed No. 156 of Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notary in Jakarta, dated October 21, 2008, the name of the Company's was changed to PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. This amendment was approved by the Ministry of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0101040.AH.01.09.TAHUN 2008 dated October 24, 2008, and published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 33 dated April 29, 2009, Supplement No.11470.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 262 tanggal 30 April 2015 dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, dalam rangka perubahan Anggaran Dasar Perusahaan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Dewan Komisaris dan Direksi Emiten atau Perusahaan Publik. Perubahan tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0931398 tanggal 11 Mei 2015 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0931397 tanggal 12 Mei 2015 serta telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0935071.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 12 Mei 2015. serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 56 tahun 2015, Tambahan No. 38085.

Perubahan terakhir anggaran dasar Perusahaan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 12 tanggal 1 September 2020 dari Christina Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar Perseroan dari 2.200.000.000 menjadi 7.000.000.000 saham, serta perubahan dan penyesuaian dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0066075.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 24 September 2020.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

The Company's Articles of Association have been amended several times. Based on Notarial Deed No. 262 dated April 30, 2015 of Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., notary in Jakarta, the amendment is to conform with Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 29/POJK.05/2014 concerning Business Implementation of Finance Company, POJK No. 32/POJK.04/2014 concerning Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies and POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Commissioners and Directors of Public Limited Companies. Such amendment had been reported to the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Acceptance Letter of Notification No. AHU-AH.01.03-0931398 dated May 11, 2015 of the Company's data and Acceptance Letter of Notification No. AHU-AH.01.03-0931397 dated May 12, 2015 of the Company's Articles of Association and had been approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decision Letter No. AHU-0935071.AH.01.02.TAHUN 2015 dated May 12, 2015, and was published in State Gazette No. 12 year 2015, Supplement No. 38085.

The latest amendment of the Company's articles of association, based on the Notarial Deed No. 12 dated September 1, 2020 of Christina Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., notary in Jakarta, in connection with the increase of the Company's authorized shares from 2,200,000,000 to 7,000,000,000 shares, and changes and adjustments in order to conform with the Financial Services Authority Regulation. Such amendment had approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decision Letter No. AHU-0066075. AH.01.02.TAHUN 2020 dated September 24, 2020.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah di bidang pembiayaan pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna; dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan serta menjalankan usaha lain, yang berkaitan dan mendukung kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat ini, Perusahaan terutama bergerak dalam bidang pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan multiguna.

Entitas induk Perusahaan adalah PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk yang didirikan di Indonesia, sedangkan entitas induk utama Perusahaan adalah Malacca Trust Pte. Ltd., sebuah perusahaan yang didirikan di Singapura.

Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 90/KMK.017/1995 tanggal 15 Februari 1995 dengan nama PT Bira Multi Finance dan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1995.

Izin Perusahaan telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP - 099/KM.10/2007 tanggal 9 Mei 2007, sehubungan dengan perubahan nama Perusahaan menjadi PT Batavia Prosperindo Finance.

Kantor pusat Perusahaan terletak di Gedung Chase Plaza, Lantai 12 dan 15, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta. Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan memiliki 1 kantor pusat dan 75 kantor cabang.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the Company's activities is to engage in investment financing, working capital financing, multipurpose financing; and/or other financing business activities based on Financial Services Authority (OJK) approval, operating lease and/or service-based activities as long as it does not conflict with the provisions of the laws and regulations in the financial services sector as well as conducting other businesses, relating to and supporting the Company's main business activities in accordance with applicable laws and regulations.

Currently, the Company is primarily engaged in investment financing, working capital financing and multipurpose financing.

The Company's immediate parent company is PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk, incorporated in Jakarta, and its ultimate parent company is Malacca Trust Pte. Ltd., a company incorporated and domiciled in Singapore.

The Company obtained its operating license as multi finance company from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia based on its Decision Letter No. 90/KMK.017/1995 dated February 15, 1995 with the name of PT Bira Multi Finance and started its commercial operations since 1995.

The Company's operating license has been renewed with the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia based on its Decision Letter No. KEP - 099/KM.10/2007 dated May 9, 2007, in connection with the change of name to PT Batavia Prosperindo Finance.

The Company's head office is located at Chase Plaza, 12th and 15th Floors, Jenderal Sudirman Street Kav. 21, Jakarta. As of December 31, 2020, the Company has 1 head office and 75 branch offices.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan dan Aksi Korporasi Lainnya

Pada tanggal 19 Mei 2009, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), yang sejak 1 Januari 2013 fungsinya dialihkan ke OJK, melalui surat No. S-4010/BL/2009 untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sejumlah 450.000.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp 100 per saham dengan harga penawaran Rp 110 per saham. Seluruh saham ini telah tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 1 Desember 2014, Perusahaan melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) I kepada pemegang saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atas 700.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham. Dimana setiap pemegang saham yang memiliki 10 saham lama mempunyai 7 HMETD, setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham baru dengan harga pelaksanaan Rp 500 yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pesanan pelaksanaan HMETD.

Berdasarkan pengumuman PT Bursa Efek Indonesia No. Peng-P-00940/BEI.PG2/12-2014 tanggal 30 Desember 2014, jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam rangka PUT I adalah sebesar 360.627.100 saham, sehingga jumlah saham yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 1.360.627.100 saham dengan jumlah nilai sebesar Rp 136.062.710.000. Sehubungan dengan PUT I, Perusahaan telah menerima Rp 180.313.550.000 dari pemegang saham Perusahaan. Dana dari hasil PUT I digunakan untuk modal kerja Perusahaan.

Sisa saham dalam PUT I yang tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD, sebesar 339.372.900 saham, tidak akan dikeluarkan dari portepel Perusahaan.

Pada tanggal 6 Maret 2017, Perusahaan melakukan PUT II kepada pemegang saham dalam rangka penerbitan HMETD atas 221.962.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham, dimana setiap pemegang saham yang memiliki 613 saham lama mempunyai 100 HMETD dan setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham baru dengan harga pelaksanaan Rp 284 yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pesanan pelaksanaan HMETD.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Public Offering of the Company's Shares and Other Corporate Actions

On May 19, 2009, the Company obtained an effective statement from Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK), which since January 1, 2013 its function has been transferred to OJK, through letter No. S-4010/BL/2009 to conduct the Initial Public Offering of shares consisting of 450,000,000 common shares with par value of Rp 100 per share at offering price of Rp 110 per share. These shares were all listed in Indonesia Stock Exchange.

On December 1, 2014, the Company conducted a Limited Public Offering (PUT) I through pre-emptive rights (HMETD) of 700,000,000 shares with par value of Rp 100 per share. Every shareholder who owns 10 old shares owned 7 rights, in which every 1 HMETD entitles the holder to purchase 1 new share with the offering price of Rp 500 per share that should be paid in full at the time of ordering the execution of HMETD.

Based on the announcement of PT Bursa Efek Indonesia No. Peng-P-00940/BEI.PG2/12-2014 dated December 30, 2014, the total of the Company's shares issued related to PUT I amounted to 360,627,100 shares, therefore, the total of the shares listed in Indonesia Stock Exchange amounted to 1,360,627,100 shares equivalent to Rp 136,062,710,000. In relation with this PUT I, the Company received Rp 180,313,550,000 from the Company's shareholders. The results of PUT I were used for the Company's working capital.

The remaining shares from PUT I which was not exercised by HMETD holder, amounted to 339,372,900 shares, will not be issued from the Company's portfolio.

On March 6, 2017, the Company conducted a PUT II through HMETD of 221,962,000 shares with par value of Rp 100 per share, where every shareholder who owns 613 old shares owned 100 rights and every 1 Right entitles the holder to purchase 1 new share with the offering price of Rp 284 per share that should be paid in full at the time of ordering the execution of HMETD.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan dan Aksi Korporasi Lainnya (lanjutan)

Berdasarkan pengumuman PT Bursa Efek Indonesia No. S-01323/BEI.PP2/03-2017 tanggal 9 Maret 2017, jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam rangka PUT II adalah sebesar 221.962.000 saham, sehingga jumlah saham yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 1.582.589.100 saham dengan jumlah nilai sebesar Rp 158.258.910.000. Sehubungan dengan PUT II, Perusahaan telah menerima Rp 63.037.208.000 dari pemegang saham Perusahaan. Sebesar 91,66% dari dana digunakan untuk membayar pengambilalihan yang dilakukan Perusahaan terhadap piutang pembiayaan konsumen - neto, piutang dalam penyelesaian agunan - neto dan utang bank dari PT Magna Finance Tbk, dan sisanya digunakan untuk modal kerja Perusahaan.

Pada tanggal 12 April 2018, Perusahaan melakukan PUT III kepada pemegang saham dalam rangka penerbitan HMETD atas 200.074.475 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham. Dimana setiap pemegang saham yang memiliki 791 saham lama mempunyai 100 HMETD, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham baru dengan harga pelaksanaan Rp 500 yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pesanan pelaksanaan HMETD.

Berdasarkan pengumuman PT Bursa Efek Indonesia No. S-9/D.40/2018 tanggal 12 Maret 2018, jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam rangka PUT III adalah sebesar 200.074.475 saham, sehingga jumlah saham yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 1.782.663.575 saham dengan jumlah nilai sebesar Rp 178.266.357.500. Sehubungan dengan PUT III, Perusahaan telah menerima Rp 100.037.237.500 dari pemegang saham Perusahaan. Dana dari hasil PUT III digunakan seluruhnya untuk modal kerja.

Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 1 September 2020, para pemegang saham Perusahaan menyetujui penambahan modal Perusahaan dengan mengeluarkan saham baru dari portepel dengan jumlah sebanyak-banyaknya 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 100 (seratus rupiah) per saham dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Public Offering of the Company's Shares and Other Corporate Actions (continued)

Based on the announcement of PT Bursa Efek Indonesia No. S-01323/BEI.PP2/03-2017 dated March 9, 2017, the total of the Company's shares issued related to PUT II amounted to 221,962,000 shares, therefore, the total of the shares listed in the Indonesia Stock Exchange amounted to 1,582,589,100 shares equivalent to Rp 158,258,910,000. In relation with this PUT II, the Company received Rp 63,037,208,000 from the Company's shareholders. Around 91.66% of the funds was used to pay for the acquisition of consumer financing receivables - net, receivables under settlement of collaterals - net and bank loans of PT Magna Finance Tbk, and the remaining was used for the Company's working capital.

On April 12, 2018, the Company conducted a PUT III to shareholders through HMETD of 200,074,475 shares with par value of Rp 100 per share. Every shareholder who owns 791 old shares owned 100 rights, in which 1 right entitles the holder to purchase 1 new share with the offering price of Rp 500 per share that should be paid in full at the time of ordering the execution of HMETD.

Based on the announcement of PT Bursa Efek Indonesia No. S-9/D.40/2018 dated March 12, 2018, the total of the Company's shares issued related to PUT III amounted to 200,074,475 shares, therefore, the total of the shares listed in the Indonesia Stock Exchange amounted to 1,782,663,575 shares equivalent to Rp 178,266,357,500. In relation with this PUT III, the Company received Rp 100,037,237,500 from the Company's shareholders. The results of PUT III were used for working capital.

Based on Deed No. 11 dated September 1, 2020, the Company's shareholders approved additional of Company capital by issuing new shares from the portfolios with a maximum amount of 950,000,000 (nine hundred and fifty million) shares with a nominal value of Rp 100 (one hundred rupiah) per share by issuing Pre-emptive Rights (HMETD) in Additional of Capital by issuing Pre-emptive Rights.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan dan Aksi Korporasi Lainnya (lanjutan)

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini diterbitkan, rencana Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD tersebut diatas masih dalam proses.

c. Penawaran Umum Efek Utang Perusahaan

Pada tanggal 26 Juni 2013, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan Surat OJK No. S-89/D.04.2013 untuk melakukan penawaran umum perdana Obligasi Batavia Prosperindo Finance I Tahun 2013 kepada masyarakat dengan jumlah pokok sebesar Rp 300.000.000.000. Pada tanggal 4 Juli 2013, seluruh obligasi tersebut telah dicatat pada Bursa Efek Indonesia dengan beban emisi final sebesar Rp 1.875.398.000.

Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal 3 Oktober 2013. Obligasi ini terbagi menjadi tiga seri, yang terdiri dari Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp 20.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 50.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,5% per tahun, dan Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp 230.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% per tahun. Obligasi seri A, seri B dan seri C masing-masing jatuh tempo tanggal 3 Juli 2014, 2015 dan 2016.

Pada tanggal 20 Juni 2016, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan Surat OJK No. S-306/D.04.2016 untuk melakukan penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance kepada masyarakat dengan jumlah pokok sebesar Rp 500.000.000.000.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Public Offering of the Company's Shares and Other Corporate Actions (continued)

Until the date of the financial statement are issued, the Addition of Capital by Issuing Pre-emptive Rights (HMETD) are still in process.

c. Public Offering of the Company's Debt Securities

On June 26, 2013, the Company obtained the effective statements from OJK based on No. S-89/D.04.2013 to conduct an initial public offering of Obligasi Batavia Prosperindo Finance I Tahun 2013 to public with a principal amount of Rp 300,000,000,000. On July 4, 2013, all of the bonds have been recorded in the Indonesia Stock Exchange. The bonds were listed in the Indonesia Stock Exchange with a final issuance cost of Rp 1,875,398,000.

Interest on such bond was paid on a quarterly basis starting from October 3, 2013. The bonds were divided into three series, consisting of Series A with a nominal value of Rp 20,000,000,000 bearing fixed interest rate of 9.25% per year, Series B with a nominal value of Rp 50,000,000,000 bearing fixed interest rate of 9.5% per year, and Series C with a nominal value of Rp 230,000,000,000 bearing fixed interest rate of 10.75% per year. The series A, series B and series C bonds matured on July 3, 2014, 2015 and 2016, respectively.

On June 20, 2016, the Company obtained the effective statements from OJK based on No. S-306/D.04.2016 to conduct a public offering of Obligasi Berkelanjutan Batavia Prosperindo Finance I to public with total principal amount of Rp 500,000,000,000.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Penawaran Umum Efek Utang Perusahaan (lanjutan)

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perusahaan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016 dengan jumlah pokok sebesar Rp 200.000.000.000. Pada tanggal 28 Juni 2016, seluruh obligasi tersebut telah dicatat pada Bursa Efek Indonesia dengan beban emisi final sebesar Rp 5.026.925.651.

Bunga Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016 dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal 28 September 2016. Obligasi ini terbagi menjadi dua seri, yang terdiri dari Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp 30.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun, Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 170.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% per tahun. Obligasi seri A dan seri B masing-masing jatuh tempo tanggal 8 Juli 2017 dan 28 Juni 2018.

Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp 300.000.000.000. Pada tanggal 8 Mei 2017, seluruh obligasi tersebut telah dicatat pada Bursa Efek Indonesia dengan beban emisi final sebesar Rp 3.482.943.498.

Bunga Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2017 dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal 5 Agustus 2017 dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% per tahun dan jatuh tempo tanggal 5 Mei 2020.

Pada tanggal 4 Juni 2018, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan Surat OJK No. S-62/D.04/2018 untuk melakukan penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahun 2018 kepada masyarakat dengan jumlah pokok sebesar Rp 650.000.000.000.

Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2018 dengan jumlah pokok sebesar Rp 300.000.000.000. Pada tanggal 26 Juni 2018, seluruh obligasi tersebut telah dicatat pada Bursa Efek Indonesia dengan beban emisi final sebesar Rp 3.539.926.500.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

c. Public Offering of the Company's Debt Securities (continued)

Regarding the public offering, the Company issued *Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016* with a principal amount of Rp 200,000,000,000. On June 28, 2016 all of the bonds have been recorded in the Indonesia Stock Exchange. The bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange with a final issuance cost of Rp 5,026,925,651.

Interest on *Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016* was paid on a quarterly basis starting from September 28, 2016. The bonds were divided into two series, consisting of Series A with a nominal value of Rp 30,000,000,000 bearing fixed interest rate of 10.50% per year, Series B with a nominal value of Rp 170,000,000,000 bearing fixed interest rate of 11.00% per year. The series A and series B bonds matured on July 8, 2017 and June 28, 2018, respectively.

The Company issued *Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2017* with a principal amount of Rp 300,000,000,000. On May 8, 2017, all of the bonds have been recorded in the Indonesia Stock Exchange with a final issuance cost of Rp 3,482,943,498.

Interest on *Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2017* was paid on a quarterly basis starting from August 5, 2017, bearing fixed interest rate of 11.00% per year. The bond matured on May 5, 2020.

On June 4, 2018 the Company obtained the effective statements from OJK based on No. S-62/D.04/2018 to conduct a public offering of *Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahun 2018* to public with total principal amount of Rp 650,000,000,000.

The Company issued *Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2018* with a principal amount of Rp 300,000,000,000. On June 26, 2018, all of the bonds have been recorded in the Indonesia Stock Exchange with a final issuance cost of Rp 3,539,926,500.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Penawaran Umum Efek Utang Perusahaan (lanjutan)

Bunga Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2018 dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal 25 September 2018 dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% per tahun. Obligasi tersebut jatuh tempo tanggal 25 Juni 2021.

Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebesar Rp 200.000.000.000. Pada tanggal 5 Mei 2020, seluruh obligasi tersebut telah dicatat pada Bursa Efek Indonesia dengan beban emisi final sebesar Rp 2.737.450.000

Bunga Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2020 dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal 4 Agustus 2020 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,70% per tahun. Obligasi tersebut jatuh tempo tanggal 14 Mei 2021.

d. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit, Internal Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris Independen
Komisaris

Irena Istary Iskandar
Desti Liliati
Christopher Joseph Clower

Direksi

Direktur Utama
Direktur Keuangan
Direktur
Direktur

Markus Dinarto Pranoto
Indah Mulyawan
Jasin Hermawan
Hady Sutiono

Manajemen kunci adalah Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Ruang lingkup Direktur Utama mencakup bidang hukum, sumber daya manusia, pemasaran dan operasional, dan ruang lingkup Direktur Keuangan mencakup bidang keuangan dan akuntansi.

Gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing berjumlah sebesar Rp 17.481.124.000 dan Rp 16.839.050.000.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

c. Public Offering of the Company's Debt Securities (continued)

Interest on Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2018 was paid on a quarterly basis starting from September 25, 2018, bearing fixed interest rate of 11.00% per year. The bond matures on June 25, 2021.

The Company issued Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2020 with a principal amount of Rp 200,000,000,000. On May 5, 2020, all of the bonds have been recorded in the Indonesia Stock Exchange with a final issuance cost of Rp 2,737,450,000.

Interest on Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2020 was paid on a quarterly basis starting from August 4, 2020, bearing fixed interest rate of 9.70% per year. The bond matures on May 14, 2021.

d. Boards of Commissioners and Directors, Audit Committee, Internal Audit, Corporate Secretary and Employees

The members of the Company's Boards of Commissioners and Directors as December 31, 2020 and 2019 are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner

Board of Directors

President Director
Finance Director
Director
Director

Key management are Boards of Commissioners and Directors of the Company. President Director's scope of authority includes legal, human resources, marketing and operational, and Finance Director's scope of authority includes finance and accounting.

Salaries and benefits provided to the Boards of Commissioners and Directors for the years ended December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp 17,481,124,000 and Rp 16,839,050,000, respectively.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit, Internal Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan (lanjutan)

Susunan Komite Audit dan Manajemen Risiko Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Ketua
Anggota
Anggota

Desti Liliati
Eddy Silalahi
Iwan Setiawan

Chairman
Member
Member

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perusahaan telah menyusun Piagam Internal Audit sejak tanggal 2 September 2008 dan telah membentuk Divisi Internal Audit sejak tanggal 15 April 2008, berdasarkan Surat Penunjukkan Anggota Audit Internal Perusahaan.

Kepala Satuan Audit Internal Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Abdul Malik.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. 00507/BPF/III/2009 tanggal 13 Maret 2009, Perusahaan menunjuk Indah Mulyawan sebagai Sekretaris Perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, Perusahaan diwajibkan untuk membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan yang antara lain bertugas:

- (1) Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- (2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemberi modal yang berkaitan dengan kondisi Emiten dan Perusahaan Publik;
- (3) Memberikan masukan kepada Direksi Perusahaan untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya;
- (4) Sebagai penghubung atau *contact person* antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Otoritas Jasa Keuangan dan masyarakat;
- (5) Fungsi Sekretaris Perusahaan dapat dirangkap oleh Direktur Perusahaan.

Jumlah karyawan Perusahaan masing-masing adalah 1.186 dan 1.315 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (tidak diaudit).

1. GENERAL INFORMATION (continued)

d. Boards of Commissioners and Directors, Audit Committee, Internal Audit, Corporate Secretary and Employees (continued)

The composition of the Audit and Risk Management Committee as of December 31, 2020 and 2019 is as follows:

Based on the regulation issued by the Bapepam-LK No. IX.1.7 concerning the Forming and Charter's Compilation Guidance of Internal Audit Unit, the Company had established an Internal Audit Charter since September 2, 2008 and had formed an Internal Audit Division since April 15, 2008, based on the Letter of Assignment of Internal Audit Members.

The Head of Internal Audit Unit of the Company as of December 31, 2020 and 2019 is Abdul Malik.

Based on the virtue of the Board of Directors of the Company No. 00507/BPF/III/2009 dated March 13, 2009, the Company appointed Indah Mulyawan as its Corporate Secretary.

Based on the regulation issued by the Bapepam-LK No. IX.1.4 concerning the Formation of the Corporate Secretary, the Company is required to establish a Corporate Secretary which functions comprise the followings:

- (1) Keep informed with respect to Capital Market developments, especially Capital Market regulations;
- (2) Provide the public with all information needed by investors regarding the condition of the Issuer or Public Company;
- (3) Make recommendations to the Public Company's board of directors with respect to comply with Law No. 8 Year 1995 concerning the Capital Market and its implementing regulations;
- (4) Act as the Issuer's or Public Company's contact person with Indonesia Financial Service Authority and the public; and
- (5) The functions of Corporate Secretary can be concurrently performed by a director of the Issuer or Public Company.

The Company has 1,186 and 1,315 employees as of December 31, 2020 and 2019, respectively (unaudited).

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

e. Penyelesaian Laporan Keuangan

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2020 diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 9 Februari 2021. Direksi Perusahaan yang menandatangani Surat Pernyataan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan PT Batavia Prosperindo Finance Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada dibawah pengawasannya.

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan".

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, kecuali bagi penerapan beberapa SAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam Catatan-Catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2020.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Perusahaan menerapkan PSAK 2, "Laporan Arus Kas".

Laporan arus kas disusun dan disajikan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

e. Completion of the Financial Statements

The Company's financial statements as of December 31, 2020 are completed and authorized for issuance by the Company's Board of Directors on February 9, 2021. The Company's Directors who signed the Directors' Statement letter are responsible for the fair preparation and presentation of such financial statements.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements of PT Batavia Prosperindo Finance Tbk have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), which comprise the Financial Accounting Standards, (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (DSAK) and the regulations of capital market regulator for entities under its control.

The financial statements have been prepared and presented in accordance with PSAK 1, "Presentation of Financial Statements".

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those made in the preparation of the Company's financial statements for the year ended December 31, 2019, except for the adoption of several amended SAKs. As disclosed further in the relevant succeeding Notes, several amended and published accounting standards were adopted effective January 1, 2020.

The financial statements, except for the statements of cash flows, have been prepared on the accrual basis using the historical cost basis of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

The Company applied PSAK 2, "Statement of Cash Flows".

The statements of cash flows have been prepared and presented using the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing, and financing activities.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank, dan deposito berjangka, setelah dikurangi cerukan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam pengajian laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Perusahaan, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa item pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

b. Kas dan Setara Kas dan Deposito Berjangka yang Dibatasi Penggunaannya

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan terdiri atas kas di tangan, kas di bank dan deposito jangka pendek yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan, tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman serta tidak dibatasi penggunaannya.

Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan sejak tanggal penempatan yang dijamin dan dibatasi penggunaannya dicatat sebagai "Deposito Berjangka yang Dibatasi Penggunaannya" dalam laporan posisi keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)

For the purpose of statement of cash flows, cash and cash equivalents comprise cash on hand and in banks and time deposits, net of overdrafts.

The presentation currency used in the preparation of the financial statements is the Indonesian Rupiah, which the Company's functional currency.

In order to provide further understanding of the financial performance of the Company, due to the significance of their nature or amount, several items of income or expense have been shown separately.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgment in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

b. Cash and Cash Equivalents and Restricted Time Deposits

Cash and cash equivalents in the statement of financial position comprise of cash on hand, cash in banks and time deposits with maturities of 3 (three) months or less at the time of placement that are readily convertible to known amounts of cash and neither pledged as collateral nor restricted for use and are subject to an insignificant risk of changes in value.

Time deposits with maturities of more than three months from the date of placement which are used as collateral and are restricted for use are recorded as "Restricted Time Deposits" in the statement of financial position.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan

Perusahaan menerapkan PSAK 71, "Instrumen Keuangan" efektif mulai 1 Januari 2020. PSAK 71 menggantikan ketentuan PSAK 55 yang terkait dengan pengakuan, klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan, penghentian pengakuan instrument keuangan, penurunan nilai aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Amandemen tersebut mengharuskan instrumen utang diukur baik pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) atau nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Klasifikasi instrumen utang, tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan apakah arus kas kontraktual hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga (SPPI). Model bisnis entitas adalah bagaimana entitas mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas dan menciptakan nilai bagi entitas baik dari mengumpulkan arus kas kontraktual, menjual aset keuangan, atau keduanya. Jika instrumen utang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual, diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika juga memenuhi persyaratan SPPI. Instrumen utang yang memenuhi persyaratan SPPI yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual aset dan untuk menjual aset diukur di FVOCI. Aset keuangan diukur pada FVTPL jika tidak memenuhi kriteria FVOCI atau biaya perolehan diamortisasi.

Penerapan PSAK 71 mengakibatkan perubahan pada kebijakan akuntansi dan penyesuaian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan klasifikasi dan pengukuran, dan penurunan aset keuangan telah diubah untuk mematuhi standar ini, PSAK 71 efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, dan Perusahaan mengadopsi PSAK 71 menggunakan metode retrospektif yang dimodifikasi. Dalam metode ini, angka komparatif tidak disajikan kembali dan dampak keuangan dari adopsi standar diakui dalam laba ditahan sebagai penyesuaian pada tanggal 1 Januari 2020.

Penilaian model bisnis dan apakah aset keuangan memenuhi persyaratan SPPI dibuat pada 1 Januari 2020, dan kemudian diterapkan secara retrospektif pada aset keuangan yang tidak dihentikan pengakuannya sebelum 1 Januari 2020.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial Instruments

The Company applied PSAK 71, "Financial Instruments" effective beginning January 1, 2020. PSAK 71 replaces the provisions of PSAK 55 that relate to the recognition, classification and measurement of financial assets and financial liabilities, derecognition of financial instruments, impairment of financial assets and hedge accounting.

The amendments require debt instruments to be measured either at amortized cost, fair value through other comprehensive income (FVOCI) or fair value through profit or loss (FVTPL). Classification of debt instruments, depends on the entity's business model for managing the financial assets and whether the contractual cash flows represent solely payments of principal and interest (SPPI). An entity's business model is how an entity manages its financial assets in order to generate cash flows and create value for the entity either from collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. If a debt instrument is held to collect contractual cash flows, it is measured at amortized cost if it also meets the SPPI requirement. Debt instruments that meet the SPPI requirement that are held both to collect the assets' contractual cash flows and to sell the assets are measured at FVOCI. Financial assets are measured at FVTPL if they do not meet the criterion of FVOCI or amortized cost.

The adoption of PSAK 71 resulted in changes to the accounting policies and adjustment to the financial statements. The accounting policies that relate to the classification and measurement, and impairment of financial assets, are amended to comply with this standard. PSAK 71 is effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2020, and the Company adopted PSAK 71 using the modified retrospective method. Under this method, comparative figures are not restated and the financial impact of the adoption of the standard is recognized in retained earnings as adjustment on January 1, 2020.

The assessment of the business model and whether the financial assets meet the SPPI requirements was made as of January 1, 2020, and then applied retrospectively to those financial assets that were not derecognized before January 1, 2020.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Instrumen utang Perusahaan memiliki arus kas kontraktual yang semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga. Perusahaan memiliki aset keuangan saat ini untuk mengumpulkan arus kas kontraktual, dan karenanya diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika menerapkan PSAK 71.

PSAK 71 mengharuskan semua instrumen ekuitas dilakukan pada FVTPL, kecuali jika entitas memilih pengakuan awal, untuk menyajikan perubahan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain.

PSAK 71 mengharuskan Perusahaan untuk mencatat kerugian kredit ekspektasian (ECL) pada semua aset keuangannya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI dan jaminan keuangan. Perusahaan sebelumnya mencatat penurunan nilai berdasarkan model kerugian yang terjadi ketika terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Pada tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan menggunakan matriks provisi untuk menyediakan kerugian kredit yang diharapkan yang ditentukan oleh PSAK 71 yang mensyaratkan penggunaan penyisihan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur dari semua piutang usaha. Hal ini meningkatkan penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas piutang sewa pembiayaan sebesar Rp 863.215.772 (Catatan 6) dan menurunkan penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas piutang pembiayaan konsumen dan piutang lain-lain masing-masing sebesar Rp 1.186.012.586 (Catatan 7) dan Rp 125.975.449 (Catatan 9), total efek neto sebesar Rp 448.772.263, yang diakui sebagai penyesuaian saldo laba pada tanggal 1 Januari 2020.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial Instruments (continued)

The Company's debt instruments have contractual cash flows that are solely payments of principal and interest. The Company holds its current financial assets to collect contractual cash flows, and accordingly measured at amortized cost when it applies PSAK 71.

PSAK 71 requires all equity instruments to be carried at FVTPL, unless an entity chooses on initial recognition, to present fair value changes in other comprehensive income.

PSAK 71 requires the Company to record expected credit losses (ECL) on all of its financial assets measured at amortized cost or FVOCI and financial guarantees. The Company previously recorded impairment based on the incurred loss model when there is objective evidence that financial asset is impaired.

On January 1, 2020, the Company applies the simplified approach using provision matrix to provide for expected credit losses prescribed by PSAK 71 which requires the use of lifetime allowance for expected credit losses of all trade receivables. This increased the allowance for expected credit losses of finance lease receivables by Rp 863,215,772 (Note 6) and decreased the allowance for expected credit losses of consumer finance receivables and other receivables by Rp 1,186,012,586 (Note 7) and Rp 125,975,449 (Note 9), respectively, resulting to a total net effect of Rp 448,772,263 which was recognized as an adjustment to retained earnings on January 1, 2020.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Berdasarkan penilaian model bisnis Perusahaan pada tanggal penerapan awal, 1 Januari 2020, kas dan setara kas, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, piutang sewa pembiayaan, piutang pembiayaan konsumen, tagihan anjak piutang, piutang lain-lain dan aset lain-lain - deposit sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan memberikan kenaikan untuk arus kas yang semata-mata mewakili pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan ini sekarang diklasifikasikan dan diukur sebagai instrumen utang dengan biaya perolehan diamortisasi. Perubahan klasifikasi aset keuangan Perusahaan tidak mengakibatkan perubahan dalam pengukurannya.

Investasi ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2019 diklasifikasikan dan diukur sebagai instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mulai 1 Januari 2020. Perusahaan memilih untuk mengklasifikasikan investasi ekuitas yang terdaftar di bawah kategori ini pada tanggal penerapan awal karena bermaksud untuk menahan investasi ini di masa mendatang. Tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laporan laba rugi untuk investasi tersebut pada periode sebelumnya.

Perusahaan belum menetapkan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Tidak ada perubahan dalam klasifikasi dan pengukuran untuk liabilitas keuangan Perusahaan.

Efektif tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan", Amandemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan Amandemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang Reformasi Acuan Suku Bunga sebagai hasil adopsi dari *Interest Rate Benchmark Reform - Amandemen IFRS 9, IAS 39 dan IFRS 7*

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial Instruments (continued)

Based on the assessment of the Company's business model as of the date of initial application, January 1, 2020, cash and cash equivalents, restricted time deposits, finance lease receivables, consumer financing receivables, factoring receivables, other receivables and other assets - rental deposits, which were previously classified as loans and receivables are held to collect contractual cash flows and give rise to cash flows representing solely payments of principal and interest. These financial assets are now classified and measured as debt instruments at amortized cost. The change of the classification of the Company's financial assets do not result in changes in their measurement.

Equity investments classified as available for sale financial assets as of December 31, 2019 are classified and measured as equity instruments designated at fair value through other comprehensive income at beginning January 1, 2020. The Company elected to classify irrevocably its listed equity investment under this category at the date of initial application as it intends to hold these investments for the foreseeable future. There were no impairment losses recognized in profit or loss for these investments in prior periods.

The Company has not designated any financial liabilities as at fair value through profit or loss. There are no changes in the classification and measurement for the Company's financial liabilities.

Effective January 1, 2020, the Company adopted Amendments to PSAK 71, "Financial Instruments", Amendments to PSAK 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and Amendments to PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosures" on Interest Rate Reference Reforms as a result of adoption from Interest Rate Benchmark Reform - Amendments to IFRS 9, IAS 39 and IFRS 7.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

c. Financial Instruments (continued)

Amandemen ini memberikan kelonggaran atas potensi dampak ketidakpastian yang disebabkan oleh *Interest Rate Benchmark Reform* ("IBOR Reform") dengan memberikan pengecualian terhadap persyaratan akuntansi lindung nilai dalam PSAK 71 dan PSAK 55. Nilai, dan/atau acuan tingkat suku bunga yang menjadi acuan dasar arus kas instrumen lindung nilai, tidak berubah sebagai akibat dari reformasi IBOR. Secara garis besar, amandemen ini mengatur:

This amendment provides concessions on the potential effects of uncertainty caused by the interest rate reference reform ("IBOR Reform") by providing an exception to the hedge accounting requirements in PSAK 71 and PSAK 55. The value, and/or interest rate reference on which the hedging instrument cash flows are based, are not changed as a result of the IBOR reform. Broadly speaking, this amendment regulates:

- Persyaratan yang sangat mungkin untuk lindung nilai arus kas,
- Penilaian prospektif PSAK 71 dan penilaian retrospektif PSAK 55,
- Penentuan komponen risiko yang diidentifikasi secara terpisah,
- Penerapan amandemen ini bersifat wajib dan akan berlaku untuk jangka waktu terbatas,
- Pengungkapan.

- *A highly probable requirement for cash flow hedges,*
- *Prospective assessment of PSAK 71 and retrospective assessment of PSAK 55,*
- *Determination of risk components that are identified separately,*
- *The application of these amendments is mandatory and will be in effect for a limited period,*
- *Disclosure.*

Penerapan Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan", Amandemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan Amandemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang Reformasi Acuan Suku Bunga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan.

The adoption of the Amendments to PSAK 71, "Financial Instruments", Amendments to PSAK 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and Amendments to PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosures" on Interest Rate Reference Reforms has no significant impact on the financial statements.

Klasifikasi

Classification

Perusahaan mengklasifikasikan instrument keuangan menjadi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lain.

The Company classifies financial instruments into financial assets and financial liabilities. A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Dari tanggal 1 Januari 2020

From January 1, 2020

(i) Aset Keuangan

(i) Financial Assets

Aset keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, FVOCI, dan FVTPL.

Financial assets are classified, at initial recognition, and subsequently measured at amortized cost, FVOCI, and FVTPL.

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, piutang sewa pembiayaan, piutang pembiayaan konsumen, tagihan anjak piutang, piutang lain-lain, aset lain-lain - jaminan sewa diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dan investasi saham diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada FVOCI.

The Company's financial assets consist of cash and cash equivalents, restricted time deposits, finance lease receivables, consumer financing receivables, factoring receivables, other receivables, other assets - rental deposits classified as financial assets at amortized cost and investment in shares classified as financial assets at FVOCI.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi (lanjutan)

Dari 1 tanggal Januari 2020 (lanjutan)

(ii) Liabilitas Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai (i) liabilitas keuangan diukur pada FVTPL atau (ii) liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri atas utang bank, pinjaman pihak ketiga, beban masih harus dibayar, liabilitas sewa dan efek utang yang diterbitkan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Sebelum 1 Januari 2020

(i) Aset Keuangan

Aset keuangan dalam lingkup PSAK 55 diklasifikasikan sebagai (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi dimiliki hingga jatuh tempo, (iv) atau aset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir tahun keuangan.

Aset keuangan Perusahaan terdiri atas kas dan setara kas, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, piutang sewa pembiayaan, piutang pembiayaan konsumen, tagihan anjak piutang, piutang lain-lain dan aset lain-lain - jaminan sewa diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang dan investasi saham yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial Instruments (continued)

Classification (continued)

From January 1, 2020 (continued)

(ii) Financial Liabilities

The Company classifies its financial liabilities as: (i) financial liabilities at FVTPL or (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

The Company's financial liabilities consist of bank loans, third party loan, accrued expenses, lease liabilities and debt securities issued classified as financial liabilities at amortized cost.

Before January 1, 2020

(i) Financial Assets

Financial assets within the scope of PSAK 55 are classified as (i) financial assets at fair value through profit or loss, (ii) loans and receivables, (iii) held-to-maturity investments, or (iv) available for sale financial assets, as appropriate. The Company determines the classification of its financial assets at initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluates the designation of such assets at each financial year end.

The Company's financial assets consist of cash and cash equivalents, restricted time deposits, finance lease receivables, consumer financing receivables, factoring receivables, other receivables and other assets - rental deposits classified as loans and receivables and investment in shares classified as available for sale financial assets.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

c. Financial Instruments (continued)

Klasifikasi (lanjutan)

Classification (continued)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Before January 1, 2020 (continued)

(ii) Liabilitas Keuangan

(ii) Financial Liabilities

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 55 dapat dikategorikan sebagai (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau (iii) derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Financial liabilities within the scope of PSAK 55 are classified as (i) financial liabilities at fair value through profit or loss, (ii) financial liabilities measured at amortized cost, or (iii) as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri atas utang bank, pinjaman pihak ketiga, beban masih harus dibayar, dan efek utang yang diterbitkan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

The Company's financial liabilities consist of bank loans, third party loan, accrued expenses, and debt securities issued classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Pengakuan dan Pengukuran

Recognition and Measurement

Dari tanggal 1 Januari 2020

From January 1, 2020

(i) Aset Keuangan

(i) Financial Assets

Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan tersebut. Kecuali untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan dan atau saat Perusahaan menerapkan panduan praktis, pada saat pengakuan awal Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada FVTPL, biaya transaksi. Untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan atau ketika Perusahaan menerapkan panduan praktis, diukur sesuai harga transaksi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 72.

The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial asset's contractual cash flow characteristics and the Company's business model for managing them. With the exception of trade receivables that do not contain a significant financing component for which the Company has applied the practical expedient, the Company initially measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at FVTPL, transactions costs. Trade receivables that do not contain a significant financing component or which the Company has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 72.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Dari tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

(i) Aset Keuangan (lanjutan)

Agar dapat diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI, aset keuangan harus memiliki arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Pengujian ini dikenal sebagai SPPI testing dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan mengacu kepada bagaimana Perusahaan mengelola aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari memperoleh arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Pengukuran aset keuangan tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

a. Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Kategori ini merupakan yang paling relevan bagi Perusahaan. Perusahaan mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

From January 1, 2020 (continued)

(i) Financial Assets (continued)

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVOCI, it needs to give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI testing and it is performed at instrument level.

The Company's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Company commits to buy or sell the asset.

The measurement of financial assets depends on their classification as follows:

a. Financial assets at amortized cost (debt instruments)

This category is the most relevant to the Company. The Company measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective to hold the financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

c. Financial Instruments (continued)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Recognition and Measurement (continued)

Dari tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

From January 1, 2020 (continued)

(i) Aset Keuangan (lanjutan)

(i) Financial Assets (continued)

- a. Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang) (lanjutan)

- a. Financial assets at amortized cost (debt instruments) (continued)

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*EIR*). Keuntungan dan kerugian diakui sebagai laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dimodifikasi, serta melalui proses amortisasi.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest (*EIR*) method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the assets are derecognized or impaired, modified, as well as through the amortization process.

- b. Aset keuangan pada *FVOCI* tanpa fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif saat penghentian pengakuan (instrumen ekuitas)

- b. Financial assets at *FVOCI* with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments)

Setelah pengakuan awal, Perusahaan dapat memilih untuk mengklasifikasikan investasi ekuitasnya yang tidak dapat dibatalkan sebagai instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ketika mereka memenuhi definisi ekuitas yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 71 tidak dimiliki untuk perdagangan. Klasifikasi ditentukan berdasarkan instrumen-per-instrumen.

Upon initial recognition, the Company can elect to classify irrevocably its equity investments as equity instruments designated at *FVOCI* when they meet the definition of equity and under PSAK 71 are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis.

Keuntungan dan kerugian pada aset keuangan ini tidak pernah didaur ulang ke laba rugi. Dividen diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam laba rugi ketika hak pembayaran telah ditetapkan, kecuali ketika Perusahaan memperoleh manfaat dari hasil tersebut sebagai pemulihan sebagian dari biaya aset keuangan, dalam hal mana, keuntungan tersebut dicatat dalam penghasilan komprehensif lain.

Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss. Dividends are recognized as other income in profit or loss when the right of payment has been established, except when the Company benefits from such proceeds as a recovery of part of the cost of the financial asset, in which case, such gains are recorded in other comprehensive income.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

c. Financial Instruments (continued)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Recognition and Measurement (continued)

Dari tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

From January 1, 2020 (continued)

(i) Aset Keuangan (lanjutan)

(i) Financial Assets (continued)

- b. Aset keuangan pada *FVOCI* tanpa fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif saat penghentian pengakuan (instrumen ekuitas) (lanjutan)

- b. Financial assets at *FVOCI* with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments) (continued)

Perusahaan memilih untuk mengklasifikasikan, yang tidak dapat dibatalkan, investasi ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif di bawah kategori ini.

The Company elected to classify irrevocably its non-listed equity investments under this category.

(ii) Liabilitas Keuangan

(ii) Financial Liabilities

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman, atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, jika sesuai.

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

Semua liabilitas keuangan pada awalnya diakui pada nilai wajar, dan untuk pinjaman sebesar pinjaman yang diterima setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loan and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada *FVTPL* diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Perusahaan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Issued financial instruments or their components, which are not classified as financial liabilities at *FVTPL* are classified as other financial liabilities, where the substance of the contractual arrangements results in the Company having an obligation either to deliver cash or another financial asset to the holder, or to satisfy the obligation other by the exchange of a fixed amount of cash or another financial asset for a fixed number of own equity shares.

Pengukuran liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

The measurement of financial liabilities depends on their classification as follows:

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

c. Financial Instruments (continued)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Recognition and Measurement (continued)

Dari tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

From January 1, 2020 (continued)

(ii) Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(ii) Financial Liabilities (continued)

a. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

a. Financial liabilities measured at amortized cost

Kategori ini merupakan yang paling relevan bagi Perusahaan. Setelah pengakuan awal, pinjaman diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode EIR.

This is the category most relevant to the Company. After initial recognition, loans and borrowings are subsequently measured at amortized cost using the EIR method.

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi hingga liabilitas dihentikan pengakuannya melalui proses amortisasi menggunakan metode EIR.

Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process using the EIR method.

Biaya perolehan dimortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskon atau premi pada perolehan awal dan biaya yang merupakan bagian integral dari metode EIR. Amortisasi metode EIR diakui sebagai "Beban keuangan" pada laba rugi.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included as "Finance expenses" in profit or loss.

Sebelum 1 Januari 2020

Before January 1, 2020

(i) Aset Keuangan

(i) Financial Assets

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya, ditambah, dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset.

Financial assets are recognized initially at fair value, plus, in the case of financial assets not at fair value through profit or loss, directly attributable transaction costs. The subsequent measurement of financial assets depends on their classification.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim/reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Company commits to purchase or sell the assets.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

c. Financial Instruments (continued)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Recognition and Measurement (continued)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Before January 1, 2020 (continued)

(i) Aset Keuangan (lanjutan)

(i) Financial Assets (continued)

a. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

a. Loans and Receivables

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut dicatat sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest rate method.

Keuntungan dan kerugian diakui sebagai laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

Gains and losses are recognized in profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

b. Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual

b. Available for Sale Financial Assets

Aset keuangan tersedia untuk dijual termasuk efek ekuitas adalah aset keuangan Nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam kategori sebelumnya.

Available for sale financial assets include equity which are nonderivative financial assets that are designated as available for sale or are not classified in any of the preceding categories.

Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual selanjutnya diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dalam cadangan nilai wajar sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya, pada saat keuntungan atau kerugian kumulatif diakui dalam pendapatan operasional lainnya, atau terjadi penurunan nilai, pada saat kerugian kumulatif direklasifikasi ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam biaya keuangan dan dihapus dari cadangan nilai wajar.

After initial measurement, available for sale financial assets are subsequently measured at fair value with unrealized gains or losses recognized as other comprehensive income in the fair value reserve until the investment is derecognized, at which time the cumulative gain or loss is recognized in other operating income, or determined to be impaired, at which time the cumulative loss is reclassified to statements of profit or loss and other comprehensive income in finance costs and removed from the fair value reserve.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

(i) Aset Keuangan (lanjutan)

b. Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual (lanjutan)

Perusahaan mengevaluasi aset keuangan tersedia untuk dijual apakah kemampuan dan niat untuk menjualnya dalam waktu dekat masih sesuai. Ketika Perusahaan tidak mampu untuk memperdagangkan aset keuangan karena pasar tidak aktif dan niat manajemen untuk melakukannya secara signifikan berubah di masa mendatang, Perusahaan dapat memilih untuk mereklasifikasi aset keuangan dalam kondisi yang jarang terjadi.

Reklasifikasi ke pinjaman yang diberikan dan piutang diperbolehkan ketika aset keuangan memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang dan Perusahaan memiliki maksud dan kemampuan untuk memiliki aset-aset di masa mendatang atau sampai jatuh tempo. Reklasifikasi ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo hanya diperbolehkan ketika entitas memiliki kemampuan dan berkeinginan untuk menahan aset keuangan sedemikian rupa.

Untuk aset keuangan yang direklasifikasi keluar dari aset keuangan tersedia untuk dijual, keuntungan atau kerugian sebelumnya atas aset tersebut yang telah diakui dalam ekuitas diamortisasi ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama sisa umur dari investasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Selisih antara biaya perolehan diamortisasi baru dan arus kas yang diharapkan juga diamortisasi selama sisa umur aset dengan menggunakan suku bunga efektif. Jika selanjutnya terjadi penurunan nilai aset, maka jumlah yang dicatat dalam akun ekuitas direklasifikasi ke laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Before January 1, 2020 (continued)

(i) Financial Assets (continued)

b. Available for Sale Financial Assets (continued)

The Company evaluates its available for sale financial assets whether the ability and intention to sell them in the near term is still appropriate. When the Company is unable to trade these financial assets due to inactive markets and management's intention to do so significantly changes in the foreseeable future, the Company may elect to reclassify these financial assets in rare circumstances.

Reclassification to loans and receivables is permitted when the financial assets meet the definition of loans and receivables and the Company has the intent and ability to hold these assets for the foreseeable future or until maturity. Reclassification to the held to maturity category is permitted only when the entity has the ability and intention to hold the financial asset accordingly.

For a financial asset reclassified out of the available for sale category, any previous gain or loss on that asset that has been recognized in equity is amortized to statements of profit or loss and other comprehensive income over the remaining life of the investment using the effective interest rate. Any difference between the new amortized cost and the expected cash flows is also amortized over the remaining life of the asset using the effective interest rate. If the asset is subsequently determined to be impaired, then the amount recorded in equity is reclassified to statements of profit or loss.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

c. Financial Instruments (continued)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Recognition and Measurement (continued)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Before January 1, 2020 (continued)

(ii) Liabilitas Keuangan

(ii) Financial Liabilities

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of financial liabilities measured at amortized cost, inclusive of directly attributable transaction costs.

a. Liabilitas Keuangan yang Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi

a. Financial Liabilities Measured at Amortized Cost

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, selanjutnya setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, menggunakan suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan.

Financial liabilities measured at amortized cost are measured, subsequent to initial recognition, at amortized cost using the effective interest rate method unless the effect of discounting would be immaterial, in which case they are stated at cost.

Beban bunga diakui dalam "Beban keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi.

The related interest expense is recognized within "Finance expenses" in statement of profit or loss and other comprehensive income. Gains and losses are recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income when the financial liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

Saling Hapus dari Instrumen Keuangan

Offsetting of Financial Instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan

Fair Value of Financial Instruments

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi, jika ada, ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran atau permintaan (bid or ask prices) pada penutupan perdagangan pada akhir periode pelaporan.

The fair values of financial instruments that are actively traded in organized financial markets, if any, are determined by reference to quoted market bid or ask prices at the close of business at the end of the reporting period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan (lanjutan)

Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (*recent arm's length market transactions*); penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama; analisa arus kas yang didiskonto; atau model penilaian lain.

Bila nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif tidak dapat ditentukan secara handal, aset keuangan tersebut diakui dan diukur pada nilai tercatatnya.

Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Dari tanggal 1 Januari 2020

Perusahaan mengakui cadangan untuk ECL terkait dengan instrumen hutangnya utang yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada FVTPL. Kerugian kredit ekspektasian didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo sesuai dengan kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Perusahaan, didiskontokan berdasarkan perkiraan *EIR* awal. Arus kas yang diharapkan akan mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau peningkatan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari ketentuan kontraktual.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial Instruments (continued)

Fair Value of Financial Instruments (continued)

For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques may include using recent arm's length market transactions; reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same; discounted cash flow analysis; or other valuation models.

When the fair value of the financial instruments not traded in an active market cannot be reliably determined, such financial assets are recognized and measured at their carrying amounts.

Amortized Cost of Financial Instruments

Amortized cost is computed using the effective interest rate method less any allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

Impairment of Financial Assets

From January 1, 2020

The Company recognizes an allowance for ECL for all debt instruments not held at FVTPL. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Company expects to receive, discounted at an approximation of the original *EIR*. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Dari tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

ECL diakui dalam dua tahap. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, pengukuran penyisihan kerugian dilakukan sejumlah ECL 12 bulan. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian dilakukan sepanjang sisa umurnya, terlepas dari waktu terjadinya default (sepanjang umur ECL).

Untuk piutang usaha, Perusahaan menerapkan panduan praktis dalam menghitung ECL. Oleh karena itu, Perusahaan tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian sejumlah ECL sepanjang umur. Perusahaan telah membentuk matriks provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (forward-looking) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi.

Jumlah kerugian atau pembalikan penyisihan kerugian kredit ekspektasian yang diharapkan diakui sebagai kerugian penurunan nilai atau keuntungan dalam laba rugi dan disajikan secara terpisah dari yang lain jika material.

Instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak tunduk pada penilaian penurunan nilai.

Sebelum 1 Januari 2020

Setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

From January 1, 2020 (continued)

ECL are recognized in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, ECL are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime ECL).

For trade receivables, the Company applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Company does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Company has established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

The amount of ECLs or reversal is recognized as impairment loss or gain in profit or loss and presented separately from others, if material.

Equity instruments designated at FVOCI are not subject to impairment assessment.

Before January 1, 2020

The Company assesses at the end of each reporting period whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the asset (an incurred 'loss event') and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

c. Financial Instruments (continued)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Impairment of Financial Assets (continued)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Before January 1, 2020 (continued)

- (i) Aset Keuangan yang Dicatat pada Biaya Perolehan Diamortisasi

- (i) *Financial Assets Carried at Amortized Cost*

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif mengenai adanya penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual terdapat bukti penurunan nilai secara kolektif.

For financial assets carried at amortized cost, the Company first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.

Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perusahaan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

If the Company determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial, whether significant or not, the Company include the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in a collective assessment of impairment.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan dan piutang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini. Nilai tercatat aset tersebut berkurang melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian diakui dalam laporan laba rugi.

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the assets carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial assets original effective interest rate. If a loan has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in statement of profit or loss.

Ketika aset tidak tertagih, nilai tercatat atas aset keuangan yang telah diturunkan nilainya dikurangi secara langsung atau jika ada suatu jumlah telah dibebankan ke akun cadangan penurunan nilai jumlah tersebut dihapusbukkan terhadap nilai tercatat aset keuangan tersebut.

When the asset becomes uncollectible, the carrying amount of the financial assets is reduced directly or if an amount was charged to the allowance account, the amounts charged to the allowance account are written off against the carrying value of the financial asset.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

(i) Aset Keuangan yang Dicatat pada Biaya Perolehan Diamortisasi (lanjutan)

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan, sepanjang nilai tercatat aset tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi.

Penerimaan kemudian atas piutang yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan pada akun cadangan penurunan nilai, sedangkan jika setelah akhir periode pelaporan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya.

Untuk aset keuangan yang tersedia untuk dijual, Perusahaan menilai pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti objektif bahwa investasi atau kelompok investasi terjadi penurunan nilai.

Dalam hal investasi ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, bukti objektif akan meliputi penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang pada nilai wajar investasi di bawah biaya perolehannya. 'Signifikan' yaitu evaluasi terhadap biaya perolehan awal investasi dan 'jangka panjang' terkait periode dimana nilai wajar telah di bawah biaya perolehannya.

Dimana ada bukti penurunan nilai, kerugian kumulatif, diukur sebagai selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai pada investasi yang sebelumnya diakui dalam laporan laba rugi - dihapus dari penghasilan komprehensif lain dan diakui dalam laporan laba rugi. Kerugian penurunan nilai atas investasi ekuitas tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi, kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui langsung dalam penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Before January 1, 2020 (continued)

(i) Financial Assets Carried at Amortized Cost (continued)

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed to the extent that the carrying amount of the asset does not exceed its amortized cost at the reversal date by adjusting the allowance account. The amount of the reversal is recognized in statement of profit of loss.

Subsequent recoveries of previously written off receivables, if in the current period, are credited to the allowance accounts, but if after the reporting period, are credited to other operating income.

For available for sale financial assets, the Company assesses at each reporting date whether there is objective evidence that an investment or a group of investments is impaired.

In the case of equity investments classified as available for sale, objective evidence would include a significant or prolonged decline in the fair value of the investment below its cost. 'Significant' is evaluated against the original cost of the investment and 'prolonged' against the period in which the fair value has been below its original cost.

Where there is evidence of impairment, the cumulative loss, measured as the difference between the acquisition cost and the current fair value, less any impairment loss on that investment previously recognized in statement of profit or loss - is removed from other comprehensive income and recognized in statement of profit or loss. Impairment losses on equity investments are not reversed through the statements of profit or loss, increases in their fair value after impairment are recognized directly in other comprehensive income.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

- (i) Aset Keuangan yang Dicatat pada Biaya Perolehan Diamortisasi (lanjutan)

Dalam hal instrumen utang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, penurunan nilai dievaluasi berdasarkan kriteria yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Namun, jumlah yang dicatat untuk penurunan adalah kerugian kumulatif yang diukur sebagai selisih antara biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai pada investasi yang sebelumnya diakui dalam laporan laba rugi.

Pendapatan bunga di masa akan datang selanjutnya diakui berdasarkan pengurangan nilai tercatat aset, dengan menggunakan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa depan dengan tujuan untuk mengukur kerugian penurunan nilai. Pendapatan bunga dicatat sebagai bagian dari penghasilan lain-lain. Jika, pada tahun berikutnya, nilai wajar dari instrumen utang meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara objektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui dalam laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laba rugi.

Penghentian Pengakuan

- (i) Aset Keuangan

Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

- (a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Before January 1, 2020 (continued)

- (i) Financial Assets Carried at Amortized Cost (continued)

In the case of debt instruments classified as available for sale, impairment is assessed based on the same criteria as financial assets carried at amortized cost.

However, the amount recorded for impairment is the cumulative loss measured as the difference between the amortized cost and the current fair value, less any impairment loss on that investment previously recognized in statement of profit or loss.

Future interest income continues to be accrued based on the reduced carrying amount of the asset, using the rate of interest used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss. The interest income is recorded as part of other revenues. If, in a subsequent year, the fair value of a debt instrument increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in profit or loss, the impairment loss is reversed through profit or loss.

Derecognition

- (i) Financial Assets

A financial asset, or where applicable a part of a financial asset or part of a Company of similar financial assets, is derecognized when:

- (a) the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

(i) Aset Keuangan (lanjutan)

- (b) Perusahaan mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (i) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani kesepakatan pelepasan (*pass-through arrangement*), dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun mentransfer pengendalian atas aset, aset tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan Perusahaan terhadap aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat aset dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali.

Dalam hal ini, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan liabilitas yang masih dimiliki Perusahaan.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang harus ditanggung; dan (ii) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang diakui pada pendapatan komprehensif lain harus diakui pada laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial Instruments (continued)

Derecognition (continued)

(i) Financial Assets (continued)

- (b) the Company has transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.

When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Company continuing involvement in the asset.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company could be required to repay.

In that case, the Company also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed; and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized in other comprehensive income is recognized to profit or loss.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

(ii) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi.

d. Sewa

Perusahaan menerapkan PSAK 73, "Sewa" efektif sejak tanggal 1 Januari 2020.

Perubahan dalam definisi sewa terutama terkait dengan konsep kontrol. PSAK 73 menentukan suatu kontrak mengandung sewa apabila pelanggan memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang diidentifikasi untuk periode waktu tertentu.

PSAK 73 mensyaratkan penyewa untuk mengakui sebagian besar sewa pada neraca. Standar ini mencakup dua pengecualian pengakuan untuk penyewa - sewa aset 'bernilai rendah' dan sewa jangka pendek. Pada tanggal dimulainya sewa, penyewa akan mengakui liabilitas untuk melakukan pembayaran sewa (liabilitas sewa) dan aset yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa (aset hak-guna). Penyewa akan diminta untuk secara terpisah mengakui beban bunga atas liabilitas sewa dan biaya penyusutan atas aset hak-guna.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial Instruments (continued)

Derecognition (continued)

(ii) Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

d. Leases

The Company applied PSAK 73, "Leases" effective beginning January 1, 2020.

The change in definition of a lease mainly relates to the concept of control. PSAK 73 determines whether a contract contains a lease on the basis of whether the customer has the right to control the use of an identified asset for a period of time.

PSAK 73 requires lessees to recognize most leases on balance sheets. The standard includes two recognition exemptions for lessees - leases of 'low value' assets and short-term leases. At commencement date of a lease, a lessee will recognize a liability to make a lease payment (the lease liability) and an asset representing the right to use the underlying asset during the lease term (the right-of-use asset). Lessees will be required to separately recognize the interest expense on the lease liability and the depreciation expense on the right-of-use asset.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Sewa (lanjutan)

Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan dan kemudian diukur pada biaya perolehan (tunduk pada pengecualian tertentu) dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang belum dibayarkan pada tanggal tersebut. Selanjutnya, liabilitas sewa disesuaikan antara lain dengan pembayaran bunga dan sewa, serta dampak modifikasi sewa. Dengan demikian, klasifikasi arus kas juga akan terpengaruh sebagai pembayaran sewa operasi berdasarkan PSAK 30 disajikan sebagai arus kas operasi; sedangkan berdasarkan model PSAK 73, pembayaran sewa akan dibagi menjadi bagian pokok dan bagian bunga yang akan disajikan masing-masing sebagai arus kas pendanaan dan operasi.

Berbeda dengan akuntansi penyewa, PSAK 73 tidak mengubah secara substansial cara pesewa mencatat sewa. Dalam PSAK 73, pesewa tetap mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda.

Tetapi, PSAK 73 telah mengubah dan memperluas persyaratan pengungkapan, terutama cara pesewa mengelola risiko yang timbul dari kepentingan residual dalam aset sewa.

Perusahaan menerapkan PSAK 73 dengan menggunakan metode retrospektif yang dimodifikasi. Dengan metode ini, standar diterapkan secara retrospektif dengan efek kumulatif dari penerapan standar yang diakui pada tanggal penerapan awal.

Perusahaan memilih untuk menggunakan kebijaksanaan praktis transisi untuk tidak menilai kembali apakah suatu kontrak adalah, atau mengandung sewa pada tanggal 1 Januari 2020. Sebaliknya, Perusahaan menerapkan standar hanya pada kontrak yang sebelumnya diidentifikasi sebagai sewa yang menerapkan PSAK 30 pada tanggal awal perjanjian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Leases (continued)

The right-of-use asset is initially measured at cost and subsequently measured at cost (subject to certain exceptions) less accumulated depreciation and impairment losses, adjusted for any remeasurement of the lease liability. The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at that date. Subsequently, the lease liability is adjusted for interest and lease payment, as well as the impact of lease modifications, amongst others. Furthermore, the classification of cash flows will also be affected as operating lease payments under PSAK 30 are presented as operating cash flows; whereas under the PSAK 73 model, the lease payments will be split into a principal and an interest portion which will be presented as financing and operating cash flows, respectively.

In contrast to lessee accounting, PSAK 73 does not substantially change how a lessor accounts for leases. Under PSAK 73, a lessor continues to classify leases as either finance leases or operating leases and accounts for those two types of leases differently.

However, PSAK 30 has changed and expanded the disclosures required, in particular regarding how a lessor manages the risks arising from its residual interest in leased assets.

The Company adopted PSAK 73 using the modified retrospective method. Under this method, the standard is applied retrospectively with the cumulative effect of initially applying the standard recognized at the date of initial application.

The Company elected to use the transition practical expedient to not reassess whether a contract is, or contains a lease on January 1, 2020. Instead, the Company applied the standard only to contracts that were previously identified as leases applying PSAK 30 at the date of initial application.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
 Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2020 and 2019 and
 For the Years Then Ended
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Sewa (lanjutan)

d. Leases (continued)

Perusahaan, sebagai penyewa, memiliki sewa yang sebelumnya diklasifikasikan dalam sewa operasi. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal 1 Januari 2020. Rata-rata tertimbang suku bunga inkremental yang digunakan adalah sebesar 11,40%. Aset hak guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019.

The Company, as lessee, has leases previously classified under operating leases. These lease liabilities are measured at the present value of the remaining lease payments, discounted using the Company's incremental borrowing rate on January 1, 2020. The weighted average of the Company's incremental borrowing rate applied is 11.40%. Right-of-use assets are measured at amounts equal to the lease liability, adjusted by the amount of any prepaid or accrued lease payments relating to that lease recognized in the statement of financial position as of December 31, 2019.

Rekonsiliasi antara komitmen sewa operasi yang diungkapkan berdasarkan PSAK 30 pada tanggal 31 Desember 2019 dan liabilitas sewa yang diakui berdasarkan PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the operating lease commitments disclosed under PSAK 30 as of December 31, 2019 and the lease liabilities recognized under PSAK 73 as of January 1, 2020 is as follows:

	Jumlah/ Amount	
Komitmen sewa operasi yang diungkapkan pada 31 Desember 2019	8.370.952.744	<i>Operating lease commitment disclosed as of December 31, 2019</i>
Pengaruh penggunaan diskonto dengan menggunakan suku bunga inkremental	(1.297.950.223)	<i>Effect of discounting using the Company's incremental borrowing rate</i>
Ditambah:		<i>Add:</i>
Penyesuaian sebagai hasil dari opsi ekstensi dan terminasi	3.551.292.375	<i>Adjustment as a result of extension and termination options</i>
Jumlah liabilitas sewa yang diakui pada 1 Januari 2020	10.624.294.896	<i>Lease liabilities recognized as of January 1, 2020</i>

Dalam menerapkan PSAK 73 untuk pertama kalinya, Perusahaan menerapkan cara praktis berikut yang diizinkan oleh standar:

In applying PSAK 73 for the first time, the Company used the following practical expedients permitted by the standard:

- menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa;
- pengakuan liabilitas sewa dan aset hak guna tidak termasuk sewa dengan persyaratan sewa yang berakhir selama tahun keuangan berjalan atau untuk sewa aset bernilai rendah;
- pengecualian biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal 1 Januari 2020;
- penentuan jangka waktu sewa pada 1 Januari 2020 dengan menggunakan tinjau balik di mana kontrak berisi opsi untuk memperpanjang atau mengakhiri sewa;
- pemilihan berdasarkan kelas aset pendasar untuk tidak memisahkan komponen nonsewa dari komponen sewa.

- the use of a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar characteristics;
- the recognition of lease liabilities and right-of-use assets not to include leases with lease terms that ends during the current financial year or for leases of low-value assets;
- the exclusion of initial direct costs for the measurement of the right-of-use assets on January 1, 2020;
- the determination of lease term on January 1, 2020 using hindsight where the contract contained options to extend or terminate the lease;
- the election by class of underlying asset not to separate non-lease components from lease components.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Sewa (lanjutan)

Berdasarkan keterangan di atas, per 1 Januari 2020:

- Aset hak guna sebesar Rp 15.933.654.901 telah diakui dan disajikan sebagai bagian dari "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan;
- Liabilitas sewa sebesar Rp 10.624.294.896 telah diakui pada laporan posisi keuangan;
- Pembayaran di muka sebesar Rp 5.309.360.005 terkait dengan sewa operasi sebelumnya telah dihentikan pengakuannya.

Dari tanggal 1 Januari 2020

Sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Perusahaan harus menilai apakah:

- Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi; dan
- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 1. Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
 2. Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Leases (continued)

Based on the above, as of January 1, 2020:

- Right-of-use assets of Rp 15,933,654,901 were recognized and presented as part of "Property and Equipment" in the statement of financial position;
- Lease liabilities of Rp 10,624,294,896 were recognized in the statement of financial position;
- Prepayments of Rp 5,309,360,005 related to previous operating leases were derecognized.

From January 1, 2020

As lessee

At the inception of a contract, the Company assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company shall assess whether:

- The Company has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Company has the right to direct the use of the asset. The Company has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:
 1. The Company has the right to operate the asset;
 2. The Company has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Sewa (lanjutan)

Dari tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Sebagai penyewa (lanjutan)

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Jika Perusahaan dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 57. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

Aset hak penggunaan kemudian diukur dengan biaya lebih sedikit akumulasi penyusutan dan penurunan kerugian. Aset hak penggunaan disusutkan secara garis lurus selama jangka waktu sewa yang lebih pendek dan perkiraan kehidupan aset yang berguna, sebagai berikut:

Gedung kantor

Tahun/ Years

2 - 5

Aset hak-guna disusutkan selama periode yang lebih singkat antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Leases (continued)

From January 1, 2020 (continued)

As lessee (continued)

The Company recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

Whenever the Company incurs an obligation for costs to dismantle and remove a leased asset, restore the site on which it is located or restore the underlying assets to the conditions required by the terms and conditions of the lease, a provision is recognized and measured under PSAK 57. The costs are included in the related right-of-use asset, unless those costs are incurred to produce inventories.

Right-of-use assets are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of the lease term and the estimated useful lives of the assets, as follows:

Office buildings

Right-of-use assets are depreciated over the shorter period of lease term and useful life of the underlying assets. If a lease transfers ownership of the underlying assets or the cost of the right-of-use assets reflects that of the Company expects to exercise a purchase option, the related right-of-use asset is depreciated over the useful life of the underlying assets. The depreciation starts at the commencement date of the lease.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Sewa (lanjutan)

Dari tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Sebagai penyewa (lanjutan)

Selain itu, aset hak penggunaan juga disesuaikan untuk pengukuran kembali tanggung jawab sewa tertentu. Aset hak guna disajikan sebagai bagian dari "Aset Tetap" dalam laporan posisi keuangan.

Perusahaan menerapkan PSAK 48 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan asset penurunan nilai.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika sukubunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Perusahaan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Perusahaan cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Liabilitas sewa disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Leases (continued)

From January 1, 2020 (continued)

As lessee (continued)

In addition, the right-of-use assets are also adjusted for certain remeasurement of lease liability. Right-of-use assets are presented as part of "Property and Equipment" in the statement of financial position.

The Company applies PSAK 48 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of assets policy.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Company uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- fixed payments, including in substance fixed payments less any lease incentive receivable;
- variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- amounts expected to be payable under a residual value guarantee;
- the exercise price under a purchase option that the Company is reasonably certain to exercise; and
- penalties for early termination of a lease unless the Company is reasonably certain not to terminate early.

The lease liability is presented as a separate line in the statement of financial position.

The lease liability is subsequently measured by increasing the carrying amount to reflect the interest on the lease liability (using the effective interest method) and by reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Sewa (lanjutan)

Dari tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Sebagai penyewa (lanjutan)

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

i. Sewa jangka-pendek dan sewa yang aset dasarnya bernilai-rendah

Perusahaan memutuskan untuk tidak mengakui asset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa yang aset dasarnya bernilai-rendah. Perusahaan mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban operasi dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

ii. Modifikasi sewa

Perusahaan mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Perusahaan:

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. Leases (continued)

From January 1, 2020 (continued)

As lessee (continued)

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

i. Short-term leases and leases of low-value assets

The Company has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Company recognizes the lease payments associated with these leases as an operating expense on a straight-line basis over the lease term, unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

ii. Lease modification

The Company accounts for a lease modification as a separate lease if both:

- the modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and
- the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Company:

- remeasures and allocate the consideration in the modified contract;
- determines the lease term of the modified lease;

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Sewa (lanjutan)

d. Leases (continued)

Dari tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

From January 1, 2020 (continued)

Sebagai penyewa (lanjutan)

As lessee (continued)

ii. Modifikasi sewa (lanjutan)

ii. Lease modification (continued)

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Perusahaan: (lanjutan)

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Company: (continued)

- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan pada tanggal efektif modifikasi;
- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Perusahaan mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

- *remeasures the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Company's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;*
- *decreases the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Company recognizes in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and*
- *makes a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.*

Sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga tidak diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa dan asset hak-guna. Pembayaran terkait diakui sebagai beban dalam periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi dan dicatat dalam pos "Beban umum dan administrasi" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Variable rents that do not depend on an index or rate are not included in the measurements of the lease liability and the right-of-use asset. The related payments are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers those payments occur and are included in the line "General and administrative expenses" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Sebagai cara praktis, PSAK 73 mengizinkan penyewa untuk memisahkan komponen nonsewa, dan mencatat masing-masing komponen sewa dan komponen nonsewa sebagai kesepakatan sewa tunggal. Perusahaan tidak menggunakan cara praktis ini. Untuk kontrak yang memiliki komponen sewa dan satu atau lebih sewa tambahan atau komponen non sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke setiap komponen sewa dengan dasar harga jual relatif berdiri sendiri dari komponen sewa dan jumlah agregat masing-masing dari komponen non sewa.

As a practical expedient, PSAK 73 permits a lessee not to separate non-lease components, and instead account for any lease and associated non-lease components as a single arrangement. The Company has not used this practical expedient. For contracts that contain a lease component and one or more additional lease or non-lease components, the Company allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of the relative stand-alone price of the lease component and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Sewa (lanjutan)

Dari tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Sebagai pesewa

Sewa di mana Perusahaan sebagai pesewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Ketika persyaratan sewa secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan ke penyewa, kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Seluruh sewa lainnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Ketika Perusahaan adalah pesewa-antara, Perusahaan mencatat sewa utama dan subsewa sebagai dua kontrak yang terpisah. Subsewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi dengan mengacu pada aset hak-guna yang timbul dari sewa utama.

Penghasilan sewa dari sewa operasi diakui secara garis lurus selama masa sewa yang relevan. Biaya langsung awal yang terjadi dalam menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat aset sewa dan diakui secara garis lurus selama masa sewa.

Dalam sewa pembiayaan, jumlah terutang oleh penyewa diakui sebagai piutang sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto Perusahaan. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan dialokasikan pada periode akuntansi yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih pesewa.

Ketika suatu kontrak mencakup komponen sewa dan non-sewa, Perusahaan menerapkan PSAK 72 untuk mengalokasikan imbalan berdasarkan kontrak bagi setiap komponen.

Sebelum 1 Januari 2020

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial semua risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Leases (continued)

From January 1, 2020 (continued)

As lessor

Leases for which the Company is a lessor are classified as finance or operating leases. Whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee, the contract is classified as a finance lease. All other leases are classified as operating leases.

When the Company is an intermediate lessor, it accounts for the head lease and the sublease as two separate contracts. The sublease is classified as a finance or operating lease by reference to the right-of-use asset arising from the head lease.

Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the terms of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased assets and recognized on a straight-line basis over the lease term.

Amounts due from lessees under finance leases are recognized as receivables at the amount of the Company's net investment in the leases. Finance lease income is allocated to accounting periods so as to reflect a constant periodic rate of return on the Company's net investment outstanding in respect of the leases.

When a contract includes lease and non-lease components, the Company applies PSAK 72 to allocate the consideration under the contract to each component.

Before January 1, 2020

Leases are classified as finance leases whenever the term of the lease transfer substantially all the risk and rewards of ownership of the lessee. All other leases are classified as operating lease.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Sewa (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Sebagai lessee

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Sewa kontingen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

Sebagai lessor

Dalam sewa pembiayaan, jumlah terutang oleh lessee diakui sebagai piutang sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto Perusahaan. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan dialokasikan pada periode akuntansi yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih lessor.

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan dalam jumlah tercatat aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Piutang sewa pembiayaan yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. Leases (continued)

Before January 1, 2020 (continued)

As lessee

Operating lease payments are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rentals arising under operating leases are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

In the event that lease incentives are received to enter into operating leases, such incentives are recognized as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line basis, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.

As lessor

Amounts due from lessees under finance leases are recorded as receivables at the amount of the Company's net investment in the leases. Finance lease income is allocated to accounting periods so as to reflect a constant periodic rate of return on the net investment outstanding in respect of the lessor.

Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the term of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized on a straight-line basis over the lease term.

Restructured finance lease receivables are stated at the lower of carrying value on date of restructuring or value of the future cash receipts after the restructuring. Losses resulting from the difference between the carrying value on the date restructuring with the present value of future cash receipts after the restructuring is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income. After the restructuring, all future cash receipts specified by the new terms are recorded as a return of principal loans and interest income in accordance with the terms of the restructuring.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Pembiayaan Konsumen

e. Consumer Financing

Piutang pembiayaan konsumen merupakan jumlah piutang setelah dikurangi dengan bagian pembiayaan bersama di mana risiko kredit ditanggung pemberi pembiayaan bersama sesuai dengan porsinya (*without recourse*), pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Consumer financing receivables are stated net of joint financing receivables where joint financing providers bear credit risk in accordance with its portion (without recourse), unearned consumer financing income and allowance for impairment losses.

Penyelesaian kontrak sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan keuntungan yang timbul diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Early termination of a contract is treated as a cancellation of an existing contract and the resulting gain is recognized in the current year statements of profit or loss and other comprehensive income.

Pembiayaan Bersama

Joint Financing

Pembiayaan bersama terdiri atas pembiayaan bersama konsumen tanpa jaminan (*without recourse*) dan pembiayaan bersama konsumen dengan jaminan (*with recourse*). Piutang pembiayaan konsumen yang dibiayai bersama pihak-pihak lain dimana masing-masing pihak menanggung risiko kredit sesuai dengan porsinya (*without recourse*) disajikan di laporan posisi keuangan secara neto. Pendapatan pembiayaan konsumen dan beban keuangan yang terkait dengan pembiayaan bersama (*without recourse*) disajikan secara neto di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Joint financing consist of with and without recourse joint financing to end-user consumers. The consumer financing receivables under joint financing where each party assumes the credit risk according to the risk portion (without recourse) are stated at net amount in the statements of financial position. Consumer financing income and finance cost related to without recourse joint financing are stated at net amount in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Piutang pembiayaan konsumen yang dibiayai bersama pihak-pihak lain dimana Perusahaan menanggung risiko kredit (*with recourse*) disajikan di laporan posisi keuangan secara bruto, sedangkan kredit yang disalurkan oleh penyedia dana dicatat sebagai liabilitas (pendekatan bruto). Pendapatan pembiayaan konsumen dan beban keuangan yang terkait dengan pembiayaan bersama *with recourse* tersebut disajikan secara bruto di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Consumer financing receivables under joint financing where the Company assumes the credit risk (with recourse) are stated at gross amount in the statement of financial position, while the credit that are distributed by the fund provider are recorded as liability (gross approach). The consumer financing income and finance cost related to with recourse joint financing are stated at gross amount in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Dalam pembiayaan bersama *without recourse*, Perusahaan berhak menentukan tingkat bunga yang lebih tinggi kepada pelanggan dari tingkat bunga yang ditetapkan dalam perjanjian dengan pemberi pembiayaan bersama. Selisihnya merupakan pendapatan dan disajikan sebagai bagian dari "Penghasilan pembiayaan konsumen".

For joint financing without recourse, the Company reserves the right to charge higher interest rates to customers than those stated in the joint financing agreements with joint financing providers. The difference is recognized as revenue and disclosed as "Consumer financing revenue".

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Pembiayaan Konsumen (lanjutan)

Pembiayaan Bersama (lanjutan)

Piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, yang setelah pengakuan awal dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (Catatan 2c).

Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dan jumlah pokok pembiayaan, yang diakui sebagai pendapatan selama jangka waktu kontrak berdasarkan tingkat suku bunga efektif dari piutang pembiayaan konsumen.

Biaya-biaya yang timbul pertama kali yang terkait langsung dengan fasilitas pembiayaan konsumen ditangguhkan dan disajikan sebagai biaya transaksi ditangguhkan sebagai bagian dari piutang pembiayaan konsumen pada laporan posisi keuangan dan diakui sebagai penyesuaian selama periode pembiayaan konsumen.

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut:
 - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau
 - (iii) personil manajemen kunci Perusahaan atau entitas induk Perusahaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Consumer Financing (continued)

Joint Financing (continued)

Consumer financing receivables are classified as financial assets at amortized cost, which subsequent to initial recognition are carried at amortized cost using the effective interest rate method (Note 2c).

Unearned consumer financing income represents the difference between total installments to be received from the consumer and the principal amount financed, which is recognized as income over the term of the contract based on effective interest rate of the related consumer financing receivable.

The initial direct cost related to consumer financing facility is deferred and presented as deferred transaction cost as part of consumer financing receivables in the statement of financial position and recognized as adjustment throughout the consumer financing period.

f. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Company:

- a. A person or a close member of that person's family is related to the Company if that person:
 - (i) has control or joint control over the Company;
 - (ii) has significant influence over the Company; or
 - (iii) is a member of the key management personnel of the Company or of a parent of the Company.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

- b. Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut:
- (i) entitas dan Perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan Perusahaan.
 - (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a.
 - (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf a. (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - (viii) entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Perusahaan atau kepada entitas induk dari Perusahaan.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Transactions with Related Parties (continued)

- b. An entity is related to the Company if any of the following conditions applies:
- (i) the entity and the Company are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - (ii) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - (iii) both entities are joint ventures of the same third party.
 - (iv) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - (v) the entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the Company.
 - (vi) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in a.
 - (vii) a person identified in a. (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
 - (viii) the entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the Company or to the parent of the Company.

The transactions are made based on terms agreed by both parties, in which such terms are the same as those of transactions between unrelated parties.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements herein.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Tagihan Anjak Piutang

Tagihan anjak piutang merupakan piutang yang dibeli dari Perusahaan lain. Tagihan anjak piutang diklasifikasikan dalam aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penurunan nilai, penghentian pengakuan tagihan anjak piutang dan nilai wajar mengacu pada Catatan 2c.

h. Piutang dalam Penyelesaian Agunan

Piutang dalam penyelesaian agunan sehubungan dengan penyelesaian piutang pembiayaan konsumen dinyatakan berdasarkan nilai terendah antara nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen terkait atau nilai realisasi neto dari aset tarikan. Selisih antara nilai tercatat dan nilai realisasi neto dicatat sebagai kerugian penurunan nilai atas piutang dalam penyelesaian agunan dan dibebankan pada laporan laba rugi.

Perusahaan menerima aset yang didanai oleh perusahaan dari konsumen dan membantu untuk menjual aset tersebut sehingga konsumen dapat melunasi utangnya.

Beban sehubungan dengan perolehan dan pemeliharaan piutang dalam penyelesaian agunan tersebut dibebankan pada saat terjadinya.

Konsumen memberi kuasa kepada Perusahaan untuk menjual piutang dalam penyelesaian agunan ataupun melakukan tindakan lainnya dalam upaya penyelesaian piutang pembiayaan konsumen bila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan. Konsumen berhak atas selisih lebih antara nilai penjualan dengan saldo piutang. Jika terjadi selisih kurang, kerugian yang terjadi dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif periode berjalan.

Piutang dalam penyelesaian agunan disajikan sebagai bagian dari piutang lain-lain dalam laporan posisi keuangan.

i. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Factoring Receivables

Factoring receivables are purchased receivables from other companies. These are classified as financial assets at amortized cost.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, impairment, derecognition of factoring receivables and fair value are discussed in Note 2c.

h. Receivables under Settlement of Collaterals

Receivables under settlement of collaterals acquired in conjunction with settlement of consumer financing receivables is stated at the lower of related consumer financing receivables' carrying value or net realizable value of repossessed assets. The difference between the carrying value and the net realizable value is recorded as provision for decline in value of repossessed assets and is charged to statement of profit or loss.

The Company receives assets funded by the Company from customers and assists them in selling their assets so that the customers are able to settle their payables.

Expenses in relation with the acquisition and maintenance of those receivables under settlement of collaterals are charged as incurred.

In case of default, the consumer gives the Company the right to sell the receivables under settlement of collaterals or take any other actions to settle the outstanding receivables. The consumers are entitled to the excess between the proceeds from sales and the outstanding receivables. In the event of shortage, the resulting loss is charged to the current period statement of profit or loss and other comprehensive income.

Receivables under settlement of collaterals are presented as part of other receivables in the statement of financial position.

i. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized and charged to operations over the periods benefited using the straight-line method.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Investasi Saham

Investasi saham merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki untuk jangka waktu yang lama. Perusahaan memiliki kepemilikan kurang dari 20% hak suara dan dinyatakan sebesar biaya perolehan (metode biaya), setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Pendapatan dividen diakui pada saat pembagian dividen diumumkan.

k. Aset Tetap

Tanah dan kendaraan disajikan sebesar nilai revaluasi, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen eksternal, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, kecuali untuk tanah yang tidak disusutkan. Revaluasi atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi tanah dan kendaraan langsung dikreditkan ke akun "Keuntungan revaluasi aset tetap" pada penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam ekuitas pada bagian cadangan revaluasi aset tetap, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dalam hal ini kenaikan revaluasi sehingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laporan laba rugi. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi tanah dan kendaraan dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain apabila penurunan tersebut melebihi saldo cadangan revaluasi aset tetap yang bersangkutan, jika ada.

Selanjutnya, akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasi dari aset tersebut. Pada saat penghentian aset, cadangan revaluasi untuk aset tetap yang dijual dipindahkan ke saldo laba.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Investment in Shares

Investment in shares is an investment which is intended to be held for a long period. The Company has ownership of less than 20% of the voting power and are stated at cost (cost method), net of allowance for impairment losses. Dividend income is recognized when the dividends are declared.

k. Property and Equipment

Land and vehicles are shown at revaluated amount, based on valuations performed by external independent valuers, less any subsequent accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment losses, except for land which is not depreciated. Revaluations are performed regularly to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount.

Any revaluation increase arising on the revaluation of such land and vehicles is credited to the "Gain on revaluation of property and equipment" account in other comprehensive income and accumulated in equity under the property and equipment revaluation reserve, except to the extent that it reverses a revaluation decrease, for the same asset which was previously recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income, in which case the increase is credited to profit or loss to the extent of the decrease previously charged. A decrease in carrying amount arising on the revaluation of such land and vehicles is charged to statements of profit or loss and other comprehensive income to the extent that it exceeds the balance, if any, held in the property and equipment revaluation reserve relating to a previous revaluation of such land and vehicles.

In addition, accumulated depreciation as of the revaluation date is eliminated against the gross carrying amount of the asset and the net asset amount is restated to the revalued amount of the asset. Upon disposal, any revaluation reserve relating to the particular asset being sold is transferred to retained earnings.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset Tetap (lanjutan)

Aset tetap lainnya seperti bangunan dan inventaris kantor dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan.

Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa manfaat ekonomis dengan persentase penyusutan aset tetap sebagai berikut:

	Tahun/ Years	Persentase/ Percentage	
Bangunan	20	5%	Buildings
Kendaraan	5	20%	Vehicles
Inventaris kantor	4 - 5	20 - 25%	Office equipment

Tanah dinyatakan berdasarkan nilai wajar dan tidak disusutkan.

Setelah penerapan PSAK 73, Perusahaan menganalisa fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomik yang mendasarinya.

Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Perusahaan, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Perusahaan menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK 73, "Sewa". Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Perusahaan menerapkan PSAK 16 "Aset tetap".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Property and Equipment (continued)

Other property and equipment such as building and office equipment are stated at cost less accumulated depreciation and any impairment loss. Such cost includes the cost of replacing part of the property and equipment when the cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the assets as a replacement if the recognition criteria are met.

All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.

Depreciation is computed using the straight-line method over the useful lives with percentage of depreciation of the property and equipment as follows:

	Tahun/ Years	Persentase/ Percentage	
Bangunan	20	5%	Buildings
Kendaraan	5	20%	Vehicles
Inventaris kantor	4 - 5	20 - 25%	Office equipment

Land is stated at fair value and is not depreciated.

Upon adoption of PSAK 73, the Company analyzes the facts and circumstances for each type of land rights in determining the accounting for each of these land rights so that it can accurately represent an underlying economic event or transaction.

If the land rights do not transfer control of the underlying assets to the Company, but gives the rights to use the underlying assets, the Company applies the accounting treatment of these transactions as leases under PSAK 73, "Leases". If land rights are substantially similar to land purchases, the Company applies PSAK 16, "Property, plant and equipment".

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset Tetap (lanjutan)

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB"), dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun aset tetap dan tidak diamortisasi.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (*derecognized*) pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset diakui dalam laporan laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuan.

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Nilai residu, estimasi masa manfaat dan metode penyusutan direview dan disesuaikan, setiap akhir tahun, bila diperlukan.

I. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar dari pada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang dilanjutkan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai rugi penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Property and Equipment (continued)

Legal cost of land rights in the form of Business Usage Rights ("Hak Guna Usaha" or "HGU"), Building Usage Rights ("Hak Guna Bangunan" or "HGB") and Usage Rights ("Hak Pakai" or "HP") when the land is acquired initially are recognized as part of the cost of the land under property and equipment account and are not amortized.

The carrying value of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use. Any gain or loss arising on derecognition of the assets is charged to statements of profit or loss in the period the assets is derecognized.

The carrying values of property and equipment are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

The residual values, estimated useful lives, and depreciation method are reviewed and adjusted, at year end, if necessary.

I. Impairment of Non-Financial Assets

The Company assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exist, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or Cash Generating Units (CGU) fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or group of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses of continuing operations are recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan (lanjutan)

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar terkini atas nilai waktu dari uang dan risiko spesifik dari aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikasi nilai wajar yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang dilanjutkan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan kategori beban yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk suatu aset mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Impairment of Non-Financial Assets (continued)

In assessing the value in use (VIU), the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated.

A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceeds the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri atas pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak diakui dalam laba rugi kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui diluar laba atau rugi, baik dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung pada ekuitas.

Pajak Kini

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima. Jika Perusahaan mengajukan keberatan, Perusahaan mempertimbangkan apakah besar kemungkinan otoritas pajak akan menerima keberatan tersebut dan merefleksikan dampaknya terhadap liabilitas perpajakan Perusahaan.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Income Taxes

Income tax expense comprises current tax and deferred tax. Income tax expense is recognized in profit or loss and except to the extent that it relates to items recognized outside profit or loss, either in other comprehensive income or directly in equity.

Current Tax

Current tax expense is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted at end of the reporting period, and is provided based on the estimated taxable income for the year. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Underpayment or overpayment of corporate income tax are presented as part of current income tax expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received. If the Company files an appeal, the Company considers whether it is probable that a taxation authority will accept the appeal and reflect its effect on the Company's tax obligations.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences with certain exceptions. Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and tax losses carry-forward to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and tax losses carry-forward can be utilized.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain atau langsung ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Perusahaan bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

n. Efek Utang Yang Diterbitkan

Efek utang yang diterbitkan merupakan utang obligasi.

Efek utang yang diterbitkan dicatat sebesar nilai nominal dikurangi saldo diskonto yang belum diamortisasi. Beban emisi efek utang yang diterbitkan sehubungan dengan penerbitan efek utang yang diterbitkan diakui sebagai diskonto dan dikurangkan langsung dari hasil emisi efek utang yang diterbitkan untuk menentukan hasil emisi neto efek utang yang diterbitkan tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Income Taxes (continued)

Deferred Tax (continued)

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax laws that have been enacted or substantively enacted at the end of reporting period. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are credited or charged to current period operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to other comprehensive income or directly in equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the Company intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.

n. Debt Securities Issued

Debt securities issued represents bonds payable.

Debt securities issued are presented at nominal value net of unamortized discounts. Debt securities issuance costs are recognized as discounts and directly deducted from the proceeds of debt securities issuance to determine the net proceeds of the debt securities issued.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Efek Utang Yang Diterbitkan (lanjutan)

Efek utang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif setelah pengakuan awalnya. Diskonto diamortisasi selama jangka waktu efek utang yang diterbitkan tersebut dengan menggunakan metode suku bunga efektif (Catatan 2c).

o. Imbalan Kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan dan diakui pada saat pekerja telah memberikan jasa kerjanya. Kewajiban diakui ketika karyawan memberikan jasa kepada perusahaan dimana semua perubahan pada nilai bawaan dari kewajiban diakui pada laba rugi.

Manfaat imbalan pasti

Perusahaan mengakui kewajiban imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003, tanggal 25 Maret 2003. Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Perusahaan ditentukan melalui perhitungan aktuaria secara periodik dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.

Seluruh pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial dan hasil atas aset program (tidak termasuk bunga neto) diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lainnya dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun neto diakui dalam laporan posisi keuangan untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus program. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera dalam saldo laba dan tidak akan direklasifikasi ke laba atau rugi pada periode berikutnya.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Debt Securities Issued (continued)

Debt securities are measured at amortized cost using effective interest method after initial recognition. The discounts are amortized over the period of the debt securities using the effective interest method (Note 2c).

o. Employee Benefits

Short-term employee benefits

Short term employee benefits are employee benefits which are due for payment within twelve months after the reporting period and recognized when the employees have rendered related service. Liabilities are recognized when the employee renders services to the Company where all changes in the carrying amount of the liability are recognized in profit or loss.

Defined benefit plan

The Company recognized unfunded employee benefits liability in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003 (the "Labor Law"). Pension costs under the Company's defined benefit pension plans are determined by periodic actuarial calculation using the projected unit credit method and applying the assumptions on discount rate and annual rate of increase in compensation.

All remeasurements, comprising of actuarial gains and losses, and the return of plan assets (excluding net interest) are recognized immediately through other comprehensive income in order for the net pension asset or liability recognized in the statements of financial position to reflect the full value of the plan deficit and surplus. Remeasurements recognized in other comprehensive income are reflected immediately in retained earnings and will not be reclassified to profit or loss in subsequent periods.

All past service costs are recognized at the earlier of when the amendment or curtailment occurs and when the related restructuring or termination costs are recognized.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Imbalan Kerja (lanjutan)

Manfaat imbalan pasti (lanjutan)

Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti terdiri dari biaya jasa kini dan biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian tidak rutin, jika ada. Beban atau pendapatan bunga neto dan biaya jasa diakui dalam laba atau rugi.

p. Provisi

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif), sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas tersebut dapat dibuat. Ketika Perusahaan mengharapkan sebagian atau seluruh provisi diganti, maka penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah tetapi hanya pada saat timbul keyakinan penggantian pasti diterima.

Beban yang terkait dengan provisi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain secara neto setelah dikurangi jumlah yang diakui sebagai pengantiannya.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika kemungkinan besar tidak terjadi arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan liabilitas tersebut, maka provisi dibatalkan.

q. Beban Emisi Saham

Beban emisi saham merupakan beban-beban yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum, disajikan sebagai pengurang akun tambahan modal disetor dan tidak diamortisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Employee Benefits (continued)

Defined benefit plan (continued)

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit cost comprise current service costs and past service cost, gains and losses on curtailments and non-routine settlements, if any. Net interest expense or income and service costs are recognized in profit or loss.

p. Provisions

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Where the Company expects some or all of a provision to be reimbursed, the reimbursement is recognized as a separate asset but only when the reimbursement is virtually certain.

The expense relating to any provision is presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income net of any reimbursement.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

q. Share Issuance Cost

Share issuance costs are expenses paid by the Company for Public Offering purposes, deducted from additional paid-in capital portion of the related proceeds from issuance of shares and are not amortized.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Perusahaan menerapkan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" efektif mulai 1 Januari 2020.

PSAK 72 menetapkan satu model komprehensif untuk digunakan entitas dalam akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Pada saat berlaku efektif, PSAK 72 akan menggantikan panduan pengakuan pendapatan saat ini termasuk PSAK 23, "Pendapatan", PSAK 34, "Kontrak Konstruksi" dan interpretasi terkait.

Prinsip utama PSAK 72 adalah bahwa entitas harus mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran dengan barang atau jasa tersebut. Secara khusus, Standar memperkenalkan pendekatan 5 langkah untuk pengakuan pendapatan:

- 1) Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
- 2) Identifikasi kewajiban kinerja dalam kontrak;
- 3) Tentukan harga transaksi;
- 4) Mengalokasikan harga transaksi untuk kewajiban kinerja dalam kontrak; dan
- 5) Mengakui pendapatan ketika (atau saat) entitas memenuhi kewajiban kinerja.

Berdasarkan PSAK 72, entitas mengakui pendapatan ketika (atau pada saat) kewajiban pelaksanaan terpenuhi, yaitu ketika pengendalian barang atau jasa yang mendasari kewajiban pelaksanaan tertentu dialihkan ke pelanggan.

Standar tersebut mengharuskan entitas untuk melakukan pertimbangan, dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan saat menerapkan setiap langkah model untuk kontrak dengan pelanggan mereka. Standar ini juga menentukan bagaimana memperhitungkan biaya tambahan untuk memperoleh kontrak dan biaya yang terkait langsung dengan pemenuhan kontrak. Persyaratan pengungkapan baru berdasarkan PSAK 72 mencakup informasi terpilah tentang pendapatan dan informasi tentang kewajiban kinerja yang tersisa pada tanggal pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Revenue and Expense Recognition

The Company applied PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers" effective beginning January 1, 2020.

PSAK 72 established a single comprehensive model for entities to use in accounting for revenue arising from contracts with customers. PSAK 72 will supersede the current revenue recognition guidance including PSAK 23, "Revenue", PSAK 34 "Construction Contracts" and the related interpretations when it becomes effective.

The core principle of PSAK 72 is that an entity should recognize revenue to depict the transfer or promised goods or services to customers in an amount that reflects the consideration to which the entity expects to be entitled in exchange for those goods or services. Specifically, the Standards introduces a 5-step approach to revenue recognition:

- 1) Identify the contract(s) with a customer;
- 2) Identify the performance obligations in the contract;
- 3) Determine the transaction price;
- 4) Allocate the transaction price to the performance obligations in the contract; and
- 5) Recognize revenue when (or as) the entity satisfies a performance obligation.

Under PSAK 72, an entity recognizes revenue when (or as) a performance obligation is satisfied, i.e. when 'control' of the goods or services underlying the particular performance obligation is transferred to the customer.

The standard requires entities to exercise judgment, taking into consideration all of the relevant facts and circumstances when applying each step of the model to contracts with their customers. The standard also specifies how to account for the incremental costs of obtaining a contract and the costs directly related to fulfilling a contract. New disclosure requirements under PSAK 72 include disaggregated information about revenue and information about the performance obligations remaining at the reporting date.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Standar pendapatan baru dapat diterapkan ke semua entitas dan akan menggantikan semua persyaratan pengakuan pendapatan saat ini berdasarkan PSAK. Baik penerapan restropektif penuh atau penerapan restrospektif yang dimodifikasi diperlukan untuk periode tahunan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020. Perusahaan telah mengadopsi standar tersebut pada tanggal efektifnya, dengan menggunakan metode adopsi retrospektif yang dimodifikasi. Standar ini tidak berlaku untuk pendapatan atau pendapatan yang terkait dengan instrumen keuangan yang tercakup dalam PSAK 71 seperti piutang dagang dan sekuritas investasi keuangan. Penerapan standar ini tidak memiliki dampak keuangan material terhadap laporan keuangan Perusahaan.

PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" berlaku untuk semua kontrak dengan pelanggan kecuali untuk: sewa dalam ruang lingkup ISAK 8, "Penentuan apakah Suatu Perjanjian Mengandung suatu Sewa"; instrumen keuangan dan hak atau kewajiban kontraktual lainnya dalam lingkup PSAK 71, "Instrumen Keuangan" dan PSAK 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"; kontrak asuransi dalam lingkup PSAK 62, "Kontrak Asuransi"; dan pertukaran non-moneter antara entitas dalam lini bisnis yang sama untuk memfasilitasi penjualan kepada pelanggan atau calon pelanggan.

Sebelum penerapan PSAK 72, Perusahaan telah mengadopsi PSAK 23.

Pendapatan Pembiayaan Konsumen, Pendapatan Sewa Pembiayaan, Pendapatan Anjak Piutang, Pendapatan Bunga dan Beban Bunga

Pendapatan pembiayaan konsumen, pendapatan sewa pembiayaan, pendapatan anjak piutang, pendapatan bunga dan beban bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Revenue and Expense Recognition (continued)

The new revenue standard is applicable to all entities and will supersede all current revenue recognition requirements under PSAK. Either a full restropective application or a modified restrospective application is required for annual periods beginning in or after January 1, 2020. The Company has adopted the standard on its effective date, using the modified retrospective method of adoption. The standard does not apply to income or revenue associated with financial instruments scoped in PSAK 71 such as trade receivables and financial investment securities. The adoption of this standard has no material financial impact on the Company's financial statements.

PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers" applies to all contracts with customers except for: leases within the scope ISAK 8, "Determining whether an Arrangement Contains a Lease"; financial instruments and other contractual rights or obligations within scope of PSAK 71, "Financial Instruments", and PSAK 15, "Investments in Associates and Joint Ventures"; insurance contracts within the scope of PSAK 62, "Insurance Contracts"; and non-monetary exchanges between entities in the same line of business to facilitate sales to customers or potential customers.

Prior to implementation of PSAK 72, the Company has adopted PSAK 23.

Consumer Financing Income, Finance Lease Income, Factoring Income, Interest Income and Interest Expense

Consumer financing income, finance lease income, factoring income, interest income, and interest expenses are recognized using the effective interest method.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban
(lanjutan)

Pendapatan Pembiayaan Konsumen, Pendapatan Sewa Pembiayaan, Pendapatan Anjak Piutang, Pendapatan Bunga dan Beban Bunga (lanjutan)

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran dan penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian di masa mendatang.

Perhitungan suku bunga efektif mencakup seluruh biaya dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, termasuk biaya transaksi.

Pendapatan Lainnya

Pendapatan administrasi diakui pada saat perjanjian pembiayaan konsumen ditandatangani.

Pendapatan denda keterlambatan dan pinalti diakui pada saat denda keterlambatan dan pinalti diterima.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

s. Laba Neto per Saham Dasar

Jumlah laba neto per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Revenue and Expense Recognition (continued)

Consumer Financing Income, Finance Lease Income, Factoring Income, Interest Income and Interest Expense (continued)

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments and receipts through the expected life of the financial asset or financial liability (or, where appropriate, a shorter period) to the carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Company estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but not future credit losses.

The calculation of the effective interest rate includes all fees and points paid or received that are an integral part of the effective interest rate, including transaction costs.

Other Income

Administrative income is recognized at the time the consumer financing contracts are signed.

Late charges and penalty income are recognized when the late charges and penalty are received.

Expenses

Expenses are recognized as incurred on the accrual basis.

s. Basic Earnings per Share

Basic earnings per share are calculated by dividing net income for the year by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Segmen Operasi

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan yang secara reguler direview oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b. yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c. dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk hal-hal yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut.

u. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- i. Di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
- ii. Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Perusahaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Operating Segments

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Company that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

- a. *that engages in business activities from which it may earn revenues and incurred expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);*
- b. *whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and*
- c. *for which discrete financial information is available.*

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of performance is more specifically focused on the category of each product.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.

u. Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- i. *In the principal market for the asset or liability, or*
- ii. *In the absence of a principal market, the most advantageous market for the asset or liability.*

The principal or the most advantageous market must be accessible to the Company.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diamati.

Seluruh aset dan liabilitas, baik yang diukur pada nilai wajar, atau dimana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar, berdasarkan level input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran, sebagai berikut:

1. Tingkat 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) dipasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
2. Tingkat 2 - Teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
3. Tingkat 3 - Teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Perusahaan menentukan apakah terdapat perpindahan antara Level dalam hirarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan level masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Fair Value Measurement (continued)

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest able input that is significant to fair value measurement as a whole:

1. *Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;*
2. *Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;*
3. *Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.*

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between Levels in the hierarchy by re-assessing categorisation (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan informasi tambahan tentang posisi Perusahaan pada periode pelaporan (menyesuaikan peristiwa) tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak menyesuaikan peristiwa, jika ada, diungkapkan dalam Catatan 40 terhadap laporan keuangan.

w. Standar, Amendemen/ Penyesuaian dan Interpretasi Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan standar dan sejumlah amendemen/ penyesuaian/ interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020.

- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif"

Amendemen PSAK 71 mengamendemen paragraf PP4.1.11(b) dan PP4.1.12(b), dan menambahkan paragraf PP4.1.12A sehingga mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan skompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan: Definisi Material" dan Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan: Definisi Material"

Definisi yang baru menyatakan bahwa "Informasi adalah material jika menghilangkan, salah saji atau mengaburkannya yang diyakini dapat diharapkan untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan tujuan umum yang dibuat berdasarkan laporan keuangan tersebut, yang menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelaporan tertentu".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Events after the Reporting Period

Events after the reporting period that provide additional information about the Company's position at the reporting period (adjusting events) are reflected in the financial statements. Events after the reporting period that are not adjusting events, if any, are disclosed in Note 40 to the financial statements.

w. Standards, Amendments/ Improvements and Interpretation to Standards Effective in the Current Year

In the current year, the Company has applied standards and a number of amendments/ improvements to PSAK that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2020.

- Amendments to PSAK 71, "Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation"

Amendments to PSAK 71 amend paragraphs PP4.1.11 (b) and PP4.1.12 (b), and add paragraph PP4.1.12A so that financial assets with accelerated repayment features that can produce negative compensation qualify as contractual cash flows that originate solely from payment of principal and interest from the principal amount owed.

- Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements: Definition of Material" and Amendments to PSAK 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition of Material"

The new definition states that "Information is material if omitting, misstating or obscuring it could reasonably be expected to influence decisions that the primary users of general purpose financial statements make on the basis of those financial statements, which provide financial information about a specific reporting entity".

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

w. Standar, Amendemen/ Penyesuaian dan Interpretasi Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan (lanjutan)

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan: Definisi Material" dan Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan: Definisi Material" (lanjutan)

Amendemen tersebut mengklarifikasi bahwa materialitas akan tergantung pada sifat atau besarnya informasi. Sebuah entitas perlu menilai apakah informasi tersebut, baik secara individu atau kombinasi dengan informasi lain, adalah material dalam konteks laporan keuangan. Salah satu informasi adalah material jika diyakini dapat diharapkan untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama.

- ISAK 36, "Interaksi antara Ketentuan mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16, Aset Tetap, dan PSAK 73, Sewa"

Secara umum, ISAK 36 mengatur mengenai:

- a. Penilaian dalam menentukan perlakuan akuntansi terkait suatu hak atas tanah yang melihat pada substansi dari hak atas tanah dan bukan bentuk legalnya;
- b. Perlakuan akuntansi terkait hak atas tanah yang sesuai dengan PSAK 16 yaitu jika suatu ketentuan kontraktual memberikan hak yang secara substansi menyerupai pembelian aset tetap, termasuk ketentuan dalam PSAK 16 paragraf 58 yang mengatur bahwa pada umumnya tanah tidak disusutkan;
- c. Perlakuan akuntansi terkait hak atas tanah yang sesuai dengan PSAK 73 yaitu jika substansi suatu hak atas tanah tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar dan hanya memberikan hak untuk menggunakan aset pendasar tersebut selama suatu jangka waktu, maka substansi hak atas tanah tersebut adalah transaksi sewa.

Penerapan dari interpretasi dan penyesuaian-penyesuaian tersebut diatas tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Standards, Amendments/ Improvements and Interpretation to Standards Effective in the Current Year (continued)

- Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements: Definition of Material" and Amendments to PSAK 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition of Material" (continued)

The amendments clarify that materiality will depend on the nature or magnitude of information. An entity will need to assess whether the information, either individually or in combination with other information, is material in the context of the financial statements. A misstatement of information is material if it could reasonably be expected to influence decisions made by the primary users.

- ISAK 36, "Interaction between Provisions regarding Land Rights in PSAK 16, Property, Plant and Equipment, and PSAK 73, Leases"

In general, ISAK 36 regulates:

- a. Assessment in determining the accounting treatment related to land rights focusing on the substance of the land rights and not its legal form;
- b. Accounting treatment relating to land rights in accordance with PSAK 16, wherein the contractual terms provide rights which are in-substance purchase of property, plant and equipment, including the provisions in paragraph 58 of PSAK 16 which states that in general, land is not depreciated;
- c. Accounting treatment relating to land rights in accordance with PSAK 73, wherein the substance of land rights does not transfer control over the underlying asset and only gives the right to use of the underlying asset for a period of time, then, the substance of the land rights is a lease transaction.

The adoption of the above interpretations and annual improvements has no significant impact on the financial statements.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dan pengungkapan yang terkait, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Kelangsungan Usaha

Manajemen Perusahaan telah melakukan penilaian terhadap kelangsungan usaha Perusahaan dan meyakini bahwa perusahaan memiliki sumber daya untuk melanjutkan bisnis dimasa yang akan datang yang tidak dapat diperkirakan. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan disusun dengan basis kelangsungan usaha. Rincian terkait hal ini diungkapkan pada Catatan 42.

Penilaian Model Bisnis

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan bergantung pada hasil SPPI dan uji model bisnis. Perusahaan menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana hal ini dikelola dan bagaimana manajer aset diberi kompensasi. Perusahaan memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasan tersebut konsisten dengan tujuan bisnis di mana aset tersebut dimiliki. Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Perusahaan atas apakah model bisnis di mana aset keuangan yang tersisa dimiliki tetap sesuai dan jika tidak sesuai apakah telah terjadi perubahan dalam model bisnis dan dengan demikian terdapat perubahan prospektif terhadap klasifikasi aset keuangan tersebut. Tidak ada perubahan yang diperlukan selama periode yang disajikan.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates, and assumptions that affect the reported amounts herein, and the related disclosures, at the end of the reporting period. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

Judgments

In the process of applying the Company's accounting policies, management has made the following judgments, which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements:

Going Concern

The Company's management has made an assessment of the Company's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Company has the resources to continue in business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt upon the company's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continue to be prepared on the going concern basis. Details related to this matter are disclosed in Note 42.

Business Model Assessment

Classification and measurement of financial assets depends on the results of the SPPI and the business model. The Company determines the business model at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve a particular business objective. This assessment includes judgment reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed and how the managers of the assets are compensated. The Company monitors financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income that are derecognized prior to their maturity to understand the reason for their disposal and whether the reasons are consistent with the objective of the business for which the asset was held. Monitoring is part of the Company's continuous assessment of whether the business model for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate whether there has been a change in business model and so a prospective change to the classification of those assets. No such changes were required during the periods presented.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer Perusahaan beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen Perusahaan, mata uang fungsional adalah Rupiah.

Menentukan Waktu Pemenuhan Kewajiban Pelaksanaan

Perusahaan menyimpulkan bahwa pendapatan atas jasa yang diberikan harus diakui sepanjang waktu karena pelanggan secara bersamaan menerima dan menikmati manfaat yang diberikan oleh Perusahaan. Fakta bahwa entitas lain tidak perlu untuk melakukan kembali jasa yang telah diberikan Perusahaan saat ini menunjukkan bahwa pelanggan secara bersamaan menerima dan menikmati manfaat dari pelaksanaan Perusahaan saat melaksanakannya.

Perusahaan menentukan bahwa metode masukan adalah metode terbaik dalam mengukur kemajuan jasa karena terdapat hubungan langsung antara upaya Perusahaan (yaitu, jam tenaga kerja yang terjadi) dan pengalihan jasa tersebut kepada pelanggan.

Penentuan Persyaratan Sewa - Perusahaan sebagai penyewa

Perusahaan menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode apa pun yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika cukup pasti untuk dilakukan, atau periode apa pun yang dicakup oleh opsi untuk mengakhiri sewa, jika cukup pasti untuk tidak dilakukan.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Judgments (continued)

Determination of Functional Currency

The functional currency of the Company is the currency of the primary economic environment in which each entity operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services. Based on the Company's management assessment, the Company's functional currency is in Rupiah.

Determining the Timing of Satisfaction of Performance Obligations

The Company concluded that revenue for services rendered is to be recognized over time because the customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the Company. The fact that another entity would not need to re-perform the service that the Company has provided to date demonstrates that the customer simultaneously receives and consumes the benefits of the Company's performance as it performs.

The Company determined that the input method is the best method in measuring progress of the services because there is a direct relationship between the Company's effort (i.e., labor hours incurred) and the transfer of service to the customer.

Determination of Lease Terms - the Company as lessee

The Company determines the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Penentuan Persyaratan Sewa - Perusahaan sebagai penyewa (lanjutan)

Perusahaan menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah wajar dan pasti untuk mengeksekusi opsi untuk pembaruan atau penghentian sewa atau tidak. Untuk kontrak sewa dengan opsi perpanjangan atau pengakhiran, manajemen perlu mengestimasi masa sewa yang memerlukan pertimbangan atas semua fakta dan keadaan yang menciptakan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan atau tidak untuk menggunakan opsi pengakhiran, termasuk setiap perubahan yang diharapkan dalam fakta dan keadaan dari tanggal dimulainya sampai tanggal pelaksanaan opsi. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian) hanya termasuk dalam persyaratan sewa jika Perusahaan cukup yakin untuk menggunakan opsi perpanjangan atau tidak menggunakan opsi penghentian. Jika terjadi peristiwa signifikan atau perubahan signifikan dalam keadaan yang memengaruhi penilaian ini dan berada dalam kendali penyewa, penilaian di atas akan ditinjau.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penilaian Instrumen Keuangan

Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perusahaan. Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 37.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Judgments (continued)

Determination of Lease Terms - the Company as lessee (continued)

The Company applies judgment in evaluating whether it is reasonably certain whether or not to exercise the option to renew or terminate the lease. For lease contracts with extension or termination options, management need to estimate the lease term which requires consideration of all facts and circumstances that creates an economic incentive to exercise an extension option or not to exercise termination options, including any expected changes in facts and circumstances from commencement date until the exercise date of the options. Extension options (or periods after termination options) are only included in lease terms if the Company is reasonably certain to exercise the extension options or not to exercise the termination options. If a significant event or a significant change in circumstances occurs which affects this assessment and that is within the control of the lessee, the above assessment will be reviewed.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are described below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments however, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Fair Value of Financial Instruments

The Company carries certain financial assets and liabilities at fair values, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidences, the amount of changes in fair values would differ if the Company utilized different valuation methodology. Any changes in fair values of these financial assets and liabilities would affect directly the Company's profit or loss. The fair value of financial assets and liabilities are set out in Note 37.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Piutang Sewa Pembiayaan, Pembiayaan Konsumen, Tagihan Anjak Piutang dan Piutang Dalam Penyelesaian Agunan

Tingkat penyisihan yang spesifik dievaluasi oleh manajemen dengan dasar faktor-faktor yang memengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut. Dalam kasus ini, Perusahaan menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan kondisi terbaik yang tersedia meliputi tetapi tidak terbatas pada jangka waktu hubungan Perusahaan dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan laporan dari pihak ketiga dan faktor-faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat pencadangan spesifik untuk pelanggan terhadap jumlah jatuh tempo untuk mengurangi piutang Perusahaan menjadi jumlah yang diharapkan tertagih.

Penyisihan secara spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat informasi tambahan yang diterima yang memengaruhi jumlah yang diestimasi. Selain penyisihan khusus terhadap piutang yang signifikan secara individual, Perusahaan juga mengakui penyisihan penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit debitur yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, dan meskipun tidak secara spesifik diidentifikasi membutuhkan penyisihan khusus, memiliki risiko gagal bayar lebih tinggi daripada ketika piutang pada awalnya diberikan kepada debitur

Penyisihan secara kolektif diakui berdasarkan pengalaman kerugian historis dengan menggunakan faktor yang bervariasi seperti kinerja historis dari debitur dalam grup kolektif, dan pertimbangan atas penurunan kinerja pasar di mana debitur beroperasi dan kelemahan struktural yang diidentifikasi atau penurunan kinerja arus kas dari debitur.

Jika tidak terdapat kemungkinan besar dari awal bahwa piutang dari penjualan secara kredit dapat diterima pembayarannya, penghasilan atas penjualan tersebut diakui hanya pada saat kas diterima.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Allowance for ECLs on Finance Lease Receivables, Consumer Financing Receivables, Factoring Receivables and Receivables Under Settlement of Collateral

The level of a specific allowance is evaluated by management on the basis of factors that affect the collectability of the accounts. In these cases, the Company uses judgment based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of the Company relationship with the customers's credits status based on third-party credit reports and known market factors, to record specific reserves for customers against amounts due in order to reduce the Company receivables to amounts that it expects to collect.

These specific allowance are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts estimated. In addition to specific allowance against individually significant receivables, the Company also recognizes a collective impairment allowance against credit exposure of its debtors which are grouped based on common credit characteristics, and although not specifically identified as requiring a specific provision, have a greater risk of default than when the receivables were originally granted to the debtors.

Any collective allowance recognized is based on historical loss experience using various factors such as historical performance of the debtors within the collective group and judgments on the effect of deterioration in the markets in which the debtors operate and identified structural weaknesses or deterioration in the cash flows of debtors.

When collectability of sales on credit is not considered or estimated to be probable at the outset, the related revenues are recognized only to the extent of cash received.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Piutang Sewa Pembiayaan, Pembiayaan Konsumen, Tagihan Anjak Piutang dan Piutang Dalam Penyelesaian Agunan (lanjutan)

Penerapan PSAK 71 menyebabkan perubahan atas penilaian dari estimasi dan pertimbangan yang signifikan terkait dengan penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang. Dalam penentuan kerugian kredit ekspektasian, manajemen diharuskan untuk menggunakan pertimbangan dalam mendefinisikan hal apa yang dianggap sebagai kenaikan risiko kredit yang signifikan dan dalam pembuatan asumsi dan estimasi, untuk menghubungkan informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi. Pertimbangan diaplikasikan dalam menentukan periode seumur hidup dan titik pengakuan awal piutang.

Nilai tercatat piutang sewa pembiayaan, piutang pembiayaan konsumen, tagihan anjak piutang dan piutang dalam penyelesaian agunan Perusahaan sebelum penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing diungkapkan dalam Catatan 6, 7, 8, dan 9.

Revaluasi Aset Tetap

Perusahaan mencatat tanah dan kendaraan pada nilai revaluasi, dengan perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Perusahaan menggunakan spesialis penilai independen untuk menentukan nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Nilai tercatat tanah dan kendaraan diungkapkan pada Catatan 12.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 2 sampai dengan 20 tahun. Masa manfaat setiap aset tetap Perusahaan ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Allowance for ECLs on Finance Lease Receivables, Consumer Financing Receivables, Factoring Receivables and Receivables Under Settlement of Collateral (continued)

The implementation of PSAK 71 resulted in a change to the assessment of the significant accounting estimates and judgments related to allowance for loss impairment of receivables. In determining expected credit losses, management is required to exercise judgment in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions. Judgment has been applied indetermining the lifetime and point of initial recognition of receivables.

The carrying amount of the Company's finance lease receivables, consumer financing receivables, factoring receivables and receivables under settlement of collateral before allowance for ECLs as of December 31, 2020 and 2019 are disclosed in Notes 6, 7, 8, and 9, respectively.

Revaluation of Property and Equipment

The Company carries its land and vehicles at revalued amounts, with changes in fair value being recognized in other comprehensive income. The Company engaged independent valuation specialists to determine fair value as of December 31, 2020 and 2019. The carrying amounts of land and vehicles are disclosed in Note 12.

Depreciation of Property and Equipment

The costs of property and equipment are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these property and equipment to be within 2 to 20 years. The useful life of each item of the Company's property and equipment is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penyusutan Aset Tetap (lanjutan)

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah beban penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 12.

Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) melebihi nilai terpulihkannya, yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset. Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Data arus kas diambil dari anggaran untuk lima tahun yang akan datang dan tidak termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum dilakukan oleh Perusahaan atau investasi signifikan di masa datang yang akan memutakhirkan kinerja aset dari UPK yang diuji. Nilai terpulihkan paling dipengaruhi oleh tingkat diskonto yang digunakan dalam model arus kas yang didiskontokan, sebagaimana juga jumlah arus kas masuk di masa datang yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi.

Manajemen percaya bahwa tidak ada indikasi potensi penurunan nilai aset non keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas dan biaya imbalan kerja dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 20 dan mencakup, antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, tingkat cacat, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, umur pensiun dan tingkat mortalitas. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan diakui segera pada laporan posisi keuangan dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lainnya dalam periode terjadinya.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Depreciation of Property and Equipment (continued)

A change in the estimated useful life of any item of property and equipment would affect the recorded depreciation expense, respectively, and decrease in the carrying values of these assets.

The carrying amounts of property and equipment are disclosed in Note 12.

Impairment of Non-Financial Assets

An impairment exists when the carrying value of an asset or Cash Generating Unit (CGU) exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell calculation is based on available data from binding sales transactions in an arm's length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing of the asset. The value in use calculation is based on a discounted cash flow model. The cash flows are derived from the budget for the next five years and do not include restructuring activities that the Company is not yet committed to or significant future investments that will enhance the asset's performance of the CGU being tested. The recoverable amount is most sensitive to the discount rate used for the discounted cash flow model as well as the expected future cash inflows and the growth rate used for extrapolation purposes.

Management believes that there is no indication of potential impairment of non-financial assets as of December 31, 2020 and 2019.

Employee Benefits

The determination of the obligation and cost for employee benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by independent actuary in calculating such amounts. Those assumptions are described in Note 20 and include, among others, discount rate, rate of salary increase, disability rate, annual employee turn-over rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the Company's assumptions are recognized immediately in the statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income in the period which they occur.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Imbalan Kerja (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar. Namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja. Nilai tercatat liabilitas imbalan kerja diungkapkan dalam Catatan 20.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atau pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Detail lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 17.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan. Detail lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 17.

Estimasi Bunga Pinjaman Inkremental untuk Sewa

Perusahaan tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa, oleh karena itu, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman tambahan (*IBR*) untuk mengukur kewajiban sewa. *IBR* adalah tingkat bunga yang harus dibayar Perusahaan untuk meminjam dalam jangka waktu yang sama, dan dengan jaminan serupa, dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi yang sama. Oleh karena itu, *IBR* mencerminkan apa yang 'harus dibayar' oleh Perusahaan, yang memerlukan perkiraan ketika tidak ada tarif yang tersedia sebagai acuan atau ketika perlu disesuaikan untuk mencerminkan syarat dan ketentuan sewa. Perusahaan memperkirakan *IBR* menggunakan input yang dapat diamati (seperti suku bunga pasar).

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Employee Benefits (continued)

While it is believed that the Company's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of employee benefits liabilities and net employee benefits expense. The carrying amounts of employee benefits liabilities are disclosed in Note 20.

Income Tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in Note 17.

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Note 17.

Estimating the Incremental Borrowing Rate for Leases

The Company cannot readily determine the interest rate implicit in the lease, therefore, it uses its incremental borrowing rate (*IBR*) to measure lease liabilities. The *IBR* is the rate of interest that the Company would have to pay to borrow over a similar term, and with a similar security, the funds necessary to obtain an asset of a similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment. *IBR* therefore reflects what the Company 'would have to pay', which requires estimation when no observable rates are available or when they need to be adjusted to reflect the terms and conditions of the lease. The Company estimates the *IBR* using observable inputs (such as market interest rates).

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS

Terdiri atas:

	2020	2019
Kas		
Rupiah	3.684.502.404	2.734.543.334
Kas di bank		
Rupiah		
PT Bank Central Asia Tbk	5.552.310.597	5.496.287.242
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.178.285.569	7.519.549.087
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.082.376.274	4.913.681.346
PT Bank KEB Hana Indonesia	1.210.485.887	478.537.627
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	421.200.399	516.842.850
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	410.154.309	2.412.079.465
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	230.298.101	2.317.405.302
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk	110.364.451	293.609.999
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	75.195.486	527.216.230
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	35.258.886	35.498.886
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	25.860.610	10.946.295
PT Bank BRIsyariah Tbk	19.980.380	-
PT Bank Sinarmas Tbk	18.649.578	1.263.326.099
PT Bank ICBC Indonesia Tbk	11.649.922	11.624.940
PT Bank Victoria International Tbk	11.385.164	31.735.588
PT Bank MNC Internasional Tbk	7.732.267	15.130.673
PT Bank CIMB Niaga Tbk	3.119.770	2.601.770
PT Bank Bukopin Tbk	1.084.959	1.876.959
Total kas di bank	15.405.392.609	25.847.950.358

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

This account consists of:

	Cash
	Rupiah
Cash	
Rupiah	
Cash in banks	
Rupiah	
PT Bank Central Asia Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank KEB Hana Indonesia	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	
PT Bank BRIsyariah Tbk	
PT Bank Sinarmas Tbk	
PT Bank ICBC Indonesia Tbk	
PT Bank Victoria International Tbk	
PT Bank MNC Internasional Tbk	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	
PT Bank Bukopin Tbk	
Total cash in banks	

Deposito berjangka

Rupiah		
PT Bank Victoria International Tbk	34.000.000.000	-
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	7.000.000.000	2.500.000.000
Total deposito berjangka	41.000.000.000	2.500.000.000

Time deposits

Rupiah	
PT Bank Victoria International Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	
Total time deposits	

Total

60.089.895.013 **31.082.493.692**

Total

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya dan ditempatkan kepada pihak berelasi.

As of December 31, 2020 and 2019, there is no restricted cash and cash equivalents balance and placed in related parties.

Kisaran suku bunga deposito berjangka tersebut 2,80% - 6,75% dan 4,20% - 8,00% per tahun masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

The range of interest rates for time deposits are, 2.8% - 6.75% and 4.20% - 8.00% per annum for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. DEPOSITO BERJANGKA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Deposito berjangka pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk digunakan untuk jaminan atas fasilitas pembiayaan bersama (Catatan 35).

Kisaran suku bunga kontraktual deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya tersebut 3,50% dan 4,75% - 5,50% per tahun masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

5. RESTRICTED TIME DEPOSITS

Time deposits in PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk is used as collateral for a joint financing facility (Note 35).

The range of contractual interest rates for restricted time deposits are, 3.50% and 4.75% - 5.50% per annum for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively.

6. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN - PIHAK KETIGA - NETO

	2020	2019
Piutang sewa pembiayaan - bruto	288.155.564.000	334.578.438.720
Nilai sisa yang terjamin	116.008.345.808	138.187.678.118
Dikurangi:		
Simpanan jaminan	(116.008.345.808)	(138.187.678.118)
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(43.190.735.998)	(49.856.482.583)
Total	244.964.828.002	284.721.956.137
Dikurangi:		
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(3.974.039.105)	(2.786.043.928)
Biaya pemasaran yang ditangguhkan	(92.435.064)	(81.439.906)
Piutang sewa pembiayaan - neto	240.898.353.833	281.854.472.303

Pada saat perjanjian sewa pembiayaan dimulai, penyewa memberikan simpanan jaminan yang akan digunakan sebagai pembayaran atas pembelian dari aset sewa pembiayaan pada akhir masa sewa, bila hak opsi dilaksanakan penyewa pembiayaan. Apabila hak opsi tidak dilaksanakan, simpanan jaminan tersebut akan dikembalikan kepada penyewa pada akhir masa sewa pembiayaan.

Piutang sewa pembiayaan - bruto (sebelum dikurangi pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui dan penyisihan kerugian kredit ekspektasian) pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 jika diklasifikasikan berdasarkan jenis produk adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Alat berat	214.681.421.000	262.681.563.091
Kapal	47.403.595.000	44.445.709.000
Kendaraan bermotor	20.022.354.000	23.015.324.629
Mesin	6.048.194.000	4.435.842.000
Total	288.155.564.000	334.578.438.720

6. FINANCE LEASE RECEIVABLES - THIRD PARTIES - NET

Finance lease receivables - gross	334.578.438.720
Guaranteed residual value	138.187.678.118
Less:	
Security deposit	(138.187.678.118)
Unearned finance lease income	(49.856.482.583)
Total	284.721.956.137
Less:	
Allowance for ECLs	(2.786.043.928)
Deferred marketing expense	(81.439.906)
Finance lease receivables - net	281.854.472.303

At the inception of the finance lease contract, the lessees provide security deposits to be used as payment to purchase the leased assets at the end of the lease period, if the purchase option is exercised. If the purchase option is not exercised, such security deposits will be returned at the end of the lease period.

Finance lease receivables - gross (excluding unearned finance lease income and allowance for ECLs) as of December 31, 2020 and 2019 if classified based on type of product are as follows:

Heavy equipment	214.681.421.000
Ships	47.403.595.000
Vehicles	20.022.354.000
Machinery	6.048.194.000
Total	288.155.564.000

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN - PIHAK KETIGA - NETO (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, semua piutang sewa pembiayaan Perusahaan, jika diidentifikasi berdasarkan kegiatan usaha nasabah diklasifikasikan sebagai pembiayaan investasi.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, piutang sewa pembiayaan Perusahaan seluruhnya berasal dari pembiayaan sendiri dan seluruhnya untuk pihak ketiga.

Rincian atas jatuh tempo kontraktual (ditunjukkan dengan arus kas kontraktual yang tidak didiskonto) dari piutang sewa pembiayaan - bruto sesuai dengan tanggal jatuh temponya masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
2019	-	5.210.202.914	2019
2020	5.617.866.748	194.900.079.653	2020
2021	164.914.850.113	97.358.256.528	2021
2022	87.479.082.133	26.267.496.378	2022
2023	28.873.358.406	10.842.403.247	2023
2024	1.270.406.600	-	2024
Total	288.155.564.000	334.578.438.720	Total

Suku bunga efektif yang dikenakan untuk sewa pembiayaan masing-masing berkisar antara 14,50% - 23,48% dan 12,56% - 28,27% per tahun untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Jangka waktu kontrak sewa pembiayaan yang dibiayai oleh Perusahaan atas barang modal adalah 10 bulan - 5 tahun.

Alat berat yang dibiayai oleh Perusahaan telah diasuransikan terhadap risiko kehilangan dan kerusakan kepada beberapa perusahaan asuransi pihak ketiga dan pihak berelasi (Catatan 34).

Piutang sewa pembiayaan - bruto yang akan diterima dari konsumen sesuai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
Tidak lebih dari 1 tahun	170.532.716.861	200.110.282.567	Not later than 1 year
Lebih dari 1 tahun dan tidak lebih dari 5 tahun	117.622.847.139	134.468.156.153	Later than 1 year and not later than 5 years
Total	288.155.564.000	334.578.438.720	Total

6. FINANCE LEASE RECEIVABLES - THIRD PARTIES - NET (continued)

As of December 31, 2020 and 2019, all of the Company's finance lease, if identified based on customer business activities is classified as investment financing.

As of December 31, 2020 and 2019, all of the Company's finance lease receivables are self-financed and from third parties.

Details of the contractual maturities (represented by undiscounted contractual cash flows) of finance lease receivables - gross according to their respective due dates as of December 31, 2020 and 2019, are as follows:

Effective interest rate for finance lease ranges from 14.50% - 23.48% and 12.56% - 28.27% per year for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively.

The terms of finance lease contracts financed by the Company on capital goods are 10 months - 5 years.

Heavy equipment financed by the Company are covered by insurance against losses and damages to several third parties and related party insurance companies (Note 34).

The finance lease receivables - gross, that will be collected from consumers in accordance with its due dates are as follows:

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN - PIHAK KETIGA - NETO (lanjutan)

Piutang sewa pembiayaan yang direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 25.827.186.034 dan Rp 5.941.228.210. Skema restrukturisasi umumnya dilakukan dengan perpanjangan periode pembiayaan dan penjadwalan kembali pembayaran bunga pembiayaan yang tertunggak.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019, laba piutang sewa pembiayaan yang direstrukturisasi masing-masing sebesar Rp 1.441.229.048 dan Rp 868.579.341 dan dicatat pada akun pendapatan administrasi sebagai bagian dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Rincian analisa umur atas jatuh tempo kontraktual (ditunjukkan dengan arus kas kontraktual yang tidak didiskonto) dari saldo piutang sewa pembiayaan bruto adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
Belum jatuh tempo	238.622.861.000	302.391.843.500	Current
Telah jatuh tempo:			Overdue:
1 - 10 hari	21.739.320.000	18.243.300.220	1 - 10 days
11 - 90 hari	23.784.071.000	9.961.640.000	11 - 90 days
91 - 120 hari	518.893.000	61.750.000	91 - 120 days
121 - 180 hari	1.172.646.000	808.743.000	121 - 180 days
Lebih dari 180 hari	2.317.773.000	3.111.162.000	More than 180 days
Total	288.155.564.000	334.578.438.720	Total

Perubahan penyisihan kerugian kredit ekspektasian adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
Saldo awal	(2.786.043.928)	(3.265.443.667)	Beginning balance
Dampak penerapan PSAK 71	(863.215.772)	-	Effect of adoption of PSAK 71
Saldo awal setelah penerapan PSAK 71	(3.649.259.700)	(3.265.443.667)	Beginning balance after adoption of PSAK 71
Penyisihan tahun berjalan (Catatan 32)	(1.275.680.335)	(1.805.208.888)	Provision during the year (Note 32)
Pemulihan penurunan nilai	292.068.330	1.662.921.674	Reversal of impairment
Penghapusan tahun berjalan	658.832.600	621.686.953	Write-off during the year
Saldo akhir	(3.974.039.105)	(2.786.043.928)	Ending balance

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas piutang sewa pembiayaan adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

Penghapusan penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas piutang sewa pembiayaan berasal dari kerugian penjualan aset piutang dalam penyelesaian agunan.

6. FINANCE LEASE RECEIVABLES - THIRD PARTIES - NET (continued)

The restructured finance lease receivables as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp 25,827,186,034 and Rp 5,941,228,210, respectively. The restructuring scheme generally are extensions of the financing period and reschedule of payments of overdue financing interest.

For the years ended December 31, 2020 and 2019, gain on restructuring of finance lease receivables amounted to Rp 1,441,229,048 and Rp 868,579,341, respectively, and recorded in administrative income account as part of the statement of profit or loss and other comprehensive income.

The detailed aging analysis of the contractual maturities (represented by undiscounted contractual cash flows) of the outstanding gross finance lease receivables are as follows:

Movements of allowance for ECLs are as follows:

The Company's management believes that the amount of the allowance for ECLs on finance lease receivables is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.

The write-off of allowance for ECLs on finance lease receivables arises from loss on sale of receivables under settlement of collateral assets.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN - PIHAK KETIGA - NETO (lanjutan)

Sebagai jaminan atas piutang sewa pembiayaan, Perusahaan menerima jaminan dari konsumen berupa alat berat yang dibiayai Perusahaan. Nilai wajar jaminan atas piutang sewa pembiayaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 281.782.869.567 dan Rp 232.071.837.416.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, piutang sewa pembiayaan digunakan sebagai jaminan pinjaman yang diterima dari bank (Catatan 14).

Piutang sewa pembiayaan didominasi dalam mata uang Rupiah.

6. FINANCE LEASE RECEIVABLES - THIRD PARTIES - NET (continued)

For the collateral to the finance lease receivables, the Company receives the heavy equipment financed by the Company as collateral from the customers. The fair value of collaterals received over finance lease receivables as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp 281,782,869,567 and Rp 232,071,837,416, respectively.

As of December 31, 2020 and 2019, finance lease receivables were used as collateral for credit facilities obtained from the banks (Note 14).

Finance lease receivables are denominated in Rupiah.

7. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN - NETO

7. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES - NET

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Pihak ketiga			Third parties
Piutang pembiayaan konsumen - bruto			Consumer financing receivables - gross
Pembiayaan sendiri	1.051.413.628.421	1.399.819.097.196	Self financing
Pembiayaan yang dibiayai bersama pihak-pihak lain - without recourse	<u>34.136.684.092</u>	<u>9.785.250.250</u>	Joint financing with other parties - without recourse
Total piutang pembiayaan konsumen - bruto	1.085.550.312.513	1.409.604.347.446	Total consumer financing receivables - gross
Ditambah: Biaya transaksi ditangguhkan	<u>24.085.197.711</u>	<u>27.022.299.439</u>	Add: Deferred transaction costs
	<u>1.109.635.510.224</u>	<u>1.436.626.646.885</u>	
Dikurangi: Pendapatan yang belum diakui			Less: Unearned income
Pembiayaan sendiri	(235.923.773.914)	(274.736.165.129)	Self financing
Pembiayaan yang dibiayai bersama pihak lain - without recourse	<u>(6.002.107.042)</u>	<u>(1.865.922.988)</u>	Joint financing with other parties - without recourse
	<u>(241.925.880.956)</u>	<u>(276.602.088.117)</u>	
Total piutang pembiayaan konsumen - neto	<u>867.709.629.268</u>	<u>1.160.024.558.768</u>	Total consumer financing receivables - net
Dikurangi: Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	<u>(18.648.837.248)</u>	<u>(27.601.294.040)</u>	Less: Allowance for ECLs
Total piutang pembiayaan konsumen - neto	<u>849.060.792.020</u>	<u>1.132.423.264.728</u>	Total consumer financing receivables - net

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN – NETO (lanjutan)

Piutang pembiayaan konsumen - bruto (sebelum dikurangi pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan penyisihan kerugian kredit ekspektasian) pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan jenis produk

	2020	2019	
Kendaraan bermotor	1.026.966.335.760	1.338.842.483.977	Vehicles
Perumahan	58.583.976.753	70.761.863.469	Properties
Total	1.085.550.312.513	1.409.604.347.446	Total

b. Berdasarkan kegiatan usaha

	2020	2019	
Multi guna	1.056.778.747.159	1.402.732.782.092	Multi purpose
Modal kerja	28.771.565.354	6.871.565.354	Working capital
Total	1.085.550.312.513	1.409.604.347.446	Total

Rincian atas jatuh tempo kontraktual (ditunjukkan dengan arus kas kontraktual yang tidak didiskonto) dari piutang pembiayaan konsumen - bruto sesuai dengan tanggal jatuh temponya pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
2019	-	42.860.455.219	2019
2020	28.552.348.493	734.791.040.071	2020
2021	568.482.593.924	432.025.981.124	2021
2022	358.548.192.907	151.743.717.489	2022
2023	100.354.088.283	22.310.827.980	2023
2024	13.884.032.597	10.481.473.190	2024
2025	5.585.426.095	15.390.852.373	2025
2026	10.143.630.214	-	2026
Total	1.085.550.312.513	1.409.604.347.446	Total

Jangka waktu kontrak sewa pembiayaan yang dibiayai oleh Perusahaan atas barang modal adalah 1 - 15 tahun.

Suku bunga efektif untuk pembiayaan konsumen baru masing-masing berkisar antara 9,00% - 46,97% dan 9,00% - 39,04% per tahun untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Piutang pembiayaan konsumen bruto yang dikelola Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, termasuk piutang pembiayaan yang dibiayai bersama pihak lain - (without recourse), masing-masing sebesar Rp 1.272.286.424.421 dan Rp 1.604.371.836.922. Bagian piutang pembiayaan yang dibiayai oleh pihak lain masing-masing sebesar Rp 186.736.111.908 dan Rp 197.945.854.919 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

7. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES – NET (continued)

Consumer financing receivables - gross (excluding unearned income and allowance for ECLs) as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

a. Based on type of product

	2020	2019	
Kendaraan bermotor	1.026.966.335.760	1.338.842.483.977	Vehicles
Perumahan	58.583.976.753	70.761.863.469	Properties
Total	1.085.550.312.513	1.409.604.347.446	Total

b. Based on business activities

	2020	2019	
Multi guna	1.056.778.747.159	1.402.732.782.092	Multi purpose
Modal kerja	28.771.565.354	6.871.565.354	Working capital
Total	1.085.550.312.513	1.409.604.347.446	Total

Details of the contractual maturities (represented by undiscounted contractual cash flows) of consumer financing receivables - gross according to their respective due dates as of December 31, 2020 and 2019, are as follows:

	2020	2019	
2019	-	42.860.455.219	2019
2020	28.552.348.493	734.791.040.071	2020
2021	568.482.593.924	432.025.981.124	2021
2022	358.548.192.907	151.743.717.489	2022
2023	100.354.088.283	22.310.827.980	2023
2024	13.884.032.597	10.481.473.190	2024
2025	5.585.426.095	15.390.852.373	2025
2026	10.143.630.214	-	2026
Total	1.085.550.312.513	1.409.604.347.446	Total

The terms of finance lease contracts financed by the Company on capital goods are 1- 15 years.

Effective interest rate for new consumer financing ranges from from 9.00% - 46.97% and 9.00% - 39.04% per year for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively.

As of December 31, 2020 and 2019, the gross consumer financing receivables managed by the Company, including joint financing with other parties - (without recourse), amounted to Rp 1,272,286,424,421 and Rp 1,604,371,836,922, respectively. Portion of consumer financing receivables financed from other parties amounted to Rp 186,736,111,908 and Rp 197,945,854,919 as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN - NETO (lanjutan)

Kendaraan bermotor yang dibiayai oleh Perusahaan telah diasuransikan terhadap risiko kehilangan dan kerusakan kepada beberapa perusahaan asuransi pihak ketiga dan berelasi (Catatan 34).

Rincian analisa umur atas jatuh tempo kontraktual (ditunjukkan dengan arus kas kontraktual yang tidak didiskonto) dari saldo piutang pembiayaan konsumen bruto adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
Belum jatuh tempo	900.670.012.067	1.203.640.976.448	Current
Telah jatuh tempo:			Overdue:
1 - 10 hari	38.294.901.633	39.011.505.944	1 - 10 days
11 - 90 hari	120.985.435.731	130.903.683.666	11 - 90 days
91 - 120 hari	5.344.501.000	3.090.804.000	91 - 120 days
121 - 180 hari	4.167.457.000	3.338.196.122	121 - 180 days
Lebih dari 180 hari	16.088.005.082	29.619.181.266	More than 180 days
Total	1.085.550.312.513	1.409.604.347.446	Total

Piutang pembiayaan konsumen yang direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 210.350.431.653 dan Rp 9.541.424.337 skema restrukturisasi umumnya dilakukan dengan perpanjangan periode pembiayaan dan penjadwalan kembali pembayaran bunga pembiayaan yang tertunggak.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019, laba piutang pembiayaan konsumen yang direstrukturisasi masing-masing sebesar Rp 27.141.365.202 dan Rp 193.231.756 dan dicatat pada akun pendapatan administrasi sebagai bagian dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Perubahan penyisihan kerugian kredit ekspektasian adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
Saldo awal	(27.601.294.040)	(26.760.483.810)	Beginning balance
Dampak penerapan PSAK 71	1.186.012.586	-	Effect of adoption of PSAK 71
Saldo awal setelah penerapan PSAK 71	(26.415.281.454)	(26.760.483.810)	Beginning balance after adoption of PSAK 71
Penyisihan tahun berjalan (Catatan 32)	(19.965.052.094)	(24.218.082.060)	Provision during the year (Note 32)
Pemulihan penurunan nilai	8.583.885.373	5.074.877.163	Reversal of impairment
Penghapusan tahun berjalan	19.147.610.927	18.302.394.667	Write-off during the year
Saldo akhir	(18.648.837.248)	(27.601.294.040)	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas piutang pembiayaan konsumen adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

7. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES - NET (continued)

The vehicles financed by the Company are covered by insurance, against losses and damages, to several third and related party insurance companies (Note 34).

The detailed aging analysis of the contractual maturities (represented by undiscounted contractual cash flows) of the outstanding gross consumer financing receivables are as follows:

The restructured consumer financing receivables as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp 210,350,431,653 and Rp 9,541,424,337, respectively. The restructuring scheme generally are extensions of the financing period and reschedule of payments of overdue financing interest.

For the years ended December 31, 2020 and 2019, gain on restructuring consumer financing receivables amounted to Rp 27,141,365,202 and Rp 193,231,756, respectively, and recorded in administrative income account as part of the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Movements of allowance for ECLs are as follows:

Management believes that the amount of the allowance for ECLs on consumer financing receivables is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN - NETO (lanjutan)

Penghapusan penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas piutang pembiayaan konsumen berasal dari kerugian penjualan aset piutang dalam penyelesaian agunan.

Sebagai jaminan atas piutang pembiayaan konsumen, Perusahaan menerima jaminan dari konsumen berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kendaraan bermotor atau hak tanggungan atas rumah yang dibiayai Perusahaan. Jumlah keseluruhan nilai wajar jaminan tersebut masing-masing sebesar Rp 1.065.097.732.871 dan Rp 1.251.563.035.115 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, piutang pembiayaan konsumen digunakan sebagai jaminan pinjaman yang diterima dari bank (Catatan 14), pihak ketiga (Catatan 15) dan efek utang yang diterbitkan (Catatan 18).

Piutang lain-lain - pihak ketiga dinyatakan dalam Rupiah.

8. TAGIHAN ANJAK PIUTANG

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pihak ketiga		
Jatuh tempo dalam satu tahun	34.191.665.667	114.899.822.001
Jatuh tempo lebih dari satu tahun	32.400.000.000	-
Dikurangi:		
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(289.856.524)	-
Subtotal	66.301.809.143	114.899.822.001
Pihak berelasi (Catatan 34)	-	17.000.000.000
Total	<u>66.301.809.143</u>	<u>131.899.822.001</u>

Tagihan anjak piutang pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 66.301.809.143 dan Rp 131.899.822.001, jika diidentifikasi berdasarkan kegiatan usaha nasabah maka diklasifikasikan sebagai pembiayaan modal kerja.

Anjak piutang dikenakan bunga masing-masing sebesar 14,00% - 36,00% per tahun dan 10,25% - 36,00% per tahun untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Jangka waktu tagihan anjak piutang berdasarkan periode dalam perjanjian adalah 1 bulan - 3 tahun.

Tagihan anjak piutang memiliki jaminan tambahan berupa tanah dan bangunan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, beban penyisihan ECL atas piutang anjak piutang berjumlah Rp 289.856.524 (Catatan 32).

7. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES - NET (continued)

The write-off of allowance for ECLs for consumer financing receivables arises from loss on sale of receivables under settlement of collateral assets.

For the collateral to the consumer financing receivables, the Company receives the certificate of ownership (BPKB) of the vehicles or the mortgage right of the land or houses financed by the Company. As of December 31, 2020 and 2019, the fair value of collateral amounted to Rp 1,065,097,732,871 and Rp 1,251,563,035,115, respectively.

As of December 31, 2020 and 2019, consumer financing receivables were used as collateral for credit facilities obtained from the banks (Note 14), third party (Note 15) and debt securities issued (Note 18).

Other receivables - third parties are denominated in Rupiah.

8. FACTORING RECEIVABLES

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
			<i>Third parties</i>
			<i>Due within one year</i>
			<i>Due over than one year</i>
			<i>Less:</i>
			<i>Allowance for ECLs</i>
			<i>Subtotal</i>
			<i>Related party (Note 34)</i>
			<i>Total</i>

Factoring receivables as of December 31, 2020 and 2019 amounting to Rp 66,301,809,143 and Rp 131,899,822,001, respectively, if identified based on customer business activities, are classified as working capital financing.

Factoring receivables bear interest rates of 14.00% - 36.00% per year and 10.25% - 36.00% per year for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively.

The terms of factoring receivables based on the agreements are 1 month - 3 years.

Factoring receivables have additional collateral in the form of land and building.

For the year ended December 31, 2020, provision expense for ECLs on factoring receivables amounted to Rp 289,856,524 (Note 32).

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. TAGIHAN ANJAK PIUTANG (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas tagihan anjak piutang pada tanggal 31 Desember 2020 cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya tagihan anjak piutang.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas anjak piutang karena manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi terjadinya penurunan nilai atas jumlah tercatat tagihan anjak piutang.

9. PIUTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA - NETO

	2020	2019
Piutang dalam penyelesaian agunan - bruto	106.201.504.381	92.755.085.675
Dikurangi:		
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(8.932.576.461)	(8.965.768.978)
Piutang dalam penyelesaian agunan - neto	97.268.927.920	83.789.316.697
Piutang karyawan	1.429.482.066	1.577.447.808
Lain-lain	1.319.321.279	855.971.606
Total	100.017.731.265	86.222.736.111

Perubahan penyisihan kerugian kredit ekspektasian adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Saldo awal	(8.965.768.978)	(8.092.851.482)
Dampak penerapan PSAK 71	125.975.449	-
Saldo awal setelah penerapan PSAK 71	(8.839.793.529)	(8.092.851.482)
Penyisihan tahun berjalan (Catatan 32)	(137.318.720)	(890.676.145)
Pemulihan penurunan nilai	44.535.788	17.758.649
Saldo akhir	(8.932.576.461)	(8.965.768.978)

Piutang dalam penyelesaian agunan berkaitan dengan piutang dari pelanggan dimana jaminan ditahan oleh Perusahaan.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas piutang dalam penyelesaian agunan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang dalam penyelesaian agunan.

Piutang karyawan tidak memiliki jaminan dan akan dipotong setiap bulan selama 1-3 tahun dari gaji karyawan dengan bunga sebesar 15% per tahun masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Piutang lain-lain - pihak ketiga dinyatakan dalam Rupiah.

8. FACTORING RECEIVABLES (continued)

Management believes that allowance for ECLs on factoring receivables as of December 31, 2020 is adequate to cover possible losses from factoring receivables.

As of December 31, 2019, the Company did not provide allowance for impairment losses of factoring receivables as the management believes that there is no indication of impairment losses of the carrying amount of the factoring receivables.

9. OTHER RECEIVABLES - THIRD PARTIES - NET

Receivables under settlement of collaterals - gross
Less:
 Allowance for ECLs
Receivables under settlement of collaterals - net
Employee receivables
Others

Total

Movements of allowance for ECLs are as follows:

Beginning balance
Effect of adoption of PSAK 71
Beginning balance after adoption of PSAK 71
Provision during the year (Note 32)
Reversal of impairment

Ending balance

Receivables under settlement of collaterals pertain to receivables from customers in which collaterals are currently being held by the Company.

Management believes that allowances for ECLs on receivables under settlement of collaterals as of December 31, 2020 and 2019 is adequate to cover possible losses from receivables under settlement collaterals.

Employee receivables are not collateralized and will be deducted monthly for 1-3 years from employees' salaries at an interest rate of 15% per annum as of December 31, 2020 and 2019.

Other receivables - third parties are denominated in Rupiah.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Uang muka:		
Pembelian aset	1.529.750.000	1.105.680.000
Beban dibayar dimuka:		
Perawatan bangunan	483.090.221	745.506.410
Asuransi	100.000.000	173.667.417
Sewa		
Pihak ketiga	-	5.551.972.484
Pihak berelasi (Catatan 34)	-	340.220.833
Lain-lain	767.269.760	217.996.942
Total	<u>2.880.109.981</u>	<u>8.135.044.086</u>

Sewa dibayar di muka merupakan pembayaran di muka atas sewa bangunan untuk keperluan operasional Perusahaan.

Uang muka lain-lain merupakan uang muka atas beban operasional yang belum direalisasikan, seperti pemeliharaan bangunan, dan lain-lain.

Uang muka dan beban dibayar di muka dinyatakan dalam Rupiah.

11. INVESTASI SAHAM

Pada bulan Juli 2011, Perusahaan membeli 25,00% kepemilikan atas PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk (MTI) dengan nilai sebesar Rp 17.500.000.000.

Pada bulan Oktober 2012, MTI menambah modal sahamnya yang didistribusikan kepada pemegang saham lain selain Perusahaan. Sebagai akibat dari kejadian ini, kepemilikan Perusahaan pada MTI terdilusi menjadi sebesar 22,67%.

Pada bulan Desember 2013, Perusahaan menambah kepemilikan atas MTI dengan nilai sebesar Rp 9.500.000.000 secara tunai. Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember 2013, kepemilikan Perusahaan atas MTI sebesar 24,98%.

Pada bulan Desember 2014, MTI menambah modal sahamnya yang didistribusikan kepada pemegang saham lain selain Perusahaan. Sebagai akibat dari kejadian ini, kepemilikan Perusahaan pada MTI terdilusi menjadi sebesar 23,88%.

Pada bulan Juni 2015, MTI menambah modal sahamnya yang didistribusikan kepada para pemegang saham. Sebagai akibat dari kejadian ini, kepemilikan Perusahaan pada MTI meningkat menjadi sebesar 23,95%.

Pada bulan November 2015, MTI menambah modal sahamnya yang didistribusikan kepada pemegang saham lain selain Perusahaan. Sebagai akibat dari kejadian ini, kepemilikan Perusahaan pada MTI terdilusi menjadi sebesar 23,19%.

10. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

Advances for:
Purchases of assets
Advances for:
Building maintenance
Insurance
Rental
Third parties
Related party (Note 34)
Others

Prepaid rental represents prepayment of building rental for Company's operational purpose.

Other advances represent advances for unrealized operational expenses, such as building maintenance, and others.

Advances and prepaid expenses are denominated in Rupiah.

11. INVESTMENT IN SHARES

In July 2011, Company acquired 25.00% ownership interest in PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk (MTI) for total consideration of Rp 17,500,000,000.

In October 2012, MTI increased its share capital and distributed to its shareholders other than the Company. As a result of this event, Company's ownership in MTI became diluted into 22.67%.

In December 2013, the Company increased its ownership in MTI amounting to Rp 9,500,000,000, in cash. Accordingly, as of December 31, 2013, the Company's ownership in MTI is 24.98%.

In December 2014, MTI increased its share capital and distributed to its shareholders other than the Company. As a result of this event, the Company's ownership in MTI became diluted into 23.88%.

In June 2015, MTI increased its share capital and distributed to all its shareholders. As a result of this event, the Company's ownership in MTI increased into 23.95%.

In November 2015, MTI increased its share capital and distributed to its shareholders other than the Company. As a result of this event, the Company's ownership in MTI became diluted into 23.19%.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. INVESTASI SAHAM (lanjutan)

Pada bulan Desember 2015, Perusahaan menjual kepemilikan atas MTI dengan nilai sebesar Rp 4.000.000.000. Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember 2015, kepemilikan Perusahaan atas MTI menjadi sebesar 19,90% atau setara dengan 241.938.250 lembar.

Pada tanggal 29 September 2017, MTI memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No.S-422/D.04/2017 untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sejumlah 310.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp 100 per saham dengan harga penawaran Rp 100 per saham. Seluruh saham ini telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Oktober 2017. Perusahaan tidak melakukan hak membeli efek terlebih dahulu pada penawaran umum saham MTI, sehingga kepemilikan Perusahaan pada saham MTI terdilusi menjadi 15,86%.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, kepemilikan Perusahaan pada saham MTI adalah sebesar 15,86% dan nilai wajar investasi pada MTI masing-masing adalah sebesar Rp 62 dan Rp 64 per saham, sehingga keuntungan (kerugian) nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar (Rp 483.876.500) dan Rp 725.814.750 .

11. INVESTMENT IN SHARES (continued)

In December 2015, the Company decreased its ownership in MTI amounting to Rp 4,000,000,000. Accordingly, the Company's ownership in MTI became 19.90% or equivalent to 241,938,250 shares.

On September 29, 2017, MTI obtained an effective statements from Financial Services Authority (OJK) through letter No. S-422/D.04/2017 to conduct the Initial Public Offering of shares consisting of 310,000,000 common shares with par value of Rp 100 per share at offering price of Rp 100 per share. These shares were all listed in the Indonesia Stock Exchange on October 11, 2017. The Company did not execute its rights on the public offering of MTI's shares, hence the Company's ownership in MTI's share was diluted to 15.86%.

As of December 31, 2020 and 2019, the Company's ownership in MTI's share is 15.86% and the fair value of investments in MTI amounted to Rp 62 and Rp 64 per share, respectively, hence fair value gain (loss) on financial assets at fair value through other comprehensive income for the years ended December 31, 2020 and 2019 amounted to (Rp 483,876,500) and Rp 725,814,750, respectively.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019 and
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP - NETO

12. PROPERTY AND EQUIPMENT - NET

	31 Desember 2020/ December 31, 2020								
	31 Desember 2019/ December 31, 2019	Penerapan PSAK 73/ PSAK 73 Adoption	1 Januari 2020/ January 1, 2020	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Revaluasi/ Revaluation	Pengukuran Kembali atas Perubahan Pembayaran/ Remeasurement Due to Changes in Lease Payment	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Biaya perolehan									Costs
<u>Kepemilikan langsung</u>									<u>Direct Ownership</u>
Tanah	63.685.000.000	-	63.685.000.000	-	(293.000.000)	(1.380.938.405)	-	62.011.061.595	Land
Bangunan	43.601.584.273	-	43.601.584.273	819.600.000	(181.716.068)	-	-	44.239.468.205	Buildings
Inventaris kantor	36.486.884.632	-	36.486.884.632	2.104.317.820	-	-	-	38.591.202.452	Office equipment
Kendaraan	16.369.699.997	-	16.369.699.997	3.661.040.742	(2.621.553.170)	(345.587.570)	-	17.063.599.999	Vehicles
<u>Aset Hak Guna</u>									<u>Right-of-Use Assets</u>
Gedung kantor	-	15.933.654.901	15.933.654.901	575.000.000	-	-	327.206.624	16.835.861.525	Office buildings
Total biaya perolehan	<u>160.143.168.902</u>	<u>15.933.654.901</u>	<u>176.076.823.803</u>	<u>7.159.958.562</u>	<u>(3.096.269.238)</u>	<u>(1.726.525.975)</u>	<u>327.206.624</u>	<u>178.741.193.776</u>	Total cost
Akumulasi penyusutan									Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>									<u>Direct Ownership</u>
Bangunan	9.622.892.695	-	9.622.892.695	2.198.297.763	(31.800.303)	-	-	11.789.390.155	Buildings
Inventaris kantor	23.147.629.964	-	23.147.629.964	5.566.231.195	-	-	-	28.713.861.159	Office equipment
Kendaraan	-	-	-	3.434.949.508	(301.298.463)	(3.133.651.045)	-	-	Vehicles
<u>Aset Hak Guna</u>									<u>Right-of-Use Assets</u>
Gedung kantor	-	-	-	4.842.495.118	-	-	-	4.842.495.118	Office buildings
Total akumulasi penyusutan	<u>32.770.522.659</u>	<u>-</u>	<u>32.770.522.659</u>	<u>16.041.973.584</u>	<u>(333.098.766)</u>	<u>(3.133.651.045)</u>	<u>-</u>	<u>45.345.746.432</u>	Total accumulated depreciation
Nilai tercatat	<u>127.372.646.243</u>							<u>133.395.447.344</u>	Carrying amount

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019 and
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

12. PROPERTY AND EQUIPMENT - NETO (continued)

31 Desember 2019/ December 31, 2019						
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Revaluasi/ <i>Revaluation</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	Cost
Biaya perolehan						
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct Ownership</u>
Tanah	54.796.300.000	6.259.750.000	-	2.628.950.000	63.685.000.000	Land
Bangunan	40.917.695.273	2.683.889.000	-	-	43.601.584.273	Buildings
Inventaris kantor	30.575.346.172	5.911.538.460	-	-	36.486.884.632	Office equipment
Kendaraan	14.296.100.000	4.370.125.189	(1.715.073.536)	(581.451.656)	16.369.699.997	Vehicles
Total biaya perolehan	<u>140.585.441.445</u>	<u>19.225.302.649</u>	<u>1.715.073.536</u>	<u>2.047.498.344</u>	<u>160.143.168.902</u>	Total cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct Ownership</u>
Bangunan	7.486.033.969	2.136.858.726	-	-	9.622.892.695	Buildings
Inventaris kantor	18.064.198.086	5.083.431.878	-	-	23.147.629.964	Office equipment
Kendaraan	-	3.073.454.506	(135.263.025)	(2.938.191.481)	-	Vehicles
Total akumulasi penyusutan	<u>25.550.232.055</u>	<u>10.293.745.110</u>	<u>(135.263.025)</u>	<u>(2.938.191.481)</u>	<u>32.770.522.659</u>	Total accumulated depreciation
Nilai tercatat	<u>115.035.209.390</u>				<u>127.372.646.243</u>	Carrying amount

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan memiliki 26 (dua puluh enam) bidang tanah yang terletak di Jakarta, Bekasi, Tegal, Yogyakarta, Semarang, Kudus, Sidoarjo, Surabaya, Bali, Lubuk Linggau, Palembang, Bandar Lampung, Baturaja, Samarinda, Banjarmasin, Manado, Makassar, Medan, Mataram, Pontianak, Bandung, dan Jambi dengan hak legal berupa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang berjangka waktu 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) tahun yang akan jatuh tempo antara tahun 2028 - 2050.

Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan HGB, karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti kepemilikan yang memadai.

Beberapa aset tetap Perusahaan sebagai jaminan pinjaman bank dari PT Bank Central Asia Tbk (Catatan 14), yang terdiri dari 6 bidang tanah dan bangunan berlokasi di Palembang, Sidoarjo, Semarang, Tegal, Lubuk Linggau dan Denpasar pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Total nilai perolehan aset tetap Perusahaan yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan dalam aktivitas operasional Perusahaan adalah berupa inventaris kantor dengan nilai masing-masing sebesar Rp 16.454.591.806 dan Rp 15.125.738.473 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Penilaian atas nilai wajar aset tetap berupa tanah dan kendaraan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dilakukan oleh penilai independen penilai independen Jeffrey I. Benyamin, ST, SE, MAPPI dari KJPP Budi, Edy, Saptono & Rekan dalam laporannya masing-masing tertanggal 15 Januari 2021 dan 3 Februari 2020. Penilaian aset tetap berupa tanah dan kendaraan menggunakan laporan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Metode penilaian yang digunakan adalah pendekatan pendapatan dan nilai pasar. Total nilai wajar tanah setelah penilaian kembali aset tetap pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 62.011.061.595 dan Rp 63.685.000.000, sedangkan total nilai wajar kendaraan setelah penilaian kembali aset tetap pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 17.063.599.999 dan Rp 16.369.699.997.

12. PROPERTY AND EQUIPMENT - NET
(continued)

As of December 31, 2020, the Company owned 26 (twenty six) parcels of land located in Jakarta, Bekasi, Tegal, Yogyakarta, Semarang, Kudus, Sidoarjo, Surabaya, Bali, Lubuk Linggau, Palembang, Bandar Lampung, Baturaja, Samarinda, Banjarmasin, Manado, Makassar, Medan, Mataram, Pontianak, Bandung and Jambi with "Hak Guna Bangunan" (HGB) certificates which have useful lives between 20 (twenty) until 30 (thirty) years and will mature on years between 2028 - 2050.

Management believes there is no issue with the extension of HGB, since all land were acquired legally and supported with sufficient ownership documents.

Several property and equipment of the Company are pledged as collateral for bank loan from PT Bank Central Asia Tbk (Note 14) which consist of 6 parcels of land and buildings located in Palembang, Sidoarjo, Semarang, Tegal, Lubuk Linggau and Denpasar as of December 31, 2020 and 2019.

Total cost of the Company's property and equipment that have been fully depreciated but still in use for Company's operational activities consist of office equipment amounting to Rp 16,454,591,806 and Rp 15,125,738,473 as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

The revaluation of land and vehicles as of December 31, 2020 and 2019 was performed by independent appraisers Jeffrey I. Benyamin, ST, SE, MAPPI from KJPP Budi, Edy, Saptono & Rekan as stated in its reports dated January 15, 2021 and February 3, 2020, respectively. The revaluation of land and vehicles used the financial information as of December 31, 2020 and 2019. The appraisal method used is the income and market approach. The total fair value of land after revaluation as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp 62,011,061,595 and Rp 63,685,000,000, respectively, meanwhile total fair value of vehicles after revaluation as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp 17,063,599,999 and Rp 16,369,699,997, respectively.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

Keuntungan atas selisih nilai wajar aset dengan nilai tercatat pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 1.419.001.107 dan Rp 4.995.248.263, dikurangi dengan efek pajak terkait masing-masing sebesar Rp 1.029.840.445 dan Rp 591.574.566, yang dibukukan pada penghasilan komprehensif lain dan akumulasinya dicatat dalam ekuitas pada bagian "Cadangan revaluasi aset tetap". Kerugian atas selisih antara nilai wajar aset dengan nilai tercatat untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 11.876.037 dan Rp 9.558.438 dan dibukukan pada beban lain-lain (Catatan 31).

Mutasi cadangan revaluasi aset tetap yang diakui pada laporan perubahan ekuitas adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Saldo awal	49.745.009.104	46.348.907.262	<i>Beginning balance</i>
Keuntungan revaluasi aset tetap	1.419.001.107	4.995.248.263	<i>Gain on revaluation of property and equipment</i>
Transfer cadangan revaluasi aset tetap yang dijual	(2.489.817.822)	(1.216.243.993)	<i>Transfer of revaluation reserve of property and equipment sold</i>
Efek pajak terkait	(484.170.524)	(382.902.428)	<i>Related tax effect</i>
Saldo akhir	<u>48.190.021.865</u>	<u>49.745.009.104</u>	<i>Ending balance</i>

Berdasarkan laporan penilaian tersebut, penilaian dilakukan sesuai Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang ditentukan berdasarkan transaksi terkini dalam ketentuan yang wajar dan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.4 tentang pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian aset di pasar modal. Elemen-elemen yang digunakan dalam perbandingan data untuk menentukan nilai wajar aset adalah jenis hak yang melekat pada properti, kondisi pasar, lokasi, karakteristik fisik, karakteristik dalam menghasilkan pendapatan dan karakteristik tanah.

Nilai wajar tanah dan kendaraan Perusahaan dikategorikan sebagai tingkat 2 dan tidak ada perpindahan antar tingkat atas pengukuran nilai wajar selama tahun berjalan.

Jika aset tetap berupa tanah dan kendaraan dicatat sebesar biaya perolehan, nilai tercatatnya pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Tanah	19.267.870.697	19.267.870.697	<i>Land</i>
Kendaraan	8.182.300.084	6.065.645.400	<i>Vehicles</i>
Total	<u>27.450.170.781</u>	<u>25.333.516.097</u>	<i>Total</i>

12. PROPERTY AND EQUIPMENT - NET (continued)

Gain on difference between fair value and carrying amount as of December 31, 2020 and 2019 amounting to Rp 1,419,001,107 and Rp 4,995,248,263, respectively, less tax effect amounting to Rp 1,029,840,445 and Rp 591,574,566, respectively, are recorded in other comprehensive income and accumulated in equity as "Property and Equipment Revaluation Reserve". Loss on difference between the fair value and carrying amount amounting to Rp 11,876,037 and Rp 9,558,438, respectively, for the years ended December 31, 2020 and 2019, recorded in other expense (Note 31).

Movements in the property and equipment of revaluation reserve recognized in the statements of changes in equity are as follows:

Based on the appraisal reports, the valuation was determined in accordance with the Indonesian Appraisal Standards (SPI), referring to recent arm's length transaction and Bapepam-LK'S rule No. VIII.C.4 regarding valuation and presentation of asset valuation report in capital market. Elements used in data comparison process to determine assets' fair value are type of right on property, condition, location, characteristics, income producing characteristics, and land characteristics.

The fair value of the Company's land and vehicles is categorized as level 2 and there was no inter-level transfers of fair value measurement during the current year.

If land and vehicles were stated at historical cost basis, the carrying amounts as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

12. PROPERTY AND EQUIPMENT - NET (continued)

Beban penyusutan yang dibebankan pada laba rugi masing-masing sebesar Rp 16.041.973.584 dan Rp 10.293.745.110 untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 (Catatan 31).

Depreciation expenses charged to profit or loss amounted to Rp 16,041,973,584 and Rp 10,293,745,110 for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively (Note 31).

Rincian rugi penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

The details of loss on sale of property and equipment are as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Penerimaan hasil penjualan aset tetap	2.278.100.000	1.392.440.000	Proceeds from sale of property and equipment
Harga perolehan Akumulasi penyusutan	3.096.269.238 (333.098.766)	1.715.073.536 (135.263.025)	Acquisition cost Accumulated depreciation
Nilai buku neto	<u>2.763.170.472</u>	<u>1.579.810.511</u>	Net book value
Rugi penjualan aset tetap	<u>(485.070.472)</u>	<u>(187.370.511)</u>	Loss on sale of property and equipment

Rugi penjualan aset tetap diakui sebagai bagian dari "Penghasilan lain-lain" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (Catatan 28).

Loss on sale of property and equipment is recognized as part of "Other income - net" in the statement of profit or loss and other comprehensive income (Note 28).

Aset tetap berupa bangunan dan kendaraan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya kepada beberapa perusahaan asuransi dengan rincian sebagai berikut:

Property and equipment in the form of buildings and vehicles were insured against fire, theft and other risks to several insurance companies with details as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Pihak ketiga			Third parties
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	66.627.266.000	54.701.050.000	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	370.000.000	190.540.000	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika
PT Asuransi Sinar Mas	265.000.000	276.870.000	PT Asuransi Sinar Mas
Pihak berelasi			Related party
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk	<u>11.836.830.000</u>	<u>9.870.400.000</u>	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk
Total	<u>79.099.096.000</u>	<u>65.038.860.000</u>	Total

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungansian aset tetap tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungansikan.

Management believes that the insurance coverage amount for property and equipment is adequate to cover all possible losses.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai atas aset tetap pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Management believes that there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment in value of property and equipment as of December 31, 2020 and 2019.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
 Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2020 and 2019 and
 For the Years Then Ended
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET LAIN-LAIN

13. OTHER ASSETS

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Renovasi gedung	8.456.673.841	13.799.604.798	Building renovation
Dikurangi:			Less:
Akumulasi amortisasi	<u>(6.755.111.644)</u>	<u>(10.978.991.467)</u>	Accumulated amortization
Nilai tercatat	1.701.562.197	2.820.613.331	Carrying amount
Jaminan sewa	<u>1.223.490.200</u>	<u>1.223.490.200</u>	Rental deposits
Total	<u>2.925.052.397</u>	<u>4.044.103.531</u>	Total

Beban amortisasi atas renovasi gedung yang dibebankan pada beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp 1.955.089.877 dan Rp 3.021.581.004 untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 (Catatan 31).

Amortization expense of building renovation charged to general and administrative expense amounted to Rp 1,955,089,877 and Rp 3,021,581,004 for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively (Note 31).

Aset lain-lain dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Other assets are denominated in Rupiah.

14. UTANG BANK

14. BANK LOANS

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank KEB Hana Indonesia	44.513.476.903	95.462.706.864	PT Bank KEB Hana Indonesia
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	39.991.756.898	45.871.563.112	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	23.580.455.183	55.281.470.233	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	21.719.934.244	60.059.409.061	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
PT Bank Victoria International Tbk	14.672.543.720	-	PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk	-	67.890.102.335	PT Bank Sinarmas Tbk
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	-	14.452.748.723	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-	9.095.714.941	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
	144.478.166.948	348.113.715.269	
Dikurangi:			Less:
Beban transaksi yang belum diamortisasi	<u>(2.112.504.259)</u>	<u>(3.089.331.552)</u>	Unamortized transaction costs
Total	<u>142.365.662.689</u>	<u>345.024.383.717</u>	Total

PT Bank KEB Hana Indonesia

Berdasarkan Akta Notaris No. 176 tanggal 19 Desember 2017 dari Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank KEB Hana Indonesia menandatangani Perjanjian Angsuran Modal Kerja dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 100.000.000.000. Jangka waktu penarikan sampai dengan 19 April 2018 dengan jangka waktu pembiayaan tiga tahun untuk setiap pencairan dengan enam bulan periode ketersediaan.

Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 11,00% per tahun dan dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia sebesar nilai maksimum 110 % dari maksimum kredit.

PT Bank KEB Hana Indonesia

Based on Notarial Deed No. 176 dated December 19, 2017 of Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari, SH., M.Kn., Notary in Jakarta, the Company and PT KEB Hana Indonesia agreed to sign a Working Capital Installment Agreement amounting to Rp 100,000,000,000. Drawdown period is until April 19, 2018, with a three-year financing period for each disbursement and a six-month availability period.

This loan bears interest at rate of 11.00% per year and was secured by fiduciary transfer of consumer financing receivables by a maximum of 110% of the maximum credit.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank KEB Hana Indonesia (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 4 Maret 2019 dari Susana Tatang, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank KEB Hana Indonesia menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 50.000.000.000. Jangka waktu penarikan sampai dengan 4 September 2019 dengan jangka waktu pembiayaan tiga tahun untuk setiap pencairan dengan enam bulan periode ketersediaan.

Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 11,00% per tahun dan dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia sebesar Rp 55.000.000.000.

Nilai tercatat sewa pembiayaan yang dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 712.400.000 dan Rp 1.974.933.000 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Catatan 6).

Nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen yang dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 94.988.117.000 dan Rp 142.366.554.000 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Catatan 7).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp 44.513.476.903 dan Rp 95.462.706.864.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas-fasilitas pinjaman.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Berdasarkan Akta Notaris No. 14 tanggal 8 September 2016 dari Indra Meidi, S.H., Notaris di Jakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk menyetujui Perjanjian Kredit Modal Kerja bersifat *Non-revolving* dengan maksimum limit sebesar Rp 40.000.000.000. Fasilitas tersebut memiliki jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan dan jangka waktu penarikan selama 6 bulan yang dimulai sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 11,50% per tahun dan dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia maksimum sebesar Rp 44.000.000.000.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank KEB Hana Indonesia (continued)

Based on Notarial Deed No. 3 dated March 4, 2019 of Susana Tatang, S.H., Notary in Jakarta, the Company and PT KEB Hana Indonesia agreed to sign a Working Capital Installment Agreement amounting to Rp 50,000,000,000. Drawdown period is until September 4, 2019, with a three-year financing period for each disbursement and a six-month availability period.

This loan bears interest at rate of 11.00% per year and was secured by fiduciary transfer of consumer financing receivables amounting to Rp 55,000,000,000.

The carrying amount of finance lease receivables collateralized for this loan facility amounted to Rp 712,400,000 and Rp 1,974,933,000, respectively, as of December 31, 2020 and 2019 (Note 6).

The carrying amount of consumer financing receivables collateralized for this loan facility amounted to Rp 94,988,117,000 and Rp 142,366,554,000, respectively, as of December 31, 2020 and 2019 (Note 7).

As of December 31, 2020 and 2019, the outstanding loan amounted to Rp 44,513,476,903 and Rp 95,462,706,864, respectively.

As of December 31, 2020 and 2019, the Company has complied with all the requirements mentioned in these loan facility agreements.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Based on Notarial Deed No 14 dated September 8, 2016 of Indra Meidi, S.H., Notary in Jakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk agreed to sign a Non-revolving Working Capital Loan with maximum limit amounting to Rp 40,000,000,000. The facilities had financing periods of 36 months and drawdown period of 6 months since the date of signing the facility. This loan bears interest rate of 11.50% per year and was secured by fiduciary transfer of consumer financing receivables amounting to a maximum of Rp 44,000,000,000.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (lanjutan)

Perusahaan telah melunasi fasilitas ini pada tanggal 25 Februari 2019.

Berdasarkan Akta Notaris No. 21 tanggal 21 Juni 2017 dari Indra Meidi, S.H., Notaris di Jakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk menyetujui permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja dengan batas maksimum sebesar Rp 35.000.000.000. Jangka waktu pembiayaan maksimum 42 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 11,50% per tahun dan dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia sebesar maksimum Rp 38.500.000.000.

Perusahaan telah melunasi fasilitas ini pada tanggal 28 November 2019.

Berdasarkan Akta Notaris No. 24 tanggal 27 Juni 2019 dari Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H. Notaris di Jakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk menyetujui permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja dengan batas maksimum sebesar Rp 66.000.000.000. Jangka waktu pencairan adalah 6 bulan sejak penandatanganan perjanjian. Jangka waktu pembiayaan maksimum 42 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 11,75% per tahun dan dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia sebesar maksimum Rp 72.600.000.000.

Perjanjian tersebut telah dirubah sesuai dengan Akta Notaris No. 8 tanggal 9 Januari 2020 "Adendum I Perjanjian Kredit" dari Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H. Notaris di Jakarta, yang menyatakan bahwa Perusahaan dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk menyetujui perubahan pasal 5 "Jangka Waktu Kredit" menjadi maksimal 45 bulan sampai dengan 27 Maret 2023, masa penarikan selama 9 bulan sampai dengan 27 Maret 2020, jangka waktu kredit maksimal 36 bulan untuk setiap penarikan.

Total nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen yang dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 57.227.114.000 dan Rp 64.670.714.000 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Catatan 7).

Selama pinjaman belum dilunasi, Perusahaan harus memelihara rasio jumlah utang terhadap jumlah ekuitas tidak melebihi rasio 8:1.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas-fasilitas pinjaman ini.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp 39.991.756.898 dan Rp 45.871.563.112.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (continued)

The Company has repaid this facility on February 25, 2019.

Based on Notarial Deed No. 21 dated June 21, 2017 of Indra Meidi, S.H., Notary in Jakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk agreed to sign a Loan Agreement with maximum limit of Rp 35,000,000,000. The period of financing is 42 months since the date of each withdrawal of the facility. This loan bears interest at rate of 11.50% per year and was secured by fiduciary transfer of consumer financing receivables amounting to a maximum of Rp 38,500,000,000.

The Company has repaid this facility on November 28, 2019.

Based on Notarial Deed No. 24 dated June 27, 2019 of Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notary in Jakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk agreed to sign a Loan Agreement with maximum limit of Rp 66,000,000,000. The disbursement period is 6 months from the signing of the agreement. The period of financing is 42 months since the date of each withdrawal of the facility. This loan bears interest at rate of 11.75% per year and was secured by fiduciary transfer of consumer financing receivables amounting to a maximum of Rp 72,600,000,000.

The agreement has been amended in accordance with Notarial Deed No. 8 dated January 9, 2020 "Addendum I to the Credit Agreement" from Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H. Notary in Jakarta, which states that the Company and PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk approved the amendment to article 5 "Credit Period" to a maximum of 45 months until March 27, 2023, a withdrawal period of 9 months to March 27, 2020, and term maximum credit of 36 months for each withdrawal.

Total carrying amount of consumer financing receivables collateralized for this loan facility amounted to Rp 57,227,114,000 and Rp 64,670,714,000 as of December 31, 2020 and 2019, respectively (Note 7).

During the period that the loans are still outstanding, the Company has to maintain its debt to equity ratio not to exceed 8:1.

As of December 31, 2020 and 2019, the Company has complied with all the requirements mentioned in these loan facilities agreement.

As of December 31, 2020 and 2019, the outstanding loan amounted to Rp 39,991,756,898 and Rp 45,871,563,112, respectively.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk

Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran)

Berdasarkan Akta Notaris No. 19 tanggal 18 Desember 2013 dari Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta, PT Bank Central Asia Tbk menyetujui pemberian Fasilitas Kredit Lokal maksimum Rp 7.000.000.000 dan Kredit Investasi I maksimum Rp 7.400.000.000 kepada Perusahaan dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan surat No. 292 tanggal 20 Desember 2017, PT Bank Central Asia Tbk menyetujui perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) kepada Perusahaan dengan jangka waktu sampai dengan 30 Desember 2018.

Berdasarkan surat No. 03761 tanggal 27 Desember 2019, PT Bank Central Asia Tbk menyetujui perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) kepada Perusahaan dengan jangka waktu sampai dengan 3 Maret 2020.

Berdasarkan surat No. 00605 tanggal 17 Februari 2020, yang telah diaktakan dengan akta notaris No. 40 tanggal 23 Maret 2020 dari Karin Christiana Basoeki, S.H di Jakarta. PT Bank Central Asia Tbk menyetujui perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) kepada Perusahaan dengan jangka waktu sampai dengan 30 Maret 2021 dengan tingkat suku bunga 11,25% per tahun.

Saldo atas fasilitas kredit lokal (rekening koran) pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar nil dan Rp 3.398.845.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan aset tetap Perusahaan yang terdiri dari 6 bidang tanah dan bangunan yang terletak di daerah Palembang, Sidoarjo, Semarang, Tegal, Lubuk Linggau dan Denpasar (Catatan 12) pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Central Asia Tbk

Local Credit Facility (Bank Overdraft)

Based on Notarial Deed No. 19 dated December 18, 2013 of Karin Christiana Basoeki, S.H., Notary in Jakarta, PT Bank Central Asia Tbk agreed to give Local Credit Facility amounting to a maximum of Rp 7,000,000,000 and Installment Investment Loan Facility I to the Company amounting to a maximum of Rp 7,400,000,000 for a period of 3 (three) years.

Based on letter No. 292 dated December 20, 2017, PT Bank Central Asia Tbk approved the extension of the Withdrawal period and/or Use of Local Credit Facilities (Bank Overdraft) to the Company with a period of up to December 30, 2018.

Based on letter No. 03761 dated December 27, 2019, PT Bank Central Asia Tbk approved the extension of the Withdrawal period and/or Use of Local Credit Facilities (Bank Overdraft) to the Company with a period of up to March 3, 2020.

Based on letter No. 00605 dated February 17, 2020, through Notarial Deed No. 40 dated March 23, 2020 of Karin Christiana Basoeki, S.H. in Jakarta, PT Bank Central Asia Tbk approved the extension of the Withdrawal period and/or Use of Local Credit Facilities (Bank Overdraft) to the Company with a period of up to March 31, 2021 with an interest rate of 11.25% per annum.

The balance of local credit facility (bank overdraft) as of December 31, 2020 and 2019 amounted to nil and Rp 3,398,845, respectively.

This loan facility is secured by property and equipment of the Company which consist 6 parcels of land and buildings located in Palembang, Sidoarjo, Semarang, Tegal, Lubuk Linggau and Denpasar (Note 12) as of December 31, 2020 and 2019.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

Fasilitas *Installment Loan* 3

Berdasarkan Akta Notaris No. 20 tanggal 18 Desember 2013 dari Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta, PT Bank Central Asia Tbk menyetujui pemberian Fasilitas *Installment Loan* 3 maksimum Rp 52.000.000.000 kepada Perusahaan dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan surat No. 203b/SPPK/SBK-W08/2016 tanggal 24 November 2016, PT Bank Central Asia Tbk menyetujui perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas *Installment Loan* 3 kepada Perusahaan dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan surat No. 00605 tanggal 17 Februari 2020, PT Bank Central Asia Tbk menyetujui perpanjangan batas waktu fasilitas *Installment Loan* 3 kepada Perusahaan dengan jangka waktu sampai dengan 29 Maret 2021.

Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 10,75% - 11,50% per tahun untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan piutang pembiayaan bersih sebesar 110% dari saldo *Installment Loan* 3.

Selama pinjaman belum dilunasi, Perusahaan harus memelihara *gearing ratio* tidak lebih dari 10 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas-fasilitas pinjaman.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar nil dan Rp 18.569.300.964.

Perusahaan telah melunasi seluruh pinjaman pada tanggal 22 Juli 2020.

Fasilitas *Installment Loan* 4

Berdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 16 Januari 2018 dari Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta, PT Bank Central Asia Tbk menyetujui Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Dengan Angsuran dengan batas maksimum sebesar Rp 50.000.000.000. Fasilitas tersebut memiliki jangka waktu selama selama 3 tahun untuk setiap penarikan yang dimulai sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 10,75% per tahun dan dijamin dengan piutang yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan maksimum sebesar Rp 50.000.000.000.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Central Asia Tbk (continued)

***Installment Loan Facility* 3**

Based on Notarial Deed No. 20 dated December 18, 2013 of Karin Christiana Basoeki, S.H., Notary in Jakarta, PT Bank Central Asia Tbk agreed to give additional *Installment Loan Facility* 3 to the Company amounting to a maximum of Rp 52,000,000,000 for a period of 3 (three) years.

Based on letter No. 203b/SPPK/SBK-W08/2016 dated November 24, 2016, PT Bank Central Asia Tbk agreed to extend the *Withdrawal Period* and/or *Use of Installment Loan Facility* 3 for a period of 3 (three) years.

Based on letter No. 00605 dated February 17, 2020, PT Bank Central Asia Tbk agreed to extend *Loan Facility* 3 with a period of up to March 29, 2021.

These loans bear interest rate of 10.75% - 11.50% per year for the years ended December 31, 2020 and 2019.

This loan facility is secured by a net financing receivable of 110% of the outstanding *Installment Loan* 3.

During the period that the loans are still outstanding, the Company has to maintain its *gearing ratio* not to exceed 10 times.

As of December 31 2019, the Company has complied with all the requirements mentioned in these loan facility agreements.

As of December 31, 2020 and 2019, the outstanding loan amounted to nil and Rp 18,569,300,964, respectively.

The Company has repaid all loans on July 22, 2020.

***Installment Loan Facility* 4**

Based on Notarial Deed No. 5 dated January 16, 2018 from Karin Christiana Basoeki, S.H., Notary in Jakarta, PT Bank Central Asia Tbk approved the *Fixed Loan credit Agreement with Installments* with a maximum limit of Rp 50,000,000,000. The facility has a term of 3 years for each withdrawal starting from the date of signing this agreement. This loan bears interest at 10.75% per annum and is guaranteed by fiduciary loans receivable with a maximum guarantee value of Rp 50,000,000,000.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

Fasilitas *Installment Loan* 4 (lanjutan)

Berdasarkan surat No. 00605 tanggal 17 Februari 2020, PT Bank Central Asia Tbk menyetujui perpanjangan batas waktu fasilitas *Installment Loan* 4 kepada Perusahaan dengan jangka waktu sampai dengan 15 Mei 2022.

Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 10,75% per tahun untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan piutang pembiayaan bersih sebesar 110% dari saldo *Installment Loan* 4.

Total nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen yang dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 17.873.592.000 dan Rp 49.641.611.000 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Catatan 7).

Selama pinjaman belum dilunasi, Perusahaan harus memelihara *gearing ratio* tidak lebih dari 10 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas-fasilitas pinjaman.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp 11.802.677.405 dan Rp 36.708.770.424.

Fasilitas *Installment Loan* 5

Berdasarkan surat No. 00605 tanggal 17 Februari 2020, yang telah diaktakan dengan akta notaris No. 40 tanggal 23 Maret 2020 dari Karin Christiana Basoeki, S.H di Jakarta. PT Bank Central Asia Tbk menyetujui Fasilitas *Installment Loan* 5 (*non-revolving*) dengan batas maksimum sebesar Rp 50.000.000.000. Fasilitas tersebut memiliki jangka waktu selama selama 3 tahun untuk setiap penarikan yang dimulai sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini. Jangka waktu penarikan pinjaman adalah 12 bulan sampai dengan 23 Maret 2021. Pinjaman ini dikenakan bunga tetap sebesar 11,00% per tahun.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan aset tetap yang sama dengan fasilitas kredit lokal serta jaminan tambahan berupa piutang pembiayaan neto sebesar 100% dari saldo *Installment Loan* 5.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Central Asia Tbk (continued)

Installment Loan Facility 4 (continued)

Based on letter No. 00605 dated February 17, 2020, PT Bank Central Asia Tbk agreed to extend Loan Facility 4 with a period of up to May 15, 2022.

These loans bear interest rate of 10.75% per year for the years ended December 31, 2020 and 2019.

This loan facility is secured by a net financing receivable of 110% of the outstanding *Installment Loan* 4.

Total carrying amount of consumer financing receivables collateralized for this loan facility amounted to Rp 17,873,592,000 and Rp 49,641,611,000 as of December 31, 2020 and 2019, respectively (Note 7).

During the period that the loans are still outstanding, the Company has to maintain its *gearing ratio* not to exceed 10 times.

As of December 31, 2020 and 2019, the Company has complied with all the requirements mentioned in these loan facility agreements.

As of December 31, 2020 and 2019, the outstanding loan amounted to Rp 11,802,677,405 and Rp 36,708,770,424, respectively.

Installment Loan Facility 5

Based on letter No. 00605 dated February 17, 2020, through Notarial Deed No. 40 dated March 23, 2020 of Karin Christiana Basoeki, S.H. in Jakarta, PT Bank Central Asia Tbk approved the *Installment Loan Facility* 5 (*non-revolving*) with a maximum limit of Rp 50,000,000,000. The facility has a term of 3 years for each withdrawal starting from the date of signing this agreement. The loan drawdown period is 12 months until March 23, 2021. This loan bears interest at 11.00% per annum.

This loan facility is secure by the same property and equipment as the local credit facility and additional collateral in the form of a net financing receivable of 100% of the outstanding *Installment Loan* 5.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

Fasilitas *Installment Loan* 5 (lanjutan)

Total nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen yang dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman ini sebesar Rp 5.692.920.000 pada tanggal 31 Desember 2020 (Catatan 7).

Total nilai tercatat piutang sewa pembiayaan yang dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman ini sebesar Rp 10.931.648.000 pada tanggal 31 Desember 2020 (Catatan 6).

Selama pinjaman belum dilunasi, Perusahaan harus memelihara *gearing ratio* tidak lebih dari 10 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas-fasilitas pinjaman.

Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman tersebut sebesar Rp 11.777.777.778.

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

Berdasarkan Akta Notaris No. 64 tanggal 21 Januari 2019 dari Sri Ismiyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk telah setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perusahaan berupa Pinjaman Angsuran Berjangka dengan limit Rp 75.000.000.000 dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun. Jangka waktu penarikan adalah 6 bulan sejak tanggal perjanjian. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 11,50% - 12,00% per tahun dengan tenor 1 sampai 3 tahun dan dijamin dengan seluruh piutang yang dimiliki Perusahaan dengan nilai penjaminan 100%.

Total nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen yang dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 27.400.044.000 dan Rp 75.283.052.000 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Catatan 7).

Selama pinjaman belum dilunasi, Perusahaan harus memelihara *gearing ratio* tidak melebihi 8 kali dan *current ratio* tidak melebihi 1 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp 21.719.934.244 dan Rp 60.059.409.061.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Central Asia Tbk (continued)

Installment Loan Facility 5 (continued)

Total carrying amount of consumer financing receivables collateralized for this loan facility amounted to Rp 5,692,920,000 as of December 31, 2020 (Note 7).

Total carrying amount of financing lease receivables collateralized for this loan facility amounted to Rp 10,931,648,000 as of December 31, 2020 (Note 6).

During the period that the loans are still outstanding, the Company has to maintain its *gearing ratio* not to exceed 10 times.

As of December 31, 2020, the Company has complied with all the requirements mentioned in these loan facility agreements.

As of December 31, 2020, the outstanding loan amounted to Rp 11,777,777,778.

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

Based on Notarial Deed No.64 dated January 21, 2019 of Sri Ismiyati, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk has agreed to give credit facility to the Company in the form of *Installment Loan* with credit limit Rp 75,000,000,000 for a period 3 (three) years. The withdrawal period is 6 months from the date of the agreement. This facility bears interest at rate of 11.50% - 12.00% per year with tenor from 1 to 3 years and was secured by *fiduciary transfer* of all Company's receivables which amounted to 100% from withdrawn loan amount.

Total carrying amount of consumer financing receivables collateralized for this loan facility amounted to Rp 27,400,044,000 and Rp 75,283,052,000, as of December 31, 2020 and 2019 (Note 7), respectively.

As long as the loan has not been repaid, the Company must maintain the *gearing ratio* not to exceed 8 times and the *current ratio* not to exceed 1 time.

As of December 31, 2020 and 2019, the Company has complied with all the requirements mentioned in this loan facility agreement.

As of December 31, 2020 and 2019, the outstanding loan amounted to Rp 21,719,934,244 and Rp 60,059,409,061, respectively.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Victoria International Tbk

Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran)

Berdasarkan Akta Notaris No. 94 tanggal 30 Juli 2007 dari Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta, PT Bank Victoria International Tbk fasilitas pinjaman memberikan berupa kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan limit maksimum sebesar Rp 15.000.000.000 dan dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 12 bulan. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12,00% per tahun dan akan diperbaharui setiap tahun.

Perpanjangan terakhir dinyatakan dalam perjanjian No. 119/SKM-KPP/VIC/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020, dimana PT Bank Victoria International Tbk menyetujui perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit selama 12 bulan menjadi sampai dengan 31 Juli 2021 dengan limit maksimum sebesar Rp 10.000.000.000 dan bunga sebesar 12,00% per tahun.

Saldo atas fasilitas kredit lokal (rekening koran) pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar nil.

Fasilitas Kredit Fixed Loan X Line Limit - Non Revolving

Berdasarkan Akta Notaris No. 89 tanggal 22 Mei 2018 dari Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan, PT Malacca Trust Finance dan PT Bank Victoria International Tbk menandatangani Akta Perjanjian Novasi Utang. Berdasarkan akta tersebut Perusahaan, PT Malacca Trust Finance dan PT Bank Victoria International Tbk setuju untuk mengalihkan fasilitas pinjaman PT Malacca Trust Finance kepada Perusahaan. Pinjaman ini dikenai bunga sebesar 12,00% - 14,00% per tahun.

Perusahaan telah melunasi seluruh pinjaman pada tanggal 18 Juli 2019.

Fasilitas Kredit Fixed Loan XI Line Limit - Non Revolving

Berdasarkan Akta Notaris No. 65 tanggal 23 Juli 2019 dari Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta, menyatakan bahwa PT Bank Victoria International Tbk telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit Fixed Loan XI Line Limit - Non Revolving (Uncommitted) sebesar Rp 50.000.000.000 kepada Perusahaan. Jangka waktu penarikan dihitung mulai tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020. Jangka waktu pelunasan pinjaman adalah 1-3 tahun sejak tanggal penarikan. Pinjaman ini dikenai bunga sebesar 11,00% - 11,75% per tahun.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Victoria International Tbk

Local Credit Facility (Bank Overdraft)

Based on Notarial Deed No. 94 dated July 30, 2007 from Suwarni Sukiman, S.H., Notary in Jakarta, PT Bank Victoria International Tbk give loan facility was in the form of a Credit Account Loan (Bank Overdraft) credit with a maximum limit of Rp 15,000,000,000 and with a maximum financing period of 12 months. This loan bears interest at 12.00% per annum and will be renewed annually.

The latest extension is stated in agreement No. 119/SKM-KPP/VIC/VII/2020 dated July 7, 2019, wherein PT Bank Victoria International Tbk approved an extension of the credit facility for 12 months until July 31, 2021 with a maximum limit of Rp 10,000,000,000, and bears interest at 12.00% per annum

The balance of local credit facility (bank overdraft) as of December 31, 2020 and 2019 amounted to nil, respectively.

Credit Facility Fixed Loan X Line Limit - Non Revolving

Based on Notarial Deed No. 89 dated May 22, 2018 of Suwarni Sukiman, S.H., Notary in Jakarta, the Company, PT Malacca Trust Finance and PT Bank Victoria International Tbk signed the Debt Novation Agreement. Based on the notarial deed, the Company, PT Malacca Trust Finance and PT Bank Victoria International Tbk agreed to transfer the loan facility of PT Malacca Trust Finance to the Company. The loan bears interest at 12.00% - 14.00% per annum.

The Company has repaid all loans on July 18, 2019.

Credit Facility Fixed Loan XI Line Limit - Non Revolving

Based on the Notary Deed No. 65 dated July 23, 2019 from Suwarni Sukiman, S.H., Notary in Jakarta, the Company, stated that PT Bank Victoria International Tbk has agreed to provide a credit facility Fixed Loan XI Line Limit - Non Revolving (Uncommitted) of Rp 50,000,000,000 to the Company. The period for withdrawal starts from July 23, 2019 to July 23, 2020. The period for repayment of the loan is 1-3 years from the date of withdrawal. This loan bears interest of 11.00% - 11.75% per annum.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Victoria International Tbk (lanjutan)

Fasilitas Kredit Fixed Loan XI Line Limit - Non Revolving (lanjutan)

Berdasarkan surat No. 119/SKM-KPP/VIC/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 dari PT Bank Victoria International Tbk, menyatakan bahwa PT Bank Victoria International Tbk menyetujui memperpanjang masa penarikan dan perubahan jatuh tempo fasilitas kredit Fixed Loan XI Line Limit - Non Revolving (Uncommitted) menjadi masing-masing sampai dengan 23 Januari 2021 dan 23 Januari 2024.

Nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen yang dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman ini sebesar Rp 30.494.274.000 pada tanggal 31 Desember 2020 (Catatan 7).

Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman tersebut sebesar Rp 14.672.543.720.

Selama pinjaman belum dilunasi, Perusahaan harus memelihara rasio jumlah utang terhadap jumlah ekuitas tidak melebihi rasio 8:1.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas-fasilitas pinjaman ini.

PT Bank Sinarmas Tbk

Berdasarkan Akta Notaris No. 822 tanggal 26 Mei 2017 dari Hartojo, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Sinarmas Tbk menandatangani Perjanjian Kredit Term Loan Non Revolving dengan maksimum limit sebesar Rp 100.000.000.000. Jangka waktu penarikan terhitung mulai tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 11,00% per tahun dan dijamin dengan piutang yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan maksimum sebesar Rp 105.000.000.000.

Perusahaan telah melunasi fasilitas ini pada tanggal 12 Maret 2019.

Berdasarkan Akta Notaris No. 29 tanggal 28 Agustus 2019 dari Veronica Nataadmadja, S.H. M.Corp. Admin, M.Com., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Sinarmas Tbk menandatangani Perjanjian Kredit Term Loan Non Revolving dengan maksimum limit sebesar Rp 100.000.000.000. Jangka waktu penarikan terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 11,00% per tahun dan dijamin dengan piutang yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan maksimum sebesar Rp 110.000.000.000.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Victoria International Tbk (continued)

Credit Facility Fixed Loan XI Line Limit - Non Revolving (continued)

Based on letter No.119/SKM-KPP/VIC/VII/2020 dated July 7, 2020 from PT Bank Victoria International Tbk, stated that PT Bank Victoria International Tbk agreed to extending the withdrawal period and changing maturity date of the credit facility Fixed Loan XI Line Limit - Non Revolving (Uncommitted) become January 23, 2021 and January 23, 2024, respectively.

The carrying amount of consumer financing receivables collateralized for this loan facility amounted to Rp 30,494,274,000 as of December 31, 2020 (Note 7).

As of December 31, 2020, the balance of the loan amounted to Rp 14,672,543,720.

During the period that the loans are still outstanding, the Company has to maintain its debt to equity ratio not to exceed 8:1.

As of December 31, 2020, the Company has complied with all the requirements mentioned in these loan facility agreement.

PT Bank Sinarmas Tbk

Based on Notarial Deed No. 822 dated May 26, 2017 of Hartojo S.H., Notary in Jakarta, the Company and PT Bank Sinarmas Tbk agreed to sign a Non-Revolving Term Loan Credit Agreement with maximum limit amounting to Rp 100,000,000,000. The drawdown period of the facility started on May 26, 2017 until December 26, 2017. This loan bears interest rate of 11.00% per year and was secured by fiduciary of receivables amounting to maximum of Rp 105,000,000,000.

The Company has repaid this facility on March 12, 2019.

Based on Notarial Deed No. 29 dated August 28, 2019 of Veronica Nataadmadja, S.H. M.Corp. Admin, M.Com., Notary in Jakarta, the Company and PT Bank Sinarmas Tbk agreed to sign a Non-Revolving Term Loan Credit Agreement with maximum limit amounting to Rp 100,000,000,000. The drawdown period of the facility started on August 28, 2019 until February 28, 2020. This loan bears interest rate of 11.00% per year and was secured by fiduciary of receivables amounting to maximum of Rp 110,000,000,000.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Sinarmas Tbk (lanjutan)

Total nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen yang dijadikan jaminan atas seluruh fasilitas pinjaman ini sebesar Rp 95.983.805.000 pada tanggal 31 Desember 2019 (Catatan 7).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar nil dan Rp 67.890.102.335.

Selama pinjaman belum dilunasi, Perusahaan harus memelihara *gearing ratio* tidak melebihi 10 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini.

Berdasarkan surat keterangan lunas No. 822/2020/CR-SKL/THA dari PT Bank Sinarmas Tbk tanggal 9 Juli 2020, menyatakan bahwa Perusahaan telah melakukan pelunasan atas fasilitas kredit sebesar Rp 100.000.000.000 beserta seluruh kewajiban Perusahaan kepada PT Bank Sinarmas Tbk.

PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk

Berdasarkan Surat Persetujuan Kredit No. 288/BWSI/LN/IX/2017 tanggal 15 September 2017, PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk menyetujui Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan batas maksimum sebesar Rp 50.000.000.000. Fasilitas tersebut memiliki jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 11,00% per tahun dan dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar 110% dari jumlah pinjaman yang ditarik.

Total nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen yang dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman ini sebesar Rp 38.661.819.000 pada tanggal 31 Desember 2019 (Catatan 7).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar nil dan Rp 14.452.748.723.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Sinarmas Tbk (continued)

Total carrying amount of consumer financing receivables collateralized for all this loan facility amounted to Rp 95,983,805,000 as of December 31, 2019 (Note 7).

As of December 31, 2020 and 2019, the outstanding loan amounted to nil and Rp 67,890,102,335, respectively.

During the period that the loans are still outstanding, the Company has to maintain its *gearing ratio* not to exceed 10 times.

As of December 31, 2020 and 2019, the Company has complied with all the requirements mentioned in this loan facility agreement.

Based on settlement letter of payment No. 822/2020/CR-SKL/THA from PT Bank Sinarmas Tbk dated July 9, 2020, stated that the Company has made repayments for the credit facility amounting to Rp 100,000,000,000 along with all of the Company's liabilities to PT Bank Sinarmas Tbk.

PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk

Based on Credit Acceptance Letter No. 288/BWSI/LN/IX/2017 dated September 15, 2017 PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk agreed to sign a Working Capital Agreement with maximum limit amounting to Rp 50,000,000,000. The facility had financing periods of 36 months. This loan bears interest rate of 11.00% per year and was secured by fiduciary transfer of consumer financing receivables amounting to 110% from withdrawn loan amount.

Total carrying amount of consumer financing receivables collateralized for this loan facility amounted to Rp 38,661,819,000 as of December 31, 2019 (Note 7).

As of December 31, 2020 and 2019, the outstanding loan amounted to nil and Rp 14,452,748,723, respectively.

As of December 31, 2020 and 2019, the Company has complied with all the requirements mentioned in these loan facility agreements.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (lanjutan)

Berdasarkan surat keterangan lunas No.443/BSWI/DIV.MKRD/IX/2020 dari PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk tanggal 15 September 2020, menyatakan bahwa Perusahaan telah melakukan pelunasan atas fasilitas pinjaman kepada PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Notaris No. 19 tanggal 25 November 2016 dari Ny. Veronica Nataadmadja, S.H., Notaris di Jakarta, PT Bank Maybank Indonesia Tbk menyetujui permohonan fasilitas kredit baru Pinjaman Berjangka II (*Term-loan II*) dengan batas maksimum sebesar Rp 200.000.000.000, dengan jangka waktu pembiayaan maksimum 4 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini. Pinjaman ini dikenakan bunga berkisar antara 11,00% per tahun dan fasilitas-fasilitas pinjaman ini dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia sebesar maksimum Rp 210.000.000.000.

Nilai tercatat sewa pembiayaan yang dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman ini sebesar Rp 86.632.000 pada tanggal 31 Desember 2019 (Catatan 6).

Nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen yang dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman ini sebesar Rp 10.727.904.000 pada tanggal 31 Desember 2019 (Catatan 7).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar nil dan Rp 9.095.714.941.

Selama pinjaman belum dilunasi, Perusahaan harus memelihara rasio jumlah utang terhadap jumlah ekuitas tidak melebihi rasio 8:1.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini.

Berdasarkan surat keterangan lunas No.S.2020.122/MBI/DIRCFS-Bussiness Banking/-Jakarta 6 dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk tanggal 13 November 2020, menyatakan bahwa Perusahaan telah melakukan pelunasan atas fasilitas pinjaman kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (continued)

Based on settlement letter of payment No.443/BSWI/DIV. MKRD/IX/2020 from PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk dated September 15, 2020, stated that the Company has made repayment of the loan facility to PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Based on Notarial Deed No. 19 dated November 25, 2016 of Ny. Veronica Nataadmadja, S.H., Notary in Jakarta, PT Bank Maybank Indonesia Tbk agreed to sign a loan agreement II (*Term-loan II*) with maximum limit of Rp 200,000,000,000, with a maximum funding period of 4 years from the date of facility signing. The loan bears interest ranging from 11.00% per annum and these loan facilities are secured by fiduciary transfer of consumer financing receivables amounting to a maximum of Rp 210,000,000,000.

The carrying amount of finance lease receivables collateralized for this loan facility amounted to Rp 86,632,000 as of December 31, 2019 (Note 6).

The carrying amount of consumer financing receivables collateralized for this loan facility amounted to Rp 10,727,904,000 as of December 31, 2019 (Note 7).

As of December 31, 2020 and 2019, the outstanding loan amounted to nil and Rp 9,095,714,941, respectively.

During the period that the loans are still outstanding, the Company has to maintain its debt to equity ratio not to exceed 8:1.

As of December 31, 2020 and 2019, the Company has complied with all the requirements mentioned in these loan facility agreements.

Based on a certificate of payment No.S.2020.122/MBI/DIRCFS-Bussiness Banking/-Jakarta 6 from PT Bank Maybank Indonesia Tbk dated November 13, 2020, stated that the Company has made repayment of the loan facility to PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank MNC Internasional Tbk

PT Bank MNC Internasional Tbk

Berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 Agustus 2019 dari Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank MNC Internasional Tbk menandatangani Perjanjian Kredit Pinjaman Transaksi Khusus dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 45.000.000.000. Jangka waktu penarikan sampai dengan 1 Agustus 2020 dengan jangka waktu pinjaman selama 72 bulan sampai dengan tanggal 1 Agustus 2025. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 13,00% per tahun dan dijamin dengan piutang pembiayaan nilai minimum sebesar 100 % dari nilai pinjaman.

Based on Notarial Deed No. 1 dated August 1, 2019 of Indrasari Kersnadjaja S.H., M.Kn. Notary in Jakarta, the Company and PT Bank MNC Internasional Tbk agreed to sign a Special Transaction Loan Agreement amounted Rp 45,000,000,000. Drawdown period until August 1, 2020 with a loan term of 72 months until August 1, 2025. This loan bears interest at rate of 13.00% per year and was secured by financing receivables by a minimum of 100% of the loan value.

Perusahaan tidak menggunakan fasilitas ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

The Company has not used this facility until December 31, 2020.

Rincian batasan maksimum Persentase Kredit Bermasalah per masing-masing bank adalah sebagai berikut:

The maximum limit of the Non-Performing Loan Percentage of each bank are as follows:

	Maksimum Persentase Kredit Bermasalah/ Maximum Non- Performing Loan Percentage	
PT Bank KEB Hana Indonesia	3%	PT Bank KEB Hana Indonesia
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	3%	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	3%	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	3%	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional
PT Bank Victoria International Tbk	3%	PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk	3%	PT Bank Sinarmas Tbk
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	2%	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	3%	PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Persentase kredit bermasalah Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 0,48% dan 0,51%, dari total piutang. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi persentase yang disyaratkan tersebut.

Percentage of Non-Performing Loan of the Company as of December 31, 2020 and 2019 amounted to 0.48% and 0.51% of total receivables, respectively. As of December 31, 2020 and 2019, the Company has complied with those required percentages.

Total pembayaran fasilitas pinjaman bank untuk untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 288.528.351.121 dan Rp 368.027.000.149.

Total payment of bank loan facilities for the years ended December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp 288,528,351,121 and Rp 368,027,000,149, respectively.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. PINJAMAN PIHAK KETIGA

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 045/PP/SMF-BPF/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017, Perusahaan dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pinjaman Program Kredit Pemilikan Rumah dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 20.000.000.000. Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 9,00% per tahun. Jangka waktu pinjaman ini 15 tahun dengan perubahan bunga setiap 5 tahun.

Pinjaman ini dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan maksimum sebesar Rp 20.000.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp 229.486.618 dan Rp 239.763.681.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 112/PP/SMF-BPF/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018, Perusahaan dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pinjaman Program Kredit Pemilikan Rumah sebesar Rp 10.000.000.000. Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 8,44% per tahun. Jangka waktu pinjaman ini 15 tahun dengan bunga tetap.

Pinjaman ini dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari nilai fasilitas yang diberikan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp 930.516.095 dan Rp 1.050.683.219.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 142/PP/SMF-BPF/B2.112.8.18/IX/2018 tanggal 28 September 2018, Perusahaan dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pinjaman Program Kredit Pemilikan Rumah sebesar Rp 1.252.692.321. Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 9,50% per tahun. Jangka waktu pinjaman ini 5 tahun dengan bunga tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp 918.123.116 dan Rp 1.126.468.034.

15. THIRD PARTY LOAN

Based on Letter of Credit Agreement No. 045/PP/SMF-BPF/VIII/2017 dated August 8, 2017, the Company and PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) entered into a Collaboration Agreement for Lending Facility of House Ownership Loan Program with maximum loan of Rp 20,000,000,000. This loan facility bears interest at 9.00% per annum. The term of this loan is 15 years with a change of interest every 5 years.

This loan was secured by fiduciary of consumer financing receivables amounting to a maximum of Rp 20,000,000,000.

As of December 31, 2020 and 2019, the loan balance amounted to Rp 229,486,618 and Rp 239,763,681, respectively.

Based on Letter of Credit Agreement No. 112/PP/SMF-BPF/VIII/2018 dated August 20, 2018, the Company and PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) entered into a Collaboration Agreement for Lending Facility of House Ownership Loan Program amounting to Rp 10,000,000,000. This loan facility bears interest at 8.44% per annum. The term of this loan is 15 years with fixed interest.

This loan was secured by fiduciary of consumer financing receivables with a guarantee value of 100% of the facility provided.

As of December 31, 2020 and 2019, the loan balance amounted to Rp 930,516,095 and Rp 1,050,683,219, respectively.

Based on Letter of Credit Agreement No. 142/PP/SMF-BPF/B2.112.8.18/IX/2018 dated September 28, 2018, the Company and PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) entered into a Collaboration Agreement for Lending Facility of House Ownership Loan Program amounting to Rp 1,252,692,321. This loan facility bears interest at 9.50% per annum. The term of this loan is 5 years with fixed interest.

As of December 31, 2020 and 2019, the loan balance amounted to Rp 918,123,116 and Rp 1,126,468,034, respectively.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. PINJAMAN PIHAK KETIGA (lanjutan)

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 060/PP/SMF-BPF/IV/2019 tanggal 26 April 2019, Perusahaan dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pinjaman Program Kredit Pemilikan Rumah sebesar Rp 1.673.783.907. Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 9,5% per tahun. Jangka waktu pinjaman ini 15 tahun dengan penyesuaian bunga setiap 5 tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp 1.581.612.494 dan Rp 1.638.649.672.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 206/PP/SMF-BPF/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019, Perusahaan dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pinjaman Program Kredit Pemilikan Rumah sebesar Rp 2.468.945.442. Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 8,60% per tahun. Jangka waktu pinjaman ini 5 tahun dengan bunga tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp 2.055.969.144 dan Rp 2.468.945.442.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 149/PP/SMF-BPF/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020, Perusahaan dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pinjaman Program Kredit Pemilikan Rumah sebesar Rp 1.209.018.233. Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 9,00% per tahun. Jangka waktu pinjaman ini 5 tahun dengan bunga tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman tersebut sebesar Rp 1.176.838.820.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 148/PP/SMF-BPF/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020, Perusahaan dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pinjaman Program Kredit Pemilikan Rumah sebesar Rp 663.259.283. Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 9,15% per tahun. Jangka waktu pinjaman ini 5 tahun dengan bunga tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman tersebut sebesar Rp 645.674.184.

Total nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen yang dijadikan jaminan atas fasilitas ini masing-masing adalah sebesar Rp 13.008.038.000 dan Rp 7.085.462.000 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Catatan 7).

15. THIRD PARTY LOAN (continued)

Based on the Letter of Credit Agreement No. 060/PP/SMF-BPF/IV/2019 dated April 26, 2019, the Company and PT Sarana Multigriya Financial (Persero) signed a Cooperation Agreement of Loans Facility for Home Ownership Credit Program amounting to Rp 1,673,783,907. This loan facility bears interest at 9.5% per annum. The term of the loan is 15 years with an interest adjustment every 5 years.

As of December 31, 2020 and 2019, the loan balance amounted to Rp1,581,612,494 and Rp 1,638,649,672, respectively.

Based on Letter of Credit Agreement No. 206/PP/SMF-BPF/XII/2019 dated December 5, 2019, the Company and PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) entered into a Collaboration Agreement for Lending Facility of House Ownership Loan Program amounting to Rp 2,468,945,442. This loan facility bears interest at 8.60% per annum. The term of this loan is 5 years with fixed interest.

As of December 31, 2020 and 2019, the loan balance amounted to Rp 2,055,969,144 and Rp 2,468,945,442, respectively.

Based on The Letter of Credit Agreement No. 149/PP/SMF-BPF/X/2020 dated October 2, 2020, the Company and PT Sarana Multigriya Keuangan (Persero) entered into a Collaboration Agreement for Lending Facility of House Ownership Loan Program amounting to Rp 1,209,018,233. This loan facility bears interest at 9.00% per annum. The loan term is 5 years with fixed interest rate.

As of December 31, 2020, the loan balance amounted to Rp 1,176,838,820.

Based on The Letter of Credit Agreement No. 148/PP/SMF-BPF/X/2020 dated October 2, 2020, the Company and PT Sarana Multigriya Keuangan (Persero) entered into a Collaboration Agreement for Lending Facility of House Ownership Loan Program amounting to Rp 663,259,283. This loan facility bears interest at 9.15% per annum. The loan term is 5 years with fixed interest rate.

As of December 31, 2020, the loan balance amounted to Rp 645,674,184.

For this facility, total carrying amount of consumer financing receivables collateralized for this loan facility amounted to Rp 13,008,038,000 and Rp 7,085,462,000 as of December 31, 2020 and 2019, respectively (Note 7).

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

16. ACCRUED EXPENSES

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Pihak ketiga			Third parties
Premi asuransi	15.059.555.667	17.157.921.457	Insurance premium
Bunga	4.026.958.431	4.470.828.034	Interest
Lain-lain	984.634.546	-	Others
Subtotal	<u>20.071.148.644</u>	<u>21.628.749.491</u>	Subtotal
Pihak berelasi (Catatan 34)			Related party (Note 34)
Premi asuransi	<u>57.745.482</u>	<u>76.181.266</u>	Insurance premium
Total	<u>20.128.894.126</u>	<u>21.704.930.757</u>	Total

Beban masih harus dibayar dinyatakan dalam Rupiah.

Accrued expenses are denominated in Rupiah.

17. PERPAJAKAN

17. TAXATION

a. Utang Pajak

a. Tax Payables

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Pajak Penghasilan			Income taxes
Pasal 4(2)	88.713.880	68.599.921	Article 4(2)
Pasal 21	3.059.158.970	2.194.251.918	Article 21
Pasal 23	10.574.747	12.686.610	Article 23
Pasal 25	137.333.834	-	Article 25
Pasal 29	<u>5.387.114.690</u>	<u>8.701.813.302</u>	Article 29
Total	<u>8.682.896.121</u>	<u>10.977.351.751</u>	Total

b. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

b. Income Tax Benefit (Expense)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Pajak kini	(11.191.740.560)	(22.258.104.500)	Current tax
Pajak tangguhan			Deferred tax
Pajak tangguhan yang timbul dari pengakuan dan pembalikan perbedaan temporer	(507.949.583)	19.320.945	Deferred tax relating to origination and reversal of temporary differences
Penyesuaian pajak tangguhan akibat perubahan tarif dan undang-undang pajak	<u>(591.501.097)</u>	<u>-</u>	Adjustments to deferred tax attributable to changes in tax rates and laws
Sub-total	<u>(1.099.450.680)</u>	<u>19.320.945</u>	Sub-total
Total	<u>(12.291.191.240)</u>	<u>(22.238.783.555)</u>	Total

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

17. TAXATION (continued)

c. Pajak Penghasilan - Pajak Kini

c. Income Tax - Current Tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan, sebagaimana yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income before income tax expense, as presented in the statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income for the years ended December 31, 2020 and 2019, are as follows:

	2020	2019	
Laba sebelum beban pajak penghasilan	53.553.686.485	97.096.113.884	Income before income taxes expense
Beda temporer:			Temporary differences:
Penyusutan aset tetap	1.078.704.319	(2.448.989.815)	Depreciation of property and equipment
Imbalan karyawan	139.263.207	2.526.273.594	Employee benefits
Sewa	(3.526.829.263)	-	Leases
Total beda temporer	<u>(2.308.861.737)</u>	<u>77.283.779</u>	Total temporary differences
Beda tetap:			Permanent differences:
Kerugian penjualan aset tetap	1.500.220.193	812.826.417	Loss on sale of property and equipment
Penyusutan aset tetap	1.256.182.244	(78.953.434)	Depreciation of property and equipment
Sewa kendaraan	126.900.000	126.900.000	Rent vehicle
Jamuan dan representasi	65.503.440	215.620.512	Entertainment and representation
Rugi penurunan nilai atas revaluasi aset tetap	11.876.037	9.558.438	Loss on revaluation of property and equipment
Beban pemasaran	(1.844.894.934)	(7.404.970.061)	Marketing expenses
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final	<u>(1.489.063.471)</u>	<u>(1.821.961.221)</u>	Interest income subjected to final tax
Total beda tetap	<u>(373.276.491)</u>	<u>(8.140.979.349)</u>	Total permanent differences
Laba kena pajak	<u>50.871.548.257</u>	<u>89.032.418.314</u>	Taxable income
Laba kena pajak (dibulatkan)	<u>50.871.548.000</u>	<u>89.032.418.000</u>	Taxable income (rounded)
Beban pajak kini (22% di 2020 dan 25% di 2019)	11.191.740.560	22.258.104.500	Current tax expense (22% in 2020 and 25% in 2019)
Dikurangi: Pajak penghasilan dibayar di muka Pasal 25	<u>(5.804.625.870)</u>	<u>(13.556.291.198)</u>	Less: Prepaid income tax Article 25
Utang pajak	<u>5.387.114.690</u>	<u>8.701.813.302</u>	Tax payable

Laba kena pajak tahun 2020 dan 2019 di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Perusahaan.

The 2020 and 2019's taxable income result from the above reconciliation provide the basis for the Company's Annual Corporate Tax Return.

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum beban pajak penghasilan seperti yang dilaporkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the income tax expense calculated by applying the applicable tax rate on the income before income tax expense as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income is as follows:

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

17. TAXATION (continued)

c. Pajak Penghasilan - Pajak Kini (lanjutan)

c. Income Tax - Current Tax (continued)

	2020	2019	
Laba sebelum beban pajak penghasilan	53.553.686.485	97.096.113.884	Income before income tax expense
Pajak dihitung pada tarif pajak yang berlaku (22% di 2020 dan 25% di 2019)	11.781.811.027	24.274.028.471	Tax calculated based on applicable tax rate (22% in 2020 and 25% in 2019)
Dampak saldo pajak tangguhan karena perubahan tarif pajak penghasilan	591.501.097	-	Effect on deferred tax balance due to change in income tax rate
Pengaruh pajak atas beda permanen	(82.120.826)	(2.035.244.837)	Tax effect of the permanent differences
Efek pembulatan	(58)	(79)	Rounding effect
Beban pajak penghasilan	12.291.191.240	22.238.783.555	Income tax expense

d. Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan

d. Income Tax - Deferred Tax

Perhitungan manfaat (beban) pajak penghasilan tangguhan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 atas beda temporer antara pelaporan komersial dan pajak dengan menggunakan tarif pajak maksimum adalah sebagai berikut:

The computations of deferred income tax benefit (expenses) for the years ended December 31, 2020 and 2019, on temporary differences between commercial and tax reporting purposes using the maximum tax rate are as follows:

	2020	2019	
<u>Dibebankan ke laba rugi</u>			<u>Charged to profit or loss</u>
Penyusutan aset tetap	274.431.024	(612.247.454)	Depreciation of property and equipment
Sewa	(775.902.438)	-	Leases
Imbalan kerja	(489.154.750)	631.568.399	Employee benefits
Surplus revaluasi aset tetap	(108.824.516)	-	Property and equipment revaluation surplus
Subtotal	(1.099.450.680)	19.320.945	Subtotal
<u>Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain</u>			<u>Charged to other comprehensive income</u>
Imbalan kerja	549.602.371	737.989.179	Employee benefits
Surplus revaluasi aset tetap	(1.029.840.445)	(591.574.566)	Property and equipment revaluation surplus
Subtotal	(480.238.074)	146.414.613	Subtotal
<u>Reklasifikasi dari penghasilan komprehensif lain ke saldo laba</u>			<u>Reclassification from other comprehensive income to retained earnings</u>
Surplus revaluasi aset tetap yang dijual	545.669.921	130.268.849	Revaluation surplus of property and equipment sold
Total	(1.034.018.833)	296.004.407	Total

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
 Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2020 and 2019 and
 For the Years Then Ended
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Imbalan kerja	5.193.389.349	5.132.941.728
Surplus revaluasi aset tetap	(2.809.626.869)	(2.216.631.829)
Sewa	(775.902.438)	-
Penyusutan aset tetap	(34.869.596)	(309.300.620)
Total	<u>1.572.990.446</u>	<u>2.607.009.279</u>

Pengakuan pemanfaatan aset pajak tangguhan oleh Perusahaan terkait dengan laba kena pajak di masa yang akan datang dan kelebihan laba yang dihasilkan oleh pemulihan beda temporer yang dapat dikenakan pajak.

e. Administrasi

Berdasarkan Undang-undang, perseroan terbuka dapat memperoleh pengurangan tarif 5% dari tarif pajak penghasilan normal jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- i. Sedikitnya 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dimiliki oleh publik;
- ii. Pemegang saham publik harus terdiri dari sedikitnya 300 individu, setiap individu mempunyai kurang dari 5% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor;
- iii. Kedua kondisi ini dipelihara setidaknya enam bulan (183 hari) dalam tahun pajak.

Pada tahun pajak 2020 dan 2019, Perusahaan tidak memperoleh pengurangan tarif sebesar 5% dikarenakan Perusahaan tidak memenuhi seluruh persyaratan di atas.

Perubahan Tarif Pajak Perusahaan

Pada tanggal 18 Mei 2020, sebagai bagian dari perlindungan stimulus ekonomi terhadap dampak Covid-19, pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Penyakit Virus Corona-19 (Covid-19) Pandemi dan / atau dalam rangka Penanggulangan Ancaman yang Berbahaya bagi Ekonomi Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan.

17. TAXATION (continued)

d. Income Tax - Deferred Tax (continued)

Deferred tax assets as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
	5.193.389.349	5.132.941.728	Employee benefits
	(2.809.626.869)	(2.216.631.829)	Property and equipment revaluation surplus
	(775.902.438)	-	Leases
	(34.869.596)	(309.300.620)	Depreciation of property and equipment
Total	<u>1.572.990.446</u>	<u>2.607.009.279</u>	Total

The utilization of deferred tax assets recognized by the Company is dependent upon future taxable profits and in excess of profits resulting from the reversal of existing taxable temporary differences.

e. Administration

Based on Law, public limited companies can obtain a reduction of 5% rate from the normal corporate income tax rate if they satisfy the following conditions:

- i. At least 40% of their total shares of paid up capital are publicly owned;
- ii. The public should consist of at least 300 individuals, each holding less than 5% of the paid up capital;
- iii. These two conditions are maintained for at least six months (183 days) in a tax year.

In fiscal years 2020 and 2019, the Company did not obtain a reduction of 5% rate from the normal corporate income tax rate since the Company did not satisfy all the above conditions.

Changes in Corporate Tax Rate

On May 18, 2020, as part of the economic stimulus protection against the impact of Covid-19, the government of the Republic of Indonesia established Law No. 2 Year 2020 Regarding State Financial Policy and Financial System Stability for Handling of Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Pandemic and/or in Order to Counter Threats which are Dangerous to National Economy and/or Financial System Stability.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Administrasi (lanjutan)

Perubahan Tarif Pajak Perusahaan (lanjutan)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak perusahaan sebagai berikut:

- Untuk tahun fiskal 2020 dan 2021: dari 25% hingga 22%;
- Mulai tahun fiskal 2022: dari 22% hingga 20%;
- Perusahaan publik domestik yang memenuhi kriteria tambahan tertentu akan memenuhi syarat untuk tarif pajak yang lebih rendah sebesar 3% dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

18. EFEK UTANG YANG DITERBITKAN

Nama Obligasi	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Tingkat Bunga Per Tahun/ Annual Interest Rate	Nilai Nominal / Nominal Value		Name of Bonds
			2020	2019	
Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2018	25 Juni 2021/ June 25, 2021	11,00%	206.500.000.000	300.000.000.000	Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2018
Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2020	14 Mei 2021/ May 14, 2021	9,70%	200.000.000.000	-	Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2020
Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2017	5 Mei 2020/ May 5, 2020	11,00%	-	300.000.000.000	Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2017
Total nilai nominal			406.500.000.000	600.000.000.000	Total nominal value
Dikurangi: Beban emisi efek utang yang belum diamortisasi - neto			(1.588.189.062)	(2.464.163.842)	Less: Unamortized debt securities issuance cost - net
Total - neto			404.911.810.938	597.535.836.158	Total - net

Pada tanggal 20 Juni 2016, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan Surat OJK No. S-306/D.04.2016 untuk melakukan penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance kepada masyarakat dengan jumlah pokok sebesar Rp 500.000.000.000.

17. TAXATION (continued)

e. Administration (continued)

Changes in Corporate Tax Rate (continued)

Law No. 2 Year 2020 regulates, among others, a decrease in the corporate tax rate as follows:

- For fiscal years 2020 and 2021: from 25% to 22%;
- Starting fiscal year 2022: from 22% to 20%;
- Domestic public listed companies that fulfill certain additional criteria will be eligible for a tax rate which is lower by 3% from the above-mentioned tax rates.

18. DEBT SECURITIES ISSUED

On June 20, 2016, the Company obtained the effective statements from OJK based on Letter No. S-306/D.04.2016 to conduct a public offering of "Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance" to public with a principal amount of Rp 500,000,000,000.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. EFEK UTANG YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perusahaan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I dengan jumlah pokok sebesar Rp 200.000.000.000 dan PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai wali amanat. Pada tanggal 28 Juni 2016, seluruh obligasi tersebut telah dicatat pada Bursa Efek Indonesia dengan beban emisi sebesar Rp 5.026.925.651.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sampai dengan 2 (dua) tahun sejak tanggal emisi. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp 30.000.000.000 dengan bunga obligasi sebesar 10,50% per tahun. Jangka waktu obligasi adalah 370 hari kalender sejak tanggal emisi. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% dari pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp 170.000.000.000 dengan bunga obligasi sebesar 11,00% per tahun. Jangka waktu obligasi adalah 2 (dua) tahun sejak tanggal emisi. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% dari pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. Pembayaran bunga obligasi pertama dilakukan pada tanggal 28 September 2016, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing obligasi adalah pada tanggal 8 Juli 2017 untuk Obligasi Seri A, 28 Juni 2018 untuk Obligasi Seri B.

Pada tanggal 8 Juli 2017, Perusahaan membayar Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016 Seri A yang jatuh tempo pada tanggal tersebut sebesar Rp 30.000.000.000.

Pada tanggal 28 Juni 2018, Perusahaan membayar Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016 Seri B yang jatuh tempo pada tanggal tersebut sebesar Rp 170.000.000.000.

18. DEBT SECURITIES ISSUED (continued)

Regarding the public offering, the Company has issued "Obligasi Berkelanjutan Batavia Prosperindo Finance Tahap I" with total principal amount of Rp 200,000,000,000, and with PT Bank Mega Tbk as trustee. On June 28, 2016, all of the bonds have been listed in the Indonesia Stock Exchange with an issuance cost of Rp 5,026,925,651.

The bonds were issued scripless and had a period of 370 calendar days up to 2 years from the date of issuance. These bonds provide options for public to choose the desired series, namely the presence of 2 series of bonds offered are as follows:

The amount of Series A Bonds that were offered at Rp 30,000,000,000 have an interest rate at 10.50% per year. Bond period is 370 calendar days from the date of issuance. The payment of bonds will be done in full amount (*bullet payment*) or 100% upon maturity date.

The amount of Series B Bonds were offered at Rp 170,000,000,000 with interest rate at 11.00% per year. Bond period is 2 (two) years from the date of issuance. The payment of bond will be done in full (*bullet payment*) by 100% upon maturity date.

The bonds were offered at 100% (one hundred percent) of the principal amount. The interest will be paid every 3 (three) months in accordance with the schedule of bond interest payment date. The first interest payment was on September 28, 2016, while the final payment together with the amount of principal due for each bonds was on July 8, 2017 for Series A, June 28, 2018 for Series B.

On July 8, 2017, the Company has paid "Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016 Seri A", which matured on that date amounting to Rp 30,000,000,000.

On June 28, 2018, the Company has paid "Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016 Seri B", which matured on that date amounting to Rp 170,000,000,000.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. EFEK UTANG YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Kemudian, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp 300.000.000.000 dengan bunga obligasi sebesar 11,00% per tahun dan PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai wali amanat. Pada tanggal 8 Mei 2017, seluruh obligasi tersebut tersebut telah dicatat pada Bursa Efek Indonesia dengan biaya emisi sebesar Rp 3.482.943.498.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan berjangka waktu 36 bulan sejak tanggal emisi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. Pembayaran bunga obligasi pertama dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2017, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada tanggal 5 Mei 2020.

Pada tanggal 4 Mei 2020, Perusahaan membayar Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2017 yang jatuh tempo pada tanggal tersebut sebesar Rp 300.000.000.000.

Pada tanggal 4 Juni 2018, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan Surat OJK No. S-62/D.04/2018 untuk melakukan penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance kepada masyarakat dengan jumlah pokok sebesar Rp 650.000.000.000.

Kemudian, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2018 dengan jumlah pokok sebesar Rp 300.000.000.000 dengan bunga obligasi sebesar 11,00% per tahun dan PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai wali amanat. Pada tanggal 26 Juni 2018, seluruh obligasi tersebut tersebut telah dicatat pada Bursa Efek Indonesia dengan biaya emisi sebesar Rp 3.539.926.500.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan berjangka waktu 36 bulan sejak tanggal emisi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. Pembayaran bunga obligasi pertama dilakukan pada tanggal 25 September 2018, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada tanggal 25 Juni 2021.

18. DEBT SECURITIES ISSUED (continued)

Then, the Company issued "Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2017" with total principal amount of Rp 300,000,000,000 with interest rate at 11.00% per year, and with PT Bank Mega Tbk as trustee. On May 8, 2017, all of the bonds have been listed in the Indonesia Stock Exchange with a listed issuance cost of Rp 3,482,943,498.

The bonds were issued scripless and a had period of 36 months from the date of issuance. The bonds were offered at 100% (one hundred percent) of the principal amount. The interest will be paid every 3 (three) months in accordance with the schedule of bond interest payment date. The first interest payment was on August 5, 2017, while the final payment together with the amount of principal due on the bond on May 5, 2020.

On May 4, 2020, the Company has paid "Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2017", which matured on that date amounting to Rp 300,000,000,000.

On June 4, 2018, the Company obtained the effective statements from OJK based on No. S-62/D.04/2018 to conduct a public offering of "Obligasi Berkelanjutan Batavia Prosperindo Finance II" to public with total principal amount of Rp 650,000,000,000.

Then, the Company issued "Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2018" with total principal amount of Rp 300,000,000,000 with interest rate at 11.00% per year, and with PT Bank Mega Tbk as trustee. On June 26, 2018, all of the bonds have been listed in the Indonesia Stock Exchange with a listed issuance cost of Rp 3,539,926,500.

The bonds were issued scripless and had a period of 36 months from the date of issuance. The bonds were offered at 100% (one hundred percent) of the principal amount. The interest will be paid every 3 (three) months in accordance with the schedule of bond interest payment date. The first interest payment was on September 25, 2018, while the final payment together with the amount of principal due on the bonds on June 25, 2021.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. EFEK UTANG YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Pada tanggal 24 Juli 2020, Perseroan telah melakukan pembayaran kembali Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2018 yang telah dikeluarkan dan tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.KEP-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dengan jumlah sebesar Rp 68.500.000.000.

Pada tanggal 25 Agustus 2020, Perseroan telah melakukan pembayaran kembali Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2018 yang telah dikeluarkan dan tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.KEP-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dengan jumlah sebesar Rp 25.000.000.000.

Sesuai dengan perjanjian perwaliamanatan obligasi, Perusahaan memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen (Catatan 7) dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi ketentuan, yaitu maksimal 10:1. Selain itu, selama pokok obligasi belum dilunasi, Perusahaan tidak diperkenankan, antara lain melakukan penggabungan dan peleburan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama serta menjual atau mengalihkan lebih dari 25% aset Perusahaan.

Kemudian, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebesar Rp 200.000.000.000 dengan bunga obligasi sebesar 9,70% per tahun dan PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai wali amanat. Pada tanggal 5 Mei 2020, seluruh obligasi tersebut telah dicatat pada Bursa Efek Indonesia dengan biaya emisi sebesar Rp 2.737.450.000.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan berjangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. Pembayaran bunga obligasi pertama dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2020, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada tanggal 14 Mei 2021.

18. DEBT SECURITIES ISSUED (continued)

As of July 24, 2020, The Company has made a repayment of the company's bonds that have been issued and registered in the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) by referring to the Regulation of the Financial Services Authority (OJK) No.KEP-412/BL/2010 dated September 6, 2010 concerning General Provisions and Debt Securities Trust Contracts amounting to Rp 68,500,000,000.

As of August 25, 2020, The Company has made a repayment of the company's bonds that have been issued and registered in the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) by referring to the Regulation of the Financial Services Authority (OJK) No.KEP-412/BL/2010 dated September 6, 2010 concerning General Provisions and Debt Securities Trust Contracts amounting to Rp 25,000,000,000.

According to the trustee bonds agreement, the Company provides collateral with fiduciary transfer of consumer financing receivables (Note 7) and debt to equity ratio should not exceed the provision, at maximum 10:1. Moreover, during the time that the bonds principals are still outstanding, the Company is not allowed to, among others, conduct merger and consolidation unless performed on the same business, and sell or assign more than 25% of the Company's assets.

Then, the Company issued "Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2020" with total principal amount of Rp 200,000,000,000 with interest rate at 9.70% per year, and with PT Bank Mega Tbk as trustee. On May 5, 2020, all of the bonds have been listed in the Indonesia Stock Exchange with a listed issuance cost of Rp 2,737,450,000.

The bonds were issued scripless and had a period of 370 days from the date of issuance. The bonds were offered at 100% (one hundred percent) of the principal amount. The interest will be paid every 3 (three) months in accordance with the schedule of bond interest payment date. The first interest payment was on August 4, 2020, while the final payment together with the amount of principal due on the bonds on May 14, 2021.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. EFEK UTANG YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Sesuai dengan perjanjian perwalianamanatan obligasi, Perusahaan memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen (Catatan 7) dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi ketentuan, yaitu maksimal 10:1. Selain itu, selama pokok obligasi belum dilunasi, Perusahaan tidak diperkenankan, antara lain melakukan penggabungan dan peleburan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama serta menjual atau mengalihkan lebih dari 25% aset Perusahaan.

Berdasarkan surat No. RC-231/PEF-DIR/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 dari Pemeringkat Efek Indonesia, peringkat "Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2018" adalah idBBB (Triple B) untuk periode sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020.

Berdasarkan surat No. RC-187/PEF-DIR/III/2020 tanggal 4 Maret 2020 dari Pemeringkat Efek Indonesia, peringkat "Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2018" adalah idBBB (Triple B) untuk periode tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021.

Berdasarkan surat No. RC-186/PEF-DIR/III/2020 tanggal 4 Maret 2020 dari Pemeringkat Efek Indonesia, peringkat "Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahun 2018" adalah idBBB (Triple B) untuk periode tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021.

Berdasarkan surat No. RC-232/PEF-DIR/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 dari Pemeringkat Efek Indonesia, peringkat "Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2017" adalah idBBB (Triple B) untuk periode sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020.

Berdasarkan surat No. RC-188/PEF-DIR/III/2020 tanggal 4 Maret 2020 dari Pemeringkat Efek Indonesia, peringkat "Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2017" adalah idBBB (Triple B) untuk periode tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020.

18. DEBT SECURITIES ISSUED (continued)

According to the trustee bonds agreement, the Company provides collateral with fiduciary transfer of consumer financing receivables (Note 7) and debt to equity ratio should not exceed the provision, at maximum 10:1. Moreover, during the time that the bonds principals are still outstanding, the Company is not allowed to, among others, conduct merger and consolidation unless performed on the same business, and sell or assign more than 25% of the Company's assets.

Based on letter No. RC-231/PEF-DIR/III/2019 dated March 12, 2019 of Credit Rating Indonesia, rating of "Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2018" is idBBB (Triple B) for the period March 12, 2019 to March 1, 2020.

Based on letter No. RC-187/PEF-DIR/III/2020 dated March 4, 2020 of Credit Rating Indonesia, rating of "Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2018" is idBBB (Triple B) for the period March 4, 2020 to March 1, 2021.

Based on letter No. RC-186/PEF-DIR/III/2020 dated March 4, 2020 of Credit Rating Indonesia, rating of "Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahun 2018" is idBBB (Triple B) for the period March 4, 2020 to March 1, 2021.

Based on letter No. RC-232/PEF-DIR/III/2019 dated March 12, 2019 of Credit Rating Indonesia, rating of "Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2017" is idBBB (Triple B) for the period March 12, 2019 to March 1, 2020.

Based on letter No. RC-188/PEF-DIR/III/2020 dated March 4, 2020 of Credit Rating Indonesia, rating of "Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2017" is idBBB (Triple B) for the period March 4, 2020 to May 5, 2020.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. SEWA

Perusahaan memiliki kontrak sewa untuk gedung kantor yang digunakan dalam operasinya. Gedung kantor memiliki jangka waktu sewa 2-5 tahun tanpa batasan atau perjanjian yang diberlakukan dan mencakup opsi perpanjangan dan pemutusan hubungan kerja. Pada tanggal 31 Desember 2020, nilai tercatat aset hak guna adalah sebesar Rp 11.993.366.407 (Catatan 12).

Perusahaan juga memiliki sewa kendaraan dengan jangka waktu 12 bulan atau kurang dan sewa peralatan kantor dengan nilai rendah. Perusahaan menerapkan "sewa jangka pendek" dan "sewa pengecualian aset bernilai rendah" untuk sewa ini.

Perubahan liabilitas sewa yang diakui dalam laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Saldo per 1 Januari 2020	10.624.294.896	As of January 1, 2020
Penambahan bunga	1.041.788.579	Accretion of interest
Penambahan	575.000.000	Additions
Pengukuran kembali atas perubahan pembayaran	327.206.624	Remeasurement due to changes in lease payments
Pembayaran		Payments
Pokok	(5.401.417.398)	Principal
Bunga	(861.718.816)	Interest
Saldo akhir	6.305.153.885	Ending balance
Lancar	2.622.416.428	Current
Tidak lancar	3.682.737.457	Non-current
Total	6.305.153.885	Total

Penambahan liabilitas sewa berasal dari perjanjian aset sewa baru pada periode berjalan yang memenuhi kriteria untuk diakui sebagai aset hak guna.

Kewajiban sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa yang direvisi menggunakan IBR pada tanggal efektif modifikasi. Rata-rata tertimbang dari kenaikan suku bunga pinjaman yang diterapkan Perusahaan adalah 11,40%.

19. LEASES

The Company has lease contracts for office buildings used in its operations. Office buildings have lease terms of 2-5 years with no restrictions or covenants imposed and includes extension and termination options. As of December 31, 2020, the carrying amounts of right-of-use assets amounted to Rp 11,993,366,407 (Note 12).

The Company also has certain lease of vehicles with lease term of 12 months or less and leases of office equipment with low value. The Company applies the "short-term lease" and "lease of low-value assets recognition exemptions" for these leases.

Movement of lease liabilities recognized in the statement of financial position as of December 31, 2020, are as follows:

The addition to lease liabilities comes from a new lease asset agreement in the current period that meets the criteria to be recognized as a right-of-use asset.

The lease liabilities were remeasured by discounting the revised lease payments using the IBR at the effective date of the modification. The weighted average of the Company's incremental borrowing rate applied is 11.40%.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. SEWA (lanjutan)

19. LEASES (continued)

Jumlah total yang diakui dalam laporan laba rugi terdiri dari:

Total amount recognized in profit or loss consists of the following:

	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	
Beban depresiasi atas aset hak guna (Catatan 12)	4.842.495.118	Depreciation expense of right-of-use assets (Note 12)
Beban yang berkaitan dengan sewa jangka pendek (Catatan 31)	2.528.987.710	Expense relating to short-term leases (Note 31)
Beban bunga atas kewajiban sewa (Catatan 29)	1.041.788.579	Interest expense on lease liabilities (Note 29)
Beban yang berkaitan dengan sewa aset bernilai rendah (Catatan 31)	<u>731.397.764</u>	Expense relating to lease of low-value assets (Note 31)
Total yang diakui dalam laba rugi	<u>9.144.669.171</u>	Total amount recognized in profit or loss

Analisis jatuh tempo dari liabilitas sewa diungkapkan pada Catatan 38.

The maturity analysis of lease liabilities are disclosed in Note 38.

Total arus kas keluar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 untuk semua kontrak sewa adalah sebesar Rp 9.523.521.688 yang termasuk beban sewa yang tidak diakui dalam liabilitas sewa. Penambahan non-tunai Perusahaan pada aset hak guna sebesar Rp 902.206.624 dan pada liabilitas sewa sebesar Rp 1.082.276.387 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

The total cash outflows for year ended December 31, 2020 for all lease contracts amounted to Rp 9,523,521,688 which is included rental expenses that are not recognized in the lease liability. The Company's non-cash additions to right-of-use assets amounted to Rp 902,206,624 and lease liabilities amounted to Rp 1,082,276,387 for the year ended December 31, 2020.

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA

20. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

Besarnya imbalan kerja dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003. Tidak terdapat pendanaan khusus yang disisihkan sehubungan dengan imbalan kerja tersebut.

The amount of employee benefits liabilities is determined based on the Labor Law No. 13 Year 2003 dated March 25, 2003. No funding of the benefits has been made to date.

Perhitungan aktuarial atas imbalan kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dilakukan oleh KKA Tubagus Syarifal dan Amran Nangasan, aktuaris independen, masing-masing tanggal 14 Januari 2021 dan 30 Januari 2020, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Actuarial valuation report on the employee benefits as of December 31, 2020 and 2019, was from KKA Tubagus Syarifal dan Amran Nangasan, independent actuary, dated January 14, 2021 and January 30, 2020, respectively, using the "Projected Unit Credit" method.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jumlah karyawan yang berhak atas manfaat pasca kerja tersebut masing-masing sebanyak 916 dan 814 karyawan (tidak diaudit).

As of December 31, 2020 and 2019, total employees who are entitled to these benefits are 916 and 814 employees, respectively (unaudited).

Liabilitas imbalan kerja pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The employees benefits liabilities presented in the statement of financial position are as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Nilai kini imbalan pasti	<u>23.606.315.221</u>	<u>20.531.766.911</u>	Present value of defined benefit obligation

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Rincian beban imbalan kerja yang diakui di dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Biaya jasa kini	3.388.600.041	3.195.993.085	Current service cost
Biaya bunga	1.190.329.187	959.662.958	Interest cost
Total	<u>4.578.929.228</u>	<u>4.155.656.043</u>	Total

Rincian beban imbalan kerja yang diakui di dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Pengukuran kembali:			Remeasurements:
Pengaruh perubahan asumsi keuangan	1.981.861.470	1.171.437.293	Effect of changes in financial assumptions
Pengaruh penyesuaian pengalaman	1.047.661.629	1.780.519.424	Effect of experience adjustments
Pengaruh perubahan asumsi demografi	(94.237.996)	-	Effect of changes in demographic assumptions
Total	<u>2.935.285.103</u>	<u>2.951.956.717</u>	Total

Mutasi liabilitas yang diakui di dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Saldo awal	20.531.766.911	15.053.536.600	Beginning balance
Beban tahun berjalan (Catatan 30)	4.578.929.228	4.155.656.043	Expense during the year (Note 30)
Kerugian aktuarial diakui pada penghasilan komprehensif lain	2.935.285.103	2.951.956.717	Actuarial loss recognized in other comprehensive income
Pembayaran imbalan tahun berjalan	(4.439.666.021)	(1.629.382.449)	Payment of employee benefits
Saldo akhir	<u>23.606.315.221</u>	<u>20.531.766.911</u>	Ending balance

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam perhitungan imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Tingkat diskonto per tahun	6,64%	7,73%	Discount rate per year
Tingkat kenaikan gaji rata-rata per tahun	6,00%	6,00%	Salary increase rate per year
Usia pensiun normal	55 tahun/ 55 years	55 tahun/ 55 years	Normal pension age
Tingkat mortalitas	TMI IV 2019	TMI III 2011	Mortality rate
Tingkat cacat	10% dari tingkat mortalitas/of mortality rate	10% dari tingkat mortalitas/of mortality rate	Disability rate
Tingkat pengunduran diri			Participants resignation rate
Usia:			Age:
18-29	10%	10%	18-29
30-39	5%	5%	30-39
40-44	3%	3%	40-44
45-49	2%	2%	45-49
50-54	1%	1%	50-54
>55	0%	0%	>55

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti per 31 Desember 2020 terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah:

	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation		
		Kenaikan asumsi/ Increase in Assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1,00%	Turun/Decrease 7,75%	Naik/Increase 8,29%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1,00%	Naik/Increase 8,48%	Turun/Decrease 7,52%	Salary growth rate

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode projected unit credit di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Perkiraan analisis jatuh tempo atas kewajiban imbalan pasti per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Antara 1-2 tahun/ Between 1-2 years	Antara 2-5 tahun/ Between 2-5 years	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years	Total/ Total	
Imbalan pasti	3.244.683.560	-	5.931.433.829	14.430.197.832	23.606.315.221	Defined benefits

Durasi rata-rata kewajiban imbalan pasti masing-masing sebesar 17,81 dan 18,14 tahun pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

20. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

The sensitivity of the defined benefit obligation as of December 31, 2020 to changes in the weighted principal assumptions is:

The sensitivity analyses are based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognized within the statement of financial position.

Expected maturity analysis of defined benefits obligation as of Desember 31, 2020 is presented below:

The weighted average duration of the defined benefit obligation is 17.81 and 18.14 years as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. MODAL SAHAM

21. SHARE CAPITAL

31 Desember 2020

December 31, 2020

Rincian pemegang saham Perusahaan berikut dengan kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan catatan yang dikelola oleh PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

The details of shareholders of the Company with their ownership as of Desember 31, 2020 based on the record maintained by PT Adimitra Jasa Korpora, the Securities Administration Agency, are as follows:

	Total Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Total Modal Saham/ Total Share Capital	
Nama pemegang saham				Name of shareholders
PT Batavia Prosperindo				PT Batavia Prosperindo
Internasional Tbk	1.324.988.580	74,33%	132.498.858.000	Internasional Tbk
Suzanna Tanojo	132.431.000	7,43%	13.243.100.000	Suzanna Tanojo
UOB Kay Hian Pte. Ltd., Singapura	107.575.819	6,03%	10.757.581.900	UOB Kay Hian Pte. Ltd., Singapore
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%):				Public (each below 5%):
Pemegang saham lokal	176.869.287	9,92%	17.686.928.700	Domestic shareholders
Pemegang saham asing	40.798.889	2,29%	4.079.888.900	Foreign shareholders
Total	1.782.663.575	100,00%	178.266.357.500	Total

31 Desember 2019

December 31, 2019

Rincian pemegang saham Perusahaan berikut dengan kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan catatan yang dikelola oleh PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

The details of shareholders of the Company with their ownership as of December 31, 2019 based on the record maintained by PT Adimitra Jasa Korpora, the Securities Administration Agency, are as follows:

	Total Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Total Modal Saham/ Total Share Capital	
Nama pemegang saham				Name of shareholders
PT Batavia Prosperindo				PT Batavia Prosperindo
Internasional Tbk	1.324.988.580	74,33%	132.498.858.000	Internasional Tbk
Suzanna Tanojo	132.431.000	7,43%	13.243.100.000	Suzanna Tanojo
UOB Kay Hian Pte. Ltd., Singapura	107.575.819	6,03%	10.757.581.900	UOB Kay Hian Pte. Ltd., Singapore
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%):				Public (each below 5%):
Pemegang saham lokal	180.242.787	10,11%	18.024.278.700	Domestic shareholders
Pemegang saham asing	37.425.389	2,10%	3.742.538.900	Foreign shareholders
Total	1.782.663.575	100,00%	178.266.357.500	Total

Berdasarkan pada Akta No. 57 tanggal 19 Juni 2019 dari Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perusahaan telah menetapkan kembali perubahan susunan pemegang saham dimana sesuai dengan daftar pemegang saham per tanggal 27 Mei 2019 yang disusun oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.

Based on Deed No. 57 dated June 19, 2019 of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notary in Jakarta, the Company has re-determined the change in the composition of shareholders which is in accordance with the register of shareholders as of May 27, 2019 compiled by PT Adimitra Jasa Korpora as the Company's Securities Administration Bureau.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
 Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2020 and 2019 and
 For the Years Then Ended
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. MODAL SAHAM (lanjutan)

Rekonsiliasi saham beredar pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Saldo awal	1.782.663.575	1.782.663.575
Penambahan	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo Akhir	<u>1.782.663.575</u>	<u>1.782.663.575</u>

21. SHARE CAPITAL (continued)

Reconciliation of outstanding shares as of December 31, 2020 and 2019 is as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Beginning balance	1.782.663.575	1.782.663.575
Issuance	<u>-</u>	<u>-</u>
Ending balance	<u>1.782.663.575</u>	<u>1.782.663.575</u>

22. TAMBAHAN MODAL DISETOR - NETO

Akun ini terdiri dari:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Tambahan modal disetor		
IPO	4.500.000.000	4.500.000.000
PUT I	144.250.840.000	144.250.840.000
PUT II	40.841.008.000	40.841.008.000
PUT III	80.029.790.000	80.029.790.000
	<u>269.621.638.000</u>	<u>269.621.638.000</u>
Biaya emisi saham		
IPO	(1.848.755.633)	(1.848.755.633)
PUT I	(1.327.322.217)	(1.327.322.217)
PUT II	(1.391.262.124)	(1.391.262.124)
PUT III	(1.739.907.118)	(1.739.907.118)
	<u>(6.307.247.092)</u>	<u>(6.307.247.092)</u>
Total		
IPO	2.651.244.367	2.651.244.367
PUT I	142.923.517.783	142.923.517.783
PUT II	39.449.745.876	39.449.745.876
PUT III	78.289.882.882	78.289.882.882
	<u>263.314.390.908</u>	<u>263.314.390.908</u>

22. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL - NET

This account consists of:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Paid-in capital		
IPO	4.500.000.000	4.500.000.000
PUT I	144.250.840.000	144.250.840.000
PUT II	40.841.008.000	40.841.008.000
PUT III	80.029.790.000	80.029.790.000
	<u>269.621.638.000</u>	<u>269.621.638.000</u>
Shares issuance costs		
IPO	(1.848.755.633)	(1.848.755.633)
PUT I	(1.327.322.217)	(1.327.322.217)
PUT II	(1.391.262.124)	(1.391.262.124)
PUT III	(1.739.907.118)	(1.739.907.118)
	<u>(6.307.247.092)</u>	<u>(6.307.247.092)</u>
Total		
IPO	2.651.244.367	2.651.244.367
PUT I	142.923.517.783	142.923.517.783
PUT II	39.449.745.876	39.449.745.876
PUT III	78.289.882.882	78.289.882.882
	<u>263.314.390.908</u>	<u>263.314.390.908</u>

23. DIVIDEN KAS

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang tercantum di dalam Akta Notaris No. 56 tanggal 19 Juni 2019 dari Christina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,M.Kn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp 30.002.227.962 yang diambil dari laba neto tahun 2018. Perusahaan telah membayarkan dividen tunai ini pada tanggal 5 Juli 2019.

23. CASH DIVIDENDS

Based on the Shareholders Annual General Meeting listed in Notarial Deed No. 56 dated June 19, 2019 of Christina Dwi Utami, SH, M.Hum., M.Kn., Notary in Jakarta, the shareholders approved the distribution of cash dividends amounting to Rp 30,002,227,962 taken from net income in 2018. The Company has paid dividends in cash on July 5, 2019.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. SALDO LABA

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 ("Undang-Undang") tentang Perusahaan Terbatas mengharuskan seluruh perusahaan untuk membuat penyisihan cadangan umum sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan penyisihan tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan tidak membentuk tambahan cadangan umum. Total cadangan umum Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp 250.000.000.

24. RETAINED EARNINGS

The Law No. 40 of 2007 (the "Law") regarding the Limited Liability Company requires the establishment of general reserve amounted to at least 20% of a company's issued and paid up capital. There is no set period of time over which this amount should be provided.

As of December 31, 2020 and 2019, the Company has not provided an additional general reserve. Total general reserve of the Company as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp 250,000,000.

25. LABA NETO PER SAHAM DASAR

Berikut ini mencerminkan laba neto dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan laba per saham dasar untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019:

25. BASIC EARNINGS PER SHARE

The following reflects net income and average number of shares outstanding used in the basic earnings per share computations for the years ended December 31, 2020 and 2019:

	Laba Neto/ Net Income	Jumlah Rata-rata Tertimbang Saham yang Beredar/ Average Number of Shares Outstanding	Nilai Laba per Saham/ Earnings per Share	
31 Desember 2020	41.262.495.245	1.782.663.575	23,15	December 31, 2020
31 Desember 2019	74.857.330.329	1.782.663.575	41,99	December 31, 2019

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif sehingga Perusahaan tidak menghitung laba per saham dilusian.

The Company has no outstanding dilutive potential ordinary shares, therefore, the Company has not calculated diluted earnings per share.

26. PENGHASILAN PEMBIAYAAN KONSUMEN NETO - 26. CONSUMER FINANCING INCOME - NET

	2020	2019	
Penghasilan pembiayaan konsumen - neto			Consumer financing income - net
Pihak ketiga	218.405.165.414	253.930.444.264	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 34)	-	197.000.427	Related party (Note 34)
Dikurangi:			Less:
Bagian pendapatan bank-bank sehubungan dengan transaksi pembiayaan bersama, penerusan pinjaman dan pengembalian piutang	<u>(21.950.064.904)</u>	<u>(15.937.904.658)</u>	Portion of income financed by banks in relation to joint financing, loan channeling and take over of receivables
Total	<u>196.455.100.510</u>	<u>238.189.540.033</u>	Total

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
 Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2020 and 2019 and
 For the Years Then Ended
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. PENGHASILAN PEMBIAYAAN KONSUMEN - NETO (lanjutan)

Penghasilan pembiayaan konsumen - neto merupakan penghasilan konsumen bruto dikurangi dengan biaya transaksi. Biaya transaksi merupakan pendapatan dan beban yang dapat diatribusikan secara langsung dengan transaksi sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen dan disajikan secara neto.

Biaya transaksi sehubungan dengan komisi keagenan asuransi diakui secara langsung di beban pemasaran dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain oleh Perusahaan dan tidak dicatat sebagai bagian dari penghasilan pembiayaan konsumen dan penghasilan sewa pembiayaan.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat penghasilan pembiayaan konsumen yang melebihi 10% dari jumlah penghasilan kepada satu konsumen saja.

26. CONSUMER FINANCING INCOME - NET (continued)

Consumer financing income - net represents consumer financing income less transaction costs. Transaction costs represent income and expenses directly attributable to the finance lease and the consumer financing transactions, and is presented on a net basis.

Transaction costs related to insurance agency commission are recognized immediately in marketing expenses in the statement of profit or loss and other comprehensive income of the Company and is not recorded as part of consumer financing income and finance lease income.

For the years ended December 31, 2020 and 2019, the Company has no consumer financing income in excess of 10% of total revenue to a single customer.

27. PENGHASILAN ADMINISTRASI

27. ADMINISTRATIVE INCOME

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Pihak ketiga			Third parties
Administrasi	73.829.947.255	84.520.903.084	Administrative
Denda	13.596.859.913	20.561.310.933	Penalties
Asuransi	4.432.791.800	6.544.040.126	Insurances
Subtotal	<u>91.859.598.968</u>	<u>111.626.254.143</u>	Subtotal
Pihak berelasi (Catatan 34)			Related party (Note 34)
Administrasi	<u>-</u>	<u>5.138.334</u>	Administrative
Total	<u>91.859.598.968</u>	<u>111.631.392.477</u>	Total

Penghasilan administrasi merupakan pendapatan yang berasal dari biaya administrasi yang dibayarkan nasabah pada saat perjanjian pembiayaan ditandatangani serta pendapatan bunga yang diakui pada saat restrukturisasi kontrak.

Administrative income represents income from the administrative fee paid by the customers at the time the financing contracts are signed and interest income recognized at the time of contract restructuring.

28. PENDAPATAN LAIN-LAIN - NETO

28. OTHER INCOME - NET

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Pihak ketiga			Third parties
Pendapatan dari pemulihan piutang yang dihapusbukkan	8.605.278.121	18.651.268.535	Income from recovery of previously written off receivables
Pendapatan keuangan	1.489.063.471	1.821.961.221	Finance income
Rugi penjualan aset tetap (Catatan 12)	<u>(485.070.472)</u>	<u>(187.370.511)</u>	Loss on sale of property and equipment (Note 12)
Subtotal	<u>9.609.271.120</u>	<u>20.285.859.245</u>	Subtotal
Pihak berelasi (Catatan 34)			Related party (Note 34)
Promosi	<u>600.000.000</u>	<u>675.000.000</u>	Promotion
Total	<u>10.209.271.120</u>	<u>20.960.859.245</u>	Total

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
 Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2020 and 2019 and
 For the Years Then Ended
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. BEBAN KEUANGAN

29. FINANCE EXPENSES

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Bunga atas efek utang yang diterbitkan (Catatan 18)	58.386.938.665	68.357.001.649	<i>Interest on debt securities issued (Note 18)</i>
Bunga dan beban transaksi atas utang bank	31.417.826.463	38.993.433.926	<i>Interest and transaction cost on bank loans</i>
Bunga atas liabilitas sewa (Catatan 19)	1.041.788.579	-	<i>Interest on lease liabilities (Note 19)</i>
Total	<u>90.846.553.707</u>	<u>107.350.435.575</u>	Total

30. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN

30. SALARIES AND ALLOWANCES EXPENSES

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Gaji dan tunjangan	92.950.522.476	91.905.825.988	<i>Salaries and allowances</i>
Imbalan kerja (Catatan 20)			<i>Employee benefits (Note 20)</i>
Pihak ketiga	4.259.679.228	3.654.406.043	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi (Catatan 34)	319.250.000	501.250.000	<i>Related parties (Note 34)</i>
Jamsostek	2.762.129.266	2.630.222.133	<i>Employee social security</i>
Pelatihan dan pendidikan	56.349.000	277.990.000	<i>Training and education</i>
Total	<u>100.347.929.970</u>	<u>98.969.694.164</u>	Total

Beban gaji dan tunjangan termasuk kompensasi yang diterima personil manajemen kunci (Catatan 34).

Salaries and allowances expenses include compensation received by the Company's key management personnel (Note 34).

31. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

31. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Administrasi	24.721.116.833	19.489.470.924	<i>Administrative</i>
Penyusutan aset tetap (Catatan 12)	16.041.973.584	10.293.745.110	<i>Depreciation of property and equipment (Note 12)</i>
Perlengkapan kantor	6.564.571.440	6.272.305.947	<i>Office supplies</i>
Transportasi	5.228.515.843	5.634.882.283	<i>Transportation</i>
Perbaikan dan perawatan	4.035.764.945	4.377.721.455	<i>Repair and maintenance</i>
Utilitas	3.920.913.757	4.435.544.743	<i>Utilities</i>
Honorarium tenaga ahli			<i>Professional fee</i>
Pihak ketiga	3.504.840.310	3.432.686.640	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi (Catatan 34)	180.000.000	180.000.000	<i>Related parties (Note 34)</i>
Sewa (Catatan 19)			<i>Rental (Note 19)</i>
Pihak ketiga	731.397.764	6.636.580.468	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi (Catatan 34)	2.528.987.710	3.753.089.390	<i>Related parties (Note 34)</i>
Telekomunikasi	2.451.817.333	3.582.400.820	<i>Telecommunication</i>
Amortisasi aset lain-lain (Catatan 13)	1.955.089.877	3.021.581.004	<i>Amortization of other assets (Note 13)</i>
Asuransi			<i>Insurances</i>
Pihak ketiga	576.646.122	833.574.500	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi (Catatan 34)	1.363.856.780	1.320.164.706	<i>Related party (Note 34)</i>
Logistik	1.370.466.830	1.884.505.963	<i>Logistic</i>
Perjalanan dinas	1.031.249.253	2.106.528.540	<i>Travelling</i>
Jamuan dan representasi	65.503.440	215.620.512	<i>Entertainment and representation</i>
Lain-lain (Catatan 12)	2.440.087.310	3.604.109.561	<i>Others (Note 12)</i>
Total	<u>78.712.799.131</u>	<u>81.074.512.566</u>	Total

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
 Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2020 and 2019 and
 For the Years Then Ended
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. KERUGIAN PENURUNAN NILAI

Merupakan penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas piutang sebagai berikut:

	2020	2019	
Piutang pembiayaan konsumen (Catatan 7)	19.965.052.094	24.218.082.060	Consumer financing receivables (Note 7)
Piutang sewa pembiayaan (Catatan 6)	1.275.680.335	1.805.208.888	Finance lease receivables (Note 6)
Tagihan anjak piutang (Catatan 8)	289.856.524	-	Factoring receivables (Note 8)
Piutang lain-lain (Catatan 9)	137.318.720	890.676.145	Other receivables (Note 9)
Total	21.667.907.673	26.913.967.093	Total

32. IMPAIRMENT LOSSES

Represent ECLs of the following receivables:

33. BEBAN PEMASARAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, beban pemasaran merupakan beban komisi kepada *showroom* dan *sales person* sehubungan dengan kegiatan pembiayaan masing-masing sebesar Rp 8.888.707.870 dan Rp 19.522.189.600.

33. MARKETING EXPENSES

For the years ended December 31, 2020 and 2019, marketing expenses represent commission to *showroom* and *sales person* in connection with financing operations amounting to Rp 8,888,707,870 and Rp 19,522,189,600, respectively.

34. SIFAT, SALDO, DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, baik kegiatan utama ataupun bukan kegiatan utama, Perusahaan melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak-pihak berelasi.

34. NATURE, BALANCES, AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In conducting its business, both its main activity or not, the Company entered into certain business and financial transactions with its related parties.

Sifat hubungan dan transaksi Perusahaan dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of relationship and transactions with related parties are as follows:

Pihak-pihak yang berelasi/ <i>Related parties</i>	Sifat dari hubungan/ <i>Nature of relationship</i>	Sifat dari transaksi/ <i>Nature of transaction</i>
PT Batavia Prosperindo Trans Tbk	Entitas sepengendali/ <i>Under common control entity</i>	Tagihan anjak piutang, penghasilan pembiayaan konsumen, beban sewa kendaraan, penghasilan pembiayaan <i>factoring</i> , penghasilan administrasi/ <i>Factoring receivables, consumer financing revenues, rent, factoring financing revenue, administrative income</i>
PT Batavia Prosperindo Properti	Entitas sepengendali/ <i>Under common control entity</i>	Sewa dibayar di muka, sewa/ <i>Prepaid rental, rent</i>
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk	Entitas sepengendali/ <i>Under common control entity</i>	Beban masih harus dibayar, penghasilan administrasi, asuransi/ <i>Accrued expenses, administrative income, insurance</i>
PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Honorarium tenaga ahli/ <i>Professional fees</i>

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. SIFAT, SALDO, DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi disajikan sebagai berikut:

a. Tagihan Anjak Piutang (Catatan 8)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
PT Batavia Prosperindo Trans Tbk	-	17.000.000.000
Persentase dari total aset	-	0,93%

Suku bunga efektif untuk fasilitas anjak piutang yang diberikan kepada PT Batavia Prosperindo Trans Tbk adalah sebesar 15,00% per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

b. Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka (Catatan 10)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Sewa dibayar di muka		
PT Batavia Prosperindo Properti	-	340.220.833
Persentase dari total aset	-	0,02%

Sewa dibayar di muka kepada PT Batavia Prosperindo Properti adalah uang muka yang dibayar sehubungan dengan sewa bangunan di cabang Tangerang, Pangkal Pinang dan Pare-pare.

c. Beban Masih Harus Dibayar (Catatan 16)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Premi asuransi		
PT Malacca Trust		
Wuwungan Insurance Tbk	57.745.482	76.181.266
Persentase dari total liabilitas	0,01%	0,01%

Beban masih harus dibayar kepada PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk adalah estimasi utang premi asuransi yang harus dibayarkan kepada PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk sehubungan dengan transaksi sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen.

Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk untuk melindungi alat berat dan kendaraan bermotor yang dibiayai oleh Perusahaan dari risiko kehilangan dengan kondisi pertanggungan asuransi *Total Loss Only* (Catatan 6 dan 7).

34. NATURE, BALANCES, AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Significant balances with related parties are as follows:

a. Factoring Receivables (Note 8)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
PT Batavia Prosperindo Trans Tbk	-	17.000.000.000
Persentase dari total aset	-	0,93%

Effective interest rate of factoring facilities given to PT Batavia Prosperindo Trans Tbk is 15.00% per year for the year ended December 31, 2019.

b. Advances and Prepaid Expenses (Note 10)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Sewa dibayar di muka		
PT Batavia Prosperindo Properti	-	340.220.833
Persentase dari total aset	-	0,02%

Prepaid rent to PT Batavia Prosperindo Properti is advance payment for building rental in Tangerang, Pangkal Pinang, and Pare-pare branch.

c. Accrued Expenses (Note 16)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Premi asuransi		
PT Malacca Trust		
Wuwungan Insurance Tbk	57.745.482	76.181.266
Persentase dari total liabilitas	0,01%	0,01%

Accrued expense to PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk is an estimation of insurance premium payable which has to be paid to PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk in relation to finance lease and consumer financing transactions.

The Company entered into agreements with PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk to insure the heavy equipment and vehicles financed by the Company which covers the risks of loss with insurance coverage of Total Loss Only (Notes 6 and 7).

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. SIFAT, SALDO, DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

34. NATURE, BALANCE, AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

d. Penghasilan (Catatan 26)

Pembiayaan

Konsumen

d. Consumer Financing Revenues (Note 26)

	2020	2019
PT Batavia Prosperindo Trans Tbk	-	197.000.427
Persentase dari total penghasilan	-	0,05%

PT Batavia Prosperindo Trans Tbk
Percentage to total revenues

e. Penghasilan Pembiayaan Anjak Piutang

e. Factoring Financing Revenues

	2020	2019
PT Batavia Prosperindo Trans Tbk	240.833.333	783.864.583
Persentase dari total penghasilan	0,07%	0,18%

PT Batavia Prosperindo Trans Tbk
Percentage to total revenues

f. Penghasilan Administrasi (Catatan 27)

f. Administrative Income (Note 27)

	2020	2019
PT Batavia Prosperindo Trans Tbk	-	5.138.334
Persentase dari total penghasilan	-	0,00%

PT Batavia Prosperindo Trans Tbk
Percentage to total revenues

g. Pendapatan Lain-lain (Catatan 28)

g. Other Income (Note 28)

	2020	2019
Promosi		
PT Malacca Trust		
Wuwungan Insurance Tbk	600.000.000	675.000.000
Persentase dari total penghasilan	0,17%	0,16%

Promotion
PT Malacca Trust
Wuwungan Insurance Tbk
Percentage to total revenues

h. Beban Umum dan Administrasi (Catatan 31)

h. General and Administrative Expenses (Note 31)

	2020	2019
<u>Sewa</u>		
PT Batavia Prosperindo Trans Tbk	2.528.987.710	3.558.014.390
PT Batavia Prosperindo Properti	-	195.075.000
<u>Asuransi</u>		
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk	1.363.856.780	1.320.164.706
<u>Honorarium tenaga ahli</u>		
PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk	180.000.000	180.000.000
Total	4.072.844.490	5.253.254.096
Persentase dari total beban usaha	1,36%	1,57%

Rental
PT Batavia Prosperindo Trans Tbk
PT Batavia Prosperindo Properti
Insurance
PT Malacca Trust
Wuwungan Insurance Tbk
Professional fee
PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk
Total
Percentage to total operating expenses

i. Kompensasi personel manajemen kunci

i. Compensation of key management personnel

	2020	2019
<u>Kompensasi yang dibayarkan kepada personil manajemen kunci</u>		
Gaji dan tunjangan	17.161.874.000	16.337.800.000
Imbalan kerja	319.250.000	501.250.000
Total	17.481.124.000	16.839.050.000
Persentase dari total beban usaha	5,82%	5,04%

Compensation paid to key management personnel
Salaries and allowances
Employee benefits
Total
Percentage to total operating expenses

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Pembiayaan bersama

Pihak ketiga

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Notaris No. 02 tanggal 6 Maret 2018 dari Indrasari Kresnadajaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan konsumen berupa kendaraan sebesar Rp 200.000.000.000 yang bersifat *Non-revolving*. Jangka waktu fasilitas pembiayaan bersama tersebut selama 48 (empat puluh delapan) bulan. Fasilitas tersebut dijamin dengan deposito yang dimiliki Perusahaan (Catatan 5). Besarnya porsi pembiayaan masing-masing kreditur dalam pemberian Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) adalah 95,00% untuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai pihak pertama dan 5,00% untuk PT Batavia Prosperindo Finance Tbk sebagai pihak kedua.

Berdasarkan Akta Notaris No. 12 tanggal 15 Agustus 2019 dari Indrasari Kresnadajaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan konsumen berupa kendaraan sebesar Rp 400.000.000.000 yang bersifat *Non-revolving*. Jangka waktu penarikan selama 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021. Fasilitas tersebut dijamin dengan kendaraan bermotor yang dibiayai. Besarnya porsi pembiayaan masing-masing kreditur dalam pemberian Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) adalah 95,00% untuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai pihak pertama dan 5,00% untuk PT Batavia Prosperindo Finance Tbk sebagai pihak kedua.

Fasilitas ini dikenakan bunga masing-masing sebesar 10,50% - 11,75% dan 10,50% - 12,50% per tahun untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019.

Jumlah piutang pembiayaan konsumen Perusahaan yang dibiayai oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 220.872.796.000 dan Rp 195.691.355.000 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jumlah keseluruhan pokok yang dibiayai oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan perjanjian fasilitas dan pembiayaan ini adalah masing-masing sebesar Rp 153.903.100.675 dan Rp 158.373.894.645.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian pembiayaan bersama ini.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS

Joint financing

Third parties

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Based on Notarial Deed No. 02 dated March 6, 2018 of Indrasari Kresnadajaja, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the Company and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk agreed to provide Non-revolving joint financing of vehicles amounting to Rp 200,000,000,000. The term of the joint financing facility is 48 (forty eight) months. This facility is collateralized by time deposit owned by the Company (Note 5). The allocated portion for each creditor of this consumer Joint Financing facility is 95.00% for PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as first party and 5.00% for PT Batavia Prosperindo Finance Tbk as second party.

Based on Notarial Deed No. 12 dated August 15, 2019 from Indrasari Kresnadajaja, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the Company and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk agreed to provide a consumer financing facility in the form of a vehicle of Rp 400,000,000,000 which is non-revolving. The term of the installment is 24 (twenty four) months until August 15, 2021. These facilities are collateralized by financed motor vehicles. The allocated portion of this Consumer Financing Facility for each creditor in granting the KKB is 95.00% for PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as first party and 5.00% for PT Batavia Prosperindo Finance Tbk as second party.

The facility bears interest rate of 10.50% - 11.75% and 10.50% - 12.50% per year for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively.

The Company's total consumer financing receivables financed by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 220,872,796,000 and Rp 195,691,355,000 as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

As of December 31, 2020 and 2019, the total principal amount financed by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk with respect to these joint financing agreements amounted to Rp 153,903,100,675 and Rp 158,373,894,645, respectively.

As of December 31, 2020 and 2019, the Company has complied with all the requirements mentioned in this joint financing agreement.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Pihak ketiga (lanjutan)

PT Bank MNC Internasional Tbk

Berdasarkan Akta Notaris No. 95 tanggal 15 September 2015 dari Ariani L. Rachim, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank MNC Internasional Tbk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama. Porsi keseluruhan pembiayaan bersama adalah sebesar Rp 50.000.000.000. Jangka waktu fasilitas ini berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerjasama ini sampai dengan tanggal 15 September 2021.

Berdasarkan Akta Notaris No. 81 tanggal 29 September 2016 dari Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank MNC Internasional Tbk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama. Porsi keseluruhan pembiayaan bersama adalah sebesar Rp 50.000.000.000. Jangka waktu fasilitas ini berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerjasama ini sampai dengan tanggal 29 Maret 2022 dan jangka waktu pencairan selama 6 bulan. Besarnya porsi pembiayaan masing-masing kreditur dalam pemberian Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) adalah 99,00% untuk PT Bank MNC Internasional Tbk sebagai pihak pertama dan 1,00% untuk PT Batavia Prosperindo Finance Tbk sebagai pihak kedua.

Berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama tersebut di atas, fasilitas tersebut dikenakan bunga sebesar 12,00% per tahun.

Jumlah piutang pembiayaan konsumen Perusahaan yang dibiayai oleh PT MNC Internasional Tbk masing-masing sebesar nil dan Rp 34.800.000 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jumlah keseluruhan pokok yang dibiayai oleh PT Bank MNC Internasional Tbk sehubungan dengan perjanjian fasilitas dan pembiayaan ini adalah masing-masing sebesar nil dan Rp 31.282.004.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Third parties (continued)

PT Bank MNC Internasional Tbk

Based on Notarial Deed No. 95 dated September 15, 2015 of Ariani L. Rachim, SH., Notary in Jakarta, the Company and PT Bank MNC Internasional Tbk signed a Joint Financing Cooperation Agreement. The aggregate portion of the joint financing amounted to Rp 50,000,000,000. The term of this facility is effective since the date of the signing date of this joint financing agreement up to September 15, 2021.

Based on Notarial Deed No. 81 dated September 29, 2016 of Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the Company and PT Bank MNC Internasional Tbk signed a Joint Financing Cooperation Agreement. The aggregate portion of the joint financing amounted to Rp 50,000,000,000. The term of this facility is effective since the date of the signing date of this joint financing agreement up to March 29, 2022 and the drawdown period is 6 months. The allocated portion for each creditor of this consumer Joint Financing facility is 99.00% for PT Bank MNC Internasional Tbk as first party and 1.00% for PT Batavia Prosperindo Finance Tbk as second party.

Based on the above joint financing agreement, the facility bears interest rate at 12.00% per year.

The Company's total consumer financing receivables financed by PT Bank MNC Internasional Tbk amounted to nil and Rp 34,800,000 as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

As of December 31, 2020 and 2019, the total principal amount financed by PT Bank MNC Internasional Tbk with respect to these joint financing agreements amounted to nil and Rp 31,282,004, respectively.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Pihak ketiga (lanjutan)

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Berdasarkan perjanjian kerjasama No. 2572/PKS/JF/V/2020 tanggal 29 Mei 2020, Perusahaan dan PT Bank CIMB Niaga Tbk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama. PT Bank CIMB Niaga Tbk memberikan fasilitas pembiayaan bersama dengan jumlah maksimum sebesar Rp 50.000.000.000 bersifat *revolving* dengan maksimal pembiayaan bersama bagi setiap debitur sebesar Rp 1.000.000.000 untuk pembiayaan mobil. Porsi pembiayaan bersama adalah maksimum 80% untuk PT Bank CIMB Niaga Tbk dan minimum 20% untuk Perusahaan. Jangka waktu penarikan fasilitas pembiayaan bersama adalah 1 (satu) tahun dan jangka waktu fasilitas pembiayaan bersama kepada debitur maksimal 5 (lima) tahun untuk mobil baru dan 3 (tiga) tahun untuk mobil bekas.

Sampai dengan pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan belum melakukan penarikan fasilitas pembiayaan tersebut.

PT Bank J TRUST Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Notaris No. 43 tanggal 22 Mei 2015 dari Indrasari Kresnadjaja, S.H., MKn., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank J TRUST Indonesia Tbk setuju untuk melakukan kerjasama atas pembiayaan bersama kredit kendaraan bermotor. Porsi keseluruhan pembiayaan bersama adalah sebesar Rp 150.000.000.000. Jangka waktu penarikan fasilitas tersebut adalah 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan perjanjian. Jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 60 bulan sampai dengan 22 Mei 2020. Fasilitas pembiayaan bersama ini dikenakan bunga tetap sebesar 14,50% per tahun.

Dalam setiap fasilitas, kedua belah pihak sepakat untuk menyediakan fasilitas pembiayaan bersama untuk nasabah, dimana Perusahaan bertindak sebagai Manajer Fasilitas dan/atau Manajer Jaminan dari PT Bank J TRUST Indonesia Tbk. Jumlah porsi pembiayaan untuk Perusahaan minimum sebesar 1% dan PT Bank J TRUST Indonesia Tbk maksimum sebesar 99% dari jumlah fasilitas pembiayaan yang disediakan kepada setiap nasabah.

Fasilitas tersebut bersifat *Non-revolving* serta dijamin dengan kendaraan bermotor yang dibiayai dan diikat secara fidusia serta Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) milik nasabah yang disimpan di PT Bank J TRUST Indonesia Tbk.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Third parties (continued)

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Based on cooperation agreement No. 2572/PKS/JF/V/2020 dated May 29, 2020, the Company and PT Bank CIMB Niaga Tbk signed a Joint Financing Facility Cooperation Agreement. PT Bank CIMB Niaga Tbk provides a joint financing facility with a maximum amount of Rp 50,000,000,000,000 revolving with a maximum of joint financing for each debtor amounting to Rp 1,000,000,000 for car financing. The share of joint financing is a maximum of 80% for PT Bank CIMB Niaga Tbk and a minimum of 20% for the Company. The withdrawal period of the joint financing facility is 1 (one) year and the term of the joint financing facility to the debtor is a maximum of 5 (five) years for new cars and 3 (three) years for used cars.

As of December 31, 2020, the Company has not withdrawn the financing facility.

PT Bank J TRUST Indonesia Tbk

Based on Notarial Deed No. 43 dated May 22, 2015 of Indrasari Kresnadjaja, S.H., Mkn., Notary in Jakarta, the Company and PT Bank J TRUST Indonesia Tbk agreed to provide joint financing agreement of credit on vehicles. The aggregate portion of the joint financing amounted to Rp 150,000,000,000. The term of facility drawdown is 12 (twelve) months since the signing date of the agreement. The term of this joint financing agreement is valid for a period of 60 months until May 22, 2020. This joint financing facility bears interest at fixed rate of 14.50% per year.

In each facility, both parties agreed to provide joint financing facilities to consumers, whereby the Company acts as Facility Manager and/or Security Manager of PT Bank J TRUST Indonesia Tbk. The financing portion for the Company is 1% at minimum and PT Bank J TRUST Indonesia Tbk is 99% at maximum of the financing facilities provided to each customer.

Facility is *Non-revolving* loan for each drawdown and secured by fiduciary transfer of financed vehicles and customer's Certificate of Ownership of Motor Vehicle under custody of PT Bank J TRUST Indonesia Tbk.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Pihak ketiga (lanjutan)

PT Bank J TRUST Indonesia Tbk (lanjutan)

Fasilitas tersebut dikenakan bunga sebesar 12,50% per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah piutang pembiayaan konsumen Perusahaan yang dibiayai oleh PT Bank J TRUST Indonesia Tbk sebesar Rp 33.450.000 pada tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah keseluruhan pokok yang dibiayai oleh PT Bank J TRUST Indonesia Tbk sehubungan dengan perjanjian fasilitas pembiayaan ini adalah sebesar Rp 31.970.977.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas pembiayaan bersama ini.

Perusahaan telah melunasi fasilitas ini pada tanggal 27 Maret 2020.

Asuransi

Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi untuk melindungi kendaraan bermotor yang dibiayai oleh Perusahaan, antara lain dari risiko kehilangan dan kerusakan, dengan kondisi pertanggungan asuransi komprehensif dan *Total Loss Only* (Catatan 6 dan 7). Perusahaan asuransi tersebut adalah PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, PT Asuransi Sinar Mas, PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk dan PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika.

36. SEGMENT OPERASI

Segmen operasi Perusahaan merupakan aliran pedapatan yang terdiri dari sewa pembiayaan, pembiayaan konsumen dan anjak piutang. Segmen operasi dilaporkan sesuai dengan laporan internal yang disiapkan untuk pengambil keputusan operasional yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya kesegmen tertentu dan melakukan penilaian atas performanya.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Third parties (continued)

PT Bank J TRUST Indonesia Tbk (continued)

The facility bears interest rate of 12.50% per year for the year ended December 31, 2019.

The Company's total consumer financing receivables financed by PT Bank J TRUST Indonesia Tbk amounted to Rp 33,450,000 as of December 31, 2019.

As of December 31, 2019, the total principal amount financed by PT Bank J TRUST Indonesia Tbk with respect to these joint financing agreements amounted to Rp 31,970,977.

As of December 31, 2019, the Company has complied with all the requirements mentioned in this joint financing facility agreement.

The Company has repaid this facility on March 27, 2020.

Insurance

The Company entered into agreements with several insurance companies to insure the vehicles financed by the Company which covers, among others, the risks of loss and damages, with insurance coverage of *Comprehensive and Total Loss Only* (Notes 6 and 7). The insurance companies are PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, PT Asuransi Sinar Mas, PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk and PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika.

36. OPERATING SEGMENTS

The Company's operating segments represent revenue streams consisting of finance lease, consumer financing and factoring. Operating segments are reported in accordance with the internal reporting provided to the chief operating decision maker, which is responsible for allocating resources to the reportable segments and assesses its performance.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
 Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2020 and 2019 and
 For the Years Then Ended
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Informasi mengenai hasil dari masing-masing pelaporan segmen disajikan di bawah ini sebagaimana termasuk dalam laporan internal manajemen yang ditelaah oleh manajemen Perusahaan. Keuntungan segmen digunakan untuk mengukur kinerja dimana manajemen berkeyakinan bahwa informasi tersebut paling relevan dalam mengevaluasi hasil segmen tersebut relatif terhadap entitas lain yang beroperasi dalam industri tersebut.

36. OPERATING SEGMENTS (continued)

Information regarding the results of each reportable segment is presented below as included in the internal management reports that are reviewed by the Company's management. Segment profit is used to measure performance of that business segment as management believes that such information is the most relevant in evaluating the results of those segments relative to other entities that operate within these industries.

31 Desember 2020/December 31, 2020						
	Sewa Pembiayaan/ Finance Lease	Pembiayaan Konsumen/ Consumer Financing	Anjak Piutang/ Factoring	Tidak Dapat Dialokasikan/ Unallocated	Total/ Total	
PENGHASILAN						REVENUES
Penghasilan segmen	40.957.378.606	196.455.100.510	14.536.235.632	-	251.948.714.748	Segment revenues
Penghasilan tidak dapat dialokasikan	-	-	-	91.859.598.968	91.859.598.968	Unallocated revenues
Penghasilan lainnya	-	-	-	10.209.271.120	10.209.271.120	Other income
Total penghasilan	40.957.378.606	196.455.100.510	14.536.235.632	102.068.870.088	354.017.584.836	Total revenue
BEBAN						EXPENSES
Beban tidak dapat dialokasikan	-	-	-	(300.463.898.351)	(300.463.898.351)	Unallocated expenses
Laba (rugi) sebelum pajak	40.957.378.606	196.455.100.510	14.536.235.632	(198.395.028.263)	53.553.686.485	Income (loss) before income taxes
Pajak penghasilan	-	-	-	(12.291.191.240)	(12.291.191.240)	Income taxes
Laba (rugi) neto tahun berjalan	40.957.378.606	196.455.100.510	14.536.235.632	(210.686.219.503)	41.262.495.245	Income (loss) for the year
Rugi komprehensif lain	-	-	-	(2.480.398.570)	(2.480.398.570)	Other comprehensive loss
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	40.957.378.606	196.455.100.510	14.536.235.632	(213.166.618.073)	38.782.096.675	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
ASET						ASSETS
Total aset dapat dialokasikan	240.898.353.833	849.060.792.020	66.301.809.143	-	1.156.260.954.996	Total allocated assets
Total aset tidak dapat dialokasikan	-	-	-	316.381.397.946	316.381.397.946	Total unallocated assets
LIABILITAS						LIABILITIES
Total liabilitas tidak dapat dialokasikan	-	-	-	613.538.953.451	613.538.953.451	Total unallocated liabilities

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

36. OPERATING SEGMENTS (continued)

		31 Desember 2019/December 31, 2019					
		Sewa Pembiayaan/ Finance Lease	Pembiayaan Konsumen/ Consumer Financing	Anjak Piutang/ Factoring	Tidak Dapat Dialokasikan/ Unallocated	Total/ Total	
PENGHASILAN							REVENUES
Penghasilan segmen	43.404.804.666	238.189.540.033	16.740.316.461	-	298.334.661.160	Segment revenues	
Penghasilan tidak dapat dialokasikan	-	-	-	111.631.392.477	111.631.392.477	Unallocated revenues	
Penghasilan lainnya	-	-	-	20.960.859.245	20.960.859.245	Other income	
Total penghasilan	43.404.804.666	238.189.540.033	16.740.316.461	132.592.251.722	430.926.912.882	Total revenue	
BEBAN							EXPENSES
Beban tidak dapat dialokasikan	-	-	-	(333.830.798.998)	(333.830.798.998)	Unallocated expenses	
Laba (rugi) sebelum pajak	43.404.804.666	238.189.540.033	16.740.316.461	(201.238.547.276)	97.096.113.884	Income (loss) before income taxes	
Pajak penghasilan	-	-	-	(22.238.783.555)	(22.238.783.555)	Income taxes	
Laba (rugi) neto tahun berjalan	43.404.804.666	238.189.540.033	16.740.316.461	(223.477.330.831)	74.857.330.329	Income (loss) for the year	
Laba komprehensif lain	-	-	-	2.915.520.909	2.915.520.909	Other comprehensive income	
TOTAL LABA (RUGI) KOMPRESIF	43.404.804.666	238.189.540.033	16.740.316.461	(220.561.809.922)	77.772.851.238	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)	
ASET							ASSETS
Total aset dapat dialokasikan	281.854.472.303	1.132.423.264.728	131.899.822.001	-	1.546.177.559.032	Total allocated assets	
Total aset tidak dapat dialokasikan	-	-	-	275.448.080.942	275.448.080.942	Total unallocated assets	
LIABILITAS							LIABILITIES
Total liabilitas tidak dapat dialokasikan	-	-	-	1.002.298.779.342	1.002.298.779.342	Total unallocated liabilities	

Perusahaan juga mengidentifikasi segmen yang dilaporkan berdasarkan wilayah geografis. Beberapa wilayah yang memiliki karakteristik serupa, diintegrasikan dan dievaluasi secara berkala oleh manajemen Perusahaan. Laba dari masing-masing segmen digunakan untuk menilai kinerja masing-masing segmen. Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha utama disajikan sebagai berikut:

The Company also identified its segments reported based on geographic area. Some areas that have similar characteristics, aggregated and evaluated regularly by Company's management. Profit from each segment is used to measure the performance of each segment. Information concerning the main segments was set out as follows:

		31 Desember 2020/December 31, 2020							
		Jawa/ Java	Kalimantan/ Borneo	Sumatera/ Sumatera	Sulawesi/ Sulawesi	Maluku/ Maluku	Papua/ Papua	Total/ Total	
Aset	803.924.841.333	188.432.569.358	350.742.454.563	90.735.763.032	19.275.644.351	19.531.080.305	1.472.642.352.942	Assets	
Liabilitas	334.934.822.986	78.505.633.883	146.127.916.309	37.802.746.186	8.030.706.599	8.137.127.488	613.538.953.451	Liabilities	
Penghasilan	139.460.961.222	60.330.732.296	110.789.884.260	27.038.364.170	7.369.053.406	9.028.589.482	354.017.584.836	Revenues	
Beban	(118.364.131.816)	(51.204.255.926)	(94.030.245.808)	(22.948.160.350)	(6.254.306.589)	(7.662.797.862)	(300.463.898.351)	Expenses	
Laba (rugi) sebelum beban pajak	21.096.829.406	9.126.476.370	16.759.638.452	4.090.203.820	1.114.746.817	1.365.791.620	53.553.686.485	Income before income tax expenses	
Beban pajak penghasilan	(4.841.966.660)	(2.094.632.020)	(3.846.531.117)	(938.749.145)	(255.847.304)	(313.464.994)	(12.291.191.240)	Income tax expenses	
Laba (rugi) neto tahun berjalan	16.254.862.746	7.031.844.350	12.913.107.335	3.151.454.675	858.899.513	1.052.326.626	41.262.495.245	Income (loss) for the year	
Rugi komprehensif lain	(2.480.398.570)	-	-	-	-	-	(2.480.398.570)	Other comprehensive loss	
Total laba komprehensif	13.774.464.176	7.031.844.350	12.913.107.335	3.151.454.675	858.899.513	1.052.326.626	38.782.096.675	Total comprehensive income	

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

36. OPERATING SEGMENTS (continued)

31 Desember 2020/December 31, 2020								
Jawa/ Java	Kalimantan/ Borneo	Sumatera/ Sumatera	Sulawesi/ Sulawesi	Maluku/ Maluku	Papua/ Papua	Total/ Total		
Penambahan aset tetap	3.624.392.358	641.667.532	2.375.836.158	168.760.659	342.367.855	6.934.000	7.159.958.562	Acquisition of property and equipment
Beban penyusutan	10.765.037.481	1.192.146.480	2.673.383.047	893.452.997	266.523.293	251.430.286	16.041.973.584	Depreciation expenses
Aset tidak lancar selain instrumen keuangan dan aset pajak tangguhan	-	-	-	-	-	-	135.097.009.541	Non-current assets other than financial instruments and deferred tax assets
31 Desember 2019/ December 31, 2019								
Jawa/ Java	Kalimantan/ Borneo	Sumatera/ Sumatera	Sulawesi/ Sulawesi	Maluku/ Maluku	Papua/ Papua	Total/ Total		
Aset	807.078.022.616	281.324.185.695	572.586.850.624	136.094.057.377	10.153.554.841	14.388.968.821	1.821.625.639.974	Assets
Liabilitas	909.985.298.095	28.640.734.434	62.614.193.274	230.728.959	293.854.633	533.969.947	1.002.298.779.342	Liabilities
Penghasilan	200.515.818.483	68.531.282.601	123.204.971.180	26.647.806.510	5.766.739.852	6.260.294.256	430.926.912.882	Revenues
Beban	(229.452.812.176)	(29.610.041.518)	(54.075.219.377)	(15.339.522.852)	(2.385.443.749)	(2.967.759.326)	(333.830.798.998)	Expenses
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan	(28.936.993.693)	38.921.241.083	69.129.751.803	11.308.283.658	3.381.296.103	3.292.534.930	97.096.113.884	Income before income tax expenses
Beban pajak penghasilan	6.627.696.465	(8.914.476.915)	(15.833.399.950)	(2.590.036.464)	(774.448.225)	(754.118.466)	(22.238.783.555)	Income tax expenses
Laba (rugi) neto tahun berjalan	(22.309.297.228)	30.006.764.168	53.296.351.853	8.718.247.194	2.606.847.878	2.538.416.464	74.857.330.329	Income (loss) for the year
Penghasilan komprehensif lain	2.915.520.909	-	-	-	-	-	2.915.520.909	Other comprehensive income
Total laba (rugi) komprehensif	(19.393.776.319)	30.006.764.168	53.296.351.853	8.718.247.194	2.606.847.878	2.538.416.464	77.772.851.238	Total comprehensive income (loss)
Penambahan aset tetap	16.085.663.048	1.079.790.005	1.515.974.301	514.355.295	9.200.000	20.320.000	19.225.302.649	Acquisition of property and equipment
Beban penyusutan	6.931.354.179	764.107.158	1.852.925.702	574.468.321	93.647.804	77.241.946	10.293.745.110	Depreciation expenses
Aset tidak lancar selain instrumen keuangan dan aset pajak tangguhan	-	-	-	-	-	-	130.193.259.574	Non-current assets other than financial instruments and deferred tax assets

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

37. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini adalah perbandingan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan yang dicatat di laporan keuangan:

37. FINANCIAL INSTRUMENTS

The table below is a comparison by class of the carrying amounts and fair value of the Company's financial instruments that are carried in the financial statements:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020		
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar/ Fair Value	
ASET KEUANGAN			FINANCIAL ASSETS
Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi:			Financial assets at amortized cost:
Kas dan setara kas	60.089.895.013	60.089.895.013	Cash and cash equivalents
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	500.000.000	500.000.000	Restricted time deposits
Piutang sewa pembiayaan - pihak ketiga	240.898.353.833	240.898.353.833	Finance lease receivables - third parties
Piutang pembiayaan konsumen - pihak ketiga	849.060.792.020	849.060.792.020	Consumer financing receivables - third parties
Tagihan anjak piutang - pihak ketiga	66.301.809.143	66.301.809.143	Factoring receivables - third parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga	100.017.731.265	100.017.731.265	Other receivables - third parties
Aset lain-lain - jaminan sewa	1.223.490.200	1.223.490.200	Other assets - rental deposits
Aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain:			Financial assets at fair value through other comprehensive income:
Investasi saham	15.000.171.500	15.000.171.500	Investment in shares
Total aset keuangan	<u>1.333.092.242.974</u>	<u>1.333.092.242.974</u>	Total financial assets
LIABILITAS KEUANGAN			FINANCIAL LIABILITIES
Liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi:			Financial liabilities at amortized cost:
Utang bank	142.365.662.689	142.365.662.689	Bank loans
Pinjaman pihak ketiga	7.538.220.471	7.538.220.471	Third party loan
Beban masih harus dibayar			Accrued expenses
Pihak ketiga	20.071.148.644	20.071.148.644	Third parties
Pihak berelasi	57.745.482	57.745.482	Related party
Efek utang yang diterbitkan	404.911.810.938	404.911.810.938	Debt securities issued
Liabilitas sewa	6.305.153.885	6.305.153.885	Lease liabilities
Total liabilitas keuangan	<u>581.249.742.109</u>	<u>581.249.742.109</u>	Total financial liabilities

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

37. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

37. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

	31 Desember 2019/ December 31, 2019		
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar/ Fair Value	
ASET KEUANGAN			FINANCIAL ASSETS
Pinjaman dan piutang:			Loans and receivables:
Kas dan setara kas	31.082.493.692	31.082.493.692	Cash and cash equivalents
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	500.000.000	500.000.000	Restricted time deposits
Piutang sewa pembiayaan - pihak ketiga	281.854.472.303	281.854.472.303	Finance lease receivables - third parties
Piutang pembiayaan konsumen - pihak ketiga	1.132.423.264.728	1.132.423.264.728	Consumer financing receivables - third parties
Tagihan anjak piutang Pihak ketiga	114.899.822.001	114.899.822.001	Factoring receivables Third parties
Pihak berelasi	17.000.000.000	17.000.000.000	Related party
Piutang lain-lain - pihak ketiga	86.222.736.111	86.222.736.111	Other receivables - third parties
Aset lain-lain - jaminan sewa	1.223.490.200	1.223.490.200	Other assets - rental deposits
Aset keuangan tersedia untuk dijual:			Available for sale financial assets:
Investasi saham	15.484.048.000	15.484.048.000	Investment in shares
Total aset keuangan	1.680.690.327.035	1.680.690.327.035	Total financial assets
LIABILITAS KEUANGAN			FINANCIAL LIABILITIES
Liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi:			Financial liabilities measured at amortized cost:
Utang bank	345.024.383.717	345.024.383.717	Bank loans
Pinjaman pihak ketiga	6.524.510.048	6.524.510.048	Third party loan
Beban masih harus dibayar Pihak ketiga	21.628.749.491	21.628.749.491	Accrued expenses Third parties
Pihak berelasi	76.181.266	76.181.266	Related party
Efek utang yang diterbitkan	597.535.836.158	597.535.836.158	Debt securities issued
Total liabilitas keuangan	970.789.660.680	970.789.660.680	Total financial liabilities

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar:

- Untuk kas dan setara kas, piutang sewa pembiayaan, piutang pembiayaan konsumen, tagihan anjak piutang, piutang lain-lain dan beban masih harus dibayar nilai tercatatnya telah mendekati estimasi nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek.
- Untuk utang bank dan pinjaman pihak ketiga nilai wajar mendekati nilai tercatat karena tingkat suku bunganya dinilai ulang secara berkala.
- Nilai wajar dari efek utang yang diterbitkan ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa datang yang disesuaikan untuk mencerminkan risiko kredit Perusahaan menggunakan suku bunga pasar.

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value:

- The carrying amount of cash and cash equivalents, finance lease receivables, consumer financing receivables, factoring receivables, other receivables, and accrued expenses approximate their estimated fair market values due to the short-term nature of the transaction.
- The value of bank loans and third party loan normally recorded approximately their carrying values largely due to their interest rates are frequently repriced.
- Fair value of debt securities issued are determined based on discounted future cash flows adjusted to reflect the Company's credit risk using market rates.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
 Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2020 and 2019 and
 For the Years Then Ended
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

37. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

- Untuk deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya dan aset lain-lain - jaminan sewa nilai wajarnya dicatat secara historis karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal dan tidak praktis untuk mengestimasi nilai wajar dari aset tersebut karena tidak ada jangka waktu penerimaan yang pasti.
- Liabilitas sewa diukur sebesar nilai kini dari pembayaran kontraktual lessor selama masa sewa, dengan tingkat diskonto yang ditentukan dengan mengacu pada tarif implisit dalam sewa kecuali hal ini tidak dapat segera ditentukan, dalam hal ini, bunga pinjaman inkremental Perusahaan saat dimulainya sewa digunakan.

Estimasi Nilai Wajar

Tabel di bawah ini menganalisis instrumen keuangan yang dicatat pada nilai wajar berdasarkan tingkatan metode penilaian. Perbedaan pada setiap tingkatan metode penilaian dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tingkat 1: harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- b. Tingkat 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga); dan
- c. Tingkat 3: input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Hirarki Nilai Wajar

	<u>Level 1</u>	<u>Level 2</u>	<u>Level 3</u>	
31 Desember 2020				December 31, 2020
Investasi saham				Investment in shares
Efek ekuitas	15.000.171.500	-	-	Quoted equity securities
31 Desember 2019				December 31, 2019
Investasi saham				Investment in shares
Efek ekuitas	15.484.048.000	-	-	Quoted equity securities

Tidak ada transfer antar level selama periode pelaporan. Tidak ada perubahan dalam teknik penilaian dari berbagai tingkatan instrumen keuangan selama periode pelaporan.

37. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

- The values of restricted time deposits and other assets - rental deposits are normally recorded historically because their value cannot be measured reliably. It is not practical to estimate the fair values of the assets because there is no definite acceptance period.
- Lease liabilities are measured at the present value of the contractual payments due to the lessor over the lease term, with the discount rate determined by reference to the rate implicit in the lease unless this is not readily determinable, in which case, the Company's incremental borrowing rate on commencement of the lease is used.

Fair Value Estimation

The table below analyses financial instruments carried at fair value, by level of valuation method. The different levels of valuation methods have been defined as follows:

- a. Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- b. Level 2: inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices); and
- c. Level 3: inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

Fair Value Hierarchy

	<u>Level 1</u>	<u>Level 2</u>	<u>Level 3</u>	
December 31, 2020				December 31, 2020
Investment in shares				Investment in shares
Quoted equity securities	15.000.171.500	-	-	Quoted equity securities
December 31, 2019				December 31, 2019
Investment in shares				Investment in shares
Quoted equity securities	15.484.048.000	-	-	Quoted equity securities

There are no transfers between levels during the reporting period. There have been no changes in the valuation techniques of the various classes of financial instruments during the reporting period.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

38. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Perusahaan memiliki eksposur terhadap risiko-risiko atas instrumen keuangan seperti: risiko kredit dan risiko pasar (seperti risiko suku bunga dan harga ekuitas) dan risiko likuiditas.

Mengingat bahwa penerapan praktik manajemen risiko yang baik dapat mendukung kinerja dari perusahaan pembiayaan, maka manajemen risiko selalu menjadi elemen pendukung penting bagi Perusahaan dalam menjalankan roda bisnisnya. Sasaran dan tujuan utama dari diterapkannya praktik manajemen risiko di Perusahaan adalah untuk menjaga dan melindungi Perusahaan melalui pengelolaan risiko kerugian yang mungkin timbul dari berbagai aktivitasnya serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan arahan yang sudah ditetapkan oleh Perusahaan.

Strategi untuk mendukung sasaran dan tujuan dari manajemen risiko diwujudkan dengan pembentukan dan pengembangan budaya risiko yang kuat, penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik, pelestarian nilai-nilai kepatuhan terhadap regulasi, infrastruktur yang memadai, serta proses kerja yang terstruktur dan sehat. Budaya risiko yang kuat ini diciptakan dengan membangun kesadaran risiko yang kuat dimulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai kepada seluruh karyawan Perusahaan.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik disosialisasikan dan dikembangkan secara menyeluruh pada semua komponen dan aktivitas Perusahaan serta dilaksanakan dengan tanpa kompromi, nilai-nilai kepatuhan terhadap peraturan yang ada dan berlaku harus dibudayakan dan melekat pada semua karyawan Perusahaan yang dipimpin oleh jajaran manajemen Perusahaan, infrastruktur risiko dibangun melalui tersedianya kebijakan dan proses yang tepat dan sesuai dengan kondisi terkini, pengembangan sistem dan database risiko yang berkelanjutan, serta teknik dan metodologi pengelolaan yang modern. Membangun proses dan kemampuan risiko yang sehat dan kuat adalah sebuah pengkajian yang berkesinambungan terhadap tujuan penanganan risiko serta berbagai aktivitas yang menyangkut penanganan risiko seperti identifikasi pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

Fungsi manajemen risiko juga berkewajiban untuk menjaga arahan risiko yang dapat diterima dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan tetap berpedoman dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan usaha.

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Company has exposures to the following risks from financial instruments such as: credit risk and market risk (i.e interest rate and equity price risks) and liquidity risk.

Considering that good risk management practices implementation could better support the performance of a finance company, hence the risk management would always be an important supporting element for the Company in running its business operations. The target and main purpose of the implementation of risk management practices in the Company is to maintain and protect the Company through managing the risk of losses, which might arise from its various activities as well as maintaining risk level in order to match with the direction already established by the Company.

Strategies to support the goals and objectives of risk management is actualized through the formation and development of a strong risk culture, the implementation of Good Corporate Governance practices, preserving the values of compliance with regulations, adequate infrastructure, as well as structured and healthy working processes. This strong risk culture is created by building a strong awareness of risk starting from the Boards of Commissioners and Directors to the entire employees of the Company.

Good Corporate Governance is socialized and developed thoroughly in all components and activities within the Company and being implemented without compromise, the values of compliance to the existing and prevailing regulations should be cultivated and embedded into all employees of the Company led by the management ranks of Company, risk infrastructure built through the availability of appropriate policies and processes and in line with current conditions continuous development of systems and risk database, as well as modern management techniques and methodologies. Building strong and healthy processes as well as risk capabilities is a continuous assessment on objectives of risks handling as well as various activities involving risks handling such as risk identification, measurement, monitoring and control.

Risk management's function is also to hold the duty of maintaining the direction of risk that is acceptable and approved by the Boards of Commissioners and Directors so that it would remain guided and capable of adapting with business development.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

38. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, manajemen Perusahaan memiliki komitmen penuh untuk menerapkan manajemen risiko secara komprehensif yang secara esensi mencakup kecukupan kebijakan, prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha Perusahaan tetap dapat terarah dan terkendali pada batasan risiko yang dapat diterima, serta tetap menguntungkan Perusahaan.

Tujuan keseluruhan dari manajemen Perusahaan adalah untuk menetapkan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi risiko sejauh mungkin tanpa terlalu mempengaruhi daya saing dan fleksibilitas Perusahaan. Rincian lebih lanjut mengenai kebijakan ini ditetapkan di bawah ini:

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika *counterparty* Perusahaan gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada Perusahaan. Perusahaan tidak memiliki risiko konsentrasi kredit yang signifikan. Risiko kredit Perusahaan melekat kepada bank dan setara kas, deposito yang dibatasi penggunaannya, piutang sewa pembiayaan, piutang pembiayaan konsumen, tagihan anjak piutang, piutang lain-lain dan aset lain-lain - jaminan sewa.

Risiko kredit merupakan risiko utama karena Perusahaan bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen, dimana Perusahaan menawarkan jasa kredit bagi masyarakat yang hendak memiliki kendaraan bermotor. Secara langsung, Perusahaan menghadapi risiko seandainya konsumen tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam melunasi kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara konsumen dengan Perusahaan.

Rasio saldo piutang pembiayaan neto Perusahaan terhadap total aset Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 85,31% dan 89,61%.

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

As a company engaged in financing activities, the Company's management has full commitment to implement risk management comprehensively, which essentially covers the adequacy of policies, procedures and risk management methodology, hence the Company's business activities could remain directed and controlled in an acceptable risk limit, at the same time still profitable.

The overall objective of the Company's management is to set policies that seek to reduce risk as far as possible without affecting the Company's competitiveness and flexibility. Further details regarding these policies are set out below:

Credit Risk

Credit risk is the risk of suffering financial loss should any of the Company's counterparties fail to fulfill their contractual obligations to the Company. The Company has no significant concentration on credit risk. Credit risk is primarily attributable to its cash in banks and cash equivalents, restricted time deposits, finance lease receivables, consumer financing receivables, factoring receivables, other receivables and other assets - rental deposit.

Credit risk is a major risk because the Company is engaged in consumer financing activity, in which the Company offers credit services to public who would like to own motor vehicles. Directly, the Company faces risks when consumers are not able to fulfill their obligations in paying off loans already agreed upon in the contract between consumers and the Company.

The Company's net financing receivable to the total assets ratio (FAR) as of December 31, 2020 and 2019 are 85.31% and 89.61%, respectively.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

38. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Risiko kredit merupakan risiko yang tidak bisa dihindari, namun dapat dikelola hingga pada batasan yang bisa diterima. Perusahaan telah memiliki kebijakan dalam menghadapi risiko ini. Dimulai dari proses awal penerimaan aplikasi kredit yang selektif dan ditangani dengan prinsip kehati-hatian, yang mana aplikasi kredit akan melalui proses survei dan analisa kredit untuk kemudian disetujui oleh Komite Kredit. Perusahaan juga menerapkan Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Risiko kredit timbul dari bank dan setara kas dan simpanan-simpanan di bank. Untuk memitigasi risiko kredit Perusahaan menempatkan bank dan setara kas pada institusi keuangan yang terpercaya. Perusahaan tidak masuk ke dalam instrumen derivatif untuk mengelola risiko kredit walaupun langkah-langkah pencegahan harus diambil untuk beberapa kasus tertentu yang cukup terkonsentrasi yang bertujuan untuk mengurangi risiko serupa.

Tabel berikut ini memberikan informasi mengenai paparan risiko kredit maksimum Perusahaan dan kualitas kredit aset keuangan berdasarkan kelas berdasarkan proses evaluasi kreditnya:

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

Credit risk is an unavoidable risk, however, could be managed to an acceptable limit. The Company already has a policy in order to deal with this risk. Starting from the beginning of the process in receiving credit applications selectively and handling them with prudence principle, whereby the credit application would go through survey and credit analysis process in order to be approved subsequently by the Credit Committee. The Company also implements the Manual for Implementation of Know Your Customer Principles for Non-Depository Financial Institution as regulated in the Regulation of Ministry of Finance No. 30/PMK.010/2010 and Financial Services Authority Regulation Number 23/POJK.01/2019 concerning Implementation of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Program in Financial Services Sector.

Credit risk also arises from cash in banks and cash equivalents and deposits with banks. To mitigate the credit risk, the Company places its cash in banks and cash equivalents with reputable financial institutions. The Company does not enter into derivatives to manage credit risk although in certain isolated cases may take steps to mitigate such risks if it is sufficiently concentrated.

The following tables provide information regarding the maximum credit risk exposure of the Company and the credit quality of its financial assets by class based on its credit evaluation process:

31 Desember 2020 / December 31, 2020				
	Tidak ada penurunan nilainya/ Not impaired	Telah diturunkan nilainya/ Impaired	Total/ Total	
Kas di bank dan setara kas	56.405.392.609	-	56.405.392.609	<i>Cash in banks and cash equivalents</i>
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	500.000.000	-	500.000.000	<i>Restricted time deposits</i>
Piutang sewa pembiayaan - pihak ketiga	240.898.353.833	3.974.039.105	244.872.392.938	<i>Finance lease receivables - third parties</i>
Piutang pembiayaan konsumen - pihak ketiga	849.060.792.020	18.648.837.248	867.709.629.268	<i>Consumer financing receivables - third parties</i>
Tagihan anjak piutang - pihak ketiga	66.301.809.143	289.856.524	66.591.665.667	<i>Factoring receivables - third parties</i>
Piutang lain-lain - pihak ketiga	100.017.731.265	8.932.576.461	108.950.307.726	<i>Other receivables - third parties</i>
Aset lain-lain - jaminan sewa	1.223.490.200	-	1.223.490.200	<i>Other assets - rental deposit</i>
Investasi saham	15.000.171.500	-	15.000.171.500	<i>Investment in shares</i>
Total	1.329.407.740.570	31.845.309.338	1.361.253.049.908	Total

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
 Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2020 and 2019 and
 For the Years Then Ended
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

38. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

	31 Desember 2019 / December 31, 2019			
	Tidak ada penurunan nilainya/ Not impaired	Telah diturunkan nilainya/ Impaired	Total/ Total	
Kas di bank dan setara kas	28.347.950.358	-	28.347.950.358	Cash in banks and cash equivalents
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	500.000.000	-	500.000.000	Restricted time deposits
Piutang sewa pembiayaan - pihak ketiga	281.854.472.303	2.786.043.928	284.640.516.231	Finance lease receivables - third parties
Piutang pembiayaan konsumen - pihak ketiga	1.132.423.264.728	27.601.294.040	1.160.024.558.768	Consumer financing receivables - third parties
Tagihan anjak piutang Pihak ketiga	114.899.822.001	-	114.899.822.001	Factoring receivables Third parties
Pihak berelasi	17.000.000.000	-	17.000.000.000	Related party
Piutang lain-lain - pihak ketiga	86.222.736.111	8.965.768.978	95.188.505.089	Other receivables - third parties
Aset lain-lain - jaminan sewa	1.223.490.200	-	1.223.490.200	Other assets - rental deposit
Investasi saham	15.484.048.000	-	15.484.048.000	Investment in shares
Total	1.677.955.783.701	39.353.106.946	1.717.308.890.647	Total

Tabel di bawah ini menggambarkan konsentrasi risiko atas piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan dan piutang lain-lain yang dimiliki Perusahaan:

The tables below set out the risk concentration of consumer financing receivables, finance lease receivables and other receivables of the Company:

	31 Desember 2020 / December 31, 2020			
	Korporasi/ Corporate	Perorangan/ Individual	Total/ Total	
Piutang sewa pembiayaan				Finance lease receivables
Pembiayaan investasi	251.050.004.000	37.105.560.000	288.155.564.000	Investment financing
Piutang pembiayaan konsumen				Consumer financing receivables
Multi guna	20.267.451.000	1.036.511.296.159	1.056.778.747.159	Multi purpose
Modal kerja	28.771.565.354	-	28.771.565.354	Working capital
Tagihan anjak piutang				Factoring receivables
Modal kerja	63.841.665.667	2.750.000.000	66.591.665.667	Working capital
Piutang lain-lain	32.366.756.663	76.583.551.064	108.950.307.727	Other receivables
Total	396.297.442.684	1.152.950.407.223	1.549.247.849.907	Total

	31 Desember 2019 / December 31, 2019			
	Korporasi/ Corporate	Perorangan/ Individual	Total/ Total	
Piutang sewa pembiayaan				Finance lease receivables
Pembiayaan investasi	257.170.256.220	77.408.182.500	334.578.438.720	Investment financing
Piutang pembiayaan konsumen				Consumer financing receivables
Multi guna	41.718.393.000	1.361.014.389.092	1.402.732.782.092	Multi purpose
Modal kerja	6.871.565.354	-	6.871.565.354	Working capital
Tagihan anjak piutang				Factoring receivables
Modal kerja	116.399.822.001	15.500.000.000	131.899.822.001	Working capital
Piutang lain-lain	25.670.768.491	69.517.736.598	95.188.505.089	Other receivables
Total	447.830.805.066	1.523.440.308.190	1.971.271.113.256	Total

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

38. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Perseroan telah menghitung rasio saldo piutang pembiayaan (*outstanding principal*) untuk pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja dibandingkan dengan total saldo piutang pembiayaan (*outstanding principal*) sebelum dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan yang telah dibentuk Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan masing-masing adalah sebesar 24,36% dan 23,19%.

Perseroan telah menghitung rasio saldo piutang pembiayaan neto dibandingkan dengan total pinjaman berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 2,26 kali dan 1,72 kali.

Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan karena perubahan tingkat bunga, nilai tukar, harga komoditas, dan harga modal atau pinjaman yang dapat membawa risiko bagi Perusahaan. Dalam perencanaan usaha Perusahaan, risiko pasar yang memiliki dampak langsung kepada Perusahaan berkaitan dengan manajemen risiko tingkat suku bunga dan harga.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan utang bank, pinjaman pihak ketiga, efek utang yang diterbitkan dan liabilitas sewa.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Perusahaan mengelola beban bunga dengan suku bunga tetap dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar. Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang.

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

The Company has calculated the outstanding principal balance ratio for investment financing and working capital financing compared to the total outstanding principal balance before deducting the allowance for expected credit losses of receivables established by the Company on December 31, 2020 and 2019 based on Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.05/2018 concerning Financing Company Business Implementation of 24.36% and 23.19%, respectively.

The Company has calculated the balance ratio of net financing receivables compared to total loans based on Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.05/2018 concerning Financing Company's Business Implementation as of December 31, 2020 and 2019 of 2.26 times and 1.72 times, respectively.

Market Risk

Market risk is the risk which is primarily due to changes in interest rates, exchange rate, commodity prices, and the price of capital or loans which could incur risks to the Company. In the Company's business planning, market risk with direct impact to the Company is with respect to interest rate and price risk management.

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Company's exposures to the interest rate risk relates primarily to bank loans, third party loan, debt securities issued and lease liabilities.

To minimize interest rate risk, the Company manages interest cost through fixed-rate debts, by evaluating market rate trends. Management also conducts assessments among interest rates offered by creditors to obtain the most favorable interest rate before taking any decision to enter a new loan agreement.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

38. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko Suku Bunga (lanjutan)

Tabel berikut adalah nilai tercatat berdasarkan jatuh temponya atas kewajiban keuangan Perusahaan yang terkait risiko suku bunga:

	31 Desember 2020 / December 31, 2020						
	Rata-rata Suku Bunga Efektif/ Average Effective Interest Rate	Jatuh Tempo dalam Satu (1) Tahun / Within One (1) Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke -2 / In the 2nd Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke -3 / In the 3rd Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke -4 / In the 4th Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke -5 / In the 5th Year	Total/ Total
Utang bank/Bank loans	10,75% - 12,00%	97.904.929.370	41.613.377.623	2.847.355.696	-	-	142.365.662.689
Pinjaman pihak ketiga/Third party loan	8,44% - 9,50%	1.060.768.381	1.158.552.428	1.265.365.741	1.382.043.504	2.671.490.417	7.538.220.471
Liabilitas sewa/ Lease liabilities	10,40%	2.622.416.428	1.992.015.237	1.632.142.971	58.579.249	-	6.305.153.885
Efek utang yang diterbitkan/ Debt securities issued	9,70% - 11,00%	404.911.810.938	-	-	-	-	404.911.810.938
	31 Desember 2019 / December 31, 2019						
	Rata-rata Suku Bunga Efektif/ Average Effective Interest Rate	Jatuh Tempo dalam Satu (1) Tahun / Within One (1) Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke -2 / In the 2nd Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke -3 / In the 3rd Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke -4 / In the 4th Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke -5 / In the 5th Year	Total/ Total
Utang bank/Bank loans	11,00% - 12,50%	80.683.578.658	8.050.533.561	256.290.271.498	-	-	345.024.383.717
Pinjaman pihak ketiga/Third party loan	8,44% - 9,50%	712.756.239	778.020.114	849.273.519	835.439.732	3.349.020.444	6.524.510.048
Efek utang yang diterbitkan/ Debt securities issued	11,00%	299.455.564.909	298.080.271.249	-	-	-	597.535.836.158

Seluruh pinjaman bank dikenakan suku bunga efektif.

Perubahan tingkat bunga acuan akan menjadi risiko pada saat perubahannya, terutama ketika tingkat bunga dinaikkan, yang menyebabkan kerugian bagi Perusahaan sehingga dapat menyebabkan risiko kredit Perusahaan meningkat. Untuk itu, Perusahaan menerapkan pengelolaan tingkat bunga tetap secara konsisten dengan menyesuaikan tingkat bunga kredit terhadap tingkat bunga pinjaman dan beban dana.

Analisis Sensitivitas

Perubahan dari 100 basis poin suku bunga pada tanggal laporan keuangan akan meningkatkan atau menurunkan laba sebelum pajak untuk tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 5.611.208.480. Analisis ini mengasumsikan bahwa semua variabel lainnya tetap konstan.

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

Interest Rate Risk (continued)

The following table sets out the carrying amounts by maturity of the Company's financial liabilities that are exposed to interest rate risk:

All bank loans were subjected to effective interest rate.

Changes in interest rates would become a risk at the point of change, especially when the interest rate is raised, which would cause losses to the Company, hence resulting in increased Company's credit risk. Therefore, the Company implements fixed interest rate management consistently by doing adjustment on lending interest rate and cost of funds.

Sensitivity Analysis

A change of 100 basis points in interest rates on the date of the financial statements will increase or decrease income before tax for the year ended December 31, 2020 amounting to Rp 5,611,208,480. This analysis assumes that all other variables remain constant.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

38. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko Harga Ekuitas

Investasi ekuitas yang terdaftar di Perusahaan rentan terhadap risiko harga pasar yang timbul dari ketidakpastian tentang nilai masa depan dari sekuritas investasi.

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan eksposur risiko harga ekuitas pada tanggal pelaporan. Analisis sensitivitas menunjukkan sensitivitas terhadap kemungkinan kenaikan atau penurunan harga ekuitas sebagai akibat dari perubahan nilai wajar aset keuangan, dengan semua variabel lain dianggap konstan dari pendapatan sebelum pajak:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Kenaikan harga ekuitas sebesar 5%	750.008.575	774.202.400	Increase in equity prices by 5%
Penurunan harga ekuitas sebesar 5%	(750.008.575)	(774.202.400)	Decrease in equity prices by 5%

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas muncul dari manajemen modal kerja dan beban keuangan Perusahaan dan pembayaran kembali pokok pada instrumen utang. Ini adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan saat jatuh tempo.

Kebijakan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa mereka selalu memiliki uang yang cukup dalam bentuk kas untuk membayar kewajiban mereka ketika liabilitas tersebut jatuh tempo.

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

Equity Price Risk

The Company's listed equity investments are susceptible to market price risk arising from uncertainties about future values of the investment securities.

The sensitivity analysis below has been determined based on the exposure to equity price risk at the reporting date. The sensitivity analysis demonstrate the sensitivity to a reasonably possible increase or decrease of equity prices as the result of the changes in fair value of financial assets, with all other variables held constant of the income before tax:

Liquidity Risk

Liquidity risk arises from the Company's management of working capital and the finance charges and principal repayments on its debt instruments. It is the risk that the Company will encounter difficulty in meeting their financial obligations as they fall due.

The Company's policy is to ensure that it will always have sufficient cash to allow them to meet their liabilities when they become due.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

38. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Tabel di bawah ini menggambarkan jatuh tempo kontraktual (digambarkan dengan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan) dari aset dan liabilitas keuangan:

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

The following table sets out the contractual maturities (represented by undiscounted contractual cash flows) of financial assets and liabilities:

	31 Desember 2020 / December 31, 2020					
	<=1 bulan/ <= 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	3-6 bulan/ 3-6 months	6-12 bulan/ 6-12 months	>= 12 bulan/ >= 12 months	Total/ Total
Aset/Assets						
Kas dan setara kas/Cash and cash equivalents	60.089.895.013	-	-	-	-	60.089.895.013
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya/ Restricted time deposits	-	-	-	-	500.000.000	500.000.000
Piutang sewa pembiayaan - pihak ketiga/ Finance lease receivables - third parties	15.452.546.984	30.673.684.968	44.890.536.590	75.865.299.164	121.273.496.294	288.155.564.000
Piutang pembiayaan konsumen - pihak ketiga/ Consumer financing receivables - third parties	52.070.140.078	106.481.484.772	156.290.983.413	266.732.947.232	503.974.757.018	1.085.550.312.513
Tagihan anjak piutang - pihak ketiga/ Factoring receivables - third parties	-	3.000.000.000	33.866.666.667	9.324.999.000	20.400.000.000	66.591.665.667
Piutang lain-lain - pihak ketiga/ Other receivables - third parties	108.950.307.726	-	-	-	-	108.950.307.726
Aset lain-lain - jaminan sewa/ Other assets - rental deposits	-	-	-	-	1.223.490.200	1.223.490.200
Investasi saham/ Investment in shares	15.000.171.500	-	-	-	-	15.000.171.500
Total aset/Total assets	251.563.061.301	140.155.169.740	235.048.186.670	351.923.245.396	647.371.743.512	1.626.061.406.619
Liabilitas/Liabilities						
Utang bank/Bank loans	11.030.596.135	21.513.611.813	29.673.476.295	35.687.245.128	44.460.733.318	142.365.662.689
Pinjaman pihak ketiga/ Third party loan	84.869.028	171.620.230	262.205.608	542.073.515	6.477.452.090	7.538.220.471
Efek utang yang diterbitkan/ Debt securities issued	-	-	404.911.810.938	-	-	404.911.810.938
Beban masih harus dibayar/ Accrued expenses	-	-	-	-	-	-
Pihak ketiga/Third parties	20.071.148.644	-	-	-	-	20.071.148.644
Pihak berelasi/Related party	57.745.482	-	-	-	-	57.745.482
Liabilitas sewa/Lease liabilities	-	514.000.000	939.735.391	1.672.373.800	4.015.000.800	7.141.109.991
Total liabilitas/Total liabilities	31.244.359.289	22.199.232.043	435.787.228.232	37.901.692.443	54.953.186.208	582.085.698.215
Selisih aset dengan liabilitas/Maturity gap of assets and liabilities	220.318.702.012	117.955.937.697	(200.739.041.562)	314.021.552.953	592.418.557.304	1.043.975.708.404

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

38. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Liquidity Risk (continued)

	31 Desember 2019 / December 31, 2019					Total/ Total
	<=1 bulan/ <= 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	3-6 bulan/ 3-6 months	6-12 bulan/ 6-12 months	>= 12 bulan/ >= 12 months	
Aset/Assets						
Kas dan setara kas/Cash and cash equivalents	31.082.493.692	-	-	-	-	31.082.493.692
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya/ Restricted time deposits	-	-	-	-	500.000.000	500.000.000
Piutang sewa pembiayaan - pihak ketiga/ Finance lease receivables - third parties	24.769.366.282	37.956.818.650	51.247.820.561	86.136.277.074	134.468.156.153	334.578.438.720
Piutang pembiayaan konsumen - pihak ketiga/ Consumer financing receivables - third parties	115.350.593.798	138.527.310.157	192.097.265.719	331.676.325.616	631.952.852.156	1.409.604.347.446
Tagihan anjak piutang/ Factoring receivables						
Pihak ketiga/ third parties	33.000.000.000	58.000.000.000	-	23.899.822.001	-	114.899.822.001
Pihak berelasi/ Related party	17.000.000.000	-	-	-	-	17.000.000.000
Piutang lain-lain - pihak ketiga/ Other receivables - third parties	95.188.505.089	-	-	-	-	95.188.505.089
Aset lain-lain - jaminan sewa/ Other assets - rental deposits	-	-	-	-	1.223.490.200	1.223.490.200
Investasi saham/ Investment in shares	15.484.048.000	-	-	-	-	15.484.048.000
Total aset/Total assets	331.875.006.861	234.484.128.807	243.345.086.280	441.712.424.691	768.144.498.509	2.019.561.145.148
Liabilitas/Liabilities						
Utang bank/ Bank loans	19.140.520.383	38.522.844.153	58.183.666.575	105.765.274.595	123.412.078.011	345.024.383.717
Pinjaman pihak ketiga/ Third party loan	57.040.647	115.338.096	176.195.514	364.181.982	5.811.753.809	6.524.510.048
Efek utang yang diterbitkan/ Debt securities issued	-	-	-	-	597.535.836.158	597.535.836.158
Beban masih harus dibayar/ Accrued expenses						
Pihak ketiga/Third parties	21.628.749.491	-	-	-	-	21.628.749.491
Pihak berelasi/Related party	76.181.266	-	-	-	-	76.181.266
Total liabilitas/Total liabilities	40.902.491.787	38.638.182.249	58.359.862.089	106.129.456.577	726.759.667.978	970.789.660.680
Selisih aset dengan liabilitas/Maturity gap of assets and liabilities	290.972.515.074	195.845.946.558	184.985.224.191	335.582.968.114	41.384.830.531	1.048.771.484.468

39. MANAJEMEN MODAL

39. CAPITAL MANAGEMENT

Tujuan Perusahaan dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, sehingga Perusahaan tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham.

The Company's objective in managing its capital is to keep the Company's capability in maintaining its going concern, so the Company could distribute the return to shareholders.

Perusahaan mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembalikan investasi pemegang saham dalam bentuk dividen kas dengan tetap memperhatikan tingkat kesehatan Perusahaan dan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha. Perusahaan telah menetapkan kebijakan dividen atas laba tahun berjalan sebanyak-banyaknya sebagai berikut:

The Company has a high commitment to deliver return on investment to its shareholders in the form of cash dividend while taking into account the Company's health and the requirement of the available funds in the context of business development. The Company has determined the dividend policy of income for the year at the maximum as follows:

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
 Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2020 and 2019 and
 For the Years Then Ended
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

39. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

Sampai dengan Rp 15.000.000.000	: 30,00%
Lebih dari Rp 15.000.000.000	: 40,00%

Perusahaan akan terus berupaya untuk memberikan imbalan investasi yang terbaik kepada seluruh pemegang saham Perusahaan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dana Perusahaan pada tahun berikutnya dan kebijakan dividen yang diambil oleh PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk selaku pemegang saham pengendali.

Dalam mengelola permodalan, Perusahaan melakukan analisa secara bulanan untuk memastikan bahwa Perusahaan tetap mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84/PMK.012/2006 tertanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yang diantaranya mengatur ketentuan sebagai berikut:

- Modal disetor Perusahaan minimum sebesar Rp 100.000.000.000;
- Jumlah pinjaman yang dimiliki Perusahaan dibandingkan modal sendiri dan pinjaman subordinasi dikurangi penyertaan maksimum 10 kali, baik untuk pinjaman luar negeri maupun dalam negeri.

Berdasarkan pasal 79 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, jumlah maksimum *gearing ratio* adalah sebesar 10.

Sebagaimana praktik yang berlaku umum, Perusahaan mengevaluasi struktur permodalan melalui rasio utang terhadap modal (*gearing ratio*) yang dihitung melalui pembagian antara total pinjaman dengan total ekuitas setelah dikurangi penyertaan. Total pinjaman adalah jumlah utang bank, utang pihak ketiga dan efek utang yang diterbitkan sebagaimana disajikan di dalam laporan posisi keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, perhitungan rasio tersebut adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Total pinjaman (a)	554.815.694.098	949.084.729.923
Total ekuitas (b)	859.103.399.491	819.326.860.632
Total penyertaan (c)	15.000.171.500	15.484.048.000
Total ekuitas setelah dikurangi penyertaan (d) = (b) - (c)	844.103.227.991	803.842.812.632
Rasio pinjaman terhadap ekuitas	0,66	1,18

39. CAPITAL MANAGEMENT (continued)

Up to Rp 15,000,000,000	: 30.00%
More than Rp 15,000,000,000	: 40.00%

The Company will continue to strive to provide the best investment return to all shareholders of the Company while considering the Company's funding needs for the following year and the dividend policy adopted by PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk as the controlling shareholder.

In managing capital, the Company conducts monthly analysis to ensure that the Company complies with the Regulation of the Ministry of Finance of Republic of Indonesia No. 84/PMK.012/2006 dated September 29, 2006 regarding Finance Companies which have some provisions as follows:

- The Company's paid-up capital of minimum Rp 100,000,000,000;
- The amount of the Company's loan to equity and subordinated loan deducted by investment is maximum 10 times, both for foreign and domestic loans.

Based on Article 79 of the Financial Service Authority of the Republic of Indonesia Regulation No. 35/POJK.05/2018 dated December 27, 2018 pertaining to Business Performance of Financing Company, the maximum amount of *gearing ratio* is 10.

In accordance with general practices, the Company evaluates its capital structure through a debt-to-equity net to investment ratio (*gearing ratio*) that is calculated by dividing the debt to capital. Debt is total of the bank loans, third party loan and debt securities issued as presented in the statement of financial position. As of December 31, 2020 and 2019, the calculation of the ratio are as follows:

Total debt (a)
Total equity (b)
Total investment (c)
Total equity net to investment (d) = (b) - (c)
Debt-to-equity ratio

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

39. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

Rasio ekuitas terhadap modal disetor perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 194,55% dan 185,54%.

Rasio imbal hasil ekuitas dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perusahaan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan melalui perbandingan antara laba neto dengan modal sendiri. Laba atas ekuitas Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 4,80% dan 9,14%.

Berdasarkan Pasal 90 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, jumlah minimum rasio permodalan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen).

Rasio permodalan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 105,54% dan 83,86%.

40. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Utang Bank

PT Bank Victoria International Tbk

Berdasarkan surat No. 65 tanggal 25 Januari 2021 dari PT Bank Victoria International Tbk, menyatakan bahwa PT Bank Victoria International Tbk menyetujui memperpanjang masa penarikan dan perubahan jatuh tempo fasilitas kredit Fixed Loan XI Line Limit - Non Revolving (Uncommitted) menjadi masing-masing sampai dengan tanggal 23 Mei 2021 dan 23 Mei 2024.

39. CAPITAL MANAGEMENT (continued)

The Company's equity to the paid-up capital ratio as of December 31, 2020 and 2019 are 194.55% and 185.54%, respectively.

Return on equity ratio is used to identify the Company's capability to earn profit from the invested equity and is reflected through the comparison between net income to equity. The Company's return on equity as of December 31, 2020 and 2019 are 4.80% and 9.14%, respectively.

Based on Article 90 of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Regulation No. 35/POJK.05/2018 dated December 27, 2018 concerning the implementation of Financing Company Business, the minimum capital ratio is at least 10% (ten percent).

The Company's capital ratio as of December 31, 2020 and 2019 was 105.54% and 83.86% respectively.

40. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

Bank Loans

PT Bank Victoria International Tbk

Based on letter No.65 dated January 25, 2021 from PT Bank Victoria International Tbk, PT Bank Victoria International Tbk agreed to extend the withdrawal period and change the maturity date of the credit facility Fixed Loan XI Line Limit - Non Revolving (Uncommitted) to May 23, 2021 and May 23, 2024, respectively.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

41. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK ARUS KAS

41. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR CASH FLOWS

a. Aktivitas investasi non-kas sebagai berikut:

a. Significant non-cash investing activities are as follows:

	2020	2019	
Penambahan aset tetap dari:			<i>Additions to property and equipment from:</i>
Uang muka pembelian aset	3.601.117.742	2.124.875.000	<i>Advances for asset purchases</i>
Piutang lain-lain	1.105.680.000	8.930.339.189	<i>Other receivables</i>
Liabilitas sewa	902.206.624	-	<i>Lease liabilities</i>
Total	5.609.004.366	11.055.214.189	Total

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan

b. Reconciliation of liabilities arising from financing activities

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Perusahaan yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Perusahaan sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

The table below details changes in the Company's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Company's statement of cash flows as cash flows from financing activities.

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	Penerapan PSAK 73/ PSAK 73 Adoption	31 Desember 2020/December 31, 2020			Saldo Akhir/ Ending Balance	
			1 Januari 2020/ January 1, 2020	Arus Kas/ Cash Flows	Perubahan Non Kas/ Non-Cash Changes		
Efek utang yang diterbitkan	597.535.836.158	-	597.535.836.158	(196.237.450.000)	3.613.424.780	404.911.810.938	<i>Debt securities issued</i>
Utang bank	345.024.383.717	-	345.024.383.717	(205.086.055.523)	2.427.334.495	142.365.662.689	<i>Bank loans</i>
Pinjaman pihak ketiga	6.524.510.048	-	6.524.510.048	1.013.710.423	-	7.538.220.471	<i>Third party loan</i>
Liabilitas sewa	-	10.624.294.896	10.624.294.896	(5.401.417.398)	1.082.276.387	6.305.153.885	<i>Lease liabilities</i>
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	949.084.729.923	10.624.294.896	959.709.024.819	(405.711.212.498)	7.123.035.662	561.120.847.983	Total liabilities from financing activities
	31 Desember 2019/December 31, 2019						
	Saldo Awal/ Beginning Balance		Arus Kas/ Cash Flows	Perubahan Non Kas/ Non-Cash Changes		Saldo Akhir/ Ending Balance	
Efek utang yang diterbitkan	595.178.834.508		-	2.357.001.650		597.535.836.158	<i>Debt securities issued</i>
Utang bank	417.152.157.540		(70.702.737.514)	(1.425.036.309)		345.024.383.717	<i>Bank loans</i>
Pinjaman pihak ketiga	2.639.671.469		3.884.838.579	-		6.524.510.048	<i>Third party loan</i>
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	1.014.970.663.517		(66.817.898.935)	931.965.341		949.084.729.923	Total liabilities from financing activities

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
 Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2020 and 2019 and
 For the Years Then Ended
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

42. KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan penyebaran wabah virus corona ("Covid-19") sebagai pandemi global. Wabah Covid-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik, yang kemudian mempengaruhi operasi Perusahaan serta pelanggan dan pemasok Perusahaan. Meskipun gangguan ini diperkirakan hanya bersifat sementara, namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi terkait luas dampaknya terhadap operasi dan kinerja keuangan Perusahaan. Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah untuk menangani ancaman Covid-19, serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap pegawai, pelanggan dan pemasok Perusahaan. Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya. Laporan keuangan ini tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian yang diungkapkan di atas.

Berdasarkan penilaian manajemen, peristiwa yang disebutkan di atas tidak memiliki dampak signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan ini.

43. KOMITMEN

Sewa operasi - sebagai penyewa

Total pembayaran sewa minimum di masa depan yang tercatat di dalam kontrak sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Jangka waktu		
Tidak lebih dari 1 tahun	-	1.973.727.333
Lebih dari 1 tahun dan tidak lebih dari 5 tahun	-	6.397.225.411
Total	-	8.370.952.744

Total pembayaran sewa minimum tersebut tidak diakui sebagai kewajiban karena penagihan dilakukan setiap 6 bulan sekali.

42. ECONOMIC ENVIRONMENT UNCERTAINTY

On March 11, 2020, the World Health Organization (WHO) declared the outbreak of corona virus ("Covid-19") as a global pandemic. This Covid-19 outbreak has caused global and domestic economic slowdown, which in turn affected the operations of the Company's, its customers and vendors. While disruption is expected to be temporary, there is considerable uncertainty around the extent of the impact of Covid-19 on the Company's operations and financial performance. The extent of such impact will depend on certain future development which cannot be predicted at this moment, including the duration of the spread of the outbreak, economic and social measures that are being taken by the government authorities to handle Covid-19 threat, and the impact of such factors to the Company's employees, customers and vendors. The management is closely monitoring the Company's operations, liquidity and resources, and is actively working to minimize the current and future impact of this unprecedented situation. These financial statements do not include any adjustment that might result from the outcome of the aforementioned uncertainty.

Based on the management's assessment, the above-mentioned event has no significant impact yet on going concern of the Company up to the date of issuance of these financial statements.

43. COMMITMENT

Operating lease - as lessee

Total future minimum lease payments stated in the non-cancellable lease contract which are not recognize as liabilities are as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Jangka waktu			Term
Tidak lebih dari 1 tahun	-	1.973.727.333	Not later than 1 year
Lebih dari 1 tahun dan tidak lebih dari 5 tahun	-	6.397.225.411	Later than 1 year and not later than 5 years
Total	-	8.370.952.744	Total

Total minimum lease payments are not yet recognized as liabilities because the invoicing are made once in every 6 months.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

44. STANDAR, AMENDEMENT/ PENYESUAIAN DAN INTERPRETASI STANDAR TELAH DITERBITKAN TAPI BELUM DITERAPKAN

Standar akuntansi baru, amandemen, penyesuaian tahunan, dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 yang mungkin berdampak pada laporan keuangan dan belum diterapkan secara dini oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2021

Amandemen ini dikeluarkan untuk membantu entitas menentukan apakah serangkaian kegiatan dan aset yang diperoleh adalah bisnis atau tidak. Mereka mengklarifikasi persyaratan minimum untuk bisnis, menghapus penilaian apakah pelaku pasar mampu mengganti elemen yang hilang, menambah panduan untuk membantu entitas menilai apakah proses yang diperoleh adalah substantif, mempersempit definisi bisnis dan output, dan memperkenalkan uji konsentrasi nilai wajar opsional. Contoh ilustratif baru diberikan bersama dengan amandemen.

• **Amandemen PSAK 22, tentang Definisi Bisnis**

Amandemen ini mengklarifikasi definisi bisnis dengan tujuan untuk membantu entitas dalam menentukan apakah suatu transaksi seharusnya dicatat sebagai kombinasi bisnis atau akuisisi aset. Secara umum, amandemen PSAK 22 tersebut:

- mengamandemen definisi bisnis;
- menambahkan pengujian konsentrasi opsional yang mengizinkan penilaian yang disederhanakan apakah rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi bukan merupakan suatu bisnis;
- mengklarifikasi unsur bisnis bahwa untuk dipertimbangkan sebagai suatu bisnis, suatu rangkaian terintegrasi dari aktivitas dan aset yang diakuisisi mencakup, minimum, input dan proses substantif yang bersama-sama berkontribusi secara signifikan terhadap kemampuan untuk menghasilkan output; dan
- menambahkan pedoman dan contoh ilustratif untuk membantu entitas menilai apakah proses substantif telah diakuisisi.

Amandemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis: Definisi Bisnis" akan berlaku efektif pada 1 Januari 2021 dan penerapan dini diperkenankan.

44. STANDARDS, AMENDMENTS/ IMPROVEMENTS AND INTERPRETATIONS TO STANDARDS ISSUED NOT YET ADOPTED

New accounting standards, amendments, yearly improvement, and interpretations issued but not yet effective for the financial year beginning January 1, 2021 that may have certain impact on the financial statements and have not been early adopted by the Company are as follows:

Effective beginning on or after January 1, 2021

These amendments were issued to help entities determine whether an acquired set of activities and assets is a business or not. They clarify the minimum requirements for a business, remove the assessment of whether market participants are capable of replacing any missing elements, add guidance to help entities assess whether an acquired process is substantive, narrow the definitions of a business and of outputs, and introduce an optional fair value concentration test. New illustrative examples were provided along with the amendments.

• **Amendments to PSAK 22, Definition of Business**

These amendments clarify the definition of business for the purpose of assisting the entity in determining whether a transaction should be accounted for as a business combination or an asset acquisition. In general, the amendments to PSAK 22:

- amended the definition of business;
- added an optional concentration test that allows a simplified assessment of whether the acquired set of activities and assets is not a business;
- clarified the business element that to be considered as a business, an integrated set of activities and assets acquired includes, as a minimum, substantive inputs and processes that together contribute significantly to the ability to produce outputs; and
- added illustrative guidance and examples to help the entity assess whether substantive processes have been acquired.

The amendments to PSAK 22, "Business Combinations: Definition of Business" will become effective on January 1, 2021 and earlier application is permitted.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

44. STANDAR, AMENDEMENT/ PENYESUAIAN DAN INTERPRETASI STANDAR TELAH DITERBITKAN TAPI BELUM DITERAPKAN (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2021 (lanjutan)

- Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan", Amandemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", Amandemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", Amandemen PSAK 62, "Kontrak Asuransi" dan Amandemen PSAK 73, "Sewa" tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2

Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 membahas isu yang mungkin mempengaruhi pelaporan keuangan selama reformasi acuan suku bunga, termasuk dampak perubahan arus kas kontraktual atau hubungan lindung nilai yang timbul dari penggantian acuan suku bunga dengan acuan alternatif yang baru. Amendemen ini mengubah persyaratan dalam PSAK 71, "Instrumen Keuangan", PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", PSAK 62, "Kontrak Asuransi" dan PSAK 73, "Sewa" yang terkait dengan:

- perubahan dasar untuk menentukan arus kas kontraktual dari aset keuangan, liabilitas keuangan dan liabilitas sewa;
- akuntansi lindung nilai; dan
- pengungkapan.

Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 hanya berlaku untuk perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga untuk instrumen keuangan dan hubungan lindung nilai. Amendemen tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2021 dengan penerapan dini diperkenankan.

Mulai efektif pada atau setelah 1 Juni 2021

- Amandemen PSAK 73, "Sewa: Konsesi Sewa terkait COVID-19"

Sebagai akibat dari pandemi COVID-19, konsesi sewa telah diberikan kepada penyewa. Konsesi tersebut dapat diberikan dalam berbagai bentuk, termasuk pengampunan pembayaran dan penangguhan pembayaran sewa. Dewan standar membuat amandemen terhadap PSAK 73 yang memberi penyewa pilihan untuk memperlakukan konsesi sewa yang memenuhi syarat dengan cara yang sama seperti jika mereka bukan modifikasi sewa. Dalam banyak kasus, hal ini akan menghasilkan perlakuan akuntansi untuk konsesi sebagai pembayaran sewa variabel selama periode pemberiannya.

44. STANDARDS, AMENDMENTS/ IMPROVEMENTS AND INTERPRETATIONS TO STANDARDS ISSUED NOT YET ADOPTED (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2021 (continued)

- Amendments to PSAK 71, "Financial Instruments", Amendments to PSAK 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement", Amendments to PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosures", Amendments to PSAK 62, "Insurance Contracts" and Amendments to PSAK 73, "Leases" about Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2

Interest Rate Benchmark Reform - Stage 2 addresses issues that may affect financial reporting during the interest rate benchmark reform, including the effects of changes in contractual cash flows or hedging relationships that arise from replacing the interest rate benchmark with a new alternative reference. These amendments amend the requirements in PSAK 71, "Financial Instruments", PSAK 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement", PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosures", PSAK 62, "Insurance Contracts" and PSAK 73, "Leases" related to:

- changes in the basis for determining the contractual cash flows from financial assets, financial liabilities and lease liabilities;
- hedge accounting; and
- disclosures.

Interest Rate Benchmark Reform - Stage 2 only applies to changes required by the interest rate benchmark reform for financial instruments and hedging relationships. These amendments will become effective on January 1, 2021 and earlier application is permitted.

Effective beginning on or after June 1, 2021

- Amendments to PSAK 73, "Leases: Rental Concessions related to COVID-19"

As a result of the COVID-19 pandemic, rental concessions have been granted to lessees. Such concessions might take a variety of forms, including payment holidays and deferral of lease payments. The standard board made an amendment to PSAK 73 which provides lessees with an option to treat qualifying rent concessions in the same way as they would if they were not lease modifications. In many cases, this will result in accounting for the concessions as variable lease payments in the period in which they are granted.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

44. STANDAR, AMENDEMENT/ PENYESUAIAN DAN INTERPRETASI STANDAR TELAH DITERBITKAN TAPI BELUM DITERAPKAN (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah 1 Juni 2021 (lanjutan)

- Amandemen PSAK 73, "Sewa: Konsesi Sewa terkait COVID-19" (lanjutan)

Entitas yang menerapkan kebijakan praktis harus mengungkapkan fakta ini, apakah kebijakan telah diterapkan pada semua konsesi sewa yang memenuhi syarat atau, jika tidak, informasi tentang sifat kontrak yang telah diterapkan, serta jumlah yang diakui dalam laba rugi, yang timbul dari konsesi sewa.

Amandemen PSAK 73, "Sewa: Konsesi Sewa terkait COVID-19" akan berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Juni 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2022

- PSAK 74, "Kontrak asuransi", yang diadopsi dari IFRS 17, berlaku efektif 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 71 dan PSAK 72.

Ini adalah standar akuntansi baru yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang mencakup pengakuan dan pengukuran, presentasi, dan pengungkapan. Setelah efektif, PSAK 74 akan menggantikan PSAK 62 "Kontrak Asuransi". PSAK 74 berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi (yaitu, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung, dan asuransi ulang), terlepas dari jenis entitas yang menerbitkannya, juga mengenai jaminan dan instrumen keuangan tertentu dengan fitur partisipasi tidak mengikat.

Beberapa pengecualian ruang lingkup akan berlaku. Tujuan keseluruhan PSAK 74 adalah untuk menyediakan model akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih bermanfaat dan konsisten untuk perusahaan asuransi. Berbeda dengan persyaratan dalam PSAK 62, yang sebagian besar didasarkan pada kebijakan akuntansi lokal sebelumnya, IFRS 17 menyediakan model komprehensif untuk kontrak asuransi, yang mencakup semua aspek akuntansi yang relevan. Inti dari IFRS 17 adalah model umum, dilengkapi dengan:

- Adaptasi spesifik untuk kontrak dengan fitur partisipasi langsung (pendekatan biaya variabel).
- Pendekatan yang disederhanakan (pendekatan alokasi premium) terutama untuk kontrak jangka pendek.

44. STANDARDS, AMENDMENTS/ IMPROVEMENTS AND INTERPRETATIONS TO STANDARDS ISSUED NOT YET ADOPTED (continued)

Effective beginning on or after June 1, 2021 (continued)

- Amendments to PSAK 73, "Leases: Rental Concessions related to COVID-19" (continued)

Entities applying the practical expedients must disclose this fact, whether the expedient has been applied to all qualifying rental concessions or, if not, information about the nature of the contracts to which it has been applied, as well as the amount recognised in profit or loss arising from the rental concessions.

The amendments to PSAK 73, "Leases: Rental Concessions related to COVID-19" will become effective for the annual reporting period starting on or after June 1, 2020 and earlier application is permitted.

Effective beginning on or after January 1, 2022

- PSAK 74, "Insurance contracts", adopted from IFRS 17, effective January 1, 2022, and earlier application is permitted, but not before the entity applies PSAK 71 and PSAK 72.

This is a comprehensive new accounting standard for insurance contracts covering recognition and measurement, presentation and disclosure. Once effective, PSAK 74 will replace PSAK 62 "Insurance Contracts". PSAK 74 applies to all types of insurance contracts (i.e., life, non-life direct insurance and reinsurance), regardless of the type of entities that financial instruments with discretionary participation features.

A few scope exceptions will apply. The overall objective of PSAK 74 is to provide an accounting model for insurance contracts that is more useful and consistent for insurers. In contrast to the requirement in PSAK 62, which are largely based on previous local accounting policies, IFRS 17 provides a comprehensive model for insurance contracts, covering all relevant accounting aspects. The core of IFRS 17 is the general model, supplemented by:

- A specific adaptation for contracts with direct participation features (the variable direct participation features (the variable fee approach))
- A simplified approach (the premium allocation approach) mainly for short-duration contract.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

44. STANDAR, AMENDEMENT/ PENYESUAIAN DAN INTERPRETASI STANDAR TELAH DITERBITKAN TAPI BELUM DITERAPKAN (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2022 (lanjutan)

- Amandemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi: Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak"

Amandemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan.

Amandemen PSAK 57 mengatur bahwa biaya untuk memenuhi kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak terdiri dari:

1. Biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut; dan
2. Alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

Amandemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi: Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak" akan berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan.

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2023

- Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan"

Amandemen PSAK 1 mengklarifikasi bahwa kewajiban diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar, berdasarkan pada hak yang ada pada akhir periode pelaporan. Klasifikasi tidak terpengaruh oleh ekspektasi entitas atau peristiwa setelah tanggal pelaporan (misalnya penerimaan waver atau pelanggaran perjanjian). Amandemen tersebut juga mengklarifikasi apa yang dimaksud PSAK 1 perihal 'penyelesaian' liabilitas.

Amandemen tersebut dapat memengaruhi klasifikasi liabilitas, terutama untuk entitas yang sebelumnya mempertimbangkan intensi manajemen untuk menentukan klasifikasi dan untuk beberapa liabilitas yang dapat dikonversi menjadi ekuitas.

44. STANDARDS, AMENDMENTS/ IMPROVEMENTS AND INTERPRETATIONS TO STANDARDS ISSUED NOT YET ADOPTED (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2022 (continued)

- Amendments to PSAK 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contracts"

These amendments clarify the cost of fulfilling a contract when assessing whether a contract is onerous.

The amendments to PSAK 57 specify that the cost of fulfilling a contract comprises the costs that relate directly to the contract. Costs that relate directly to a contract consist of:

1. *Incremental costs of fulfilling that contract; and*
2. *Allocation of other costs that relate directly to fulfilling contracts.*

The amendments to PSAK 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contracts" will become effective on January 1, 2022 and earlier application is permitted.

Effective beginning on or after January 1, 2023

- Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements"

The narrow-scope amendments to PSAK 1 clarify that liabilities are classified as either current or non-current, depending on the rights that exist at the end of the reporting period. Classification is unaffected by the expectations of the entity or events after the reporting date (i.e. the receipt of a waver or a breach of covenant). The amendments also clarify what PSAK 1 means when it refers to the 'settlement' of a liability.

The amendments could affect the classification of liabilities, particularly for entities that previously considered management's intentions to determine classification and for some liabilities that can be converted into equity.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

44. STANDAR, AMENDEMENT/ PENYESUAIAN DAN INTERPRETASI STANDAR TELAH DITERBITKAN TAPI BELUM DITERAPKAN (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2023 (lanjutan)

- Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" (lanjutan)

Standar ini harus diterapkan secara retrospektif sesuai dengan persyaratan normal dalam PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan". Amandemen tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan lebih awal diizinkan.

Perusahaan sedang mengevaluasi dan belum menentukan dampak dari penerapan standar akuntansi baru, amandemen, penyesuaian dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan Perusahaan.

44. STANDARDS, AMENDMENTS/ IMPROVEMENTS AND INTERPRETATIONS TO STANDARDS ISSUED NOT YET ADOPTED (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2023 (continued)

- Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements" (continued)

They must be applied retrospectively in accordance with the normal requirements in PSAK 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors". The amendments will become effective on January 1, 2023 and earlier application is permitted.

The Company is currently evaluating and has not determined yet the effect of these new accounting standards, amendments, and improvement, and interpretations on its financial statements.